



PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2021 - 2026



Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si
BUPATI

ADO MAS'UD, S.Sos
WAKIL



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan Daerah.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
17. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.

Pasal 2

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

- e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD merupakan:
- a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
 - b. dokumen rencana pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, kajian lingkungan hidup strategis telah diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kota, serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan; dan
- c. sebagai pedoman dalam:
 - 1. penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - 3. penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. arah kebijakan keuangan Daerah;
- c. visi dan misi;
- d. strategi pembangunan Daerah;
- e. arah kebijakan dan kebijakan umum;
- f. program pembangunan Daerah; dan
- g. indikasi program dan kerangka pendanaan.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

(2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi Pembangunan Daerah yakni Mamuju kreatif, edukatif, ramah, enerjik dan nyaman yang selanjutnya disebut Mamuju KEREN.
- (2) Misi Pembangunan Daerah meliputi:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik yang berkelanjutan;
 - c. mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial;
 - d. mewujudkan Daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan agama, budaya serta kearifan lokal; dan
 - e. mewujudkan daya saing ekonomi Daerah berbasis inovasi dan potensi lokal.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Bertentangan dengan kepentingan Nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
- a. bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum tersedia atau belum ada, maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 26 Agustus 2021



Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 26 Agustus 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 2

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	I
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR GRAFIK	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-14
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.1.2 Aspek Letak dan Kondisi Geografi.....	II-3
2.1.1.3 Aspek Wilayah Rawan Bencana	II-11
2.1.1.4 Aspek Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-14
2.1.1.5 Aspek Demografi	II-35
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-41
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi.....	II-41
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-42
2.2.1.2 Laju Inflasi.....	II-48
2.2.1.3 PDRB per Kapita	II-54
2.2.1.4 Indeks Gini	II-56
2.2.1.5 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	II-57
2.2.1.6 Persentase PAD Terhadap Pendapatan	II-63
2.2.1.7 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	II-64
2.2.1.8 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	II-64
2.2.1.9 Penguatan Cadangan Pangan	II-66
2.2.1.10 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB.....	II-67

2.2.1.11 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	II-68
2.2.1.12 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	II-68
2.2.1.13 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB.....	II-69
2.2.1.14 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.....	II-70
2.2.1.15 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	II-71
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-72
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-72
2.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)	II-74
2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	II-75
2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah.....	II-76
2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-76
2.2.2.6 Angka Usia Harapan Hidup	II-77
2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-77
2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-78
2.2.2.9 Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja ...	II-79
2.2.3 Fokus seni Budaya dan Olah raga	II-79
2.2.3.1 Seni dan Budaya.....	II-79
2.2.3.2 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	II-80
2.2.3.3 Persentase Wira Usaha Muda	II-81
2.2.3.4 Cakupan Pembinaan Olahraga	II-81
2.2.3.5 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	II-81
2.2.3.6 Cakupan pembinaan atlet muda.....	II-81
2.2.3.7 Jumlah atlet berprestasi.....	II-82
2.2.3.8 Jumlah prestasi olahraga	II-82
2.2.3.9 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II-83
2.2.3.10 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	II-83
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-83
2.3.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan pelayanan Dasar.....	II-84
2.3.1.1 Urusan Pendidikan	II-84
2.3.1.2 Urusan Kesehatan	II-94
2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-109
2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-115
2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	

Masyarakat.....	II-118
2.3.1.6 Urusan Sosial	II-122
2.3.2 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan	
pelayanan Dasar	II-127
2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja.....	II-127
2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-133
2.3.2.3 Urusan Pangan	II-139
2.3.2.4 Urusan Pertanahan	II-141
2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup	II-142
2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-148
2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-151
2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-154
2.3.2.9 Urusan Perhubungan	II-163
2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informasi	II-165
2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	II-166
2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal	II-169
2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	II-171
2.3.2.14 Urusan Statistik.....	II-173
2.3.2.15 Urusan Persandian	II-175
2.3.2.16 Urusan Kebudayaan.....	II-175
2.3.2.17 Urusan Perpustakaan	II-176
2.3.2.18 Urusan Kearsipan	II-179
2.3.3 Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-181
2.3.3.1 Urusan Kelautan dan perikanan	II-181
2.3.3.2 Urusan Pariwisata.....	II-184
2.3.3.3 Urusan Pertanian.....	II-184
2.3.3.4 Urusan Kehutanan.....	II-186
2.3.3.5 Urusan Energi dan sumber daya mineral	II-186
2.3.3.6 Urusan Perdagangan	II-187
2.3.3.7 Urusan Perindustrian.....	II-188
2.3.3.8 Urusan Transmigrasi	II-189
2.3.4 Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	II-192
2.3.4.1 Urusan Pendukung	II-192
2.3.4.2 Urusan Penunjang	II-195
2.3.4.3 Unsur Pengawasan	II-203
2.3.4.4 Urusan Kewilayahan	II-204

2.3.4.5 Urusan Pemerintahan Umum	II-205
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-206
2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-206
2.4.1.1 Ketaatan Terhadap RTRW;.....	II-207
2.4.1.2 Luas Wilayah Produktif;	II-207
2.4.1.3 Luas Wilayah Industri;	II-208
2.4.1.4 Luas Wilayah Perkotaan;	II-208
2.4.1.5 Jenis, Jumlah Bank Dan Cabang;	II-208
2.4.1.6 Jumlah Rumah Makan/Restoran;	II-210
2.4.1.7 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel;	II-210
2.4.1.8 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih; .	II-210
2.4.1.10 Rasio Ketersediaan Daya Listrik;.....	II-215
2.4.1.11 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik;	II-216
2.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-217
2.4.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.....	II-217
2.4.2.2 Nilai Tukar Petani	II-219
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-220
2.4.3.1 Angka Kriminalitas;.....	II-220
2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi;	II-220
2.4.3.3 Lama Proses Perizinan;	II-221
2.4.3.4 Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah.....	II-225
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-227
2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3).....	II-227
2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)	II-228
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020.....	III-3
3.1.1.1. Pendapatan Daerah	III-6
3.1.1.2. Belanja Daerah	III-19
3.1.1.3. Pembiayaan Daerah	III-20
3.1.2. Neraca Daerah.....	III-21
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020	III-28
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-30
3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah	III-33
3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-	

2026.....	III-37
3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-38
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-43
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.1.1.Pendidikan	IV-1
4.1.1.2.Kesehatan	IV-1
4.1.1.3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-1
4.1.1.4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-2
4.1.1.5.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	IV-3
4.1.1.6.Sosial	IV-4
4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	IV-4
4.1.2.1. Tenaga Kerja.....	IV-4
4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV-5
4.1.2.3. Pangan	IV-5
4.1.2.4. Pertanahan	IV-6
4.1.2.5. Lingkungan Hidup	IV-6
4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-6
4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV-7
4.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-7
4.1.2.9. Perhubungan	IV-7
4.1.2.10.Komunikasi dan Informasi	IV-8
4.1.2.11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	IV-8
4.1.2.12.Penanaman Modal	IV-8
4.1.2.13.Kepemudaan dan Olah Raga	IV-9
4.1.2.14.Statistik.....	IV-10
4.1.2.15.Persandian	IV-10
4.1.2.16.Kebudayaan.....	IV-10
4.1.2.17.Perpustakaan	IV-10
4.1.2.18.Kearsipan	IV-10
4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV-10
4.1.3.1. Kelautan dan Perikanan.....	IV-10
4.1.3.2. Pariwisata.....	IV-11
4.1.3.3. Pertanian.....	IV-11
4.1.3.4. Perdagangan.....	IV-12

4.1.3.5. Perindustrian.....	IV-12
4.1.3.6. Transmigrasi.....	IV-13
4.1.4. Unsur Pendukung.....	IV-13
4.1.4.1. Sekretariat Daerah.....	IV-13
4.1.4.2. Sekretariat DPRD.....	IV-13
4.1.5. Unsur Penunjang.....	IV-14
4.1.5.1. Perencanaan.....	IV-14
4.1.5.2. Keuangan	IV-14
4.1.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	IV-15
4.1.5.4. Penelitian dan Pengembangan	IV-15
4.1.6. Unsur Pengawasan	IV-15
4.1.6.1. Inspektorat	IV-15
4.1.7. Unsur Kewilayahan.....	IV-15
4.1.7.1. Kecamatan.....	IV-15
4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum.....	IV-15
4.1.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik.....	IV-15
4.2 Perumusan Isu Strategis	IV-16
4.2.1. Isu Aktual dan Tantangan Global (Internasional)	IV-17
4.2.2. Isu Strategis Nasional yang Tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024	IV-19
4.2.3. Isu Strategis Skala Provinsi yang Termuat dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022	IV-20
4.2.4. Isu Strategis Skala Kabupaten yang termuat dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025	IV-21
4.2.5. Isu Strategis Prioritas yang Dihasilkan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	IV-21
4.2.6. Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	IV-32
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi.....	V-7
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-7

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1. Strategi	VI-1
6.2. Arah Kebijakan Tahunan	VI-5
6.3. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju	VI-7
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah... 6	VIII-
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel II - 1 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten Mamuju	II-2
Tabel II - 2 Tinggi Wilayah dan Letak Geografis Kabupaten Mamuju Menurut Kecamatan	II-3
Tabel II - 3 Daftar Sungai di Kabupaten Mamuju.....	II-7
Tabel II - 4 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan Di Kabupaten Mamuju (mm), 2017-2020	II-10
Tabel II - 5 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2019 - 2039.....	II-15
Tabel II - 6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Mamuju Tahun 2020	II-36
Tabel II - 7 Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Terakhir Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju	II-37
Tabel II - 8 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2020	II-38
Tabel II - 9 Jumlah Penduduk berdasarkan Kewarganegaraan Kabupaten Mamuju, 2020	II-40
Tabel II - 10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Mamuju, 2020.....	II-40
Tabel II - 11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju, 2016-2020.....	II-43
Tabel II - 12 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020.....	II-44
Tabel II - 13 Perkembangan PDRB Kabupaten Tahun 2016 s.d 2020 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi Barat.....	II-48
Tabel II - 14 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Mamuju (2018=100) Tahun 2020	II-51
Tabel II - 15 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Mamuju, 2016-2020.....	II-55
Tabel II - 16 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2016-2020 (Dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	II-55

Tabel II - 17	Indeks Gini kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-56
Tabel II - 18	Garis Kemiskinan, Angka Kemiskinan, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-58
Tabel II - 19	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016- 2020.....	II-59
Tabel II - 20	Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	II-64
Tabel II - 21	Opini BPK Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-64
Tabel II - 22	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-68
Tabel II - 23	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-68
Tabel II - 24	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-69
Tabel II - 25	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-70
Tabel II - 26	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-71
Tabel II - 27	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-71
Tabel II - 28	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020	II-73
Tabel II - 29	Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Mamuju Tahun 2016- 2020.....	II-75
Tabel II - 30	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-76
Tabel II - 31	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-76
Tabel II - 32	Indeks Pembangunan Gender (IPG Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional), Tahun 2016-2020	II-77
Tabel II - 33	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Mamuju Tahun 2016- 2020.....	II-77
Tabel II - 34	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju, 2017-2020	II-78
Tabel II - 35	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-79

Tabel II - 36 Presentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-79
Tabel II - 37 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-80
Tabel II - 38 Persentase Wira Usaha Muda Kab. Mamuju Tahun 2016-2020	II-81
Tabel II - 39 Cakupan Pembinaan Olahraga Kab. Mamuju Tahun 2016-2020	II-81
Tabel II - 40 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kab. Mamuju Tahun 2016-2020	II-81
Tabel II - 41 Cakupan pembinaan atlet muda Kab. Mamuju Tahun 2016-2020	II-82
Tabel II - 42 Jumlah atlet berprestasi Kab. Mamuju Tahun 2016-2020	II-82
Tabel II - 43 Jumlah prestasi olahraga Kab. Mamuju Tahun 2016-2020	II-83
Tabel II - 44 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020	II-93
Tabel II - 45 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	II-107
Tabel II - 46 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020 ..	II-114
Tabel II - 47 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2016-2020	II-117
Tabel II - 48 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2020	II-119
Tabel II - 49 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2020	II-121
Tabel II - 50 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016-2020	II-122
Tabel II - 51 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2019	II-125
Tabel II - 52 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju	II-132
Tabel II - 53 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	II-139
Tabel II - 54 Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020	II-141
Tabel II - 55 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020	II-141
Tabel II - 56 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	II-148
Tabel II - 57 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan KK Kabupaten Mamuju Tahun 2020	II-149
Tabel II - 58 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah Tahun 2020 Kabupaten Mamuju	II-150

Tabel II - 59	Gambaran capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	II-151
Tabel II - 60	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	II-153
Tabel II - 61	Pembagian Sub Urusan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-154
Tabel II - 62	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-162
Tabel II - 63	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020.....	II-164
Tabel II - 64	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2016-2020	II-165
Tabel II - 65	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	II-169
Tabel II - 66	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020	II-170
Tabel II - 67	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020	II-173
Tabel II - 68	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020	II-175
Tabel II - 69	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020	II-175
Tabel II - 70	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020	II-176
Tabel II - 71	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju	II-179
Tabel II - 72	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan tahun 2016-2020 di Kabupaten Mamuju	II-180
Tabel II - 73	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2020 di Kabupaten Mamuju	II-183
Tabel II - 74	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020	II-184
Tabel II - 75	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020	II-185
Tabel II - 76	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2020	II-187
Tabel II - 77	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	II-188
Tabel II - 78	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	II-189
Tabel II - 79	Pencadangan Lahan Permukiman Transmigrasi Menurut Transmigrasi Lokal, Tahun 2016-2020	II-190
Tabel II - 80	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju	II-191

Tabel II - 81	Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Sekretariat DPRD 2016-2020	II-194
Tabel II - 82	Ketersediaan Dokumen RPJPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-195
Tabel II - 83	Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2020.....	II-195
Tabel II - 84	Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-196
Tabel II - 85	Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Mamuju 2016-2020.....	II-196
Tabel II - 86	Konsistensi Program RPJMD dan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-196
Tabel II - 87	Konsistensi Program RKPD dan APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021	II-197
Tabel II - 88	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2016-2020.....	II-199
Tabel II - 89	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	II-202
Tabel II - 90	Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2016-2020	II-204
Tabel II - 91	Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2016-2020	II-204
Tabel II - 92	Capaian Kesbangpol Tahun 2016-2020.....	II-206
Tabel II - 93	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Di Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2020.....	II-209
Tabel II - 94	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2016 dan 2020	II-201
Tabel II - 95	Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih (PAMSIMAS) Di Kabupaten Mamuju Tahun 2020	II-211
Tabel II - 96	Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Mamuju Tahun 2016- 2020.....	II-216
Tabel II - 97	Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-217
Tabel II - 98	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mamuju.....	II-218
Tabel II - 99	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016-2020 Provinsi Sulawesi Barat.....	II-219
Tabel II - 100	Angka Kriminalitas menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	II-220

Tabel II - 101 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020..	II-220
Tabel II - 102 Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal...	II-221
Tabel II - 103 Rasio Lulusan (S1/S2/S3).....	II-228
Tabel II - 104 Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2018 Kabupaten Mamuju	II-228
Tabel II - 105 Rasio Ketergantungan Tahun 2019-2020 Kabupaten Mamuju	II-229
Tabel III - 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III-4
Tabel III - 2 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju TA 2016 - 2020	III-6
Tabel III - 3 Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	III-19
Tabel III - 4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 - 2020	III-21
Tabel III - 5 Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016- 2020.....	III-22
Tabel III - 6 Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 - 2020	III-26
Tabel III - 7 Hasil Analisa Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju 2016 - 2020	III-28
Tabel III - 8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2016 - 2020	III-31
Tabel III - 9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	III-33
Tabel III - 10 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 - 2020	III-34
Tabel III - 11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	III-35
Tabel III - 12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Riil Kabupaten Mamuju TA 2016 - 2020	III-35
Tabel III - 13 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.....	III-39
Tabel III - 14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju	III-43
Tabel III - 15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju	III-44

Tabel IV - 1	Perumusan Isi Strategis RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	IV-25
Tabel V - 1	Matriks Visi, Misi, Sasaran Pokok, Indikator dan Target Kinerja dan Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Mamuju	V-3
Tabel V - 2	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026	V-6
Tabel V - 3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	V-8
Tabel VI – 1	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	VI-2
Tabel VI – 2	Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI-5
Tabel VI – 3	Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju.....	VI-8
Tabel VII - 1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Mamuju	VII-2
Tabel VIII - 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel VIII - 2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten mamuju Tahun 2021-2026	VIII-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar I – 1 Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju.	I-2
Gambar I – 1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju	I-3
Gambar I – 3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Mamuju dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-10
Gambar I – 4 Keselarasan Dokumen RPJPD Dengan RPJMD Kabupaten Mamuju.....	I-11
Gambar I – 5 Keselarasan Dokumen RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Mamuju.....	I-12
Gambar I – 6 Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dengan RPJMD Kabupaten Mamuju	I-13
Gambar II – 1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju	II-2
Gambar II - 2 Peta Topografi Kabupaten Mamuju.....	II-4
Gambar II - 3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju	II-5
Gambar II - 4 Peta Struktur Geologi Kabupaten Mamuju	II-6
Gambar II - 5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Mamuju	II-6
Gambar II - 6 Peta Hidrologi Kabupaten Mamuju	II-9
Gambar II - 7 Peta Klimatologi Kabupaten Mamuju	II-10
Gambar II - 8 Peta Rawan Bencana Longsor	II-12
Gambar II - 9 Peta Rawan Bencana Banjir dan Tsunami	II-13
Gambar II - 10 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju ..	II-14
Gambar IV – 1 Lingkungan Strategis yang Perlu Diperhatikan dalam Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mamuju	IV-16
Gambar IV – 2 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	IV-35

DAFTAR GRAFIK

Grafik II - 1	Piramida Penduduk di Kabupaten Mamuju, 2019	II-39
Grafik II - 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2019	II-39
Grafik II - 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016–2020	II-46
Grafik II - 4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah/Persen).....	II-47
Grafik II - 5	Tingkat Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Mamuju (2018=100) 2020.....	II-52
Grafik II - 6	Inflasi Tahunan dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Mamuju Tahun 2020 (2018=100)	II-53
Grafik II - 7	Perkembangan Inflasi Tahunan di Kota Mamuju dan Indonesia Tahun 2016-2020	II-54
Grafik II - 8	Grafik perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mamuju Tahun 2015-2020	II-57
Grafik II - 9	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa) di Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	II-60
Grafik II - 10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	II-61
Grafik II - 11	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	II-62
Grafik II - 12	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2020	II-62
Grafik II - 13	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	II-63
Grafik II - 14	Jumlah Grup Kesenian Tahun 2018 Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju	II-80
Grafik II - 15	Persentase Distribusi Air Bersih yang Disalurkan PDAM di Kabupaten Mamuju, 2019.....	II-215

Grafik III - 1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	III-7
Grafik III - 2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020.....	III-8
Grafik III - 3 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020.....	III-9
Grafik III - 4 Pertumbuhan Rincian Objek Pajak tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju	III-10
Grafik III - 5 Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum	III-11
Grafik III - 6 Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha	III-13
Grafik III - 7 Pertumbuhan Retribusi Perizinan Tertentu	III-14
Grafik III - 8 Pertumbuhan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	III-15
Grafik III - 9 Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah	III-16
Grafik III - 10 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020	III-16
Grafik III - 11 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020.....	III-17

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Nomor : 02 Tahun 2021
Tanggal : 26 Agustus 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

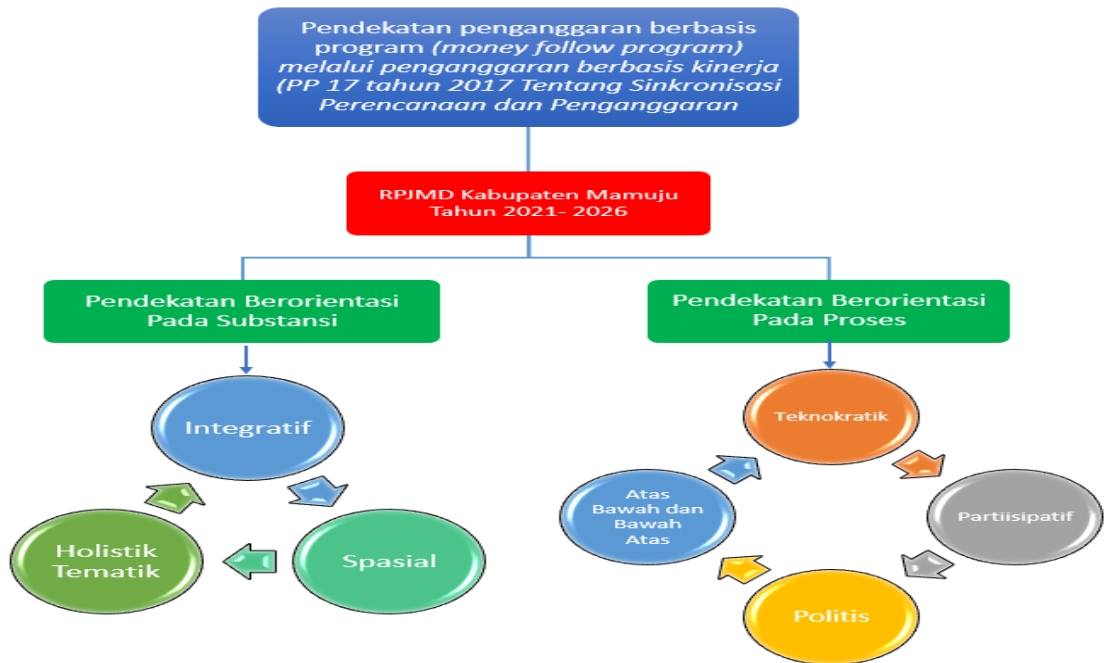
Kabupaten Mamuju merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi barat yang memiliki letak strategis karena merupakan gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur. Dimana dalam hal ini Kalimantan Timur merupakan calon Ibu Kota baru Indonesia yang tentunya hal ini akan menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai daerah penopang Ibu Kota nantinya. Dengan posisi yang strategis tersebut serta didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah, maka pembangunan di Kabupaten Mamuju memiliki potensi dan peluang yang besar untuk lebih dikembangkan.

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020, oleh karena itu, berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang disajikan dalam dokumen RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan

penganggaran berbasis program (*money follow program*), pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar I - 1
Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju



Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses antara lain:

1. Pendekatan Teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan Partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan Politis, menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan Atas Bawah dan Bawah Atas, diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan Daerah Kabupaten/kota daerah Provinsi hingga Nasional.

Pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju meliputi pendekatan Holistik- Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan sebagaimana tercantum pada gambar 1.2.

Gambar I - 2

Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020= [tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025; Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05
36. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang RTRW Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 ; Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (8/311/2017)

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 85);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 – 2039 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103);
40. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2018 tentang Reviu RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 21);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

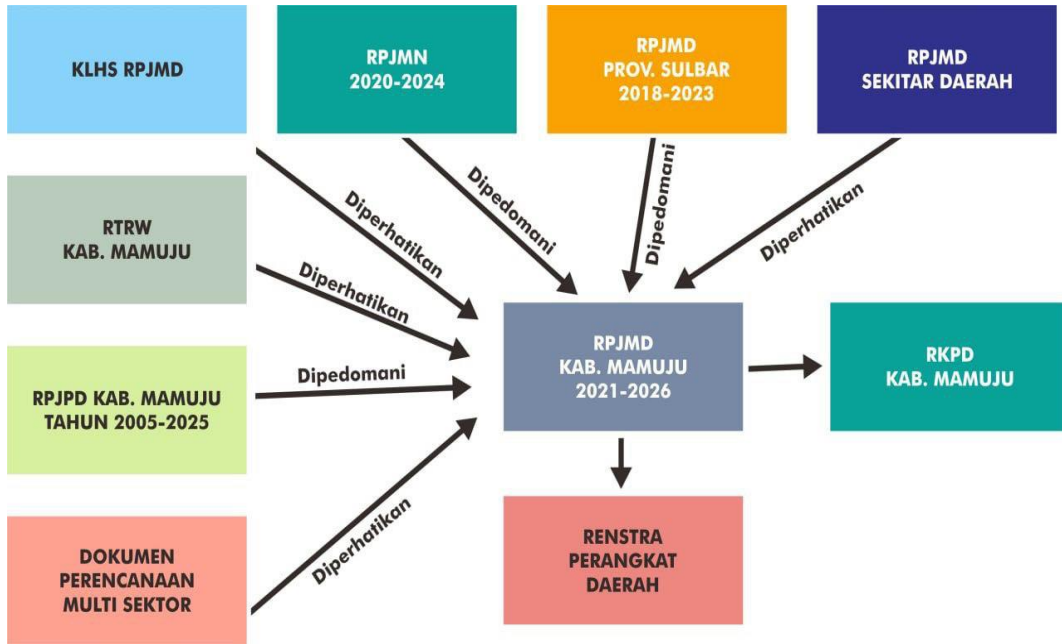
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Barat maupun Kabupaten Mamuju. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan hubungan selaras dengan dokumen perencanaan multi sektor.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mamuju dengan dokumen perencanaan lainnya tercantum pada gambar 1.3

Gambar I - 3

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Mamuju dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



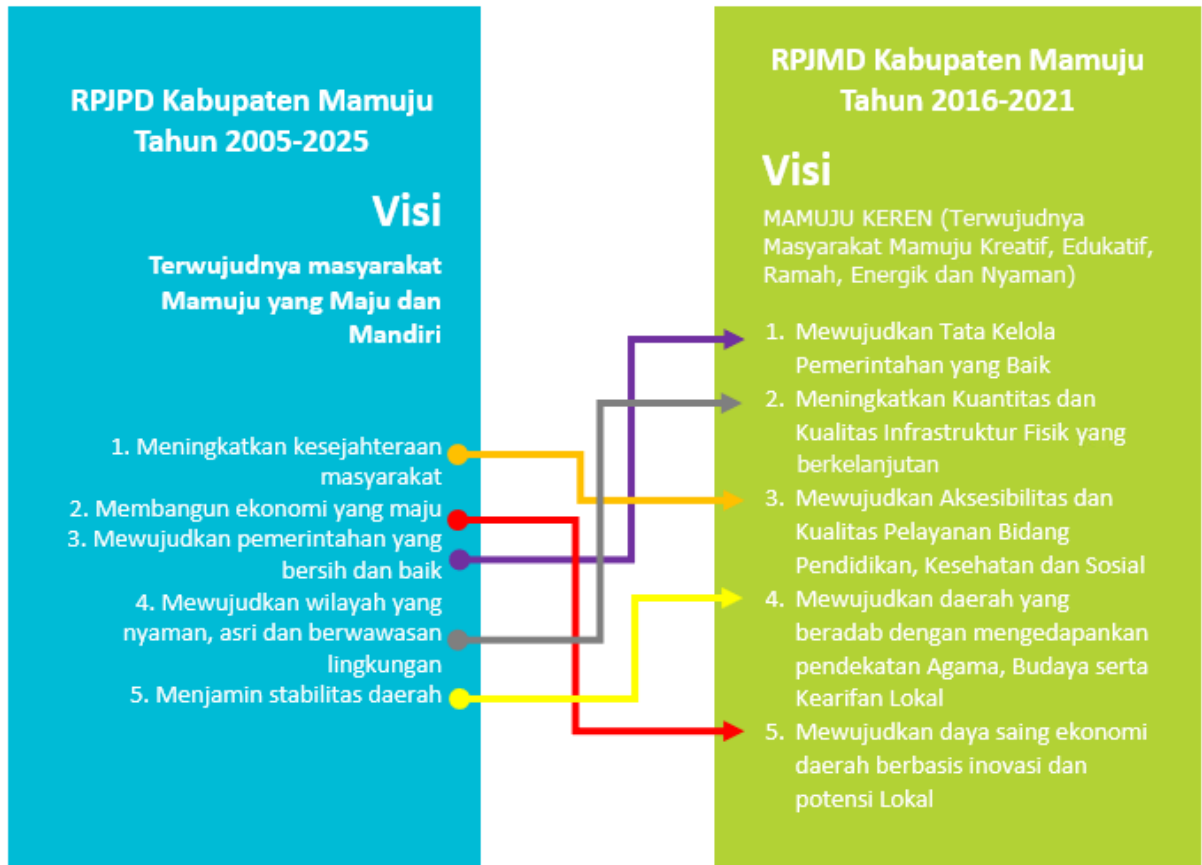
Penjelasan keterkaitan RPJMD Kabupaten Mamuju dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, terutama terkait dengan isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD tahap ke-4 dalam dokumen RPJPD.

Gambar I - 4

Keselarasan Dokumen RPJPD Dengan RPJMD Kabupaten Mamuju



2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Mamuju tahun 2019-2039, terutama terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang tahun 2021-2026.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodir dalam target dan indikator RPJMD.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2020-2024 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok 7 agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN.

Gambar 1.5

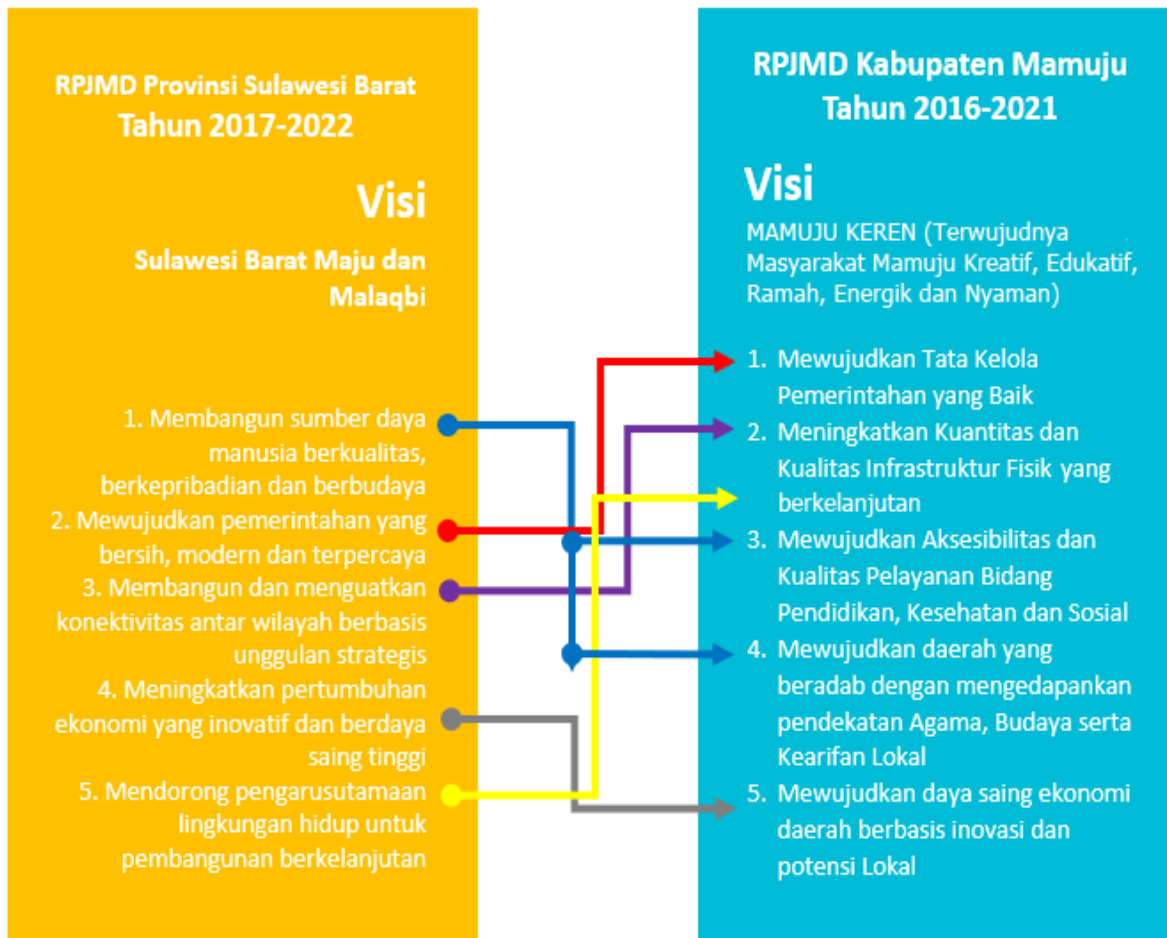
Keselarasan Dokumen RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Mamuju



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 1.6
Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
dengan RPJMD Kabupaten Mamuju



6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar (Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa) khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Mamuju yang kemungkinan berpengaruh pada wilayah Kabupaten Mamuju.

7. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), RAD Pangan dan Gizi, dan lain

sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

8. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Mamuju agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
- c. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab ini berisikan tentang uraian statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah.

Bab ini menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah.

Bab ini akan memaparkan berbagai permasalahan pembangunan yang mendasar dan penting yang dihadapi pembangunan Kab.Mamuju, selanjutnya dirangkum dalam isu strategis Kab.Mamuju.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Berisi uraian tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah tahun 2021- 2025, beserta penjelasannya, keterkaitannya hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Selain itu juga memuat program pembangunan daerah yang menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, disertai kebutuhan pendanaannya.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup.

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

1) Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah Barat Pulau Sulawesi tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi koordinat 2°8'13"-2° 56'41" Lintang Selatan dan 117°8'10"- 119°51'33" Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 4,954,57 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) kilometer persegi.

Secara administrasi, Kabupaten Mamuju berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Mamuju dengan wilayah yang terdiri dari wilayah pesisir dan laut, daratan, dan pegunungan dan merupakan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas wilayah 4.954,57 km², secara administrasi pemerintahan terbagi atas 11 kecamatan, terdiri dari 88 Desa, dan 13 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang dengan luas wilayah 1.792,55 Km² atau 36,18 persen, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bala-balakang dengan luas wilayah 1,47 Km² atau 0,03 persen, dan untuk ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Mamuju dengan luas 246,22 Km².

Berdasarkan jarak terhadap ibukota kabupaten maka Kecamatan Balabalakang memiliki jarak terjauh sekitar 188,62 km, sedangkan yang terdekat adalah Kecamatan Mamuju yang juga merupakan ibukota kabupaten. Kecamatan Balabalakang juga merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Mamuju

yang tidak bisa diakses menggunakan angkutan darat.

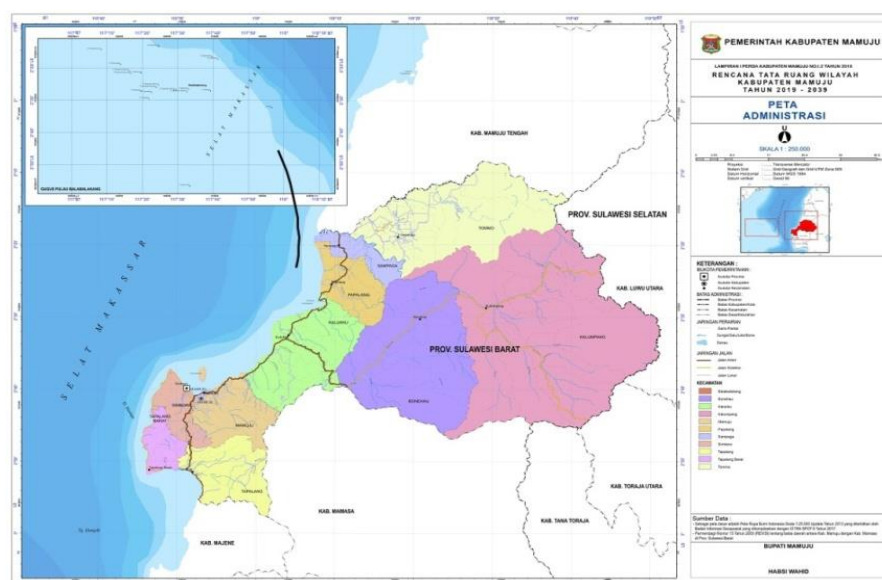
Untuk lebih jelasnya mengenai letak dan luas Kabupaten Mamuju dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.1 dan Gambar 2.1 sebagai berikut.

Tabel II - 1
Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas km ²	Presentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Tapalang	Galung	10	271,63	5,48
2	Tapalang barat	Dungkait	7	111,06	2,24
3	Mamuju	Binanga	8	246,22	4,97
4	Simboro	Rangas	8	132,06	2,67
5	Balabalakang	Pulau Salissingan	2	1,47	0,03
6	Kaluku	Kalukku	14	452,65	9,14
7	Papalang	Topore	9	200,89	4,05
8	Sampaga	Bunde	7	110,27	2,23
9	Tommo	Campaloga	14	765,75	15,46
10	Kalumpang	Kalumpang	13	1 792,55	36,18
11	Bonehau	Bonehau	9	870,02	17,56
Jumlah			101	4 954,57	100,00

Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019 – 2039

Gambar II - 1
Peta Administrasi Kabupaten Mamuju



Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019 – 2039

2.1.1.2 Aspek Letak dan Kondisi Geografi

Secara geografi Kota Mamuju berada ditepi barat Pulau Sulawesi. Di utara terdapat Teluk Mamuju dan di selatan ada Teluk Lebani. Ketinggian wilayah Kota Mamuju antara 0 sampai >1500 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertinggi berada di Gunung Adang Batambalo. Sungai-sungai besar yang ada di Kota Mamuju diantaranya Sungai Mamuju, Sungai Karema, Sungai Simboro, Sungai Anung, Sungai Taparia, Sungai Anusu, Sungai Tampala dan Sungai Malunda, dll. Secara geologi, wilayah Kabupaten Mamuju tersusun oleh batuan Formasi Gunung Api Adang berupa tuf lapili, breksi bersisipan lava, batupasir dan batu lempung. Sedangkan wilayah lembah yang dialiri Sungai Taparia serta Sungai Karema terusun atas Formasi Mamuju berupa Napal, kalkerenit dan batugamping koral bersisipan tuf dan batupasir. Kota Mamuju yang beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 24 - 34 derajat Celcius.

Tabel II - 2

Tinggi Wilayah dan Letak Geografis Kabupaten Mamuju Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah ² (mdpl)	Letak Geografis	
			Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Tapalang	0-1000	2,85880	118,86634
2	Tapalang barat	0-500	2,85392	118,7748
3	Mamuju	0-500	2,67627	118,89056
4	Simboro	0-500	2,65978	118,8495
5	Balabalakang	0-500	2,3164	117,2308
6	Kaluku	0-500	2,54229	119,06894
7	Papalang	0-100	2,42470	119,15955
8	Sampaga	0-500	2,33443	119,17461
9	Tommo	0-97	2,31577	119,29969
10	Kalumpang	125-1500	2,4793	119,4855
11	Bonehau	200-500	2,5056	119,3465

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

1) Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (*amplitude*) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (*landform*).

Keadaan topografi Kabupaten Mamuju didominasi oleh daerah curam dan

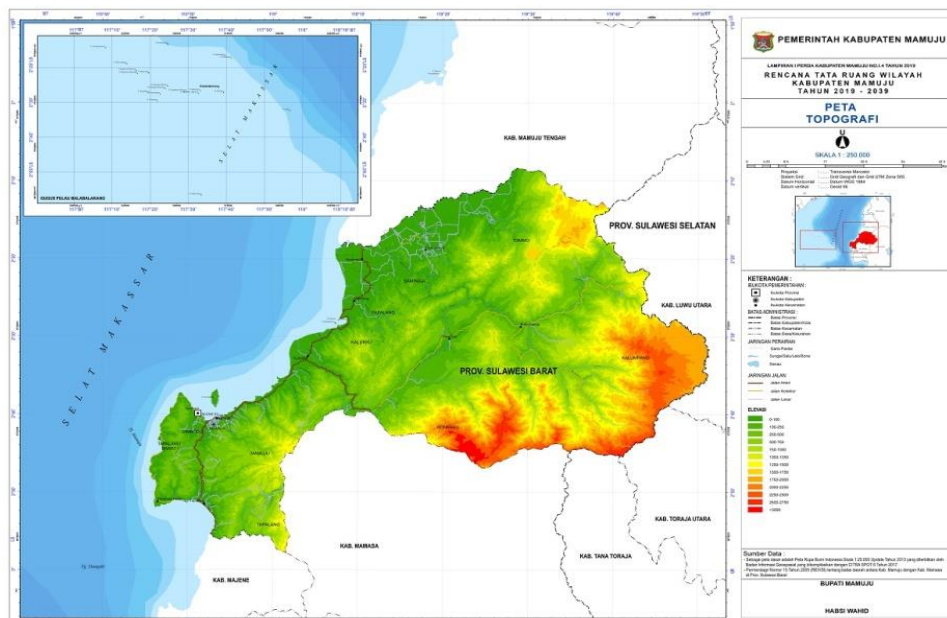
tidak curam dengan ketererangan antara 15 - 45 persen. Kondisi ini berpengaruh terhadap topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landai hingga agak curam.

Dari segi topografi Kabupaten Mamuju secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada ketinggian 395 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng yang memiliki porsi terbesar adalah kemiringan antara 12 - 25 persen dengan luas cakupan sebesar 224.910 Ha. Kemiringan lereng seperti ini terdapat hampir di semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dengan wilayah Kecamatan Tapalang yang memiliki porsi terbesar seluas 32.613 Ha.

Kemiringan antara 25 - 40 persen mencakup wilayah seluas 206.387 Ha. Kemiringan seperti ini dominan terdapat di Kecamatan Kalukku seluas 20.748 Ha. Kemiringan diatas 40 Persen mencakup wilayah seluas 186.336 Ha. Kemiringan seperti ini dominan terdapat di wilayah Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dengan luasan mencapai 77.890 Ha.

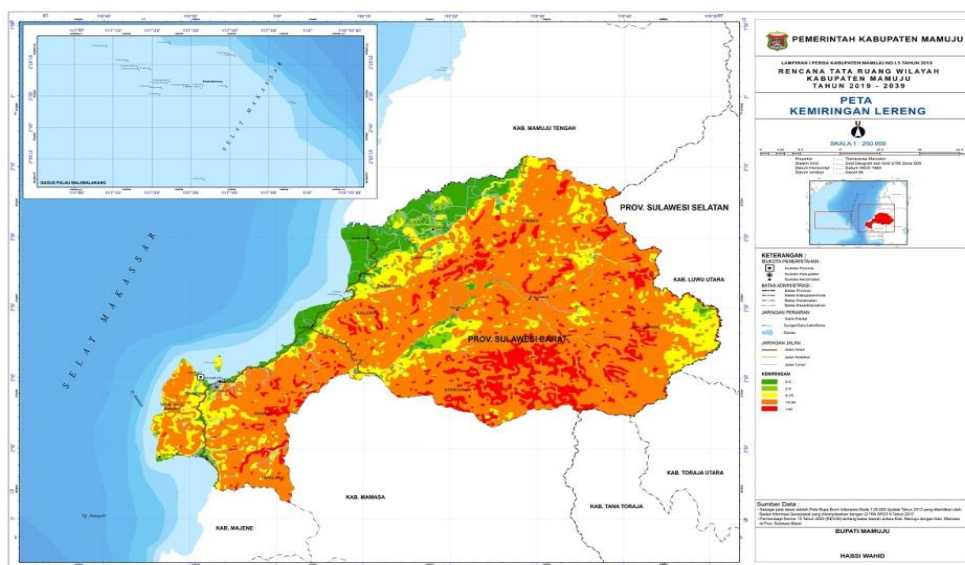
Kemiringan antara 0 - 2 persen dengan luas cakupan 113.134 Ha. Dominan terdapat di Kecamatan Kalukku 19.069 Ha. Kemiringan seperti ini terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan kemiringan antara 2 - 15 persen hanya mencakup wilayah seluas 82.122 Ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar 2.2 berikut.

Gambar II - 2
Peta Topografi Kabupaten Mamuju



Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019 – 2039

Gambar II - 3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju



Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019 – 2039

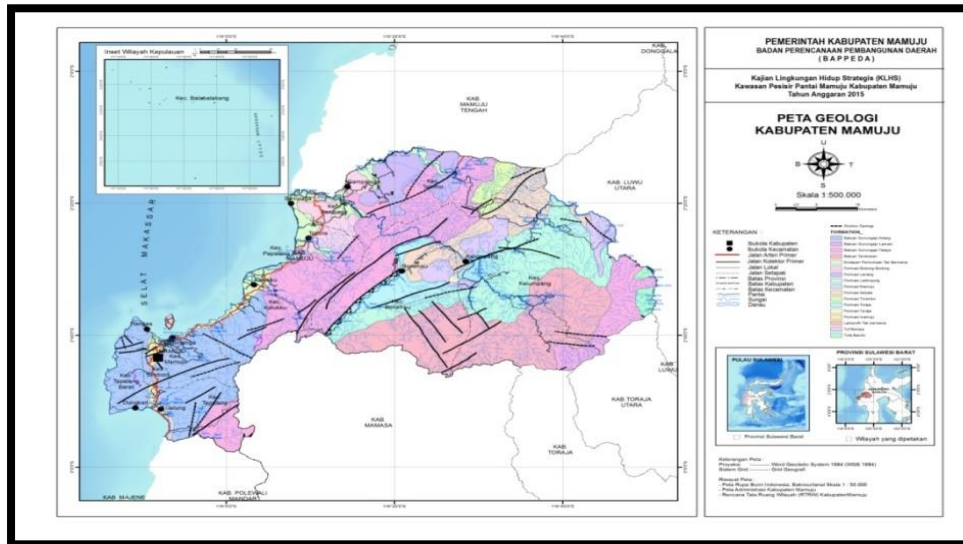
2) Kondisi Geologi

Batuan tertua yang tersingkap di daerah Mamuju dan sekitarnya berupa batuan malihan yang terdiri dari sekis, genes, filit dan batu sabak yang diduga berumur lebih tua dari Kapur. Secara tidak selaras di atasnya ditindih oleh Formasi Latimojong yang terdiri dari batuan-batuan yang termalihkan sangat lemah. Berdasarkan penelitian lapangan, struktur geologi daerah Mamuju dan sekitarnya terbentuk setelah pengendapan Formasi Mamuju yang berumur Miosen Akhir dan Formasi Larian yang berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal (Ratman dan Atmawinata, 1993), yang diakibatkan oleh gaya kompresi regional barat – timur. Gaya kompresi ini diperkirakan berhubungan dengan peristiwa tumbukan antara benua mikro (pecahan Benua Australia) dengan Mintakat Geologi Busur Magmatik Tersier Sulawesi Barat yang mencapai klimaksnya pada Miosen Akhir (Coffield dkk, 1993).

Penemuan 4 lapangan batubara di daerah Mamuju dan sekitarnya, yaitu Kalumpang, Panusuan, Tamalea dan Rante Pandolok. Dari keempat lapangan batubara tersebut Kalumpang merupakan lapangan terbesar. Namun kandungan batubara di lapangan Kalumpang sebesar 292.527 ton dan daerah Tamalea sebesar 351.221 ton (Kartasumantri dan Hadyanto), 1999). Keterdapatan bijih besi di daerah Tapango terdiri dari dua kategori, yaitu Primary body dan Floating ore atau deluvial ore. Pembentukan bijih besi dihasilkan oleh larutan hidrothermal yang disebabkan oleh adanya aktifitas vulkanisme dan tektonisme

di sekitar daerah ini. Tektonisme dan vulkanisme yang terjadi di bagian Sulawesi Barat pada Kala Tersier juga sangat dipengaruhi oleh proses geologi regional yang membentuk Sulawesi bagian barat daya.

Gambar II - 4
Peta Struktur Geologi Kabupaten Mamuju

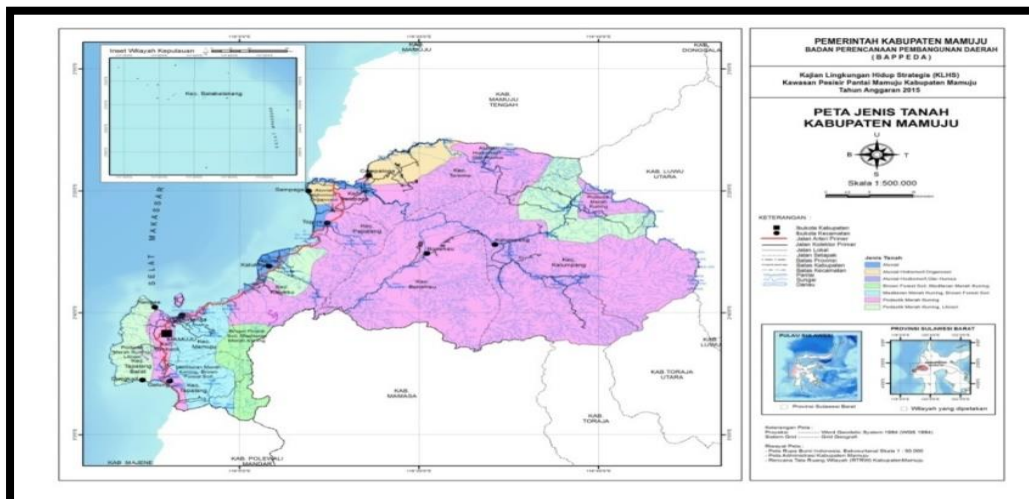


Sumber : Bagian Pemerintahan Setdakab. Mamuju, 2016

a) Jenis Tanah

Berdasar data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di daerah ini dapat digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri.

Gambar II - 5
Peta Jenis Tanah Kabupaten Mamuju



Sumber : Bagian Pemerintahan SEKDAKAB. Mamuju, 2016

3) Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi Kabupaten Mamuju, berdasarkan hasil observasi lapangan dibedakan antara lain air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air yang bersumber di bawah permukaan (air tanah). Air dibawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Mamuju bersumber dari beberapa sungai yang tersebar di beberapa kecamatan, yang pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pertanian. Kecamatan yang paling banyak dilintasi sungai adalah Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Tapalang dengan 13 sungai yang melintasinya. Sungai yang terdapat di Kabupaten Mamuju yakni;

Tabel II - 3
Daftar Sungai di Kabupaten Mamuju

Kecamatan Tapalang	=	1. Marurinding	8. Petakeang
		2. Bonde Puteh	9. Air Panas
		3. Taosa	10. Ahu
		4. Balehanan	11. Tamao
		5. Kopeang	12. Karang Matti
		6. Anusu	13. Taan
		7. Kebanga	
Kecamatan Tapalang Barat	=	1. Pasa'bu	5. Tamale
		2. Losa	6. Sulako
		3. Padada	7. Panantai
		4. Takke	8. Pindang
Kecamatan Mamuju	=	1. Bone-bone	4. Karema
		2. Tumuki	5. Rimuku
		3. Mamuju	
Kecamatan Simboro	=	1. Sese	4. Kulasi
		2. Simboro	5. Lumandang
		3. Gimbang	6. Malauwa
Kecamatan Kalukku	=	1. Guliling	8. Gentungan
		2. Pure	9. Ahuni
		3. Kalukku	10. Ampallas
		4. Keang	11. Anusu
		5. Kabuloang	12. Kebanga
		6. Kapaasang	13. Petakeang
		7. Kona	
Kecamatan Papalang	=	1. Papalang	4. Salubarana
		2. Paniki	5. Salukayu
		3. Salumasa	
Kecamatan Sampaga	=	1. Karama	2. Salubarana
Tommo	=	1. Kanan	2. Sampaga
Kecamatan Kalumpang	=	1. Pelulasa	5. Kaluttun

		2. Sepang	6. Siraun
		3. Bulo	7. Tulasi
		4. Mabubu	
Kecamatan Bonehau	=	1. Kalasissi	7. Takkesenga
		2. Pelosian	8. Pauang
		3. Salutiwo	9. Tabola-bola
		4. Saludenge	10. Bunana
		5. Atu-atu	11. Mappu
		6. Salumitto	
Kecamatan Kep. Bala-balakang	=	Tidak Ada	

Sumber data : BPS, Mamuju dalam angka 2021

a) Sumberdaya Air

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Mamuju selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

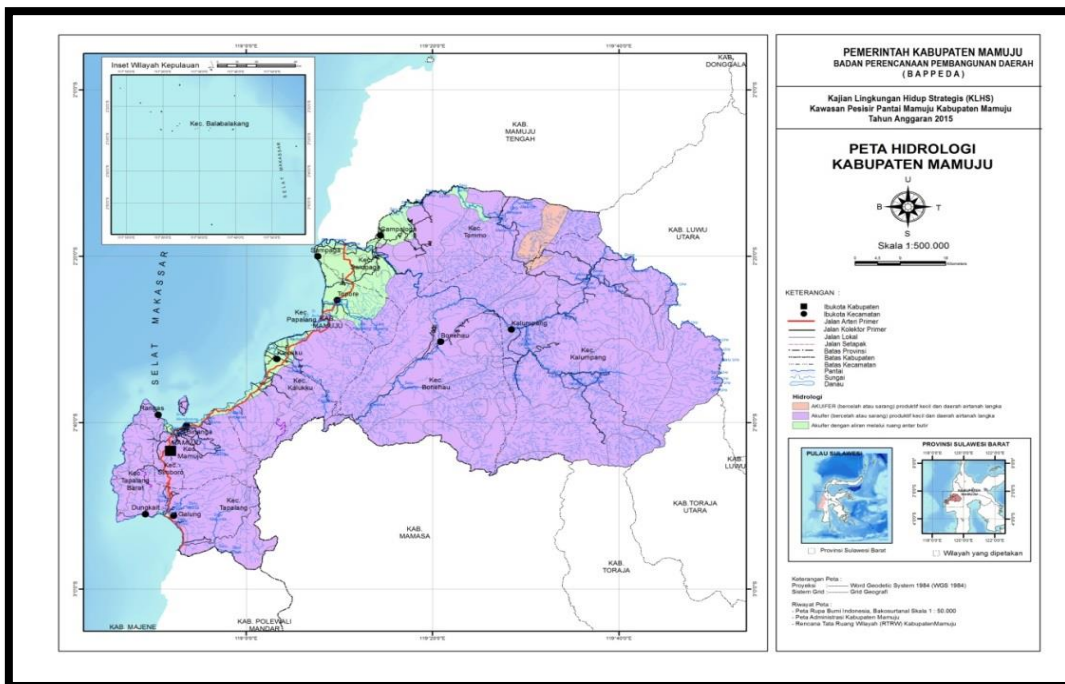
Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Mamuju yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran).

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

b) Peruntukan Air

Sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan keberadaan beberapa sungai menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Mamuju adalah Sungai Karama, dan Sungai Kaluku. Pada kawasan perkotaan peruntukan air lebih difokuskan pada kebutuhan air minum masyarakat perkotaan yang bersumber dari air tanah dangkal dan air tanah dalam serta sumber air yang dikelola oleh PDAM.

Gambar II - 6
Peta Hidrologi Kabupaten Mamuju



Sumber : Bagian Pemerintahan SETDAKAB. Mamuju, 2016

4) Kondisi Klimatologi

Iklim di Kabupaten Mamuju tergolong cukup basah sampai sangat basah, yang menurut Klasifikasi iklim Oldeman, digolongkan kedalam kelas iklim C2,C1,B2 & B1 (mayoritas) dan A yang digolongkan sebagai cukup basah sampai sangat basah. Variasi jumlah bulan kering dari nol sampai dua hingga tiga bulan pertahun. Jumlah curah hujan tahunan dapat mencapai sekitar 5.119,8 mm ditahun 2020. Musim hujan dominan terjadi sepanjang bulan januari-november dengan peningkatan terbesar pada bulan Oktober yaitu sebesar 519,2 mm, sedangkan terendah pada bulan Desember sebesar 55,9 mm.

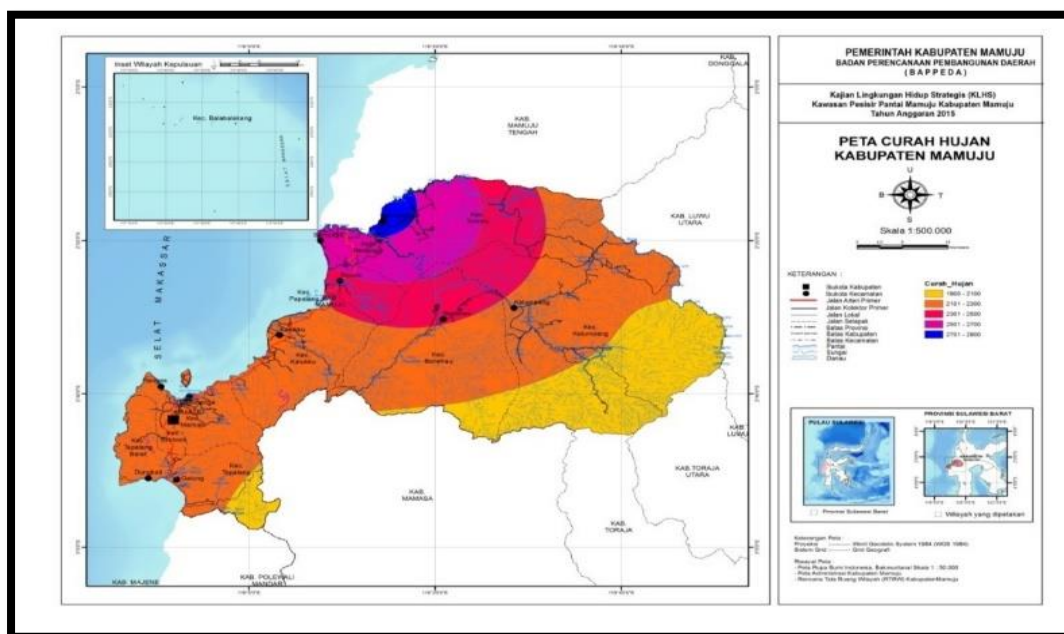
Menurut Pengamatan Stasiun Meteorologi Majene, Jumlah hari hujan di Kabupaten Mamuju total dalam setahun sebanyak 199 hari hujan. Jumlah ini bertambah 46.23 persen dibanding tahun 2019.

Di Indonesia hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan, dengan suhu udara pada siang hari

berkisar antara 21 - 39 derajat Celcius. Adapun Suhu Udara berdasarkan pengamatan BMKG pada tahun 2019 rata-rata berada pada temperatur 28 - 30°C, dengan Kelembaban udara 66 - 75 %.

Gambar II - 7

Peta Klimatologi Kabupaten Mamuju



Sumber : Bagian Pemerintahan SETDAKAB. Mamuju, 2017

Tabel II - 4

Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan Di Kabupaten Mamuju (mm), 2017-2020

Bulan	2017	2018	2019	2020
Januari	196	589	170	333,9
Februari	96	358	150	290,6
Maret	140	389	306	122,5
April	94	200	161	457,9
Mei	287	352	43	169,7
Juni	343	94	286	275,3
Juli	145	159	26	222,8
Agustus	208	73	14	100,5
September	188	36	27	213,9
Oktober	279	96	59	519,2
November	183	195	131	337,8
Desember	367	264	189	55,9
Total	2.526	2.805	1.562	5.119,8

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2018-2021

5) Kondisi Penggunaan Lahan

Luas lahan sawah di Kabupaten Mamuju adalah sekitar 15.395 ha atau 3,12 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten ini. Lahan sawah tersebut menyebar hampir disetiap kecamatan kecuali Kecamatan Mamuju dan Balabalakang, Kecamatan yang memiliki lahan sawah yang terluas adalah Kecamatan Tommo yaitu sekitar 5.295 ha dan Kecamatan Kalukku sekitar 3.493 ha. Lahan sawah ditinjau dari sistem pengairan atau irigasi yang ada, lahan sawah yang beririgasi, yaitu dengan luas sebesar 4.288 ha atau 27,85 persen dari luas keseluruhan lahan sawah. Sedangkan selebihnya merupakan Sawah tadah hujan dengan luas sebesar 11.107 ha atau 72,15 persen dari luas keseluruhan lahan sawah.

Luas lahan bukan sawah di Kabupaten Mamuju adalah sekitar 155.084 ha, yang juga menyebar di Sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Kecamatan yang mempunyai lahan bukan sawah yang terluas adalah Kecamatan Tapalang yaitu sekitar 40.845 ha, dan spesifiknya adalah lahan perkebunan yaitu sekitar 21.124 ha dan padang rumput sekitar 12.981 ha. Kemudian Kecamatan yang juga tergolong mempunyai lahan bukan sawah cukup luas adalah Kecamatan Kalukku, yaitu sekitar 27.935 ha, dan spesifiknya juga adalah lahan perkebunan yaitu sekitar 10.844 ha. Sedangkan kecamatan yang mempunyai lahan bukan sawah terkecil adalah Kecamatan Balabalakang yang luasnya kurang lebih 9 ha.

Luas lahan bukan pertanian yang ada di Kabupaten Mamuju adalah sekitar 322.300 ha atau sekitar 65,27 persen dari luas Kabupaten Mamuju. Kecamatan yang terluas lahan bukan pertaniannya adalah Kecamatan Kalumpang yaitu sekitar 150.956 ha atau sekitar 46,84 persen dari keseluruhan lahan bukan pertanian di Kabupaten Mamuju. Selanjutnya adalah Kecamatan Tommo yaitu sekitar 32.231 ha atau sekitar 10,00 persen dari luas keseluruhan lahan bukan pertanian di Kabupaten Mamuju. Sedangkan Kecamatan yang memiliki lahan bukan pertanian paling sempit adalah Kecamatan Sampaga yaitu hanya sekitar 1.126 ha atau 0,35 persen dari keseluruhan lahan bukan pertanian di Kabupaten Mamuju.

2.1.1.3 Aspek Wilayah Rawan Bencana

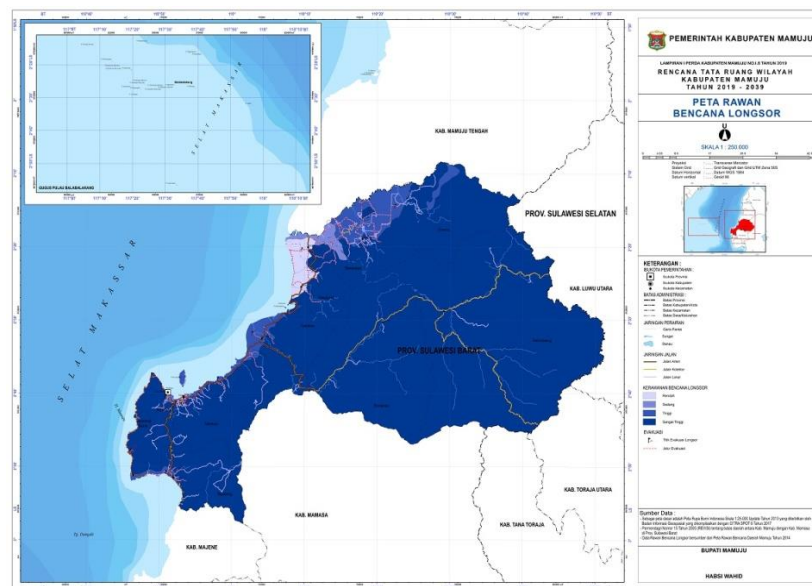
Potensi bencana alam merupakan salah satu fenomena alam yang dapat terjadi dalam suatu wilayah, potensi bencana alam yang diidentifikasi dapat terjadi di lihat dari kondisi wilayah. Kondisi wilayah Kabupaten Mamuju terdiri dari;

wilayah dengan topografi > 45 persen, terdapat daerah resapan air dan kawasan perkotaan yang setiap tahun mengalami banjir perkotaan. Berdasarkan hasil survey (pendataan dan identifikasi) yang telah dilakukan dilapangan, Kemungkinan bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Mamuju adalah Longsor, Banjir, Kebakaran Hutan, dan Tsunami. Daerah rawan bencana tersebut perlu dikenali sedini mungkin agar upaya pencegahan dan evakuasi dapat dilakukan secara efektif. Di Kabupaten Mamuju terdapat 3 kategori bencana yang rentan terjadi yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi dan longsor; kawasan rawan banjir; dan kawasan rawan gempa bumi.

1) Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi Dan Longsor

Potensi bencana alam tanah longsor (erosi) yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju umumnya terjadi pada wilayah dengan kemiringan topografi >45 persen dengan kondisi hutan yang sudah mengalami penggundulan yang disebabkan oleh peladang yang berpindah-pindah dan penebangan liar. Wilayah Kabupaten Mamuju yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi dan longsor, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat.

Gambar II - 8
Peta Rawan Bencana Longsor



Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019-2039

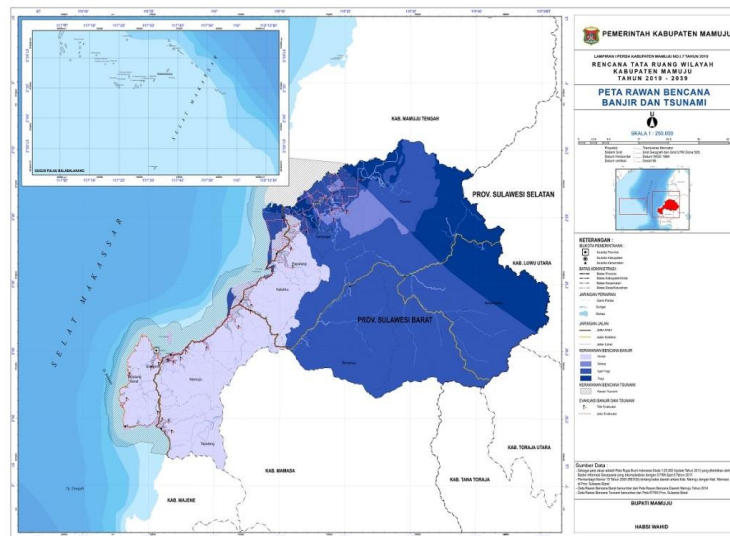
2) Kawasan Rawan Banjir

Secara umum Kabupaten Mamuju rawan bencana alam banjir, Bencana alam banjir tersebut disebabkan oleh kondisi drainase perkotaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sistem jaringan drainase (ukuran maupun dimensi), ketidakmampuan drainase menampung luapan air yang disebabkan oleh air hujan, kondisi drainase yang telah rusak dan mengalami sedimentasi, erosi, berkurangnya daerah resapan air, pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukannya serta penyebab lainnya.

Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Mamuju.

Gambar II - 9

Peta Rawan Bencana Banjir dan Tsunami



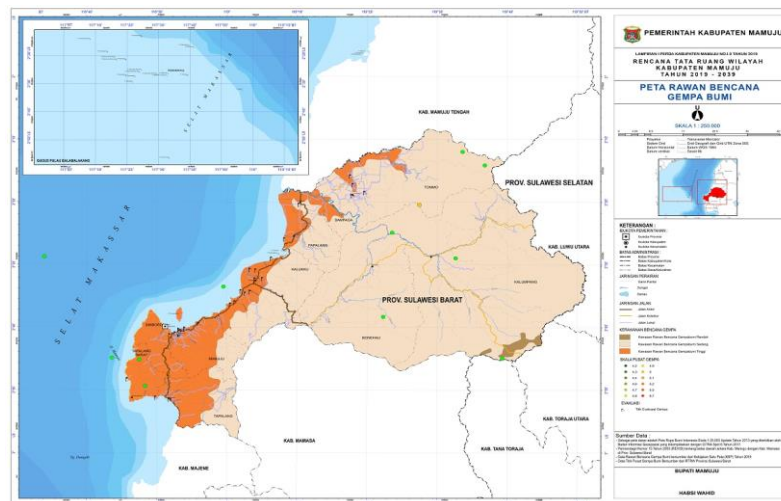
Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019-2039

3) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga.

Gambar II - 10

Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju



Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019-2039

2.1.1.4 Aspek Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 - 2034 dan memperhatikan Ranperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tahun 2016 - 2036, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur ruang sebagai berikut :

1. Pusat-pusat kegiatan
2. Sistem jaringan prasarana utama
3. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju menetapkan adanya PKNp Matabe yang akan memberikan arahan pengembangan Kecamatan Mamuju sebagai pusat kota Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya pengembangan tersebut akan disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tiap Kecamatan sehingga akan semakin jelas memberikan arahan pembangunan di Kabupaten Mamuju.

Sebagai gambaran pusat-pusat kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Sistem perkotaan di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
 - (1) pusat kegiatan lokal (PKL);
 - (2) pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - (3) pusat pelayanan lingkungan (PPL).

- b) PKL sebagaimana dimaksud, yaitu Kecamatan Papalang.
- (1) PPK sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
- kawasan perkotaan Dayanginna di Kecamatan Tapalang;
 - kawasan perkotaan Salisingan di Kecamatan Bala-balakang;
 - kawasan perkotaan Campaloga di Kecamatan Tommo;
 - kawasan perkotaan Kalumpang di Kecamatan Kalumpang;
 - kawasan perkotaan Pabettengan di Kecamatan Bonehau;
 - kawasan perkotaan Tarailu di Kecamatan Sampaga; dan
 - kawasan perkotaan Simboro di Kecamatan Simboro.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
- kawasan permukiman Dungkait di Kecamatan Tapalang Barat;
 - kawasan permukiman Sumare di Kecamatan Simboro;
 - kawasan permukiman Buttuada di Kecamatan Bonehau;
 - kawasan permukiman Toabo di Kecamatan Papalang;
 - kawasan permukiman Buanasakti di Kecamatan Tommo;
 - kawasan permukiman Pulau Ambo Kepulauan Balabalakang; dan
 - Kawasan permukiman Kasambang di Kecamatan Tapalang.

Sebagai gambaran Matriks pengembangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel II - 5
Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kabupaten Mamuju
Tahun 2019 - 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
A.1	PERWUJUDAN PUSAT-PUSAT PELAYANAN KOTA									
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kota sebagai :									
	1 Pusat Pemerintahan Kab Mamuju, melalui:									
	· Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro	5 Dokumen/Regulasi	APBN / APBD Kota	- Kementerian ATR/BPN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Kec. Papalang			- Dinas PUPR					
	· Penyediaan infrastruktur yang memadai	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro	2 kawasan	- APBN - APBD Prov - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Provinsi - Dinas PU-PR Kab					
	1 Sub Pusat Pelayanan Kawasan Pengembangan dan peningkatan fungsi kota sebagai sub pusat pelayanan:									
	1 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di pusat kecamatan	- Kecamatan Tapalang - Kecamatan Tapalang Barat - Kecamatan Balabalakang - Kecamatan Papalang - Kecamatan Tommo - Kecamatan Kalumpang - Kecamatan Bonehau - Kecamatan Sampaga	Sarana prasana dasar di 8 Kecamatan	APB D Kota	- Dinas PUPR Kab					
	1 Pusat Pelayanan Lingkungan Peningkatan sebaran infrastruktur dasar di pusat-pusat layanan skala lingkungan	- Seluruh Kelurahan di Wilayah kab mamuju	13 Kelurahan	APB D Kota	- Dinas PUPR Kab					
	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota									
	1 Perwujudan Sistem Transportasi Darat									
	1. Program									
	1. Penyelenggaraan Jalan									
	A. Sistem Jaringan Jalan Nasional dalam wilayah kota									
	1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer	- Jalan arteri ruas tapalang barat – sumare – rangas – mamuju – tanpa padang – belang belang.	34 Km	APBN	- Kementrian PU-PR					
	2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer	- Jalan topoyo - tarailu- Jalan tarailu - kalukku- Jalan kalukku – bts kota- Jalan poros kalukku- Jalan sultan hasanuddin - Jalan kalukku - salubatu	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	- APBN - APB D Prov- APB D kab	- Kementrian PU-PR- Dinas PU-PR Prov- Dinas PU-PR Kab					
	B. Sistem Jaringan Jalan Provinsi dalam wilayah kota									
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer	a. Jaringan jalan kolektor primer K-2, terdiri atas : - Jalan kalukku – bonehau – kalumpang – batuisi – batas luwu utara. - Jalan	1 ruas 1 ruas 1 ruas	- APBN - APB D Prov	- Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas PUPR Provinsi					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		batuisei – batas toraja utara - Jalan kalukku – bonehau - mambi								
	C. Sistem Jaringan Jalan kewenangan kabupaten									
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder	- Jalan Nuri - Jalan Diponegoro - Jalan bau massepe - Jalan pongtiku - Jalan baharuddin lopa - Jalan kelapa - Jalan emmy saelan - Jalan kali mamuju	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	APB D Kab	Dinas PUPR Kab					
	2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal sekunder	- Jln nelayan - Jln nelayan II - Jln BTN Graha Nusa - Jln KPU - Jln H. basir - Jln BTN Tegar 77 - Jln kampong baru - Jln tanete pao – pasa'bu - Jln atiek sutedja - Jln tengku umar - Jln ambo tjaja - Jln batu ampa	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	APB D Kab	Dinas PUPR Kab					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Jln toabo - bunde								
	3	Permbangunan Jaringan Jalan Lokal Sekunder								
	a.	Pembangunan Jalan-jalan baru di lingkungan permukiman	- Kecamatan Simboro - Kecamatan mamuju - Kecamatan kalukku	8 Km	- APBD Kab - Swasta	- Developer - Dinas PUPR Kab				
	1. Sistem 1. Jaringan 2. Kereta Api									
	1	Rencana Pembangunan jalur Kereta Api	Kabupaten Mamuju	-	- APBN - BUM N	- Kemen hub - PT. Kereta Api Indonesia				
	2	Rencana Pembangunan Stasiun Kereta Api berupa stasiun penumpang di Kab Mamuju	Kabupaten Mamuju	1 Kawasan	- APBN - BUM N	- Kemen hub - PT. Kereta Api Indonesia				
	1. Sistem 1. Jaringan 3. Angkutan Sungai, danau, dan Penyeberangan									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Rencana pengembangan pelabuhan belang-belang	Kecamatan Kalukku	1 Kawasan	- APBN	- Kemenhub					
	1 Sistem Jaringan Transportasi Laut									
	- Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pendukung Pelabuhan Belang – belang dan Rencana Pengembangan fasilitas pendukung di Pelabuhan Belang - belang berupa Terminal Kontainer. - Pengembangan Kapasitas sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan ferry	- Kecamatan Kalukku - Kecamatan Simboro	2 Kawasan	- APBN	- Kemenhub - Pertamina Persero - PT.PELINDO					
	I Sistem Jaringan Energi									
	Rencana pengembangan sistem jaringan kelistrikan, meliputi :									
	- Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kab Mamuju		- APBN - BUMN	- PLN					
	- Pembuatan dan Pengembangan Sistem Jaringan Listrik bawah tanah yang ada di jalan-jalan arteri dan kolektor	Kab Mamuju		- APBN - BUMN	- PLN					
	I Sistem Jaringan Telekomunikasi									
	1 Rencana pengembangan sistem jaringan bergerak meliputi:									
	a. Pengembangan kapasitas infrastruktur telepon nirkabel	Kab Mamuju	Maksimal 10 Titik Lokasi	- Swasta -	- telkom					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	melalui penataan lokasi menara telekomunikasi bersama			APB D						
I	Sistem Jaringan									
V	Sumber Daya Air									
	1 Penataan dan Normalisasi Wilayah Sungai (WS) Mamuju, (WS) Karema dan (WS) Kalukku	Kab Mamuju	15 KM	APBN	- Kement erian PUPR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa n Ruang Prov					
	2 Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:									
	a. Perlindungan dan pengendalian terhadap sumber Mata air di semua kecamatan	Semua Kecamatan	8 Lokasi	APB D Kota	- Dinas PU-PR Kab - Dinas Lingkungan Hidup Kab					
	b. Pemeliharaan Sistem jaringan irigasi di semua daerah irigasi	Kab Mamuju	50 KM	APBN	Kement erian PU-PR					
V	Infrastruktur Perkotaan									
	1 Sistem Penyediaan Air Minum, Meliputi									
	a. Pemeliharaan dan Pengembangan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA)	Kab Mamuju	7 Unit IPA	- APBN - APB D Kota	- PDAM - Dinas PU-PR Kab - Dinas PU-PR Prov					
	b. Pembangunan jaringan pipa pada kawasan pesisir untuk mengurangi krisis air bersih.	Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro	10 KM	- APBN - APB D Kota	- PDAM-Dinas PU-PR Kab-Dinas PU-PR Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Program Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair :									
	a Pengembangan Sistem pembuangan air limbah (sewage) Terpusat	Kecamatan Mamuju	I Unit IPAL	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Kab - DLHK Kab					
	b Pemeliharaan Sistem IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	Kecamatan Simboro	I Unit IPLT	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Kab - DLHK Kab					
	C. Penataan Sistem Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	- Kecamatan Mamuju - Kecamatan Simboro - Kecamatan Kalukku	2500 Rumah Tangga	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Kab - DLHK Kab					
	3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi Pembangunan TPS 3R (Tempat Penampungan Sampah dengan sistem Reduce, Reuse, Recycle) di seluruh kecamatan	8 Kecamatan	10 Unit Sarana TPS3R	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - DLHK Kab					
	4 Pengembangan jalur khusus jalur evakuasi meliputi pemasangan atribut jalur menuju lokasi akhir tempat evakuasi bencana	Kabupaten Mamuju	35 Km	- APBD Propinsi - APBD Kab	- BPBD Propinsi - BPBD Kab Mamuju					
	5 Rencana sistem drainase meliputi :									
	a Pemeliharaan saluran saluran pada ruas - ruas	Kab Mamuju	10 Ruas Drainase	- APBN - APBD	- Kementerian PUPR					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	blok drainase, terdiri dari :			D Propinsi - APB D Kab	- Dinas PU-PR Prov - Dinas PU-PR Kab					
	b Pengembangan Sistem Polder melalui pembangunan kolam retensi	Kecamatan Mamuju Kecamatan Simboro	2 Lokasi Kolam Retensi	- APBN - APB D Propinsi - APB D Kab	- Kementrian PUPR - Dinas PU-PR Prov - Dinas PU-PR Kab					
	6 Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,	Kab Mamuju	15 Km	- APBN - APB D Propinsi - APB D Kab	- Kementrian PUPR - Dinas PU-PR Prov - Dinas PU-PR Kab					
	7 Penyediaan dan Pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya Melalui :									
	a. Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran	Kab Mamuju	10 Titik Hidrant Kebakaran	- APB D Kab	- BPBD Kab					
	b. Pengembangan Jalur dan koridor pelayanan Bus Rapid Transit (BRT)	Kab Mamuju	9 Koridor	- APB D Kab	- Dinas Perhubungan Kab Mamuju - Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Barat					
6.2	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
B.1	Perwujudan Kawasan Lindung									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahannya									
	1 Hutan Lindung									
	Reboisasi dan Penghijauan dan Peremajaan Hutan Lindung	Kecamatan Kalumpang	153 Ha	APBN	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Prov Sulbar					
	2 Kawasan Resapan Air									
	- Pengendalian dan Pengawasan terhadap daerah sekitar kawasan resapan air	Kecamatan Mamuju Kecamatan Kalukku Kecamatan Kalumpang Kecamatan Bonehau Kecamatan Sampaga	1000 Ha	APB D Kab	- DLHK Kab					
	B Kawasan Lindung Geologi									
	1 Konservasi terhadap kawasan sumber mata air tanah	Semua Kecamatan	20 Ha	APB D Kab	- DLHK Kab					
	C Kawasan Rawan Bencana :									
	1 Pengembangan system peringatan dini jarak jauh pada kawasan rawan bencana	Kabupaten mamuju	8 Lokasi	- APBN - APB D Prov - APB D Kab	- BNPB - BPBD Propinsi Sulbar - BPBD Kab					
	D Kawasan Ruang Terbuka Hijau									
	1 Pelestarian dan pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota	- Kecamatan Mamuju - Kecamatan Simboro	500 Ha	APB D Kab	- PU-PR Kab - DLHK Kab					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B.2	Perwujudan Kawasan Budidaya									
	A Kawasan Pertanian									
	1 Pengendalian, Pengawasan dan Pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan	Semua Kecamatan	59,51 Ha	APB D Kab	- Dinas PU-PR Kab - Dinas Pertanian dan peternakan Kab					
	B Kawasan Pertambangan									
	1 Pengelolaan dan pengendalian aktifitas kawasan pertambangan Galian C	- Kecamatan Kalumpang - Kecamatan Bonehau - Kecamatan Kalukku	3 Lokasi	APB D Kota	- Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi					
	C Kawasan Perikanan									
	1 Peningkatan dan Pengembangan prasarana untuk pelabuhan khusus dan tempat pelelangan ikan	Kecamatan Mamuju	1 Kawasan	APB D Propinsi	- Dinas Kelautan Perikanan dan Kelautan Propinsi					
	D Kawasan Pariwisata									
	1 Peningkatan sarana dan fasilitas pendukung terhadap kawasan pariwisata di kab Mamuju	Kabupaten Mamuju	11 Objek Wisata	- APBN - APB D Propinsi - APB D Kab	- Kementerian PU-PR - Kementerian Pariwisata - Dinas Pariwisata Propinsi - Dinas Pariwisata Kab - Dinas PU-PR Propinsi					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					i - Dinas PU-PR Kab					
E	Kawasan Permukiman									
1	Kawasan Perumahan									
	- Peningkatan aksesibilitas jalan kawasan perumahan dan permukiman	Kabupaten Mamuju	5 Akses baru ke kawasan perumahan	- APBN - APB D Propinsi-APB D Kab	- Dinas Perkim Provinsi - Dinas Perkim a Kab- Dinas PU-PR Propinsi- Dinas PU-PR Kab					
	- Program Pengembangan Perumahan	Kab Mamuju	8 Kawasan Perumahan yang telah diserahkan	- APBN - APB D Propinsi - APB D Kab	- Dinas Perkim Provinsi - Dinas Perkim a Kab - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	- Program Pencegahan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh dan RTLH sesuai SK	1000 Unit	- APBN - APB D Propinsi - APB D Kab	- Kementrian PU-PR - Dinas Perkim Propinsi - Dinas Pekim a Kab - Dinas PU-PR Kab					
F	Kawasan Perdagangan Dan Jasa									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Revitalisasi pasar Sentral dan pasar-pasar tradisional	Kab Mamuju	10 Pasar	- APBN - APBD Kab	- Dinas Perdagangan kab - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab					
	2 Pengendalian dan penataan Pusat perbelanjaan dan toko modern	Kab Mamuju	1 Kawasan	- APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas Perhubungan Propinsi - Dinas Perhubungan Kab					
	3 Peningkatan kualitas dan kapasitas akses kawasan pergudangan	Kab Mamuju	1 Kawasan	- APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	G Kawasan Perkantoran									
	1 Peningkatan sarana prasarana perkantoran pemerintah	- Kecamatan Mamuju - Kecamatan Simboro	5 Kawasan Perkantoran	- APBN - APBD Propinsi - APBD Kota	- Kemen dagri - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	H Kawasan Peribadatan									
	1 Rencana Pembangunan Islamic Center Kab Mamuju	Kab Mamuju	13 Ha	APBD Kabupaten	Dinas PU-PR Kab					
	I Kawasan Pendidikan									
	1 Peningkatan prasarana dan sarana kawasan pendidikan	Kab Mamuju	Tersebar di 11 Kecamatan	- APBD Propinsi - APBD	- Dinas PU-PR Provinsi - Dinas PU-PR Kab -					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2025	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				D Kab	Dikpora Propinsi - Dikpora Kab					
J	Kawasan Kesehatan									
	1 Peningkatan dan Pembangunan sarana dan Prasarana kesehatan	Kab Mamuju	Tersebar di 11 Kecamatan	- APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas PU-PR Provinsi - Dinas PU-PR Kab - Dinas Kesehatan Propinsi - Dinas Kesehatan Kab					
K	Kawasan Olahraga									
	1 Peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan olahraga	Kab Mamuju	GOR	APBN	- Kemenkubud - Dinas PU-PR Kab					
L	Kawasan Transportasi									
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Type A	Kecamatan Simboro	Luas 5 Ha	APBN	Kementerian Perhubungan					
	2 Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Type B	- Kecamatan Kalukku - Kecamatan Papalang	2 Kecamatan	APBD Kab	- Dinas Perhubungan - Dinas PU-PR Kab					
M	Kawasan Ruang Evakuasi Bencana									
	1 Pengembangan dan penyediaan sarana prasarana ruang evakuasi bencana	Kab Mamuju	15 Titik	APBD Kab	- Dinas PU-PR Kab - BPBD Kab					
N	Kawasan Peruntukan Ruang bagi kegiatan sektor Informal									
	Penataan dan Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan sektor informal /Kuliner	Kab Mamuju	2 Kawasan	APBD Kab	- Dinas PU-PR Kab - Dinas Perdaga					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ngan Kab					
	O Kawasan Fasum Fasos	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro	2 Kecamatan	APB D Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
	P Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan fasilitas militer dalam rangka peningkatan sistem pertahanan dan keamanan di tingkat Kecamatan (Koramil)	Kab Mamuju	5 Koramil	APBN	Kementerian Pertahanan					
	Q Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan fasilitas POLAIRUD	Kab Mamuju	1 Polairud	APBN	POLRI					
6.3	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS									
	A Rencana Kawasan Strategis Ekonomi									
	1 Peningkatan dan Pembangunan jaringan sarana prasarana dan utilitas pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Kab Mamuju	1 Kawasan Matabe	- APBN - APB D Prov - APB D Kab	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	B Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	- Kecamatan Papalang - Kecamatan Kalukku - Kecamatan Mamuju	4 Kawasan	- APBN - APB D Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bappepan					
	C Kawasan Strategis Lingkungan Hidup									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DAN A	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Perlindungan dan peremajaan terhadap kawasan lindung dan hutan lindung. '- Taman Nasional Gandang Dewata	- Kecamatan Kalumpang - Kecamatan Bonehau	72,965 Ha	- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian LH - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Dinas Lingkungan Hidup Kab.					

Pengembangan wilayah Kabupaten Mamuju diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peruntukan pola ruang wilayah sebagai berikut : kehutanan, pertanian, perikanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, Permukiman dan Pertanahan dan Keamanan yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Kabupaten Mamuju sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan dan Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat, memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagaimana termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju, kebijakan pengembangan potensi wilayah sesuai struktur tata ruang, sebagai berikut :

- a) kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) hektar terdiri atas:
 - 1) kawasan hutan produksi terbatas terdapat di; Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tommo.
 - 2) kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan

Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Tapalang; dan

- 3) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Mamuju.
- b) kawasan pertanian di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat selain memiliki hamparan pantai yang sangat luas juga memiliki Kawasan pertanian yang cukup luas yang terbagi dalam kawasan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, peruntukan pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan seluas kurang lebih 105.000 (seratus lima ribu) hektar. Potensi strategis ini sebagian besar digeluti oleh masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan sebagian kelurahan yang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Kawasan strategis dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut terdiri atas :
 - 1) Kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dengan luas kurang lebih 7,921 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar terdapat di kecamatan Bonehau, kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang barat dan Kecamatan Tommo
 - 2) Kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang.
- c) kawasan perikanan seluas kurang lebih 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) hektar telah dipetakan sesuai dengan kondisi laut diantaranya :
 - 1) Kawasan perikanan budidaya terdiri atas:
 - (a) kawasan tambak udang dan bandeng terdapat di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga;
 - (b) kawasan budidaya air tawar terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Sampaga;
 - (c) kawasan budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku; dan
 - (d) kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Kalukku.

- 2) Sarana penunjang perikanan terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan nusantara. Terdapat di Kecamatan Mamuju;
 - b. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) Kasiwa terdapat di Kecamatan Mamuju, PPI Taan di Kecamatan Tapalang, dan PPI Simboro di Kecamatan Simboro.
- d) kawasan wilayah pertambangan dan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat selain kawasan pertanian dan perikanan juga memiliki kawasan pertambangan yang sangat menjanjikan untuk masa depan generasi penerus bangsa, diantaranya tambang mineral dan batu bara, tambang minyak dan gas bumi, air tanah, tambang rakyat dan panas bumi. Kesemua jenis tambang tersebut penggarapannya ada yang observasi, eksplorasi dan pelaksanaan. Kesemua tambang tersebut ketika dimanfaatkan dan dapat beroperasi sudah tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesemua jenis tambang tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Wilayah Usaha pertambangan mineral, terdiri atas:
 - (a) kawasan pertambangan mineral radioaktif, terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalukku;
 - (b) Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Bonehau;
 - (c) Kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku Kecamatan Tappalang dan Kecamatan Tapalang Barat; dan
 - (d) Kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tappalang Barat Kecamatan Sampaga.
 - 2) Wilayah Usaha pertambangan batu bara, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Papalang.
 - 3) Wilayah Usaha pertambangan minyak dan gas bumi, terdiri dari:
 - (a) Blok Budong-budong sebahagian berada di Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau,

- Kecamatan Tommo dan wilayah pesisir pantai sebelah barat laut Kabupaten Mamuju;
- (b) Wilayah Kerja West Budong berada di sepanjang pesisir Pantai Barat (*off shore*) mamuju melalui pesisir Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Papalang; dan
 - (c) Kawasan panas bumi, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Papalang dan Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat.
- 4) Wilayah usaha pertambangan rakyat, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tappalang.
- e) kawasan peruntukan industri yaitu berupa Kawasan Industri seluas kurang lebih 1,314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar, yang terdapat di Kecamatan Belang-Belang terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang.
 - f) kawasan pariwisata di Kabupaten Mamuju terbagi dalam tiga (3) kawasan yang tidak kalah strategisnya / menariknya dengan kabupaten dan atau propinsi lain yang ada di indonesia, dengan luas kurang lebih 145,000 (seratus empat puluh lima ribu) hektar, diantaranya :
 - 1) Kawasan peruntukan wisata budaya di Kabupaten Mamuju memiliki beragam budaya dan situs-situs purbakala yang sangat menarik untuk dikunjungi, yang dapat memperkaya wisata budaya di Kabupaten Mamuju. Wisata budaya yang ada di Kabupaten Mamuju terdiri dari :
 - (a) Rumah Adat Raja Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju;
 - (b) kuburan Makamma Pata Mata terletak di Kecamatan Simboro;
 - (c) kuburan Tua Raja Dungkai terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - (d) kuburan Tua Tosalama' terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - (e) kuburan Tua Lasalaga (loda batu) terletak di Timbu Kecamatan Mamuju;
 - (f) kuburan maradika Lambagu di Kecamatan Simboro; dan
 - (g) masossor manurung terletak di kecamatan mamuju.
 - 2) Kawasan peruntukan wisata alam di Kabupaten memuju juga memiliki wisata alam yang tidak kalah menariknya, dengan objek wisata yang ada di daerah lain, diantaranya:
 - (a) permandian So'do terletak di Kecamatan Mamuju;
 - (b) air Terjun Tamasapi terletak di Kecamatan Mamuju;
 - (c) air terjun Desa Sondoang Kecamatan Kalukku;
 - (d) air terjun buttuada terletak di Kecamatan Bonehau;
 - (e) air terjun rantepitu terletak di kecamatan Tapalang;

- (f) air terjun Kalumpang terletak di Kecamatan Kalumpang;
 - (g) kawasan wisata pantai Lombang-Lombang, Salupompong, dan Belang-Belang di Kecamatan Kalukku, Desa Sumare dan Rangas Kecamatan Simboro;
 - (h) kawasan Pasir Putih Bonetangnga dan Pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - (i) pantai Kasambang terletak di Kecamatan Tapalang;
 - (j) pasir Putih Tanjung Ngalo terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - (k) pantai Lombang-Lombang terletak di Kecamatan Kalukku;
 - (l) pantai Rangas dan Sumare terletak di Kecamatan Simboro;
 - (m) pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - (n) pulau Bakengkeng terletak di Kecamatan Kalukku; dan
 - (o) wisata Kepulauan di Kecamatan Bala-Balakkang.
- 3) Kawasan peruntukan wisata buatan di Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat untuk memancing wisatawan lokal dan domestik bahkan mancanegara membuat wisata yang menarik dan diminati oleh masyarakat setiap hari libur atau hari-hari tertentu bersama keluarga dan koleganya. Wisata buatan tersebut diantaranya :
- (a) anjungan Pantai Manakarra terletak di Kecamatan Mamuju;
 - (b) sumur jodoh di pulau karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - (c) Eco wisata berkah terletak di Kecamatan Simboro;
 - (d) pantai Graha Nusa terletak di Kecamatan Simboro; dan
 - (e) landscape Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju.
- g) Kawasan permukiman seluas kurang lebih 3.702 (tiga ribu tujuh ratus dua) hektar, yang terdiri atas :
- 1) kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Papalang; dan
 - 2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan yang terbagi atas:
 - (a) kawasan pengembangan Permukiman Transmigrasi terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Tapalang; dan

- (b) permukiman perdesaan yang tersebar di PPL dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju.
- h) kawasan pertahanan dan keamanan kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar terdiri atas:
- 1) Kawasan Perkantoran Komando Resort Militer (KOREM) di Kecamatan Simboro;
 - 2) Kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer (KODIM) 1418 di Kecamatan Mamuju;
 - 3) Kawasan Perkantoran Komando Rayon Militer (KORAMIL) pengembangannya di seluruh kecamatan mamuju;
 - 4) Kawasan Perkantoran Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal); di Kecamatan Simboro;
 - 5) Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA); di kecamatan Mamuju dan Simboro;
 - 6) Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) dikembangkan di seluruh kecamatan di kabupaten Mamuju; dan
 - 7) Kawasan Brimob Polda Sulbar di Kecamatan Simboro

2.1.1.5 Aspek Demografi

Aspek Demografi lain yang perlu dipertimbangkan adalah kepadatan penduduk. Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kabupaten mamuju dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 1.906,12 jiwa per km², karena luas wilayahnya yang sempit. Sementara itu di Kecamatan Kecamatan Kalumpang merupakan wilayah dengan kepadatan terendah dengan tingkat kepadatan sebesar 6,87 jiwa per km².

1) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju sebanyak 278.764 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 143.080 jiwa dan 135.684 jiwa. Kondisi ini menunjukkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) Kabupaten Mamuju sebesar 105 yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju mengalami pengurangan dari 2019 sebanyak 14,562 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan penduduk sebesar -4,96 persen dari tahun 2019. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II - 6**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Mamuju Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tapalang	10,686	10,134	20.820	105
2	Tapalang barat	5,837	5,536	11.373	107
3	Mamuju	33,206	31,490	64.696	103
4	Simboro	18,510	17,553	36.063	104
5	Balabalakang	1,130	1,071	2.201	111
6	Kaluku	30,338	28,770	59.108	106
7	Papalang	12,289	11,653	23.942	105
8	Sampaga	8,174	7,751	15.925	103
9	Tommo	12,001	11,380	23.381	112
10	Kalumpang	6,038	5,725	11.763	109
11	Bonehau	4,872	4,620	9.492	109
Jumlah		143.080	135.684	278,764	105

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka Tahun 2021

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan rata-rata jumlah penduduk Kabupaten Mamuju mengalami penurunan sebesar -4,96 persen jika dihitung dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Perhitungan Pertumbuhan Penduduk 5 tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 sebanyak 272.258 jiwa, sedangkan pada 2 tahun terakhir di tahun 2019 sebanyak 293.326 jiwa, dan pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten menjadi 278.764 jiwa. Jika dilihat Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus meningkat, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk, Bila dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah penduduk Kecamatan Mamuju adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dari Kecamatan yang lainnya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk kecamatan Mamuju sebanyak 74.866 jiwa, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kecamatan Mamuju sebanyak 64.696 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kecamatan Mamuju jika dihitung dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sebanyak -13,58 persen dan sebagai wilayah penurunan tertinggi pertumbuhan penduduk se-Kabupaten Mamuju. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II - 7**Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Terakhir Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju**

No	Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tapalang	20.372	20.772	21.157	21.527	20.820	-3.28
2	Tapalang Barat	10.189	10.371	10.543	10.710	11.373	6.19
3	Mamuju	68.021	70.309	72.579	74.866	64.696	-13.58
4	Simboro	28.241	29.142	30.035	30.926	36.063	16.61
5	Kepulauan Bala-balakang	2.654	2.705	2.755	2.802	2.201	-21.45
6	Kalukku	58.577	60.215	61.822	63.427	59.108	-6.81
7	Papalang	23.939	24.379	24.795	25.198	23.942	-4.98
8	Sampaga	15.619	15.865	16.100	16.324	15.925	-2.44
9	Tommo	23.197	23.895	24.590	25.281	23.381	-7.52
10	Kalumpang	11.860	12.024	12.175	12.319	11.763	-4.51
11	Bonehau	9.589	9.716	9.838	9.946	9.492	-4.56
Total		272.258	279.393	286.389	293.326	278.764	-4.96

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka Tahun 2021.

3) Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Pada 2020, kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju mencapai 56,26 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang dengan kepadatan penduduk 1.497,28 jiwa per km². Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Mamuju di atas 100. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamuju lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Semua kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin di atas 100. Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau, masing-masing 6,56 /km² dan 10,91 jiwa/km². Dengan demikian secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Mamuju masih cukup rendah (total 56,26 /km²). Sedangkan distribusi penduduk tersebar secara tidak merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju, untuk distribusi penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Mamuju. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi dan kepadatan penduduk sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

Tabel II - 8
Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Km ²	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (/Km ²)
1	Tapalang	271,63	7,47	76,65
2	Tapalang Barat	111,06	4,08	102,40
3	Mamuju	246,22	23,21	262,76
4	Simboro	132,06	12,94	273,08
5	Kep. Balabalakang	1,47	0,79	1.497,28
6	Kaluku	452,65	21,20	130,58
7	Papalang	200,89	8,59	119,18
8	Sampaga	110,27	5,71	144,42
9	Tommo	765,75	8,39	30,53
10	Kalumpang	1 792,55	4,22	6,56
11	Bonehau	870,02	3,41	10,91
Jumlah		4 954,57	100,00	56,26

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka Tahun 2021

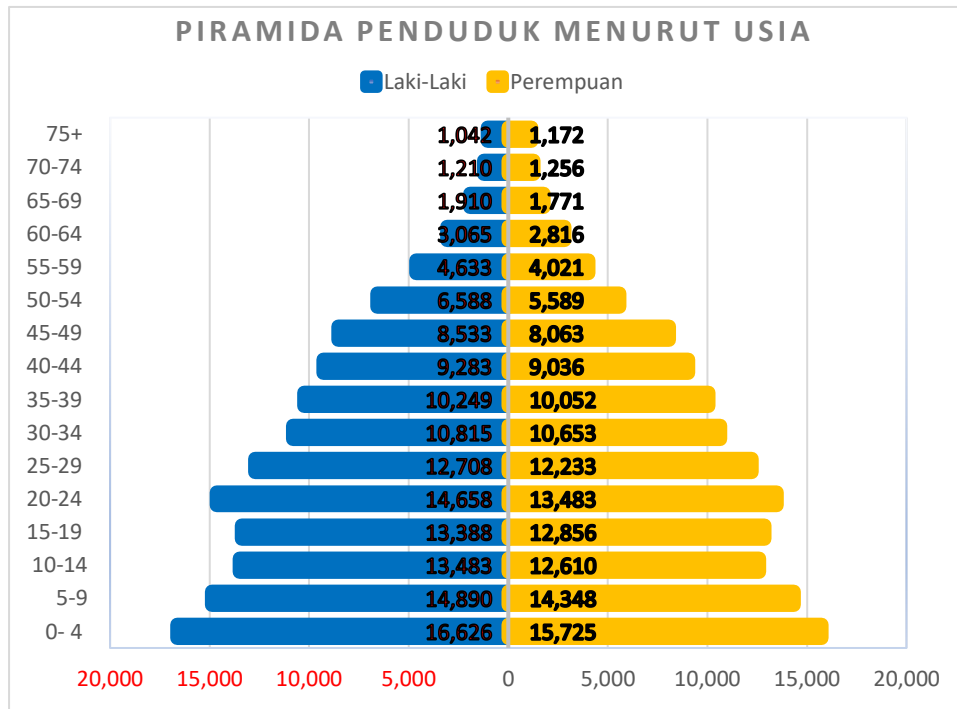
4) Struktur Kependudukan

Struktur Kependudukan Kabupaten Mamuju dapat dilihat berdasarkan struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan struktur penduduk berdasarkan kewarganegaraan, dan agama selanjutnya akan dibahas lebih rinci.

a) Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dari kelompok umur 0-75 tahun keatas, berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah penduduk terbanyak terdapat pada usia 0-4 tahun dengan jumlah 32.351 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia terkecil terdapat pada usia 75 tahun keatas, dengan jumlah 2.214. untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Grafik II - 1
Piramida Penduduk di Kabupaten Mamuju, 2020

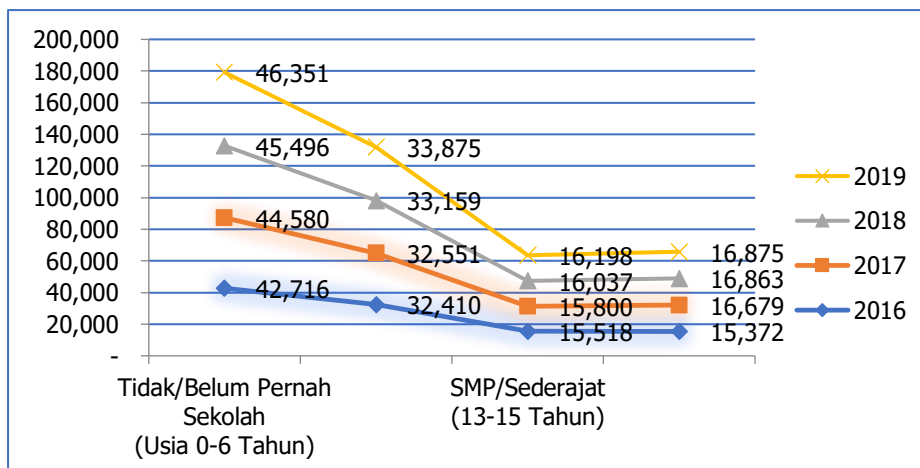


Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka Tahun 2021

b) Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menurut usia sekolah di Kabupaten Mamuju terdiri Tidak/Belum pernah sekolah, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat. Lebih jelasnya sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik II - 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 - 2019



Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka Tahun 2020

c) Penduduk berdasarkan Kewarganegaraan

Tabel II - 9

Jumlah Penduduk berdasarkan Kewarganegaraan Kabupaten Mamuju, 2020

Kecamatan	Warga Negara Indonesia	
	Laki-laki	Perempuan
Tapalang	10,794	10,733
Tapalang barat	5,344	5,366
Mamuju	37,739	37,127
Simboro	15,627	15,299
Balabalakang	1.439	1.266
Kaluku	32,109	31,318
Papalang	12,759	12,439
Sampaga	8,225	8,099
Tommo	13,301	11,980
Kalumpang	6,371	5,948
Bonehau	5,222	4,724
Jumlah	143.080	135.684

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

d) Penduduk Berdasarkan Agama

Pada tahun 2020, jumlah tempat peribadatan seperti masjid 593 Unit, Mushola 50 Unit, Gereja Protestan 266 buah, Gereja Katolik 17 buah, Pura 18 buah, dan Vihara 1 buah di Kabupaten Mamuju.

Pada tahun 2020 Jumlah Penduduk Beragama Islam masih menempati mayoritas dikabupaten mamuju dengan jumlah Penduduk sebanyak 256,840. Untuk lebih jelasnya Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II - 10

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Mamuju, 2020

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Tapalang	22,533	363	2	6		10
Tapalang Barat	12,743	1				
Mamuju	67,495	3,452	616	107	141	26
Simboro	34,089	500	141	67	18	5
Kep. Bala-balakang	2,453					
Kalukku	59,325	6,079	140	26	2	7
Papalang	23,304	2,045	74	847		9

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Sampaga	17,311	220	9	4		5
Tommo	15,153	7,538	772	1,790	1	3
Kalumpang	312	13,785	2			2
Bonehau	2,122	8,048	337	1		1
Kab. Mamuju	256,840	42,031	2,093	2,848	162	68

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur panjang, memperoleh pengetahuan, dan menjalani standar kehidupan yang layak. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Secara umum, keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu dapat ditinjau dari progresi aspek sosial dan perekonomian. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah, makin baik kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat akan mengungkit daya saing dan keberdayaan masyarakat.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh dari Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil.

Selain IPM, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dinilai dari tiga fokus yaitu: 1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang ditinjau dari PDRB, Tingkat Inflasi, Kemiskinan dan ketimpangan; 2. Fokus Kesejahteraan Sosial ditinjau dari Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kriminalitas; serta 3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

Bagian ini diantaranya akan fokus pada uraian tentang kondisi Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pendekatan yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan berbagai indikator, yang paling sering digunakan diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran atau pendapatan perkapita, dan tingkat harga atau inflasi.

1) Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai penyelenggara pemerintahan. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dari pelaksanaan proses pembangunan. Bukan saja tingkat pertumbuhan yang tinggi yang diharapkan namun tentu saja tingkat pemerataan pendapatan juga diharapkan sejalan dengan perkembangan tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan analisis pertumbuhan PDRB suatu wilayah. Analisis pada pertumbuhan PDRB dapat dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian aktual serta perkiraan perkembangan yang akan datang selain itu juga dapat dilakukan untuk penelaahan potensi pengembangan di masa depan.

Analisis PDRB juga dapat dilakukan berdasarkan sektor. Cara ini dapat memberikan gambaran distribusi PDRB untuk setiap sektor lapangan usaha yang menjadi pendukung aktivitas perekonomian di suatu wilayah.

Total Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju menurut hasil perhitungan Badan Pusat Statistik menunjukan pada tahun 2020 turun signifikan dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2020 adalah sekitar -2,08 persen. Seluruh sektor ekonomi yang ada pada PDRB pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan yang negatif. Hal ini sebagai dampak dari pandemic Covid-2019 yang tercatat mulai dari bulan februari 2020. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi dihasilkan oleh Sektor informasi dan komunikasi sebesar 13,45 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut:

Tabel II - 11
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Mamuju, 2016-2020

Kode Kategori	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018*	2019**	2020
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.310.504,6	2.498.196,4	2.648.507,6	2.719.187,8	2.753.461,2
B	Pertambangan & Penggalian	232.368,7	251.539,4	273.852,3	293.349,4	277.886,5
C	Industri Pengolahan	245.591,3	266.631,4	284.896,1	301.549,8	291.419,4
D	Pengadaan Listrik & Gas	6.236,1	6.766,3	7.306,5	7.737,0	8.419,5
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.214,5	28.743,9	31.184,0	34.817,2	35.723,3
F	Konstruksi	726.822,4	769.325,7	808.501,5	873.976,6	744.029,5
G	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	677.710,0	715.897,7	760.685,1	807.638,2	784.535,7
H	Transportasi dan Pergudangan	161.450,3	176.501,5	185.084,4	186.161,7	174.696,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	19.370,2	19.541,6	21.498,6	24.183,2	21.895,0
J	Informasi dan Komunikasi	537.295,7	590.928,4	640.930,5	686.953,7	779.344,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	186.193,5	206.166,9	218.131,4	212.646,7	228.865,9
L	Real Estate	157.183,2	165.958,9	177.635,6	193.622,8	198.302,3
M,N	Jasa Perusahaan	7.436,4	7.838,5	8.130,4	8.862,2	8.361,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	935.342,0	969.847,8	1.016.626,5	1.097.720,4	1.007.383,0
P	Jasa Pendidikan	397.163,8	421.045,9	438.281,8	477.727,2	445.968,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146.607,9	155.826,8	167.200,9	175.560,9	179.695,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	201.492,3	219.952,9	232.786,3	258.620,0	245.588,9
PDRB		6.974.983,1	7.470.710,0	7.921.239,4	8.360.314,8	8.185.577,4

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamuju, 2016-2021

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel II - 12

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020

NO	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4,99	8,12	6,02	2,67	1,26
2	Pertambangan & Penggalian	9,90	8,25	8,87	7,12	-5,27
3	Industri Pengolahan	2,79	8,57	6,85	5,85	-3,36
4	Pengadaan Listrik Gas	23,97	8,50	7,98	5,89	8,82
5	Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,19	9,65	8,49	11,65	2,60
6	Konstruksi	9,64	5,85	5,09	8,10	-14,87
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	3,77	5,63	6,26	6,17	-2,86
8	Transportasi dan Pergudangan	15,15	9,32	4,86	0,58	-6,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	8,50	0,89	10,01	12,49	-9,46
10	Informasi dan Komunikasi	10,04	9,98	8,46	7,18	13,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,95	10,73	5,80	-2,51	7,52
12	Real Estate	5,06	5,58	7,04	9,00	2,42
13	Jasa Perusahaan	3,24	5,41	3,72	9,00	-5,65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,73	3,69	4,82	7,98	-8,23
15	Jasa Pendidikan	10,59	6,01	4,09	9,00	-6,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,90	6,29	7,30	5,00	2,36
17	Jasa Lainnya	8,01	9,16	5,83	11,10	-5,04
PDRB		7,81	7,11	6,03	5,54	-2,08

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamuju, 2016-2021

Rata-rata pertumbuhan PDRB Kab. Mamuju tahun 2016-2020 pada tabel diatas nilainya signifikan menurun untuk setiap sektor, artinya setiap sektor yang terlibat dalam perhitungan PDRB fluktuatif naik-turun dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten Mamuju selama lima tahun terakhir adalah 4.88 persen, lebih tinggi dari rata-rata tahunan PDRB Sulawesi Barat yang mencapai 4.38 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2.08 persen, lebih rendah jika

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang 5.54 persen.

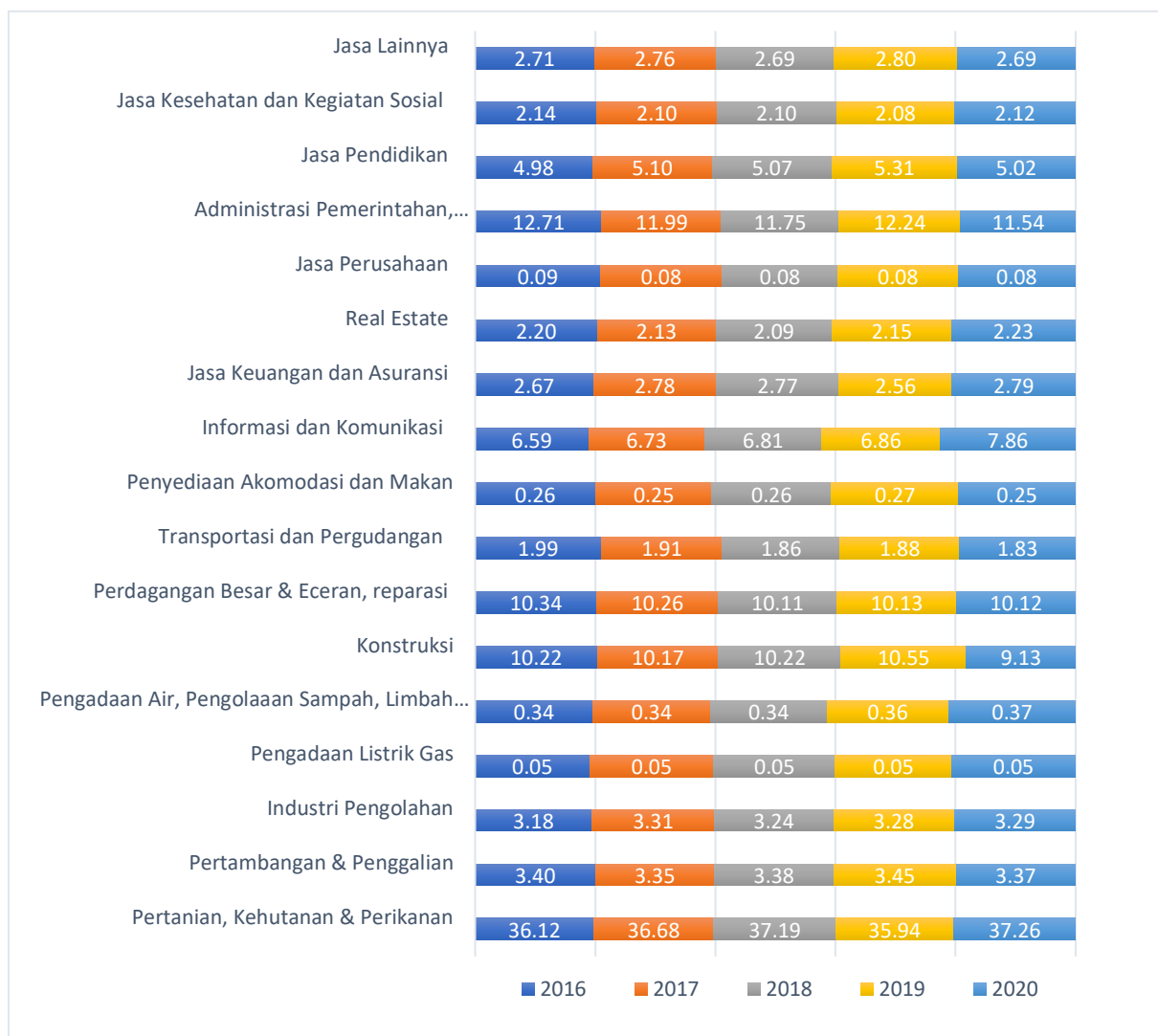
Selama setahun terakhir Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat terus berbenah dan menggenjot perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju tercatat turun signifikan dibandingkan tahun 2019 dengan keterlambatan sebesar 7.62 persen. Keadaan ini harusnya menjadi catatan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk kembali mempercepat laju pertumbuhan ekonomi agar semakin membaik.

Pada tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,26 persen. Sektor berikutnya yang kontribusinya relative besar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan andil sebesar 10,12 persen. Sektor dengan penyumbang terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu hanya sebesar 0,05 persen.

Dari tujuh belas lapangan usaha yang ada, mayoritas lapangan usaha mempunyai pertumbuhan ekonomi yang menurun kecuali sektor Pengadaan Listrik Gas, Sektor Informasi dan Komunikasi, dan Sektor jasa keuangan dan asuransi. Dari beberapa lapangan usaha tersebut, yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi dibanding tahun lalu hanya sebanyak 3 lapangan usaha. Sedangkan sisanya tercatat mengalami perlambatan ekonomi ekonomi yang bervariasi sekitar 2-22 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik II - 3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016–2020

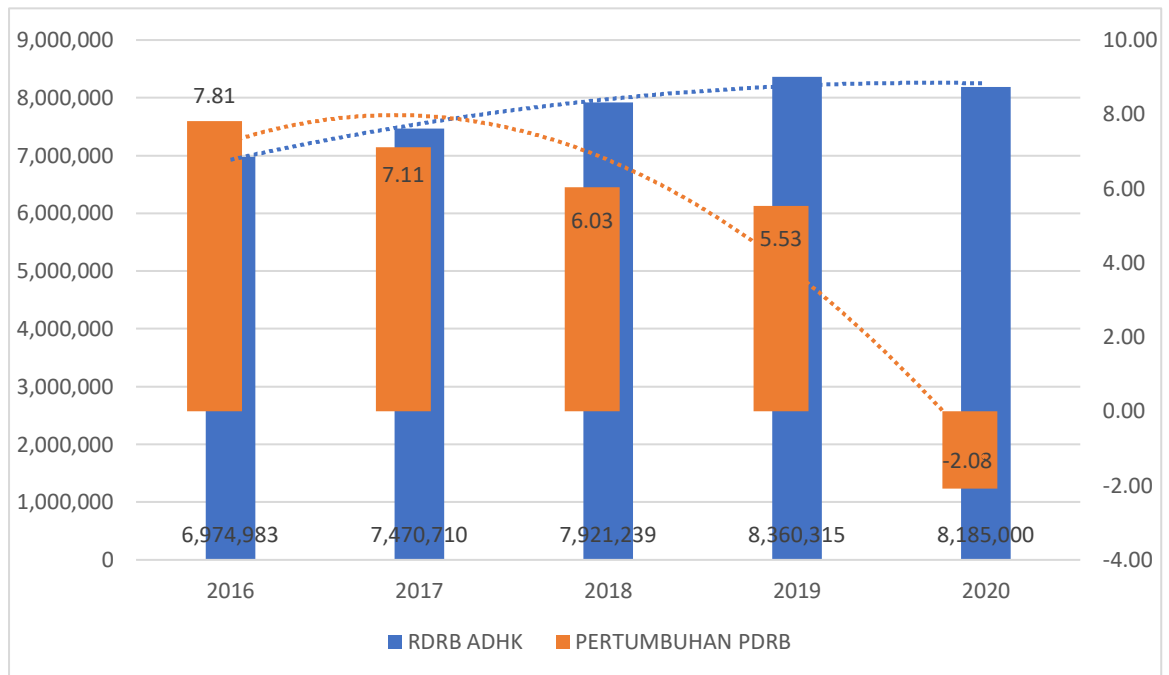


Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

Dilihat dari distribusi persentase pembentuk PDRB per sektor dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih memiliki share produk yang paling tinggi sampai tahun 2020 dengan rata-rata per tahun 37.26 persen. Sementara itu yang paling rendah adalah pengadaan listrik dan gas (0,05 persen). Jika kita amati untuk sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang juga memiliki rata-rata *share* per tahun yang rendah (0,37 persen). Data-data tersebut memberikan informasi bahwa sektor-sektor yang tumbuh dengan laju yang tinggi ternyata *share*-nya terhadap PDRB masih relatif rendah. Artinya pada iklim usaha yang terjaga dengan baik kedua sektor ini memiliki potensi pengembangan dan target investasi yang cukup baik.

Grafik II - 4

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 dan Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah/Persen)**



Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa PDRB kabupaten Mamuju dari tahun ke tahun terus meningkat dengan rata-rata penambahan sekitar 400 milyar rupiah per tahun. Namun ditahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun 175 milyar rupiah yang kondisinya semakin melambat. Kondisi ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya karena secara umum perekonomian nasional melambat atau jika dilihat dari struktur pembentukan PDRB kabupaten Mamuju yang cukup banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah artinya ada pola konsumsi yang berubah apalagi secara nasional dampak wabah covid 19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi termasuk diwilayah dampak adalah kabupaten mamuju. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan beberapa kali penghematan anggaran/recofussion. Hal ini berlaku mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, termasuk adanya moratorium pada beberapa pengadaan barang modal maupun infrastruktur pemerintah. Kejadian-kejadian tersebut tentu mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan secara langsung mempengaruhi pola pembentukan PDRB.

Tabel II - 13

Perkembangan PDRB Kabupaten Tahun 2016 s.d 2020 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten	PDRB (Miliar Rupiah)									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Majene	3.801	2.992	4.190	3.180	4.614	3.373	4.973	3.576	4.993	3.527
Polewali Mandar	10.315	7.785	11.335	8.330	12.448	8.846	13.369	9.392	13.270	9.249
Mamasa	2.333	1.881	2.534	1.995	2.763	2.116	2.974	2.242	2.983	2.213
Mamuju	9.090	6.975	10.027	7.470	11.002	7.921	11.731	8.360	11.624	8.185
Mamuju Utara	8.044	6.257	8.813	6.656	9.641	7.066	10.216	7.435	10.013	7.123
Mamuju Tengah	2.486	1.902	2.694	2.006	2.970	2.120	3.154	2.239	3.185	2.230
PDRB Provinsi	36.069	27.793	39.593	29.639	43.437	31.443	46.417	33.246	45.908	32.082
PDRB Nasional	12.401 T	9.434 T	13.589 T	9.912 T	14.838 T	10.425 T	15.833 T	10.949 T	15.434 T	10.722 T

Sumber : Tinjauan PDRB Kabupaten Se-Sulawesi Barat 2021

Dari table diatas dapat dilihat pada tahun 2020, PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 45,91 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 32,08 triliun rupiah. Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2020 melambat hingga -2,42 persen. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berimbas kepada kegiatan perekonomian di Sulawesi Barat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terkontraksi.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Inflasi yang tidak terkendali memiliki dampak yang buruk terhadap

perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi sama tidak menguntungkannya dengan kondisi ketika tingkat inflasi sangat rendah. Inflasi diperlukan untuk tetap menjaga pergerakan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menjaga tingkat inflasi ini dalam batas yang bisa memberikan dampak positif pada perekonomian dan tentu saja tidak memberatkan masyarakat namun tetap merangsang dunia usaha untuk tetap berkembang. Umumnya tingkat inflasi diharapkan bergerak disekitar 2 persen agar perekonomian tetap dalam kondisi baik.

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan perubahan harga barang dan atau jasa secara umum yang terjadi karena dinamika kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Inflasi dihitung pada 90 kota pada 34 Provinsi se-Indonesia. Penghitungan inflasi atau perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh BPS, untuk Kabupaten Mamuju diambil berdasarkan yang mewakili wilayah perkotaan. Laju inflasi yang merupakan representasi dari kenaikan atau penurunan harga antar periode waktu. Inflasi yang meningkat berarti harga barang dan jasa di suatu wilayah mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang-barang tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang.

Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (*inflasi*) atau tingkat penurunan (*deflasi*) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

1) Perkembangan Laju Inflasi Bulanan (*Month on Month*)

Inflasi bulanan adalah perbandingan IHK bulan n dibanding bulan n-1. Selama Tahun 2020, Kab. Mamuju mengalami inflasi bulanan sebanyak delapan kali dan deflasi sebanyak empat kali. Inflasi tertinggi terjadi pada Bulan Februari sebesar 0,81 persen. Peningkatan harga yang terjadi pada Bulan Februari tersebut disebabkan kenaikan harga pada delapan kelompok pengeluaran (dari sebelas kelompok pengeluaran), terutama kelompok bahan makanan yang andilnya mencapai 2,35 persen, dan sisanya satu kelompok mengalami deflasi. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Bulan Agustus yaitu sebesar 0,06 persen. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sebanyak tujuh kelompok mengalami inflasi dan empat kelompok mengalami deflasi. Kelompok yang memberi andil terbesar

terhadap inflasi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 7,81 persen. Adapun tingkat inflasi tahun 2020 dapat dilihat pada table dan grafik berikut:

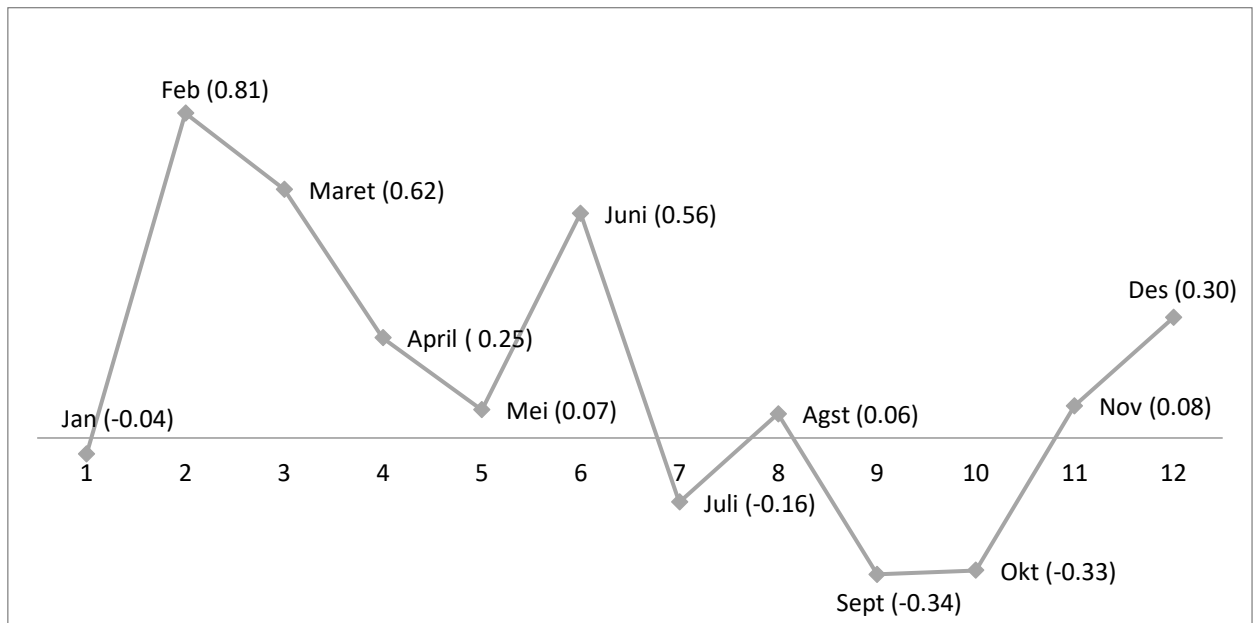
Tabel II - 14

Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Mamuju (2018=100) Tahun 2020

No	Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	2020
1	Makanan, Minuman, Tembakau	0,24	1,88	1,89	1,01	-0,85	1,76	-0,40	-0,39	-0,98	-0,51	-0,03	0,44	4,07
2	Pakaian dan alas kaki	-	0,26	0,27	0,24	0,01	-0,20	0,98	1,37	0,54	-0,98	0,04	0,30	2,84
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,08	0,26	-0,31	0,04	0,29	0,08	0,04	0,03	0,04	-0,05	0,01	-	-0,17
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,04	0,38	0,48	0,43	0,16	0,13	0,04	0,21	0,11	0,05	-0,09	0,53	2,49
5	Kesehatan	0,03	-0,70	-0,03	-0,60	-	0,02	-0,31	0,03	-0,62	0,05	0,01	1,63	-0,57
6	Transportasi	-1,03	0,78	-1,22	-2,46	2,63	-0,89	-1,27	-0,29	-0,09	-0,28	0,65	0,49	-4,52
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,04	-	-0,11	0,46	0,12	-0,81	-0,19	0,01	-0,05	0,23	0,11	0,15	-0,58
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,12	1,80	0,05	0,87	2,96	0,95	0,73	0,09	-	-	0,03	-	7,81
9	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	0,64	0,01	-	-	-	-	0,65
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	-	2,35	0,12	0,10	0,16	-	-	-	-	-	-	-	2,74
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,11	1,43	1,26	1,21	0,06	-0,05	0,82	0,28	0,21	-0,21	0,13	0,09	5,47
	Kelompok Pengeluaran Secara Umum	-0,04	0,81	0,62	0,25	0,07	0,56	-0,16	0,06	-0,34	-0,33	0,08	0,30	1,78

Sumber : BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2020

Grafik II - 5
Tingkat Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran
di Kabupaten Mamuju (2018=100) 2020



Sumber : BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2020

Deflasi di Tahun 2020 terjadi pada bulan Januari, Juli, September sampai Oktober. Deflasi disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok pengeluaran terutama pada bahan makanan yang memiliki pola sangat fluktuatif terutama pada ikan segar. Hal ini disebabkan komoditas komoditas ini sangat tergantung pada musim sehingga sulit untuk mengendalikannya.

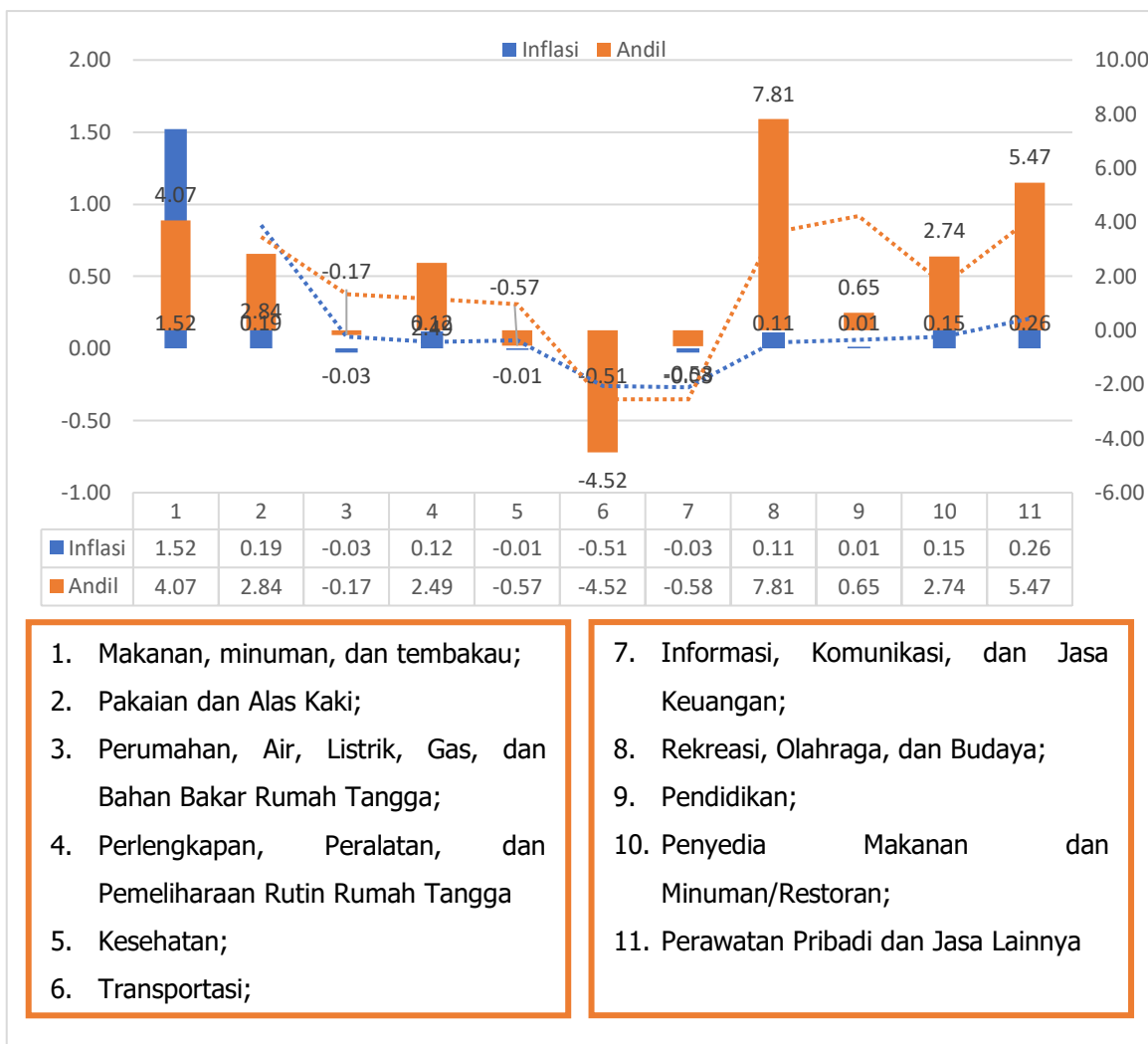
2) Perkembangan Inflasi Tahun Kalender.

Inflasi tahun kalender adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan Desember tahun y-1.

Pada tahun 2020 secara umum menunjukkan adanya inflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 4,07 persen; pakaian dan alas kaki 2,84 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,49 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 7,81 persen; pendidikan 0,65 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,74 persen; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,47 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga 0,17 persen;

kesehatan 0,57 persen; transportasi 4,52 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,58 persen.

Grafik II - 6
Inflasi Tahunan dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Mamuju Tahun 2020 (2018=100)



Sumber: BPS, Inflasi dan Indeks Harga Konsumen Kota Mamuju 2020

Beberapa komoditas yang dominan dalam andil inflasi tahun 2020 di Mamuju adalah rokok putih 0,25 persen; ikan cakalang 0,22 persen; rokok kretek filter 0,20 persen; cabai merah dan minyak goreng 0,16 persen; ikan baronang 0,13 persen; mie kering instan 0,11 persen; dan emas perhiasan 0,11 persen

3) Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year).

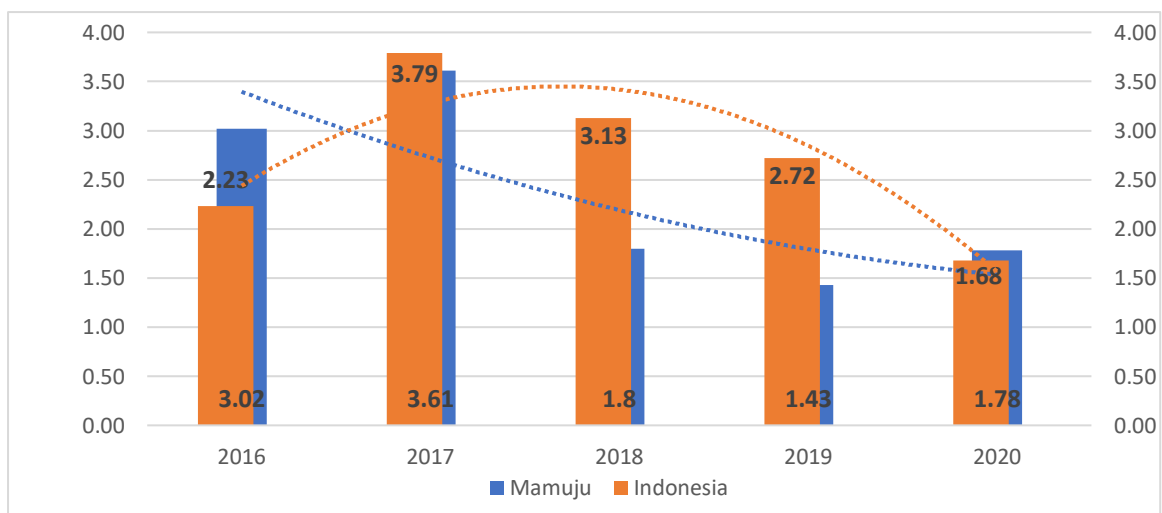
Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n tahun y

dibanding bulan n tahun y-1.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di kota Mamuju pada tahun 2020, terjadi inflasi tahunan sebesar 1,78 persen. Inflasi ini ditandai dengan peningkatan IHK (2018=100) dari 102,23 pada Desember 2019 menjadi 104,05 pada Desember 2020. Jika dibandingkan dengan inflasi di Indonesia, inflasi tahun 2020 kota Mamuju berada di atas angka inflasi Indonesia yaitu lebih tinggi 0,10 poin. Dalam lima tahun terakhir, sebanyak dua kali inflasi tahunan Mamuju berada di atas inflasi tahunan Indonesia yakni di tahun 2017 dan tahun 2020. Selanjutnya perkembangan inflasi Mamuju dan Indonesia dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik II - 7

Perkembangan Inflasi Tahunan di Kota Mamuju dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Inflasi dan Indeks Harga Konsumen Kota Mamuju 2020

2.2.1.3 PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dimana semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum

mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk, meskipun masih terdapat keterbatasan indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatau daerah dalam lingkup makro.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu dalam periode tertentu, maka akan dihasilkan angka PDRB perkapita. PDRB per kapita yang dimaksud adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sehingga menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk sesuai dengan periode waktu tertentu tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mamuju atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan tetapi kemudian menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,39 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 39,98 juta rupiah, namun kemudian turun menjadi 38,71 juta. Penurunan ini disebabkan oleh terpukulnya perekonomian Kabupaten Mamuju akibat pandem Covid19. Nilai angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel II - 15
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Mamuju, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Juta Rp)	9.090.27	10.027.45	10.999,83	11.728.04	11.624.39
Jumlah Penduduk (jiwa)	272.258	279.393	286.389	293.326	278.764
PDRB perkapita HB (Juta Rp)	33,39	35,89	38,41	39,98	38,71
PDRB perkapita HK (Juta Rp)	25,62	26,74	27,66	28,50	27,26
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,26	4,37	3,34	3,04	-4,36

Sumber : BPS, PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Mamuju, 2016-2020

Tabel II - 16
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2016-2020 (Dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Kabupaten dan Provinsi	Laki- Laki					Perempuan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Mamuju	-	11.768	12.281	12.68 1	NA	-	6.287	6.452	6.637	NA
Sulawesi Barat	12.358	12.662	13.157	13.42 4	NA	6.475	6.572	6.805	6.940	NA

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks Gini yang dihitung berdasarkan kurva Lorenz yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (dalam hal ini pendapatan) dengan distribusi *uniform* yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi pendapatan penduduk pada seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang Indeks Gini adalah 0 – 1. Angka Indeks yang semakin mendekati nilai 0 berarti tingkat pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati 1 berarti tingkat pendapatan makin timpang. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan lebih rinci:

- a) Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan Rendah
- b) $0,3 \leq$ Indeks Gini \leq 0,5 = Ketimpangan Sedang (Moderat)
- c) Indeks Gini > 0,5 = Ketimpangan Tinggi

Tabel II - 17

Indeks Gini kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

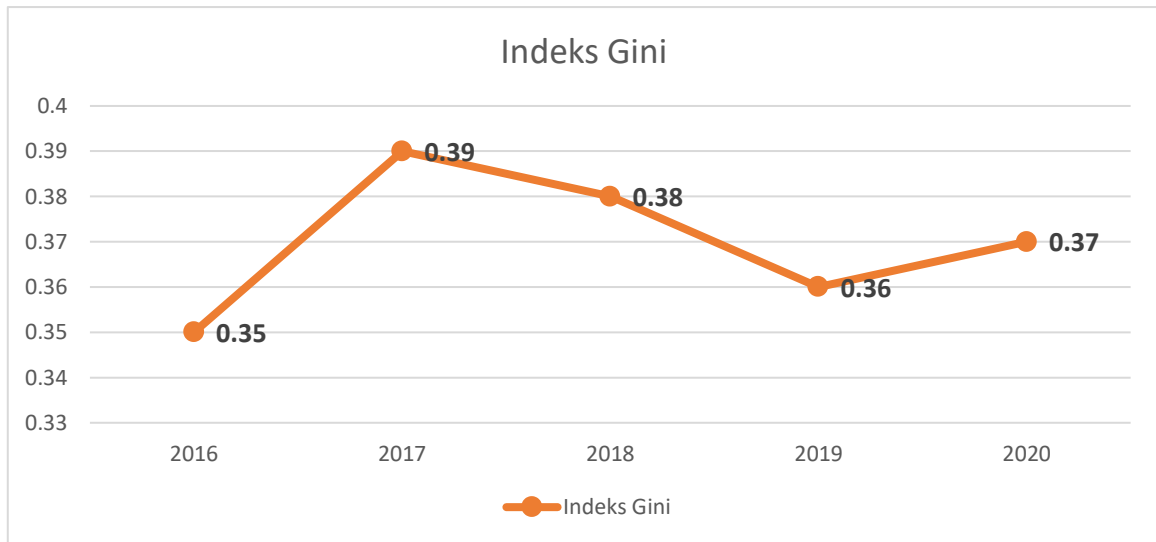
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini	0,35	0,39	0,38	0,36	0,37
Kriteria Ketimpangan	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber: BPS, Hasil pengolahan data Susenas

Tabel diatas menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mamuju tahun 2016-2020. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kabupaten Mamuju memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2016-2020. Indeks Gini Kabupaten Mamuju selama tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif berkisar antara 0,35-0,39. Hal ini menjelaskan bahwa selama lima tahun ketimpangan pendapatan di Mamuju relatif rendah. Dengan ketimpangan yang rendah tersebut, artinya pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mamuju masih bisa dirasakan oleh hampir semua penduduk dengan bertumbuhnya pula pendapatan masing-masing penduduk secara cukup merata. Berikut grafik II-8 menunjukkan perkembangan nilai Indeks Gini Kabupaten Mamuju.

Grafik II - 8

Grafik perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mamuju Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, hasil pengolahan data susenas

2.2.1.5 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibagi menjadi dua kategori, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). GKM ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM dihitung berdasarkan nilai konsumsi atau pengeluaran pada kebutuhan-kebutuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Penduduk yang pengeluaran perkapita bulannya di atas garis kemiskinan dianggap tidak miskin, berdasarkan hasil konsensus.

1) Garis Kemiskinan Kabupaten Mamuju

Garis Kemiskinan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan dan 51 komoditi non-makanan (47 komoditi di desa) yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan kilo kalori per kapita per hari. Dengan kata lain, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai

pengeluaran minimum yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Besaran garis kemiskinan menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak. Garis kemiskinan kabupaten Mamuju menurut perhitungan hasil susenas BPS semakin meningkat setiap tahun, Garis kemiskinan kabupaten Mamuju sejak tahun 2016 sampai 2020 masih berada di bawah level garis kemiskinan Sulawesi Barat. Selama tahun 2016 - 2020, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di kabupaten Mamuju masih berkisar antara 92-94 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten ini relatif tidak berubah signifikan naik maupun turun. Persentase jumlah penduduk miskin selama 2016-2020 mengalami peningkatan pada periode 2016 ke 2017, 2017 ke 2018 dan 2018 ke 2019 pada tahun 2020, persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 93,08 persen. Tabel II-18 menunjukkan data garis kemiskinan, penduduk miskin, dan penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Mamuju dengan perbandingan jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi Sulbar dan Nasional.

Tabel II - 18

Garis Kemiskinan, Angka Kemiskinan, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan Kab. Mamuju	Rp/Kapita/Bulan	223.150	241.616	252.429	259.969	277.078
Angka Kemiskinan	Persen	6,48	6,88	7,18	7,06	6,92
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	Persen	93,52	93,12	92,82	92,94	93,08
Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat	Rp/Kapita/Bulan	286.840	302.852	319.121	328.144	350.743
Garis Kemiskinan Nasional	Rp/Kapita/Bulan	354.386	374.478	401.220	425.250	454.652

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Barat, 2020

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan garis kemiskinan di Kab. Mamuju meningkat setiap tahunnya seiring dengan Prov. Sulbar, peningkatan ini tidak lepas dari inflasi yang terjadi rutin tiap tahunnya dan dampak dari covid-19 di Tahun 2020. Adapun besaran garis kemiskinan Kab.Mamuju di tahun 2020 sebesar 277.078 rupiah/kapita/bulan, masih berada di bawah garis kemiskinan Prov. Sulawesi Barat sebesar 350.743 rupiah/kapita/bulan dan berada dibawah garis kemiskinan Nasional yang mencapai 454.652 rupiah/kapita/bulan. Dapat disimpulkan bahwa harga

kebutuhan pembentuk garis kemiskinan di Kabupaten Mamuju masih lebih rendah dari rata rata Provinsi dan memerlukan langkah strategi Pemerintah dan swasta untuk tetap menjaga kestabilan harga ditengah dampak badai covid-19 dan pergerakan inflasi rutin tahunan.

2) Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kabupaten Mamuju diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kabupaten Mamuju antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

Tabel II - 19
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin Kab.Mamuju	000 Jiwa	17,47	19,11	20,42	20,57	20,65
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat	000 Jiwa	152,73	149,76	152,83	151,87	159,05
Jumlah Penduduk Miskin Nasional	000 Jiwa	28 005,39	27 771,22	25 949,80	25 144,72	26 424,02

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Barat, 2021

Sepanjang kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju selalu mengalami kenaikan, ini disebabkan adanya inflasi yang tinggi sehingga membuat harga bahan pokok mengalami kenaikan, bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun, masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka naik, dan pada tahun 2020 terjadinya krisis ekonomi sebagai dampak dari *pandemic Covid-19*.

Selama kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 tingkat kemiskinan

Kabupaten Mamuju selalu berada dibawah jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat yang cenderung fluktuatif sama halnya dengan Nasional. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Mamuju juga semakin meningkat, selama tahun 2016 hingga tahun 2020 angka ini terus mengalami kenaikan.

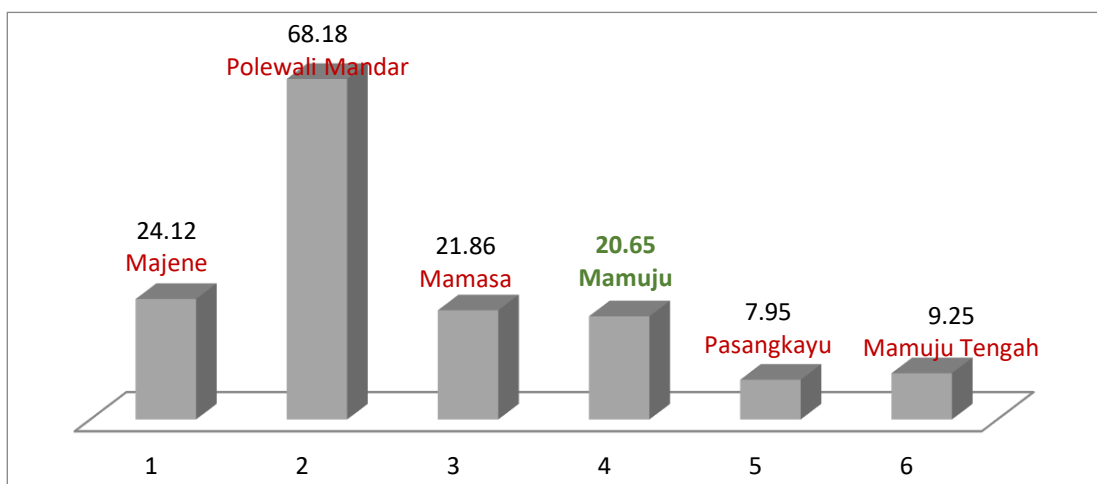
Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 152,83 Ribu Jiwa, Jumlah kemiskinan Nasional sebesar 25.949,80 ribu jiwa, sedangkan di Kabupaten Mamuju jumlahnya sekitar 20,42 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 151,87 ribu jiwa, sedangkan di Kabupaten Mamuju jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 20,57 ribu jiwa, dan untuk Nasional jumlah penduduk miskin menurun sebesar 25 144,72 ribu jiwa dari tahun 2018.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebesar 159,05 ribu jiwa, di Kabupaten Mamuju jumlah penduduk miskinnya justru mengalami penurunan sebesar 20,65 ribu jiwa, tetapi untuk Nasional mengalami kenaikan yang sama dengan Propinsi yaitu sebesar 26.424,02 ribu jiwa.

Dengan demikian disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin selalu dibawah jumlah penduduk miskin Propinsi Sulawesi Barat, namun dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Grafik II - 9

**Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)
di Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020**



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Barat, 2020

Kabupaten Mamuju adalah salah satu Kabupaten dengan urutan tingkat kemiskinan yang ketiga terendah dibandingkan dengan tiga Kabupaten di

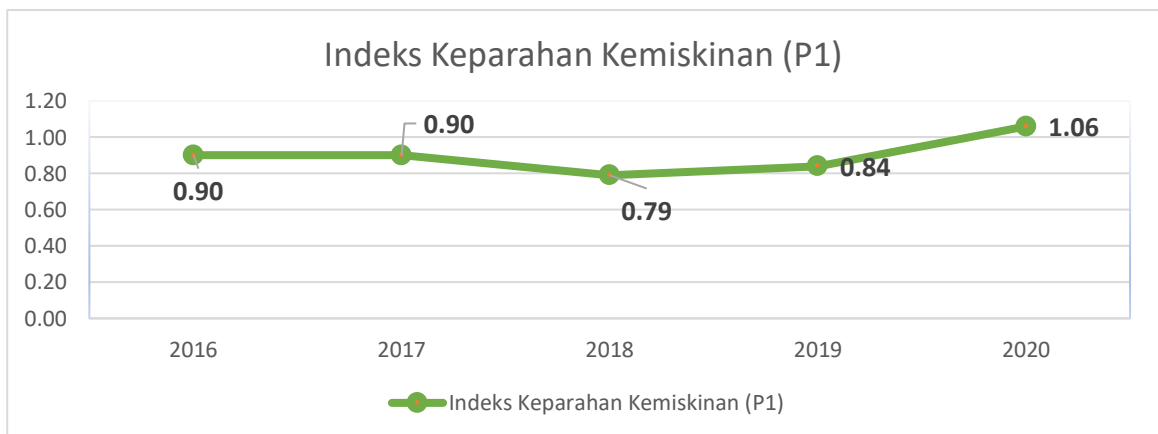
atasnya. Yang dimana urutan pertama tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat di duduki oleh Kabupaten Polewali Mandar sebesar 68,18 ribu jiwa.

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mamuju selama kurun waktu 2016-2020 meningkat. Dimana pada Tahun 2018 sebesar 0,79 selanjutnya naik pada tahun 2019 sebesar 0,84, kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2020 sebesar 1,06. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mamuju tahun 2018-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

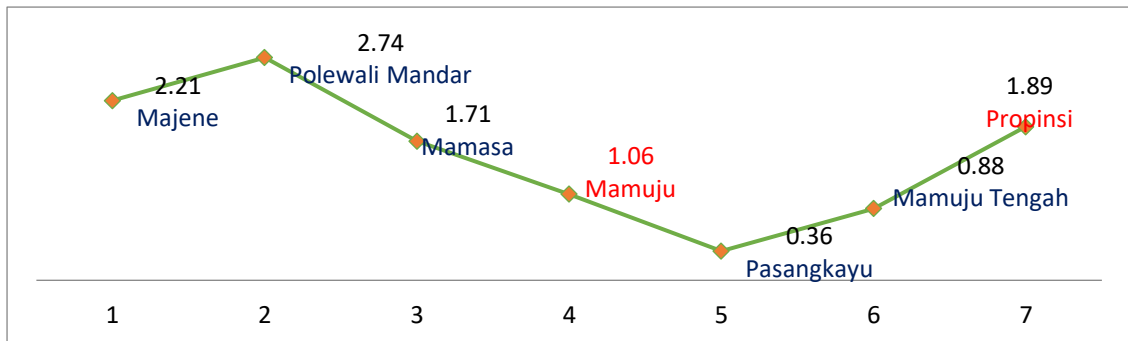
Grafik II - 10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Prov.Sulawesi Barat, 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Mamuju berada pada urutan keempat yaitu sebesar 1,06, dan masih berada dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Propinsi Sulawesi Barat sebesar 1,89. Namun perlu upaya lebih keras lagi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengingat angka indeks sebelumnya mengalami penurunan.

Grafik II - 11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



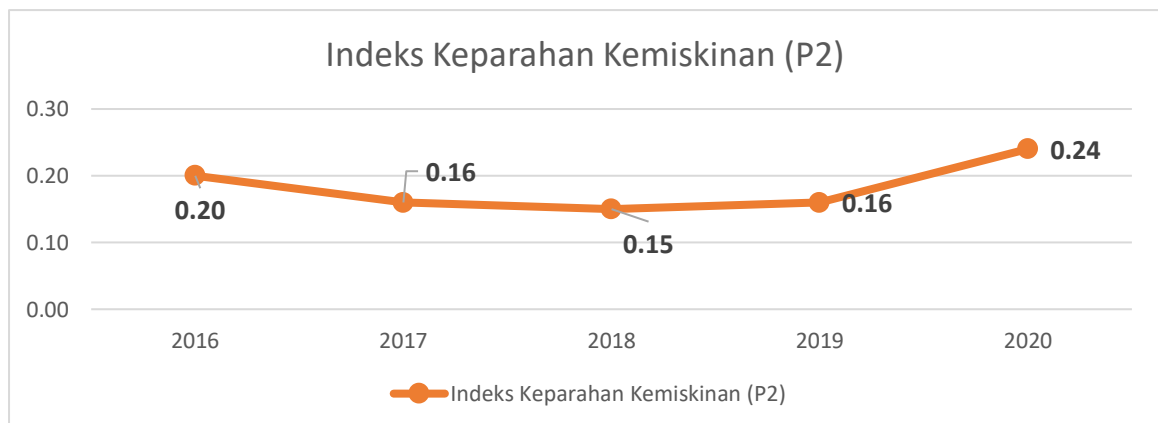
Sumber : BPS Prov. Barat, 2020

4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 sebesar 0,15, tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,16 yang berarti kondisi sedang tidak baik. Kemudian indeks ini justru mengalami naik kembali pada Tahun 2020 mencapai 0,24. Hal ini bermakna bahwa penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin mengalami kenaikan atau dengan kata lain ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin mengalami kenaikan.

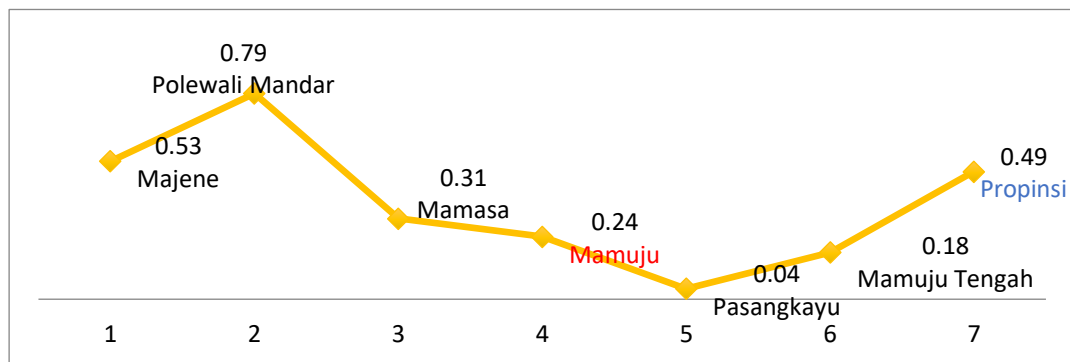
Grafik II - 12
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Prov.Sulawesi Barat, 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mamuju masih berada dibawah Indeks Keparahan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Barat. Namun, perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk menurunkan indeks keparahan kemiskinan mengingat angka indeks cenderung kenaikan dibanding tahun tahun sebelumnya.

Grafik II - 13
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber : BPS Prov.Sulawesi Barat, 2020

Pasca pandemi COVID-19, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (*absolut*) maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamuju. Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kabupaten Mamuju karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kabupaten Mamuju.

2.2.1.6 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Kabupaten Mamuju dari 2016 sampai dengan 2020 berkisaran dari 6 sampai dengan 8 persen belum cukup maksimal dalam menentukan sumber-sumber pendapatan yang menjadi prioritas dalam meningkatkan Pendapatan Kabupaten Mamuju, Adapun gambaran secara utuh realisasi indikator urusan Keuangan sebagai berikut:

Tabel II - 20
Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6.28%	7.19%	7.27%	8.46%	NA

Sumber BPS dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2020

2.2.1.7 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kabupaten Mamuju selama 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2016 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Namun di tahun 2017 mendapatkan penilaian Wajar dengan pengecualian (WDP) dan di 2 tahun terakhir 2018 - 2021 Kabupaten Mamuju kembali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku :

Tabel II - 21
Opini BPK Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BAPPEPAN Kabupaten Mamuju, 2021

2.2.1.8 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan ditandai dengan capaian keragaman konsumsi pangan penduduk Mamuju, untuk tahun 2019 pencapaiannya sekitar 81,1 dengan target sekitar 92,4. Pencapaian ini termasuk menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sekitar 88,5%. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kenyataannya pola konsumsi pangan masyarakat sampai saat ini masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenis pangan dan keseimbangan

gizinya, kelompok angan minyak & lemak serta buah atau biji berminyak sudah mencapai skor pph maksimum. Kelompok padi-padian masih belum ideal karena konsumsi beras masyarakat masih tinggi, konsumsi jagung dan padi-padian lainnya masih kurang.

Di kelompok umbi-umbian memiliki skor 1,7 dari skor ideal 2,5, kelompok umbi-umbian yang banyak di konsumsi oleh masyarakat terdiri dari singkong dan ubi jalar. Dalam kelompok pangan hewani memiliki skor rendah dari skor ideal yaitu sebesar 18,3 dari skor ideal PPH 24. Kelompok yang didominasi di konsumsi oleh masyarakat adalah ikan dan telur. Kelompok pangan kacang-kacangan memiliki nilai paling rendah dari seluruh kelompok pangan yang ada yaitu sebesar 2,9 dari skor ideal 10,0. Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat adalah kacang kedelai dalam bentuk tempe. Konsumsi sayur dan buah memperoleh skor pph 28,4 dari skor PPH Ideal 30,0 kelompok pangan Gula dan yang lainnya juga masih kurang dari yang diharapkan.

Skor PPH yang diperoleh menggambarkan bahwa komposisi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berada di desa stunting dan wilayah lainnya masih kurang beragam dan seimbang masih jauh dari komposisi yang diharapkan.

Pencapaian ini didukung dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Beberapa Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk merubah pola konsumsi masyarakat adalah Promosi Pangan Lokal, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung. Melalui kegiatan ini masyarakat Mamuju sebagian besar mampu mengolah pangan-pangan lokalnya sampai menjadi olahan yang dapat dipasarkan seperti kripik dari ubi kayu, tepung dan kue-kue kering yang terbuat dari pangan lokal lainnya, Namun masih kurang 18,9 poin dari kondisi yang diharapkan hal ini perlu ditingkatkan dengan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Kondisi saat ini, konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, yang ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

- perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi;
- masih rendahnya daya beli masyarakat. rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang. dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;
- kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan

- pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;
- produksi umbi umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar;
 - keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi (*scaling up production*), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya;
 - teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat;
 - berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior;
 - komitmen aparat dalam mengimplementasi program dan kegiatan diversifikasi dirasa masih belum kuat; dan
 - belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga serta lemahnya partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :
 - (1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik);
 - (2) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya local
 - (3) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.

2.2.1.9 Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan di intervensi melalui penguatan wilayah yang terindikasi sebagai wilayah rawan pangan. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi daerah yang tingkat ketersediaan, akses dan keamanan pangan sebagian rumah tangga/ masyarakat tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan desa. Persentase penurunan rawan pangan pada tahun 2020 sebesar 2,2% dari target 1 % atau pada tahun 2018 sekitar 23% desa rawan

pangan menjadi 22% dengan capaian menurut analisis FSVA 2019 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 20 desa dari 101 desa (19,8 %) yang terdiri dari 7 desa (6,9 %) Prioritas 1; 8 desa (6,9 %) Prioritas 2; dan Prioritas 3; 5 desa (4,9 %).

Desa prioritas 1 tersebar 7 desa, 1 desa di kecamatan Tapalang yaitu Desa Bela dan 6 desa Di kecamatan Kalumpang yaitu desa Siraun, desa Salumakki, desa Limbong, desa Kondobulo, desa Makkaliki dan desa Lasa, Desa prioritas 2 tersebar 8 desa, 1 desa di kecamatan Tapalang yaitu Desa Kopeang, 1 desa kecamatan Kepulauan Balabalakang yaitu desa Balabalakang, 1 desa Kecamatan Tommo yaitu Desa Leling Utara; 5 desa Kecamatan Kalumpang yaitu desa Karama, desa Tumonga, desa Polio, desa Sandapang, desa Batu Makkada 1 Desa di kecamatan Bonehau yaitu desa Banuada Desa prioritas 3 tersebar 5 desa di 1 desa kecamatan Mamuju yaitu desa Batupannu, 1 desa di kecamatan Simboro yaitu desa Tapadullu, 1 desa di Kecamatan sedangkan pada tahun 2019 sekitar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya tahun ini penurunan yang dicapai walaupun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dibanding dari target.

2.2.1.10 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pada hasil-hasil pertanian, maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju. Kondisi pertanian di Kabupaten Mamuju masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat khususnya pelaku tani. Selain potensi yang besar dalam nilai produksi, sektor pertanian juga merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Mamuju. Sub sektor tanaman pangan khususnya komoditi padi dan palawija berkontribusi besar terhadap sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan yang fluktuatif naik turun dari tahun 2016 hingga tahun 2020, jika dilihat pada tahun 2016 nilai PDRB sektor pertanian mencapai 22,82 persen, dan terus meningkat sampai ditahun 2019 dengan nilai 22,76 persen. Namun ditahun 2020 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dengan nilai kontribusi 23,47. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II - 22**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,82	22,91	23,87	22,76	23,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

2.2.1.11 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Perkebunan sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Mamuju telah menempatkan beberapa komoditas unggulan perkebunan (tanaman keras) yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian seperti tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb. Pada tahun 2016 produktivitas komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Mamuju dengan volume produksi sebesar 848.571,7 kg/Ha, dan terus meningkat sampai dengan ditahun 2020 telah mencapai nilai produksi sebesar 956.454,6 Kg/Ha. Untuk mencapai target produksi pemerintah bersama stakeholder terkait melakukan upaya pemeliharaan tanah dan merehabilitasi lahan yang rusak. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang menurun dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 12,69 persen, ditahun 2019 menjadi 11,88 persen, walaupun ditahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 13,05 persen dari total PDRB.

Tabel II - 23**Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	12,69	12,59	13,05	11,88	NA

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

2.2.1.12 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini

adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Subkategori sektor kehutanan pada tahun 2016 mencapai 0,84 persen, dan terus menunjukkan angka yang fluktuatif menurun hingga ditahun 2018 yang mencapai 0,75 persen, kemudian kembali meningkat sebesar 0,82 persen ditahun 2019. Pada tahun 2020 kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 0,29 Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II - 24
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	%	0,84	0,78	0,75	0,82	0,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

2.2.1.13 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. berdasarkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan jika dilihat tabel berikut di tahun 2016 mencapai 13 persen dan meningkat ditahun 2017 mencapai 13,49 persen, dan pada dua tahun terakhir terjadi penurunan dimana ditahun 2018 mencapai 13,04 persen dan ditahun 2019 hanya mencapai 12,89 persen. Namun terjadi peningkatan di tahun 2020 sebesar 13,50 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II - 25**Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju
Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap	%	13,00	13,49	13,04	12,89	13,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

2.2.1.14 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi. Untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ini selama dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ini mengalami angka yang tren menurun, jika dilihat pada tahun 2016 mencapai 10,34 persen hingga ditahun 2018 mencapai 10,11 persen, dan kembali meningkat sebesar 0,02 persen menjadi sebesar 10,14 persen di tahun 2019, dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 10,12% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II - 26
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,34	10,26	10,12	10,14	10,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

2.2.1.15 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Untuk kontribusi sektor industri terhadap PDRB ini selama dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ini mengalami angka yang fluktuatif meningkat, ditahun 2016 mencapai 3,18 persen, meningkat ditahun 2017 mencapai 3,31 persen, dan terjadi penurunan kontribusi ditahun 2018 dengan angka 3,24 persen, dan kembali meningkat menjadi sebesar 3,28 persen di tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 3,29 persen mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II - 27
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Mamuju
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	3,18	3,31	3,24	3,28	3,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial ini, kita dapat melihat beberapa aspek yang terdiri dari : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Penguatan Cadangan Pangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Usia Harapan Hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Presentase Penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja, Laju pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja, dan Presentase Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan Pekerja bebas keluarga Terhadap Total Penduduk Yang Bekerja.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan manusia adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh peningkatan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun kondisi ideal dalam pembangunan manusia bukan hanya sampai pada pencapaian target tersebut, tetapi sampai pada pemanfaatan dari capaian target telah dicapai. Dengan terbuka luasnya akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan taraf hidup masyarakat, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental yang tercermin dalam pola hidup, pola sikap dan tingkat kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan manusia tersebut dapat diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial berkorelasi positif dan berbanding lurus

dengan IPM. Dengan demikian apabila tingkat IPM semakin tinggi maka bisa dipastikan pembangunan ke arah kesejahteraan semakin dekat dan apabila kesejahteraan sosial tercapai maka IPM suatu daerah akan tinggi. Untuk jelasnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju terhadap wilayah se-Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II - 28
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2016	2017	2018	2019	2020
IPM Kabupaten Mamuu	65,65	66,32	67,11	67,72	68,15
IPM Provinsi Sulawesi Barat	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11
IPM Nasional	70.18	70.81	71.39	71,92	71,94

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2020

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam ukuran keberhasilan suatu wilayah. Ukuran keberhasilan pembangunan manusia ini tertuang dalam indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 Selama kurun waktu lima tahun

terakhir (2016-2020), capaian pembangunan manusia di tingkat Provinsi maupun Kabupaten di Sulawesi Barat terus membaik. Di tingkat Provinsi, capaian IPM pada tahun 2016 di posisi 63,60, dengan capaian tersebut Sulawesi Barat sudah berstatus pembangunan manusia “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Demikian halnya di tingkat Kabupaten, seluruh Kabupaten sudah berstatus pembangunan manusia “sedang”. Kabupaten Mamuju adalah kabupaten yang paling tinggi dalam kelompok pembangunan manusia “sedang” di tahun 2016.

Pada tahun-tahun selanjutnya, IPM baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten mengalami peningkatan. Namun sayangnya peningkatan besaran IPM baik Provinsi maupun Kabupaten belum bisa meningkatkan status pembangunan manusia Sulawesi Barat menjadi “tinggi”. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Barat di tahun 2020 mencapai 66,11 dengan variasi capaian pembangunan manusia di kabupaten berkisar diantaranya 63,84 (Kabupaten Polewali Mandar) dan 68,15 (Kabupaten Mamuju). Selama kurun waktu 2018-2020 nampak Kabupaten Mamuju selalu memiliki capaian IPM lebih tinggi dibandingkan capaian Sulawesi Barat. Sebaliknya Kabupaten Polewali Mandar memiliki IPM lebih rendah dari capaian Sulawesi Barat sekaligus menjadi IPM terendah diantara lima kabupaten lainnya.

Peningkatan IPM Kabupaten Mamuju dikarenakan adanya peningkatan pada tiap komponen penyusunnya. Angka harapan hidup yang merefleksikan harapan lama hidup penduduk baru lahir meningkat dari 67,23 tahun pada tahun 2019 menjadi 67,52 tahun di tahun 2020. Komponen kedua adalah harapan lama sekolah juga meningkat dari 13,18 tahun pada tahun 2019 menjadi 13,19 tahun pada tahun 2020. Indikator pendidikan kedua adalah rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 7,69 tahun di tahun 2019 menjadi 7,95 tahun pada tahun 2020. Pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Mamuju sebagai komponen ketiga mengalami penurunan dari 9.535 ribu rupiah pada tahun 2019 menjadi 9.500 ribu rupiah pada tahun 2020.

2.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

dengan nilai 93,13% dari tahun 2019 sebesar 94,65% Kabupaten Mamuju yang buta huruf, sedangkan tingkat melek huruf se-Kabupaten dalam Provinsi Sulbar ditahun 2020 tertinggi adalah Kabupaten Majene dengan tingkat AMH sebesar 95,85% dan untuk Provinsi sebesar 93,17 persen masih di atas dari Kabupaten Mamuju.

Tabel II - 29
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf Kabupaten Mamuju	%	N/A	92,78	93,15	94,65	93,13
Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Barat	%	N/A	92,79	92,85	93,59	93,17

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Mamuju memperlihatkan hasil yang cukup membaik. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Indikator angka rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang Pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat Pendidikan yang sedang diduduki.

Berdasarkan table dibawah memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah sebesar 7,69 tahun, meningkat pada tahun 2020 menjadi 7,95 tahun. Angka ini berada di atas angka rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat dan dibawah angka rata-rata Nasional. Rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat pada tahun 2020 adalah 7,89 Tahun, adapun rata-rata lama sekolah Nasional pada tahun 2020 adalah 8,48 Tahun atau lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mamuju. Jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan Kabupaten Mamuju tidak tamat SLTP atau masih kelas 1 (satu) SLTP, oleh karena itu untuk mencapai RLS maksimal 9 tahun (setara Wajar 9 tahun) masih memerlukan pembenahan pada sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 tertinggi juga dicapai oleh Kabupaten Majene (8,65 tahun) dan terendah Kabupaten Polewali Mandar (7,41 tahun). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mamuju yang bersekolah (dalam tahun) pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II - 30**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama sekolah Kab. Mamuju	Tahun	7,21	7,26	7,53	7,69	7,95
Rata rata lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	7,14	7,31	7,50	7,73	7,89
Rata rata lama sekolah Nasional	Tahun	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Tujuan mengukur indikator angka HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Tabel menunjukkan bahwa angka HLS mengalami peningkatan ditahun 2020 dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 13,19 persen.

Tabel II - 31**Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Angka Harapan Lama Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	Persen/Tahun	12,97	13,13	13,14	13,18	13,19
Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat	Persen/Tahun	12,34	12,48	12,59	12,62	12,77
Harapan Lama Sekolah Nasional	Persen/Tahun	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut ini merupakan data IPG di Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021.

Tabel II - 32
Indeks Pembangunan Gender (IPG Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional), Tahun 2016-2020

Kabupaten/Provinsi/Nasional	2016	2017	2018	2019	2020
Mamuju	-	90.37	90.37	90.64	90,57
Sulawesi Barat	89.35	89.44	90.05	89.76	89,43
Nasional	90,82	90,96	90.99	91.07	91.06

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju 2021

IPG di Kabupaten Mamuju pada tahun 2019 mencapai 90,64 dan mengalami penurunan menjadi 90,57 pada tahun 2020 jika dibandingkan IPG Sulawesi Barat tahun 2020 yang mencapai 89,43. Hal ini mengindikasikan persamaan dan kesetaraan gender di Kabupaten Mamuju sudah semakin tinggi.

2.2.2.6 Angka Usia Harapan Hidup

Ukuran statistik yang umum digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat adalah angka usia harapan hidup. Angka usia harapan hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Tolak ukur keberhasilan dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat. Selama periode 2016 hingga 2020, tercatat Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Mamuju tahun 2020 sebesar 67,52 Tahun.

Tabel II - 33
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Angka Usia Harapan Hidup				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Mamuju	Tahun	66,51	66,65	66,94	67,23	67,52
Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	64,31	64,34	90.05	89.76	89.43
Nasional	Tahun	70,98	71,15	90.99	91.07	91.06

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini berarti semakin besar pula permintaan akan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan lowongan pekerjaan.

Angkatan kerja Kabupaten Mamuju tahun 2020 sebesar 138.144 jiwa dengan komposisi bekerja sebesar 134.153 jiwa dan jumlah pengangguran sebesar 3.991 jiwa.

Tabel II - 34
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju, 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	127 841	123 483	134 460	138 144
Bekerja	124 778	120 230	130 879	134.153
Pengangguran	3 063	3 253	3 581	3.991

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2021

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dibanding angkatan kerja merupakan salah satu acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka memiliki implikasi social yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 2,46% dengan total jumlah pengangguran sebanyak 3.581 jiwa. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan yaitu 2,89 % dengan total jumlah pengangguran 3.991 jiwa dan masih dibawah rata-rata provinsi sebesar 3,32%. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga tenaga kerja yang ada belum terserap secara optimal. Tingkat pengangguran terbuka juga disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah lulusan angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Tabel II - 35**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2016	2017	2018	2019	2020
TPT Mamuju	Persen	N/A	2,4	2,46	2,46	2,89
TPT Sulawesi Barat	Persen	N/A	3,21	3,01	2,98	3,32

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka Kabupaten Mamuju tahun 2016 dan 2021

2.2.2.9 Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

Selama periode tahun 2016-2020 penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mamuju didominasi oleh sektor pertanian walaupun seiring dengan waktu menunjukkan pola cenderung menurun. Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 97,11% terjadi penurunan 0,23% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II - 36**Presentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020**

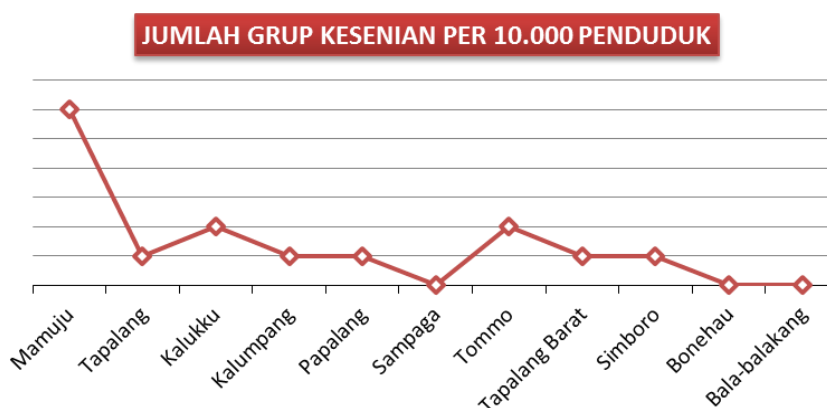
Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja	Persen	N/A	97,60	97,37	97,34	97,11

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka Kabupaten Mamuju tahun 2021

2.2.3 Fokus seni Budaya dan Olah raga**2.2.3.1 Seni dan Budaya**

Perkembangan Grup Seni dan Budaya Kabupaten Mamuju secara umum belum merata kecuali Kecamatan Mamuju. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya sehingga keberadaan seni dan budaya dapat berkembang di setiap kecamatan. Adanya budaya asli daerah yang harus dimasukkan dalam cagar budaya, agar terpelihara dari kepunahan dan generasi muda ikut dalam mengembangkan, serta lebih mengenal budaya daerahnya. Jumlah grup kesenian perkecamatan dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik II - 14
Jumlah Grup Kesenian Tahun 2018 Menurut Kecamatan
di Kabupaten Mamuju



Sumber: Dikpora Kabupaten Mamuju, 2019

2.2.3.2 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda adalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun dua tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu nilai 23,41% dan di pada tahun 2019 23,53%.

Tabel II - 37
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	22,53	23,30	23,41	23,53	NA

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Mamuju

2.2.3.3 Persentase Wira Usaha Muda

Pada tahun 2019 persentase wirausaha muda mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,76%.

Tabel II - 38
Persentase Wira Usaha Muda Kab. Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase wira usaha muda	%	10,76	11,64	11,70	11,76	NA

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Mamuju, 2021

2.2.3.4 Cakupan Pembinaan Olahraga

Pada tahun 2019 cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 50,00%.

Tabel II - 39
Cakupan Pembinaan Olahraga Kab. Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pembinaan Olahraga	%	49	49,50	49,75	50,00	NA

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Mamuju, 2021

2.2.3.5 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Pada tahun 2019 cakupan pelatih yang bersertifikasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 38,18%.

Tabel II - 40
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kab. Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	37,18	37,80	37,99	38,18	NA

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Mamuju, 2021

2.2.3.6 Cakupan pembinaan atlet muda

Pada tahun 2019 cakupan pembinaan atlet muda mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 50,00%.

Tabel II - 41
Cakupan pembinaan atlet muda Kab. Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pembinaan atlet muda	%	49	49,50	49,75	50,00	NA

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Mamuju

2.2.3.7 Jumlah atlet berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak ada perkembangan jumlah atlet berprestasi.

Tabel II - 42
Jumlah atlet berprestasi Kab. Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah atlet berprestasi	atlet	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Mamuju

2.2.3.8 Jumlah prestasi olahraga

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Peningkatan kualitas pelatih dan kuantitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Diharapkan agar pemerintah mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan di kabupaten Mamuju.

Tabel II - 43**Jumlah prestasi olahraga Kab. Mamuju Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah prestasi olahraga	Jenis	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Mamuju

2.2.3.9 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya dalam setiap tahunnya dilaksanakan dari tahun 2017 - 2020 pelaksanaan festival seni dan budaya hanya dilaksanakan sebanyak 15 kali kegiatan.

2.2.3.10 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi

Benda cagar budaya yang di lestarikan sebanyak 26 benda, Situs Cagar budaya yang dilestarikan dan adapun jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan 6 kawasan pekuburan raja, adapun jumlah karya budaya yang direvitalisasi sebanyak 38 berupa data karya budaya, tetapi belum didaftarkan

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten mamuju, baik pada urusan wajib, urusan pilihan, dan Urusan Penunjang. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan. Untuk urusan Pilihan yaitu bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian. dan Urusan Penunjang yaitu Bidang Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum.

2.3.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

1) APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009).

APK PAUD Kabupaten Mamuju tahun 2016 - 2020 cenderung meningkat.

Pada tahun 2016 capaian kinerja APK PAUD Kabupaten Mamuju mencapai 58,34% mengalami kenaikan 1.74% pada tahun 2016 yang mencapai 60,08% hanya pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 43,56% hal ini disebabkan masih banyak orang tua anak usia PAUD menganggap Pendidikan anak usia dini tidak penting Sedangkan di tahun 2018 – 2019 dapat ditingkatkan Kembali melalui program-program prioritas Pendidikan seperti sosialisasi tentang pentingnya Pendidikan anak usia dini, pembangunan sarana dan prasarana PAUD terus ditingkatkan dimana sarana dan prasarana PAUD sudah dapat dibiayai melalui dana Desa. Tetapi masih belum optimal dilihat dari capaian target pada tahun 2020 dimana APK PAUD Kabupaten Mamuju menargetkan 66,90% hal ini disebabkan karena jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk anak usia 4 – 6 tahun.

2) Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah, selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT Kabupaten Mamuju tahun 2016 - 2020 cenderung stabil dan mencapai target yang ditetapkan,

3) Angka partisipasi kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, Misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan

tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

a) APK SD/MI/Paket A

APK SD/MI/PAKET A Kabupaten Mamuju tahun 2016 - 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2016 capaian kinerja APK SD/MI/PAKET A Kabupaten Mamuju mencapai 107,05% hanya pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 112,11%. Pada tahun 2018 capaian kinerja APK SD/MI/PAKET A Kabupaten Mamuju mencapai 109,93% hanya pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 106,44% Sedangkan di tahun 2019 - 2020 Kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 109,90%.

Capaian target pada tahun 2020 telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini dipengaruhi adanya anak diluar kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A baik formal maupun non formal.

b) APK SMP/MTs/Paket B

APK SMP/MTS/PAKET B Kabupaten Mamuju tahun 2016 - 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2016 - 2017 capaian kinerja APK SMP/MTS/PAKET B Kabupaten Mamuju mengalami penurunan. Pada tahun 2018 - 2019 capaian kinerja APK SMP/MTS/PAKET B Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan sebesar 25,1% pada tahun 2018 sebesar 80,2% dan di tahun 2019 105,3%. Namun capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 84,08%. Hal ini dipengaruhi kurang minat anak kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS/PAKET B baik formal maupun non formal.

4) Angka partisipasi murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk

kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

a) APM SD/MI/Paket A

APM SD/MI/PAKET A Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 – 2020, tertinggi tercapai pada tahun 2018 yaitu 97,14%. Mengalami penurunan 5,77% pada tahun 2019 sebesar 91,37%. Kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar 96,03%.

b) APM SMP/MTs/Paket B

APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 – 2020, tercatat pada tahun 2017 APM SMP/MTs/Paket B terendah dibandingkan tahun lainnya dan tahun tertinggi pada tahun 2016. Pada tahun 2019 APM SMP/MTs/Paket B sebesar 86,68% atau meningkat 4,26% dibandingkan tahun sebelumnya 2018 yaitu 82,42%. Kemudian mengalami penurunan yang drastis pada Tahun 2020 sebesar 66,76%, disebabkan karena banyak factor yang mempengaruhi minat penduduk usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya dan mengaggap pendidikan cukup pada jenjang SD saja.

5) Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

a) APS SD/MI/Paket A

APS SD/MI/PAKET A Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 – 2020, cenderung menurun namun telah melampaui target kinerja yaitu 100%. Pada tahun 2019 tercatat capaian kinerja sebesar 109,37% kemungkinan ini dikarenakan beberapa jumlah murid usia 7-12 tahun bukan dari kabupaten Mamuju atau belum terdata dalam sistem kependudukan Kabupaten Mamuju.

b) APS SMP/MTs/Paket B

APS SMP/MTs/Paket B Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 – 2020, cenderung menurun namun telah melampaui target kinerja yaitu 100%. Pada tahun 2019 tercatat capaian kinerja sebesar 100,59% kemungkinan ini dikarenakan beberapa jumlah murid usia 13-15 tahun bukan dari kabupaten Mamuju atau belum terdata dalam sistem kependudukan Kabupaten

Mamuju.

6) Angka Putus sekolah

Angka Putus Sekolah (APtS) dimaknai sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Diinterpretasikan bahwa semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi Pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Angka Putus Sekolah pendidikan dasar menunjukkan angka yang kurang baik. Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD sederajat selama kurun waktu 2016–2020 cenderung meningkat pada angka 0,4% pada tahun 2016. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, perkembangan Angka Putus Sekolah SMP selama kurun waktu 2016–2020 fluktuatif namun cenderung meningkat.

a) APS SD/MI

Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD sederajat selama kurun waktu 2016 –2020 cenderung meningkat pada angka 0,20% pada tahun 2019, kemudian pada Tahun 2020 sebesar 0,02%, hal ini angka putus sekolah jenjang pendidikan SD sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,10%.

b) APS SMP/MTs

Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SMP sederajat selama kurun waktu 2016–2019 cenderung meningkat pada angka 1,45% pada tahun 2019. Berdasarkan capaian kinerja di tahun 2020 angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SMP belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,04%.

Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah baik jenjang SD maupun SMP adalah alasan ekonomi atau

ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial dan menganggap Pendidikan cukup sampai di jenjang SD.

7) Angka Kelulusan AL SD/MI dan SMP/MTs

Pelaksanaan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran merupakan implementasi dari fungsi manajemen. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas yang indikator outputnya adalah Angka Kelulusan (AL). Oleh karena itu angka kelulusan ini menggambarkan capaian atas keberhasilan satuan pendidikan menamatkan sejumlah peserta didik atas ketuntasan kriteria dan standar nilai yang ditetapkan. Kondisi angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTS tahun 2016 - 2020, menunjukkan capaian 100% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi kesiapan siswa menghadapi/menelaah soal dalam ujian nasional atau telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

8) Angka Melanjutkan AM SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sejak 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan namun di tahun 2020 mengalami penurunan tetapi telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.

9) Sekolah pendidikan kondisi bangunan baik

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam rangka mencapai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Penyediaan bangunan gedung yang memadai dan memenuhi standar merupakan salah satu upaya dalam memenuhi ketentuan minimum standar sarana prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah.

a) Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Kondisi bangunan sekolah untuk jenjang Pendidikan SD/MI periode 2016 – 2020 cenderung menurun hal ini disebabkan bangunan sekolah yang berada di wilayah kami itu banyak mengalami kerusakan akibat Bencana alam dan minimnya biaya perawatan. pada tahun 2019 tercatat jumlah bangunan SD/MI dalam kondisi baik sebanyak 231 Unit. Capaian tersebut belum

memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 333 Unit, sedangkan pada tahun 2020 tercatat jumlah bangunan SD/MI dalam kondisi baik sebanyak 309 Unit. Capaian tersebut juga belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 333 Unit hal ini disebabkan rencana usulan DAK yang tidak disetujui sehingga berdampak pada capaian pemenuhan target dan juga Data Dapodik yang tidak memenuhi syarat bantuan karena input data Dapodik tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Dapodik merupakan satu-satunya penilaian/tolak ukur pemberian bantuan rehabilitasi sehingga kurangnya biaya anggaran setiap tahunnya.

b) Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Kondisi bangunan sekolah untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs periode 2016 – 2020 mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 92 unit, tercatat pencapaian di tahun 2020 sebanyak 92 unit yang bangunan SMP/MTs dalam kondisi baik.

10) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai Pada tingkat pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Di tahun 2020 ketersediaan sekolah Kabupaten Mamuju memiliki jumlah gedung sekolah sebanyak 309 unit untuk SD dan 92 unit untuk tingkat SMP, Kondisi rasio ketersediaan sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2020 tercatat 1:100 atau telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

11) Rasio Guru/Murid sekolah pendidikan dasar

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidikan. Angka ini menggambarkan beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.

Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan

jumlah sekolah yang bersangkutan menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sebaliknya nilai rasio yang rendah menunjukkan adanya penguasaan kelas yang lebih sehingga mutu pengajaran cenderung membaik.

Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar pada periode 2018-2020 mengalami penurunan, pada tahun 2020 Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar di Kabupaten Mamuju tercatat rasionya 1 : 20 namun sejalan dengan target kinerja terhadap indikator tersebut diatas.

12) Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata sekolah dasar

Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata diartikan sebagai perbandingan dari jumlah guru pada satuan pendidikan (SD sederajat) per kelas dengan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan (SD sederajat). Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas pada suatu sekolah atau daerah tertentu dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi tetapi penguasaan kelas oleh guru semakin tidak efektif.

Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata sekolah dasar Kabupaten Mamuju dari tahun 2018 - 2020 mengalami peningkatan dan menunjukkan pengelolaan kelas yang semakin efektif. Dengan angka capaian yang menunjukkan pada satuan pendidikan (SD sederajat) mengatur jumlah kelompok belajar sesuai ketentuan Standar Sarana Prasarana Pendidikan sehingga penguasaan materi bagi siswa memperlihatkan kompetensinya dan bagi guru dapat memperlihatkan penguasaan bahan ajar/materi. Pada tahun 2020 capaian rasio guru/murid per kelas rata-rata sebesar 1 : 20. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

13) Rasio Guru terhadap murid per kelas rata- rata

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Kabupaten Mamuju tahun 2018 - 2020 cenderung menurun hal ini disebabkan sebaran guru di beberapa

wilayah terpencil belum merata. Pada tahun 2020 capaian guru terhadap murid per kelas rata-rata sebesar 1 : 20. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

14) Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Kabupaten Mamuju tahun 2016 - 2020 cenderung stabil, pada tahun 2020 capaian kinerja pada indikator Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar tercatat sebesar 100%. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

15) Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Angka melek huruf dapat dihitung dari membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian dikalikan dengan seratus.

Angka melek huruf Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 angka melek huruf Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 98,37%. Pencapaian tersebut telah melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 97,04%. Hal ini membuktikan tingkat kesadaran masyarakat terhadap begitu pentingnya baca tulis seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat.

16) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh karena itu Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan peningkatan persentase guru yang berkesempatan memperoleh kualifikasi S1/D-IV disebabkan peran dan koordinasi dari pusat ke provinsi dan Kabupaten/kota memberikan perhatian dan layanan dengan memberi kesempatan/izin untuk melanjutkan pendidikan sebagai tuntutan dari Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tuntutan Undang-

Undang Guru dan Dosen. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 94,80%. Pencapaian tersebut telah melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 76,00%.

Tabel II - 44
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	60,08	43,56	48,17	54,14	54,97
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	107,05	112,11	109,93	106,44	109,90
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	78,51	74,72	80,2	105,3	84,08
4	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100	100	100	100	100
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	94,14	92,94	97,14	91,37	96,03
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	88,39	73,41	82,42	86,68	66,76
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	122,34	118,96	114,34	109,37	98,14
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B	Persen	107,15	104,97	102,78	100,59	86,39
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,04	0,05	0,05	0,20	0,02
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,03	0,07	0,07	1,45	0,14
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	101,80	108,74	117,08	100	100
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	109,36	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	unit	323	232	232	231	309
16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	unit	87	90	90	90	92
17	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	rasio	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100
18	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	rasio	1 ; 176	1 ; 176	1 ; 175	1 ; 175	1:174

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	rasio	1 ; 20	1 ; 27	1 ; 27	1 ; 27	1:20
20	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	rasio	1 ; 20	1 ; 27	1 ; 26	1 ; 25	1:20
21	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	rasio	1 ; 22	1 ; 19	1 ; 19	1 ; 19	1:20
22	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	rasio	1 ; 28	1 ; 27	1 ; 27	1 ; 26	1:20
23	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100	100	100	100	100
24	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	97,76	97,83	97,86	98,02	98,37
25	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Orang	175,019	180,671	186,077	191,560	N/A
26	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	72,74	73,91	75,74	82,84	94.80

Sumber : BPS Kab. Mamuju Tahun 2020 & DIKPORA Kab. Mamuju Tahun 2020

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan.

1) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator sosial yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program kesehatan ibu dan anak, sebab AKB berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi.

Salah satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dalam setiap 1.000 kelahiran hidup. Tingginya AKB merupakan indikator buruknya derajat kesehatan masyarakat secara umum sebagai dampak dari rendahnya pelayanan kesehatan dan ketidakmampuan secara ekonomi. Jumlah kematian bayi dalam 2 tahun terakhir dapat ditekan melalui program-program dibidang kesehatan. Berdasarkan table dibawah laporan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2020 bahwa jumlah kematian bayi sebanyak 4 orang. Perkembangan angka

kematian bayi selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend yang fluktuatif. Tercatat pada tahun 2019 sempat mengalami kenaikan pada angka mencapai 3,2/1000 KH yang ditahun sebelumnya pada angka 1,7/1000 KH dan mengalami penurunan di Tahun 2020 pada angka 0,7/1000 KH. Namun capaian tersebut dikatakan belum maksimal jika belum mencapai 0/1000 KH.

2) Angka Kematian Balita

Angka kematian Balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi, kecelakaan.

Angka Kematian Balita (AKBA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (59 bulan) selama satu tahun tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Pada table dibawah dapat dilihat jumlah kematian balita di Kabupaten Mamuju Tahun 2020 sebanyak 1 orang. Angka kematian Balita Tahun 2016 – 2020 cenderung fluktuatif, dari tahun 2016 sebesar 1.1/1000KH dan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 0,3 per 1.000 KH, Tahun 2019 sebesar 0,5 per 1000 KH. Ini disebabkan penyakit tertentu (ISPA) yang merupakan kasus tertinggi di puskesmas dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,1 per 1000 KH. Capaian tersebut sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 0,1 per 1000 KH.

3) Angka Kematian Neonatal

Secara garis besar kematian bayi dari sisi penyebabnya ada 2 macam yaitu endogen (*neonatal*) dan kematian eksogen (*post neonatal*). Kematian Neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan, sedangkan kematian post neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Tabel dibawah menunjukkan angka kematian Neonatal Tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 5,6 per 1.000 KH, sedangkan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 10,1 per 1000 KH, hal ini karena adanya penyakit bawaan yang didapatkan selama masa kehamilan. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,1 per 1000 KH.

4) Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebabsebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Jumlah kematian ibu (AKI) menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Pada Tabel dibawah menjelaskan bahwa angka kematian ibu di Tahun 2019 sebesar 153 per 100.000 kelahiran hidup, ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar 246 per 100.000 kelahiran hidup, namun mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 193 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini kemungkinan disebabkan Adanya 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat dirujuk, Terlambat di tangani).

5) Rasio Posyandu per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini

Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 410 dan yang aktif sebanyak 151 atau sebesar 36,83% jumlah posyandu pratama sebanyak 19 unit, Madya 240 unit, Purnama 142 unit dan Mandiri 9 unit.

Berdasarkan table dibawah pada periode tahun 2016 – 2020 Rasio Posyandu per satuan balita masih fluktuatif. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kualitas pelayanan posyandu yang belum maksimal. Pada tahun 2020 Rasio Posyandu per satuan balita tercatat 15,4 per 1000 penduduk balita dan melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 14,2 per 1000 penduduk balita.

6) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 75 Tahun 2014 tentang persyaratan Puskesmas pada Pasal 9, dijelaskan bahwa pada setiap kecamatan minimal harus memiliki satu puskesmas, dan dalam kondisi tertentu

pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas yang dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Sementara berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan.

Pada table dibawah periode tahun 2016 – 2020 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk cenderung menurun. Pada tahun 2020 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk tercatat mengalami penurunan sebanyak 0,27 per 1000 penduduk, dibandingkan tahun 2019 sebanyak 0,49 per 1000 penduduk.

7) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kab.Mamuju tahun 2020 tercatat ada 4 jumlah Rumah Sakit Umum terdiri dari RSUD Kab.mamuju (1 Unit), Rumah Sakit Umum Provinsi (1 Unit) dan Rumah Sakit Swasta Mitra Manakarra (1 Unit) dan Rumah Sakit Bhayangkara (1 unit) untuk Rumah Sakit Khusus belum ada di Kabupaten Mamuju.

Table dibawah menjelaskan bahwa pada periode tahun 2016 – 2020 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk mengalami penurunan pada tahun 2020 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk tercatat sebesar 0,013 per 1000 penduduk.

8) Rasio Dokter per satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 jumlah dokter 68 orang dan pada tahun 2019 jumlah dokter meningkat menjadi 136 orang, kemudian pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 149 orang. Jumlah tenaga medis ini terdiri atas dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.

Tabel dibawah menjelaskan bahwa pada periode tahun 2016 – 2020 Rasio Dokter per satuan Penduduk cenderung menurun. pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,26 per 1000 penduduk dibandingkan sebelumnya di tahun 2018 sebesar 0,13 per 1000 penduduk. Namun pencapaian di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,24 per 1000 penduduk, hal ini kemungkinan disebabkan ketersediaan tenaga dokter sangat terbatas.

9) Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Khususnya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan, ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih sangat kurang seperti tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga Farmasi, dan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis). Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan lainnya. Ini disebabkan karena daerah tersebut masih kurang diminati oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di daerah tersebut selalu berusaha untuk pindah ke daerah perkotaan dengan berbagai macam alasan yang mereka ajukan.

Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dengan melakukan penugasan khusus namun beberapa daerah tetap kosong peminat untuk bertugas di daerah tersebut.

Pada table diatas menjelaskan bahwa pada periode tahun 2018 – 2020 Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,50 per 1000 penduduk dibandingkan tahun 2019 sebelumnya hanya sebesar 0,47 per 1000 penduduk.

10) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga Kesehatan yang kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Diperkirakan sekitar 15-20% ibu hamil akan mengalami komplikasi kebidanan. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani. Resiko tinggi pada ibu hamil adalah keadaan ibu hamil yang mengancam kehidupannya maupun janinnya, misalnya umur, paritas, interval dan tinggi badan. Sedangkan yang dimaksud dengan komplikasi pada proses persalinan

adalah keadaan dalam proses persalinan yang mangancam keadaan ibu maupun janinnya, misalnya perdarahan, preklamsia (keracunan kehamilan), infeksi jalan lahir, letak lintang, partus lama dan lain-lain.

Berdasarkan laporan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tahun 2020 bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani berjumlah 40,2% mengalami penurunan dari tahun 2019 dimana cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani berjumlah 65,4%.

11) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2020 sebesar 75,7% mengalami penurunan dari tahun 2019 dimana cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 89,4%. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi diantaranya jarak dengan fasilitas kesehatan, alat transportasi, letak demografi daerah dan pengetahuan mencari penolong persalinan yang aman dan pengetahuan tersebut mempengaruhi keputusan dalam meminta bantuan penolong persalinan.

12) Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) selama 5 (Lima) tahun cenderung menurun, bahkan di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastic sebesar 39,2% yang dimana perbedaannya cukup jauh di tahun 2019 yaitu sebesar 80,4%.

Kejadian ini disebabkan beberapa hal diantaranya karena kurangnya peran aktif tenaga kesehatan dan masih adanya masyarakat yang belum mengerti manfaat pentingnya imunisasi bagi bayi, balita dan ibu hamil terutama yang jauh dari sarana Kesehatan.

13) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Mamuju yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100% sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air bersih dll (Intervensi Sensitif dan Spesifik). Disisi lain masih terdapat data anak balita yang mengalami stunting di wilayah kabupaten mamuju.

14) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak yaitu 95,70% mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 75,6%, menurun sebanyak 20,1% Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ragu mengenai kehalalan vaksin.

Di Berdasarkan table di atas diharapkan masyarakat diberikan edukasi terkait pentingnya imunisasi di tahun-tahun mendatang mengingat pentingnya kekebalan anak terhadap penyakit campak yang merupakan investasi masa depan.

15) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Acute Flaccid Paralysis atau lumpuh layu merupakan kelumpuhan atau paralisis secara fokal. Dari laporan Berdasarkan laporan Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Tahun 2019 terjadi penurunan kasus, dimana ditemukan 9 kasus AFP. Sedangkan pada tahun 2018 Jumlah 10 Kasus AFP. Pencapaian tersebut telah melampaui target yaitu 10 per 100.000 penduduk namun belum maksimal karena belum mencapai angka 0 per 100.000 penduduk.

Pemerintah Daerah terus melakukan penanganan diantaranya melakukan pelacakan kontak yang di curigai, memperluas jejaring informasi terkait kasus AFP dan memutus mata rantai penularan virus.

16) Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli). Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Populasi yang rentan terserang Pneumonia adalah anak-anak yang kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun atau orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi). Sampai saat ini diketahui bahwa 80% - 90% dari seluruh kasus kematian ISPA disebabkan Pneumonia dan Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian bayi dan balita.

Berdasarkan table di atas cakupan balita pneumonia yang ditangani pada tahun 2016 - 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah perkiraan penderita Pneumonia pada balita sebesar 5,44%, yang dimana tahun sebelumnya penderita Pneumonia pada balita mencapai sebesar 9,48%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan saluran pernapasan, pemberian makanan bergizi pada bayi dan balita.

17) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

TB atau yang dulu dikenal dengan TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). TB dapat menyerang siapa saja, terutama menyerang usia produktif/masih aktif bekerja (15-50 tahun) dan anak-anak.

Berdasarkan table di atas menjelaskan bahwa pada periode 2016 - 2020 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Mamuju cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 98,87% mengalami peningkatan di Tahun 2019 sebesar 107,51 hal ini disebabkan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA aktif masif. Dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 sebesar 45,65%, hal ini semua disebabkan beberapa aspek social budaya yang melatar belakangi pertimbangan masyarakat dalam upaya pencarian pengobatan dan dianggap berkaitan dengan rendahnya cakupan penemuan TBC BTA yaitu masalah ekonomi, pendidikan/ pengetahuan, dan persepsi, kebiasaan/adat istiadat, dan kepercayaan, serta stigma social dan akses jangkauan pelayanan kesehatan.

18) Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan fluktuatif setiap tahunnya dari tahun 2016-2020. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan kesehatan dan dilaporkan di program terus meningkat.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan tidak tersedia data temuan, hal ini kemungkinan disebabkan antara lain, belum adanya kewajiban pelaporan dari Rumah Sakit dan layanan Kesehatan dalam penemuan dan tatalaksana TB (*mandatory notification*), belum mengembangkan jejaring eksternal dalam program TBC, jejaring internal rumah sakit yang masih lemah, sehingga beberapa kasus TBC yang ditemukan di beberapa poli RS tidak tercatat dan dilaporkan dengan baik di unit DOTS RS;

19) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Laporan kematian yang masuk karena Tuberkulosis pada tahun 2016 – 2020 masih fluktuatif. Tercatat pada tahun 2016 mencapai 2 per 100.000 penduduk dan meningkat di tahun 2017 sebesar 11 per 100.000 penduduk, namun pada tahun 2018 mencapai 8 per 100.000 penduduk dan menurun di tahun 2019 sebesar 4,56 per 100.000 penduduk. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 8 per 100.000 penduduk hal ini kemungkinan disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TBC, keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat, pengobatan yang tidak tuntas sehingga kematian semakin tinggi.

20) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 – 2019 telah mengalami stagnan yaitu 100%, namun di tahun 2020 terjadi penurunan yaitu 45,65%, hal ini tidak sesuai target yang ditetapkan di tahun 2020 yaitu 100%.

21) Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat di tahun 2020 proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS yaitu 94,50%. Dan pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 70%.

22) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus Dengue, yang ditularkan melalui perantara vector (Nyamuk *Aedes Aegypti*). Pada tahun 2016 data capaiannya tidak tersedia, namun seiring dengan pencapaian tersebut, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD telah memenuhi target yang direncanakan yaitu 100% dari tahun 2017-2020 capaian kinerja selama empat tahun berturut-turut stagnan di angka 100%. Tingkat keberhasilan capaian cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dipengaruhi antara lain, Jumlah penderita DBD yang ditangani dalam kurung waktu sesuai dengan SOP, adanya pemutusan rantai penularan melalui penyemprotan fogging DBD.

23) Penderita diare yang ditangani

Diare merupakan penyakit menular berbasis lingkungan. Penyakit ini akan tinggi apabila kondisi sanitasi lingkungan yang rendah dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Pada periode tahun 2016 – 2020 capaian kinerja penderita diare yang ditangani mengalami fluktuatif naik-turun jumlah penderita. Namun Pada tahun 2020 tercatat jumlah penderita diare yang ditangani mengalami peningkatan secara signifikan berjumlah 2.729 orang, dari jumlah yang tercatat di tahun 2019 sebesar 552 orang.

24) Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Walaupun angka kesakitan dan kematian akibat malaria di Indonesia saat ini cenderung menurun, namun demikian Pemerintah memandang malaria masih merupakan ancaman terhadap status kesehatan masyarakat terutama pada masyarakat yang hidup di daerah terpencil. Berdasarkan table diatas Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tahun 2019 angka kejadian malaria sebesar 0,2 per 1000 penduduk terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 0,3 per 1000 penduduk (tidak ada penderita malaria usia balita). Namun tidak ada kematian akibat malaria sejak tahun 2016 – 2020 pencapaian tersebut dipengaruhi penemuan Dini kasus malaria, Penyelidikan Epidemiologi Malaria, Surveilans Migrasi

25) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Virus imunodefisiensi manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS virus ini menyerang kekebalan/imunitas tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi, dengan kata lain kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi (kekurangan) system imun. Perlu diketahui bahwa tubuh menjadi terinfeksi HIV bukan berarti kita menderita AIDS.

Pada periode 2016 – 2020 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi sudah sesuai target program sebesar < 0.5. Namun capaian ini masih rendah disebabkan oleh Keterbatasan layanan HIV/AIDS di pelayanan Kesehatan.

26) Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

Pada periode tahun 2016 – 2020 Penggunaan kondom bagi hubungan seks berisiko tinggi terakhir Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat Penggunaan kondom pada hubungan seks

berisiko tinggi terakhir sebesar 89%. Namun capaian tersebut belum sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu sebesar 95%, hal ini kemungkinan disebabkan Keterbatasan Kondom yang Tersedia di Layanan HIV dan IMS dan beberapa populasi kunci menolak menggunakan kondom.

27) Proporsi jumlah penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

Pada periode tahun 2016 – 2020 Proporsi jumlah penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat Proporsi jumlah penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS sebesar 86%. Namun capaian sudah sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu sebesar 85%, hal ini kemungkinan disebabkan mulai adanya Sosialisasi pada penduduk Usia 15 - 24 Tahun terutama di sekolah – sekolah dan perguruan tinggi

28) Cakupan Puskesmas

Berdasarkan Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Mamuju tahun 2020 tercatat Jumlah Puskesmas Kesehatan Masyarakat sebanyak 22 Unit yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat rawat inap sebanyak 10 unit, Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap 12 unit.

Berdasarkan table di atas Cakupan Puskesmas pada tahun 2018 – 2020 stagnan pada angka 100% setiap tahunnya dan telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.

29) Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Berdasarkan Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Mamuju tahun 2020 tercatat Jumlah Puskesmas Kesehatan Masyarakat Pembantu sebanyak 54 Unit. Cakupan Puskesmas Pembantu pada tahun 2018 – 2020 stagnan pada angka 100% setiap tahunnya dan telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.

30) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

K4 adalah merupakan gambaran seberapa besar ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar dengan paling sedikit 4 (empat) kali kunjungan selama kehamilan dengan kriteria sekali pada trimester pertama, sekali pada trisemester kedua dan dua kali pada trisemester ketiga.

Berdasarkan table diatas laporan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan tahun 2020 Cakupan kunjungan K4 sebesar 72,7%, mengalami penurunan dari tahun 2019, dimana cakupannya sebesar 88,3%. Hal ini disebabkan masih kurangnya edukasi masyarakat terkait pemeriksaan kesehatan ibu hamil.

31) Cakupan pelayanan nifas

Cakupan kunjungan nifas merupakan perawatan ibu maternal pasca persalinan, Kunjungan nifas sering disama artikan dengan kunjungan neonatus karena waktunya yang bersamaan. Penurunan angka kematian ibu dapat ditempuh dengan menciptakan kondisi ibu selama kehamilan, persalinan dan post-partum atau nifas menjadi aman dan terpantau oleh Petugas Kesehatan.

Berdasarkan table diatas Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tahun 2020 cakupan pelayanan ibu nifas tercatat sebesar 74,0%, terjadi penurunan dari tahun 2019 yakni sebesar 89,3%.

32) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Kompetensi Nakes dalam menangani bayi baru lahir masih rendah, deteksi faktor resiko komplikasi pada ibu hamil masih rendah serta kualitas Kesehatan Ibu hamil masih rendah merupakan permasalahan dalam penanganan neonatus dalam komplikasi. Berdasarkan data capaian pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi disebabkan oleh salah satunya faktor medik secara langsung yaitu keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten serta menyangkut sarana dan prasarana dalam menangani bayi baru lahir bermasalah yang belum adekuat. Masalah kesehatan bayi baru lahir tidak terlepas dari kualitas kesehatan ibu pada sebelum dan saat hamil

Berdasarkan table II-45 pada tahun 2016 – 2020 capaian cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 21,7%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 31,0% dan menurun pada tahun 2020 cakupan neonatus dengan komplikasi sebesar 25,4%. Hal ini dipengaruhi karena masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap dukun.

33) Cakupan pelayanan anak balita

Anak balita adalah anak berumur 12 - 59 bulan. Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8

x dalam setahun yang tercatat di Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA-KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan tertinggi panjang badan BBTB.

Berdasarkan table diatas dapat dilihat perkembangan Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kab. Mamuju tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020 cakupan pelayanan anak balita sebesar 62,5%, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orangtua terkait pemeriksaan kesehatan anak balitanya, kurangnya edukasi mengenai pentingnya imunisasi, mengukur tinggi badan, kurangnya waktu orangtua, kualitas pelayanan kesehatan, dan tidak adanya dukungan keluarga.

34) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin pada tahun 2016 – 2020 cenderung stagnan, di tahun 2020 tercatat cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin mencapai 100%. Dan telah memenuhi target kinerja di tahun 2020 yaitu sebesar 100%.

35) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

Perubahan definisi operasional penjangkaran dari yang awalnya hanya siswa baru menjadi seluruh siswa menyebabkan capaian kinerja cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat pada tahun 2016 – 2020 cenderung fluktuatif, tercatat di tahun 2020 capaian kinerja cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 56,07% masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

36) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Di tahun 2020 tercatat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 100%, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 100%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya masyarakat miskin menjadi peserta JKN, dan masyarakat mampu yang masuk kategori masyarakat miskin JKN.

37) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) pada tahun 2016 sampai dengan 2020 stagnan di angka 100% selama 5 tahun berturut-turut.

38) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sejak tahun 2016 – 2020 sejauh ini tidak ada permasalahan yang ditemukan dikarenakan tidak adanya kasus KLB. Terlihat dari pencapaian 3 tahun yaitu sebesar 100% hal ini dipengaruhi menurunnya Frekuensi KLB, menurunnya jumlah kasus pada setiap KLB, menurunnya angka kematian di setiap kasus KLB dan menyempitnya penyebaran wilayah KLB.

Tabel II - 45

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	2.6/1000 KH	6,07/1.000 KH	9 (1,7/1.000 KH)	17 (3,2/1.000 KH)	4 (0,7/ 1.000 KH)
2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	942/1000 KH	994/1.000 KH	961/1.000 KH	930/1.000 KH	N/A
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	1.1/1000K H	1,3/1.000 KH	2 (0,3/1.000 KH)	3 (0,5/1.000 KH)	1 (0,1/ 1000 KH)
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	8.2/1000K H	3,9/1.000 KH	30 (5,6/1000)	53 (10,1/1000)	29 (5,1/1000)
5	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	131/100000 KH	94,9/100.000 KH	13 (246/100.000KH)	8 (153/100.000 KH)	11 (193/100.000 KH)
6	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 Penduduk Balita	14.07/1.000 PDDK BALITA	15/1.000 PDDK BALITA	15/1.000 PDDK BALITA	14,9/1.000 PDDK BALITA	15,4/1000 PDDK BALITA
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	0,28/1000 PDDK	0.27/1.000 PDDK	0,49/1.000 PDDK	0,49/1.000 PDDK	0,27/1000 Penduduk
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	0,01/1000 PDDK	0,01/1000 PDDK	0,014/1.000 PDDK	0,014/1.000 PDDK	0.013/1000 PDDK
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	0.23/1000 PDDK	0.15/1000 PDDK	0,13/1.000 PDDK	0,26/1.000 PDDK	0,24/1000 PDDK
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	0,58/1000 PDDK	0.35/1.000 PDDK	0,24/1.000 PDDK	0,47/1.000 PDDK	0,50/1000 PDDK
11	Cakupan	Persen	52,90	58,8	765 (47,2)	783 (65,4)	623 (40,2)

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
	komplikasi kebidanan yang ditangani						
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	74,70	86,0	5198 (70,9)	5106 (89,4)	5595 (75,7)
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	82,7	77,20	78,20	80,4	39,2%
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100
15	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Kkal/kapita/hari	2019,7	2116,7	2004,6	1861,4	N/A
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	82,50	91,10	96,10	95,70	75,6%
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	N/A	10/100.000 PDDK	10/100.000 PDDK	9/100.000 PDDK	N/A
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	4,44	5,46	9,10	9,48	5,44
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	80	99,20	98,87	107,51	45,65
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	160/100.000 PDDK	-	188/100.000 PDDK	215/100.000 PDDK	160/100.000 PDDK
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	2/100.000 PDDK	11/100.000 PDDK	8/100.000 PDDK	4,56/100.000 PDDK	10/100.000 PDDK
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	410	100	100	100	45,65
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	45,83	51,48	52,56	67,65	94,50
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	N/A	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani	Orang	809	667	562	552	2.729
26	Angka kejadian Malaria	Per 1.000 Penduduk	API<1 /1.000	API<1 /1.000	API<1 /1.000	API<1 /1.000	API<1 /1.000
27	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	100	0	0	0	N/A
28	Prevalensi	Per total	0,00018	0,00015	0,0022	0,0022	0,0021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
	HIV/AIDS (persen) dari total populasi	populasi					
29	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Persen	47	52	67	80	89
30	Proporsi jumlah penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	36	45	60	79	86
31	Cakupan puskesmas	Persen	100	100	100	100	100
32	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	100	100	100	100	100
33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	72,7	75,0	5275 (65,1)	5283 (88,3)	5629 (72,7)
34	Cakupan pelayanan nifas	Persen	79,2	88,3	5176 (74,1)	5100 (89,3)	5470 (74,0)
35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	31,3	23,4	227 (21,7)	253 (31,0)	268 (25,4)
36	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	90,8	72,9	15.938 (76,1)	18.972 (72,8)	15.754 (62,5)
37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	96,2	100	100	100	100
38	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	88,80	84,30	90	74,3	56,07
39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	57,66	58,70	59,50	64,50	100
40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100
41	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	N/A	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2021

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota tentang urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang mencakup: Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Air Limbah; Drainase; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang.

Salah satu kebijakan dalam RPJMD yaitu: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan. Fokus pada urusan pekerjaan umum adalah peningkatan pembangunan jalan dan jembatan; peningkatan fungsi sarana dan prasarana drainase; peningkatan sarana air minum dan sanitasi.

Secara umum kondisi pelayanan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Mamuju masih dalam kondisi belum optimal. Kondisi ini terlihat dari beberapa capaian kinerja indikator yang cukup rendah. Capaian pelayanan urusan pekerjaan umum dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Jalan

Untuk mendukung program percepatan pembangunan pada wilayah pelosok dan perbatasan guna mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Mamuju harus didukung dengan kondisi infrastruktur yang memadai seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Mamuju. Infrastruktur jalan merupakan sarana vital untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lain. Semakin baik mutu jalan akan semakin cepat, mudah dan murah biaya angkutan barang/ jasa dari dan ke suatu daerah. Siklus kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat sehingga perekonomian dapat berkembang pesat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/97/KPTS/1/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Mamuju, bahwa panjang jalan di Kabupaten Mamuju sebesar 666,86 km.

Untuk penetapan ruas jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Mamuju pada tahun 2016-2020 masih menggunakan panjang jalan yang secara keseluruhan 666,86 km. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju, bahwa kondisi jalan baik di Kabupaten Mamuju menunjukkan trend Penurunan dari tahun ketahun dari 30% pada tahun 2017 menjadi 32% pada tahun 2018 dan 47% di tahun 2020. Hal ini berarti masih ada 53% dari 666,86 km jalan rusak di Kabupaten Mamuju atau masih ada 353,43 km ruas jalan di Kabupaten Mamuju dalam keadaan Tidak Baik. Penyebab utama kerusakan jalan di Kabupaten Mamuju antara lain adalah Kapasitas Jalan tidak sesuai dengan kendaraan yang akan melintas (Tonase), dan belum terpadunya perencanaan jalan.

Sempadan jalan adalah garis batas luar yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan. Di Kabupaten Mamuju, pada tahun 2020 persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar sebesar 53% dengan formulasi panjang sempadan jalan yang digunakan pedagang kaki lima sepanjang 631 meter berbanding panjang seluruh sempadan jalan 1.185 meter.

2) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi cenderung meningkat. Hal ini ditandai dengan peningkatan sebesar 72% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang berada pada 67%. Berdasarkan kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Mamuju dalam mendukung penanganan sanitasi yang biasa disebut dengan istilah 100-0-100 ini memiliki makna pemenuhan akses layanan air minum 100%, kawasan kumuh 0%, dan akses layanan sanitasi yang layak 100%

3) Drainase

Pemahaman secara umum mengenai drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.

Keberadaan drainase di Kabupaten Mamuju masih perlu mendapatkan perhatian karena persentase saluran drainase dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 26% yang hanya menunjukkan trend stagnan. Kerusakan drainase ini perlu segera ditangani karena drainase berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan. Drainase yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan serta bangunan yang ada. Pentingnya peningkatan kualitas saluran drainase salah satunya untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

4) Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2018, rasio jaringan irigasi sebesar 1.410 Ha dan Tahun 2020 masih tetap sama. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan Pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang tiga tahun.

Senada dengan rasio jaringan irigasi, persentase irigasi yang tercatat dalam kondisi baik mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018

persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tercatat 38%, kemudian meningkat di Tahun 2018 menjadi 52%. Angka tersebut terus meningkat sampai dengan tahun 2020 sebesar 57%.

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju selama periode 2016-2020, pemanfaatan turap untuk mengatasi longsor disekitar jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018, persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor sebesar 16%. Dalam jangka dua tahun, yakni tahun 2020 persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai meningkat menjadi 19%. Hal ini dilakukan untuk mengatasi longsor disekitar badan jalan akibat gerusan air disepanjang aliran sungai yang rawan longsor.

5) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Berdasarkan arahan RPJMN III (2015-2019) Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan target 100- 0-100 yaitu 100% akses air minum yang layak, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi. Untuk konsumsi air minum, syarat syaratnya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang layak di Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 sebesar 65% yang dimana mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 62%.

6) Penataan Ruang

Pelaksanaan kebijakan penataan ruang dilakukan dengan penyusunan dokumen rencana tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah sangat penting untuk mengarahkan pembangunan, baik fisik maupun sosial dan ekonomi. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039.

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain tersediannya dokumen perencanaan tata ruang juga terlihat dari indikator lain salah satunya rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB. Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk. Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB kabupaten Mamuju sebesar 1:1,6 kondisi ini perlu mendapatkan perhatian. Sementara itu untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan didalam RTRW juga masih terjadi di Kabupaten Mamuju.

7) Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau dengan luas terbuka hijau di Kabupaten Mamuju seluas 460.9 Ha berbanding luas wilayah ber HPL/HGB seluas 2.048,2 Ha.

Ruang terbuka hijau sangatlah penting khususnya di wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan fungsi ruang terbuka hijau itu sendiri yakni sebagai paru paru kota yang dapat menyerap CO₂, menambah oksigen serta sebagai daerah resapan air. Oleh karenanya dengan adanya ruang terbuka hijau dapat meminimalisir banjir dan memperbaiki kualitas udara yang buruk akibat polusi.

8) Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Persentase RTH dengan luasan RTH public yang tersedia di Tahun 2020 sebesar 23%, persentasenya sama dengan tahun lalu. Luas RTH public yang tersedia di Kabupaten Mamuju seluas 460,9 Ha, melebihi luas RTH public yang seharusnya yaitu 409,64 Ha. Hal ini menandakan bahwa terdapat beberapa wilayah RTH yang belum digunakan sebagai lahan pembangunan atau pemukiman.

9) Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Salah Satu syarat mendirikan sebuah bangunan adalah dengan adanya Surat Izin Membangun (IMB) dari Pemerintah setempat. Karena IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan.

Pada Tahun 2020 bangunan ber IMB dengan jumlah bangunan yang sudah memiliki IMB sebanyak 13.485 unit berbanding dengan jumlah bangunan

keseluruhan yang ada di Kabupaten Mamuju sebanyak 73.745 unit. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak bangunan yang berdiri di Kabupaten Mamuju belum memiliki izin untuk mendirikan bangunan

Secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.46 berikut.

Tabel II - 46
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Pekerjaan Umum:					
3.1 .1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	278,97 km 731,81	202,72 km 666,86 km	<u>224,14 km</u> 666,86 km	<u>238,86 km</u> 666,86 km	<u>315,61 km</u> 666,86 km
3.1 .2.	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk	31.890 m 272.258 Jiwa	34.248 m 279.393 Jiwa	<u>95.212 m</u> 286.389 Jiwa	<u>113.572 m</u> 286.389 Jiwa	<u>126.962 m</u> 278,764 Jiwa
3.1 .4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	27%	30%	32%	35%	47%
3.1 .6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-	-	53%	53%	53%
3.1 .7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	56%	60%	64%	67%	72%
3.1 .9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	15%	18%	21%	26%	26%
3.1 .11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	14%	16%	16%	18%	19%
3.1 .12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40%	44%	38%	52%	57%
3.1 .13.	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	<u>2.041 Ha</u> 1.410 Ha	<u>2.041 Ha</u> 1.410 Ha	<u>2.041 Ha</u> 1.410 Ha
3.1 .14.	Persentase penduduk berakses air minum	52%	55%	59%	62%	65%
3.2	Penataan Ruang:					
3.2 .1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	447.300 Ha 748.131 Ha	460,9 Ha 2.048,2 Ha

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	-	-	23%	23%
3.2.3.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	-	10.206 Unit 54.451 Unit	11.283 Unit 55.878 Unit	12.485 Unit 57.278 Unit	13.485 Unit 73.745 Unit

Sumber: DPUPR Kabupaten Mamuju, 2021

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan RPJMD urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu: Peningkatan Rasio rumah layak huni, Peningkatan Rasio Permukiman Layak Huni, dan Peningkatan Rasio Sertifikasi Tanah Pemerintah daerah.

1) Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni.

Di Kabupaten Mamuju masih terdapat rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan. Dalam rangka meningkatkan kelayakan tempat tinggal penduduk miskin, pemerintah daerah setiap tahun melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga memenuhi standar rumah layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Rehabilitasi rumah tidak layak huni perlu menjadi prioritas dalam pembangunan perumahan. Pengembangan kerjasama dengan pengembang dalam penyediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak. Selain itu pemerintah daerah juga perlu mendorong agar pengembang meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang memadai.

Pemenuhan kebutuhan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dari segi kuantitas relatif tercukupi, namun perlu adanya peningkatan kualitas terkait pemenuhan kelayakan untuk di huni dan pemenuhan persyaratan kesehatan. Penyediaan Rumah layak huni lebih banyak dilakukan

Oleh SATKER SNVT perumahan di Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan table II.47 Rasio Rumah Layak Huni Kab. Mamuju dari Tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Yang dimana rasio rumah layak huni pada tahun 2018 adalah 1:6 dan mengalami penurunan sampai tahun 2020 senilai 1:5. Hal ini disebabkan karena bergesernya fungsi rumah sebagai investasi, harga rumah yang meningkat, masyarakat miskin kota tak mampu mengakses harga murah dan persyaratan dalam pasar perumahan yang tak mampu dipenuhi semakin mempersulit warga miskin mengakses rumah, selain itu akibat *pandemic covid 19* yang tengah terjadi saat ini menyebabkan penduduk miskin yang ada di Indonesia terus bertambah sehingga menyebabkan jumlah rumah tidak layak huni semakin bertambah.

2) Lingkungan Permukiman Kumuh.

Seluruh wilayah Kabupaten Mamuju terbagi menjadi beberapa kawasan penggunaan lahan, diantaranya adalah lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman masih terbagi atas beberapa kawasan salah satunya adalah kawasan permukiman kumuh.

Pada wilayah Kabupaten Mamuju kawasan lingkungan permukiman kumuh mengalami trend yang stagnan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,09% dari luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang sebesar 20%. Kemudian rumah tangga kumuh yang ada dalam kawasan perkotaan pada tahun 2020 sebesar 14%, yang mengalami penurunan dari tahun 2018-2019 sebesar 26% dan 22%. Dan permukiman yang tertata yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju dari tahun 2019 sebesar 5 % mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 7%. Permukiman kumuh disebabkan adanya perpindahan penduduk luar kota dari desa yang terus menerus terjadi. Perpindahan ini menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkan kurangnya lokasi hunian di perkotaan, sehingga untuk keberlanjutan hidup para penduduk tinggal didaerah daerah yang tidak layak huni.

Kawasan kumuh Perkotaan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Mamuju. Kawasan permukiman kumuh Perkotaan yang perlu menjadi prioritas seluas 50.64 ha, meliputi empat Kelurahan di Kecamatan Mamuju, yaitu: Simboro, Binanga, Rimuku, dan Karema. Kawasan kumuh perkotaan Danga seluas 10,8 ha terletak di Kelurahan Binanga, Kawasan Kasiwa Seluas 16,44 Ha terletak di Kelurahan Binanga, Kawasan Kanal Rimuku Seluas 12,14 Ha terletak

di Kelurahan Rimuku, Kawasan Karema Selatan Seluas 6,12 Ha Di kelurahan Karema dan Kawasan Terminal Simbuang Seluas 5,86 Ha Terletak di Kelurahan Simboro. Pemerintah Kabupaten Mamuju terus melakukan pembenahan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh melalui perbaikan sistem drainase lingkungan, pembangunan jalan lingkungan, dan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.

3) Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU.

Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU di wilayah Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU sebesar 31%, mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 25,60% dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 35%.

Perkembangan kinerja indikator RPJMD pada urusan perumahan Rakyat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II - 47

Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
4.1.	Rasio rumah layak huni	Rasio	NA	1 : 8	1 : 6	1 : 5	1 : 5
4.2.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	NA	1 : 08	1 : 09	1 : 1	1 : 1
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	NA	70%	72.11 %	71.50 %	75.32 %
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	NA	19%	19%	19%	19%
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	NA	7,6%	5%	5%	7%
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	NA	0,09%	0.09%	0.09%	0.09%
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	NA	20%	20%	20%	20%
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	NA	30%	26%	22%	14%
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	NA	23%	31%	25.60	35%

Sumber: PERKIMTA Kabupaten Mamuju, 2021

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Perkataan aman mengandung 4 (empat) pengertian dasar antara lain; *security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, *surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, *safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya dan *peaceya* itu perasaan damai secara lahiriah dan batiniah.

Amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (1) menyebutkan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 149 (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian secara teknis dalam mengaplikasikan UU 32 Tahun 2004 tersebut sudah ada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang diberi tugas dalam mengamankan dan menegakkan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan peraturan dan kebijakan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP dalam melaksanakannya mengalami beberapa kendala dan permasalahan ketika berada di lapangan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Permasalahan dan kendala yang timbul terjadi ketika Satpol PP melaksanakan penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang akan berimplikasikan pada sudut pandang masyarakat melihat kinerja Satpol PP

dipersepsikan kurang memihak kepada masyarakat, persepsi yang kurang mendukung terhadap kinerja Satpol PP merupakan bagian dari permasalahan dan kendala yang muncul di lapangan.

Untuk mengetahui capaian kinerja Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dapat dilihat melalui 4 (empat) indikator sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pencapaian target kinerja, antara lain ; Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) target 75% sudah mencapai target yaitu 75%, Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota target 2 WMK capaian 1 WMK dengan tingkat presentasi 4,97%. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum mencapai target, rata-rata masih menggunakan waktu diatas 15 menit, dalam pencapaian target tersebut belum sesuai dengan kondisi wilayah manajemen kebakaran karena keterbatasan sarana atau fasilitas fisik. Hal lain yang juga menyebabkan tingkat capaian *response time rate* yang masih belum tercapai adalah dikarenakan keterbatasan sebaran pos damkar yang ada, jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran dan keterbatasan, jumlah personil jika dibandingkan luas wilayah volume permasalahan yang dihadapi. Sedangkan untuk indikator Persentase Penegakan PERDA hanya mencapai target 20% dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan Hukum yang ada.

Gambaran capaian kinerja Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu 2016-2020, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel II - 48
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	60	60	75	75	75
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97
3	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	0	0	0	0	0
4	Persentase Penegakan PERDA	Persen	15	20	20	20	20

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Mamuju, 2021

2) Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dijelaskan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan yaitu sebagai berikut.

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Sementara wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Hasil kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dilihat melalui 5 (lima) indikator utama sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian kinerja kurun waktu tahun 2016-2020, antara lain : Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap belum mencapai target dikarenakan pada tahun 2020 jumlah korban yang dievakuasi tidak ada yang menggunakan sarana prasarana darurat tanggap lengkap, Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana baru mencapai angka 22% hal ini berarti juga belum mencapai target, Presentase Masyarakat yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan ditahun 2020 meningkat 1.05% dari tahun 2019 hal ini juga masih belum mencapai target, Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada angka 31.20% hal ini berarti belum mencapai target dan Presentase Desa Tangguh Bencana telah mencapai 43.56%.

Gambaran capaian kinerja Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang juga dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dalam kurun waktu 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II - 49
Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	0	0	20	25	0
2	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	0	9	27	20	22
3.	Presentase Masyarakat yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persen	0	0	0	16,70	17,75
4	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Persen	0	0	26,13	25,44	31,20

	korban bencana						
5	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	1,98	1,98	1,98	43,56	43,56

Sumber : BPBD Kab. Mamuju 2020

2.3.1.6 Urusan Sosial

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial menyebutkan Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat Miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Tabel II - 50
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2016-2020

No	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	N/A	1 org	4 org	2 org	2 Org
2	Anak Terlantar	N/A	1 org	3 org	0	0
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	N/A	N/A	6 org	55 org	34 org
4	Anak Jalanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	N/A	N/A	1 org	8 org	8 org
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
8	Lanjut Usia Terlantar	N/A	51 org	93 org	30 org	100 org
9	Penyandang Disabilitas	N/A	-	26 org	43 org	39 org
10	Tuna Susila	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gelandangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Pengemis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Pemulung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kelompok Minoritas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	N/A	14	58	34	42
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	N/A	28	28	28	N/A
18	Korban Trafficking	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Korban Tindak Kekerasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Korban Bencana Alam	N/A	60 KK	956 KK	285 KK	75 KK
22	Korban Bencana Sosial	N/A	31 KK	76 KK	17 KK	12 KK
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Fakir Miskin	N/A	N/A	24.724 RTM	24.702 RTM	25.316 RTM
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinsos Kabupaten mamuju, 2020

Pembangunan pada urusan sosial masih dihadapkan pada masalah banyaknya PMKS (dapat dilihat pada tabel II-52). Penanganan PMKS menjadi tanggung jawab bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Lembaga terkait lainnya. Penanganan PMKS di Kabupaten Mamuju perlu upaya penanganan yang serius dan terkoordinasi disemua level pemangku kepentingan.

Tanggungjawab Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut :

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal,

- termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Sementara wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan social yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Selain Kesejahteraan Sosial Urusan Sosial juga memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan yaitu sebagai berikut.

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Sementara wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan yaitu sebagai berikut

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan Kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Upaya untuk mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Mamuju dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pemberian pelatihan kepada para PMKS dengan tujuan meningkatkan ketrampilan mereka. Fakir miskin dan PMKS yang menerima kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Selain PMKS, para petugas Pemberdayaan PMKS juga selalu dilatih untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada para PMKS. Jumlah petugas yang dilatih jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Lebih rinci capaian indikator peningkatan kapasitas PMKS dan petugas pemberdayaan PMKS. Gambaran capaian kinerja Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel 2.51 berikut ini :

Tabel II - 51
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2,6%	3,1%	18.91%	10.42%	13 %
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	27%	36%	41.00%	45.00%	48 %
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	100%	100%	100 %
6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama	100%	100%	100%	100%	100 %

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	masa tanggap darurat					
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80%	77%	75%	70%	70 %

Sumber : Dinas Sosial Kab. Mamuju, 2021

Pada table 2.51 dapat dilihat dari 26 Jenis PMKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2018 terdapat 24 jenis PMKS yang wajib ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, namun saat ini PMKS yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju hanya fokus pada 9 Jenis PMKS hal ini disesuaikan kemampuan daerah saat ini. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

- 1. Anak Balita Terlantar (diintervensi);**
- 2. Anak terlantar (diintervensi);**
- 3. Anak yang berhadapan dengan hukum (diintervensi);**
4. Anak jalanan;
- 5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) (diintervensi);**
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 7. Lanjut usia terlantar (diintervensi);**
- 8. Penyandang disabilitas (diintervensi);**
9. Tunasusila;
10. Gelandangan;
11. Pengemis;
12. Pemulung;
13. Kelompok minoritas;
14. Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
16. Korban penyalahgunaan NAPZA;
17. Anak korban tindak kekerasan;
18. Pekerja migran bermasalah;
- 19. Korban bencana alam (diintervensi);**
- 20. Korban bencana social (diintervensi);**
21. Perempuan rawan sosial ekonomi;
- 22. Fakir miskin (diintervensi).**

2.3.2 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan pelayanan yang tidak berkaitan pelayanan dasar.

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, 3) Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan.

Dalam Undang-Undang Teknis yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM bidang ketenagakerjaan, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Maka berdasarkan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka pemerintah kabupaten dalam urusan tenaga kerja tersebut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Disamping meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pemerintah kabupaten diharapkan dapat menyediakan/membuka lapangan kerja serta dapat menciptakan iklim yang kondusif yang tercermin dalam hubungan industrial tenaga kerja yang harmonis antara perusahaan/ instansi selaku pengguna dengan tenaga kerja.

Data mengenai Tenaga kerja merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Tinggi rendahnya tingkat tenaga kerja di suatu daerah dikaitkan oleh 9 (sembilan) indikator menurut permendagri 86, sebagai berikut:

1) Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja Per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Capaian Indikator Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun sudah menunjukkan interpretasi yang sesuai bahkan capaian kinerja fluktuatif meningkat bisa dilihat pada tahun 2018 menunjukkan angka rasio 1,3 per kali 1000 sengketa, dan ditahun 2019 mencapai angka rasio 2,09. Tahun 2020 jumlah perselisihan buruh dan pengusaha tergolong tidak banyak masih dibawah 10 kasus dari 1432 perusahaan.

Jumlah perselisihan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda sebanyak 4 kasus. Hal ini terjadi yaitu karena sulitnya menyatukan kesepahaman perselisihan hak dan kepentingan antar pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja, oleh karena itu sangat penting untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan kerja yang kondusif, Adanya keluwesan dalam pengaturan dan komunikasi merupakan kunci dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang akan atau telah terjadi. Keluwesan dalam melakukan managerial yang didukung oleh budaya kedua pihak, tidak hanya berguna untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, namun juga mempererat hubungan diantara pekerja dan pengusaha. Budaya lokal seperti musyawarah dan mufakat untuk melakukan evaluasi dan penyampaian pendapat dengan komunikasi yang baik, mampu menutupi dan memperbaiki perselisihan yang terjadi. Mediator sebagai pen jembatan tentunya harus bersifat netral dan memiliki kesadaran untuk mampu menyelesaikan permasalahan berdasar objektif kedua pihak.

2) Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)

Capaian Indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) menunjukkan interpretasi yang sesuai/tercapai tiap tahunnya dengan angka mencapai 100 persen, tetapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi perhatian yaitu Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi berwenang untuk melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada kabupaten/kota; Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Provinsi; dan memberikan bantuan teknis, supervisi, dan melakukan

monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota.

3) Pencari Kerja yang ditempatkan

Capaian Indikator Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan menunjukkan angka yang fluktuatif meningkat dari tahun 2016 jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 138, ditahun 2017 sebesar 246, ditahun 2018 sebesar 301, sedangkan ditahun 2019 kembali menurun menjadi 196 pencari kerja, dan Kembali meningkat ditahun 2020 sebesar 218 pencari kerja, Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 disebabkan karena permintaan tenaga kerja lebih tinggi dibanding lapangan kerja, selain itu disebabkan karena ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu perlunya menciptakan lahan kerja baru agar pasar kerja dapat menyerap mencari kerja yang siap untuk bekerja.

4) Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II, Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi Kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat Kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun social, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan Kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Menurut H. W Heinrich dalam Notoadmodjo (2007), penyebab keselamatan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88 % dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan.

Capaian Indikator Keselamatan dan perlindungan menunjukkan interpretasi yang sesuai dimana selama waktu lima tahun 2016-2019 menunjukkan capaian yang sama yaitu 297 Perusahaan, ini jelaskan bahwa Manajemen perusahaan memberikan prioritas rendah pada program K3 dalam program perusahaan. Ditahun 2020 telah meningkat secara signifikan sebesar 645 Perusahaan Hal ini disebabkan karena perusahaan sudah mulai menerapkan system manajemen K3 yang baik dan penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Dimana K3 diterapkan bukan hanya sebatas kertas dan peran ahli K3 harus

berperan nyata dibidang ini. Karena menjaga keselamatan kerja karyawan adalah tugas dari perusahaan, selain bisa memastikan semua kondisi karyawan dalam keadaan baik, penerapan K3 bisa mencegah kerugian fisik dan finansial bagi perusahaan.

Komitmen dan kebijakan K3 masuk dalam langkah strategis perusahaan. Tanpa komitmen manajemen maka pelaksanaan K3 dalam perusahaan tidak akan memberikan hasil yang baik. Penetapan kebijakan K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha. Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3, memerhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus dan memerhatikan masukan dari pekerja/buruh serta serikat pekerja. Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan pada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan dan pihak lain yang terkait.

5) Jumlah pekerja/buruh Peserta Jamsostek

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil dan bersalin.

Capaian Jumlah Besarannya pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di tahun 2016 sebanyak 4.261 Peserta masih tergolong rendah dengan Jumlah Penduduk yang berkerja di Kabupaten Mamuju, hal ini diakibatkan Minimnya pengetahuan masyarakat pekerja mengenai manfaat jaminan sosial sebagai salah satu penyebab rendahnya keikutsertaan pelaku aktivitas ekonomi formal dalam program jaminan sosial pemerintah, sehingga perlu peran Pemerintah daerah di bidang jaminan sosial yang semakin penting sejak kebijakan desentralisasi dilaksanakan. Bahkan beberapa pemerintah daerah tertentu merancang sistem jaminan sosial mereka sendiri secara paralel dengan sistem-sistem jaminan sosial yang dimiliki pemerintah pusat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu, satu hal lain akan menerangkan tentang peran pemerintah daerah, dan kebijakan inovatifnya. Di tiga tahun terakhir 2017-2019 jumlah peserta jamsotek telah meningkat, namun stagnan sebesar 4.518 peserta, dan Kembali meningkat di tahun 2020 yaitu sebanyak 5.538 peserta pekerja/buruh. Hal ini karena perusahaan yang telah memasukkan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan social tenaga kerja, menunjukkan begitu

pentingnya perusahaan tersebut melindungi para buruhnya sedemikian rupa dalam menghadapi kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi.

6) Jumlah Pengujian Peralatan Perusahaan

Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilakukan secara internal maupun melibatkan lembaga eksternal dari luar Tempat Kerja. Pemeriksaan internal dilakukan oleh tim yang sudah memiliki sertifikasi Ahli K3 Lingkungan Kerja dengan tingkatan Muda, Madya, sampai Utama. Meski pemeriksaan internal sudah dilakukan oleh perusahaan oleh tim yang dimiliki, pihak eksternal tetap harus melakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal dan bisa saling melakukan pemeriksaan silang. Berbagai kesalahan atau mungkin kecurangan tidak akan terjadi. Pemeriksaan K3 Lingkungan Kerja secara internal harus dilakukan secara rutin atau berkala. Apalagi perusahaan atau pabrik yang dimiliki memiliki risiko faktor K3 Lingkungan Kerja yang sangat besar dan berbahaya. Misal faktor kimia berupa zat berbahaya atau faktor biologi berupa penularan patogen.

Capaian Indikator Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan menunjukkan angka capaian tiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tetap yakni 297, dan meningkat di tahun 2020 sebesar 645, tetapi hal ini tetap perlu untuk diperhatikan karna masih adanya pemakaian alat keselamatan dan mesin-mesin keselamatan diperusahaan yang belum disertifikasi, maka perlu Pemerintah untuk melakukan pengujian sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

7) Jumlah Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat, dan Pelatihan Kewirausahaan.

Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Pelatihan berbasis kompetensi terdiri dari pelatihan di lembaga pelatihan/*off the job training*, penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, *on the job training*, penilaian/asesmen di tempat kerja, penerbitan sertifikat pelatihan, dan atau sertifikat kompetensi.

jika dilihat dari table II.53 pendaftar pelatihan berbasis kompetensi menurun dari 1.547 pendaftar di tahun 2018 menjadi 245 pendaftar ditahun 2019, kemudian di tahun 2020 pendaftar pelatihan berbasis kompetisi sama sekali tidak ada. Dikarenakan kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum sesuai

kebutuhan pasar kerja, belum tersedianya Instruktur dan pengelola Balai Latihan Kerja di Kab. Mamuju, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dan juga pada Tahun 2020 wilayah Kab. Mamuju juga terkena dampak *pandemic covid 19* sehingga pelatihan tatap muka tidak lagi diadakan karena ada pembatasan berkumpul.

8) Jumlah lulusan S1/S2/S3

Capaian Indikator Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan angka yang fluktuatif meningkat yang dari tahun tahun 2016 sebesar 9.606 orang, tahun 2017 sebesar 10.295 orang, tahun 2018 sebesar 10.612 orang, dan ditahun 2019 terus meningkat mencapai 17.151, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 11.862 orang yang lulus S1/S2/S3. Angka Kelulusan di Tahun 2020 menurun disebabkan karena bayak masyarakat yang terdampak ekonominya karena covid 19, sehingga ada orangtua yang tidak mampu membiayai kuliah putra putrinya.

Tabel II - 52

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tenaga Kerja					
1.1.	Jumlah Perusahaan	1.379	1.430	1.430	1.430	1.432
1.2.	Σkasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	2	2	2	3	4
1.3.	Σpencari kerja yang ditempatkan	138	246	301	196	218
1.4.	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n	297	297	297	297	645
1.5.	Σpekerja/buruh JAMSOSTEK	4.261	4.518	4.518	4.518	5.538
1.6.	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n	2	2	2	3	4
1.7.	Σperusahaan yang terdaftar	1.379	1.430	1.430	1.430	1.432
1.8.	Σperalatan yang telah diuji	297	297	297	297	645
1.9.	ΣPendaftar pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan	148	887	1.547	245	0
1.10.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	9.606	10.295	10.612	17.151	11.862

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mamuju, 2021

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orangtua secara adil, efektif dan akuntabel.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mampu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang penting, dan bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ruang untuk menjadi pemimpin terbuka bagi seorang perempuan, dan perempuan harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun demikian, data secara umum menunjukkan bahwa persentase perempuan di posisi pengambilan keputusan di lembaga eksekutif masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, baik eksekutif dan yudikatif di Kabupaten Mamuju menunjukkan telah mengalami peningkatan dari tahun 2016 (52,29%) hingga tahun 2019 (53,33%), dan Kembali menurun di tahun 2020 (52,29%), hal ini disebabkan karena para pemimpin lembaga pemerintah masih sebagian yang memahami pentingnya peran perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender.

2) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk mendapat dukungan oleh semua pihak.

Di Kabupaten Mamuju, persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam pada tahun 2020 sebesar 8,57% mengalami stagnan seperti di tahun sebelumnya.

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di

Kabupaten Mamuju. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2016 yaitu 30 % meningkat menjadi 35% pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka untuk perempuan, meskipun posisi perempuan di perusahaan atau pabrik kebanyakan bukan menempati posisi strategis atau posisi pengambil keputusan melainkan sebagai karyawan seperti sekretaris dan administrasi atau buruh pada pabrik.

4) Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Selama periode 2016 s/d 2019 jumlah KDRT di Kabupaten Mamuju relatif rendah. Pada Tahun 2019 Rasio KDRT sebesar 0,36%. Pencapaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 5% di tahun 2019, hal ini disebabkan Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku

5) Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Anak merupakan penentu kualitas sumberdaya manusia dan akan menjadi pilar utama pembangunan, oleh karena itu seluruh populasi anak perlu ditingkatkan kualitasnya, mendapatkan perlindungan sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Kabupaten Mamuju cukup banyak memiliki tenaga kerja dibawah umur, terutama yang bekerja di usaha-usaha informal, asisten

rumah tangga, hotel tempat karaoke, pedagang asongan, dst yang mayoritas berasal dari daerah lain yang berdomisili di Kabupaten Mamuju. Kondisi tempat kerja tersebut sangat rentan dengan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, seks bebas dan narkoba. Dari jumlah tenaga informal dan formal, pekerja anak mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai kurang lebih 0,36 persen jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,86%.

6) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Perempuan tidak bekerja dapat disebabkan faktor sosial dan budaya, seperti mengurus rumah tangga, sulit masuk ke sektor formal, diskriminasi pekerjaan bagi perempuan, dan budaya yang tumbuh di masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan antara lain: marginalisasi dalam pekerjaan, kedudukan perempuan yang subordinat dalam sosial budaya, stereotip terhadap perempuan, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Mamuju pada kurun waktu dua tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 5%. Saat ini, perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2019 sebesar 50% jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 45%.

7) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Berdasarkan data yang tercantum, bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2016-2019 mengalami peningkatan sebesar 5%. jika dilihat data pada dua tahun terakhir, pada tahun 2019 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan sebesar 85% jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 80 %, kemudian di tahun 2020 telah meningkat menjadi 100%, hal ini karena semua kasus yang dilaporkan melalui unit layanan terpadu mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih, hal ini merujuk pada amanah SPM bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun korban perdagangan orang, termasuk laki-laki, berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan kasus korban.

8) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit realisasi 100% tahun 2016-2020, dimana semua kasus korban kekerasan akan mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pasien/klien di fasilitasi kesehatan akan terlayani 100% berdasarkan tingkat keterpaparannya/diagnose hasil pemeriksaan, terkecuali pada kasus kasus tertentu pasien/klien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau pelayanan khusus.

9) Cakupan Layanan Rehabilitas Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Rehab sosial bertujuan melakukan pendampingan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan klien yang mengalami disfungsi sosial/traumatik sehingga klien/korban dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (seperti semula). Pada dasarnya seluruh korban yang sudah tercatat, lembaga/ petugas akan melakukan identifikasi korban dalam rangka menindak lanjuti kasus klien. Berdasarkan tabel bahwa cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2016-2020 rata-rata korban yang mendapatkan rehabsos sebanyak 80 persen, sebab tidak semua korban menginginkan untuk Rehab Sosial. Diharapkan semua kasus yang dilaporkan melalui unit layanan terpadu akan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih.

10) Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju sejak dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 10%. Pada tahun 2020 cakupan penegakan hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak sebesar 100% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 50%. seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat oleh Penyidik seluruhnya terproses dan dikawal oleh pendamping dari P2TP2A Maupun Unit PPA, Polres/Polsek ketinggian pengadilan, demikian pula tingkat kejaksaan tetap terproses dengan baik hingga putusan.

11) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum kurun waktu lima tahun (2016-2019) data realisasi 100%. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum, namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan dan ditempuh dengan jalan damai.

12) Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Layanan reintegrasi sosial, merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban/klien kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan social lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Pelayanan lembaga P2TP2A dalam reintegrasi terhadap korban/klien adalah melakukan layanan terapi oleh konselor selama dalam penanganan, sebagai wujud perlindungan kepada klien disiapkan rumah aman kemudian diberikan pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien. Reintegrasi akan dilakukan jika kondisi klien sudah siap untuk pulang dan keluarga mau menerima korban.

Persentase klien/korban yang dipulangkan ke keluarga yang ditangani oleh Layanan P2TP2A Kabupaten Mamuju sampai tahun 2020 sebanyak 100 persen.

13) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. Di Kabupaten Mamuju, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD tidak mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan dalam kurun waktu 5

tahun (2016-2019). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan di SD bagi anak perempuan sudah mampu menyamai anak laki-laki.

14) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP di Kabupaten Mamuju menunjukkan anak perempuan masih berada pada kisaran rata-rata 60 persen, namun dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan di SMP bagi anak perempuan sudah mampu menyamai anak laki-laki.

15) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Kabupaten Mamuju sama halnya dengan jenjang Pendidikan SMP berada dikisaran 67 persen, namun dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan wajar 12 tahun hingga ke jenjang SMA bagi anak perempuan sudah mampu menyamai anak laki-laki.

16) Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Dalam kurun waktu (2016-2019) di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa masih ada perempuan yang buta huruf pada kelompok usia 15-24 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki belum mencapai nilai 100 persen namun dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

17) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian Dalam kurun waktu (2016-2020) di Kabupaten Mamuju cenderung meningkat. Tercatat dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 5% di tahun 2018 sebesar 95% dan meningkat di tahun 2019 sebesar 100%, bertahan hingga tahun 2020. Hal tersebut telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Tabel II - 53
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	52,29	52,29	53,3	53,3	52,29
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	17,78	17,78	17,78	8,57	8,57
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	30	35	35	35	N/A
4	Rasio KDRT	Persen	0,91	0,91	0,86	0,36	N/A
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	0,91	0,91	0,86	0,36	N/A
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	35	35	45	50	N/A
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	75	75	80	85	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	75	75	80	85	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	40	40	60	50	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	75	75	80	82	100
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	90	95	95	95	95,95
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	62	62	64,11	65,5	65,11
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	60	61,0	62,0	65,0	67,00
16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	74	74	80	85	85
17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non-pertanian	Persen	80	80	95	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Mamuju Tahun 2021

2.3.2.3 Urusan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 1 (Satu) Ayat (Satu) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku

Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan pada Ayat 2 (Dua) Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Kabupaten Mamuju dalam Rangka Melaksanakan Penguatan Pangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan terhadap jatuhnya harga pangan pada saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan.

Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompok, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki. Gambaran capaian kinerja urusan Pangan yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju ada 4 Indikator yaitu Pangan utama di Indonesia identik dengan beras, karena jenis ini merupakan makanan pokok utama, di Kabupaten Mamuju ketersediaan beras atau pangan utama dari tahun 2016 dengan jumlah 118,69 beras/jiwa meningkat menjadi 143,69 beras/jiwa di tahun 2017 ini menandakan ketersediaan pangan utama cukup bahkan dari segi pemenuhan pangan terpenuhi walaupun pada tahun 2020 turun 116,60 beras/jiwa ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian, Ketersediaan pangan dalam bentuk energi pada tahun 2016 sebesar 4.480,21 Kalori/kapita/hari; protein sebesar 133,72 gram/kapita/hari; Ketersediaan energi dan protein pada tahun 2017 naik energi 8258 Kalori/kapita/hari sedangkan protein 205,27 gram/kapita/hari dan pada tahun 2020 ketersediaan Energi turun sebesar 3.289 Kalori/kapita/hari sedangkan Ketersediaan Protein turun 90,38 gram/kapita/hari, ketersediaan Pangan di Kabupaten Mamuju masih di dominasi oleh ketersediaan bahan pangan nabati dan ini lebih tinggi dibandingkan ketersediaan energi dan protein ideal sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari. Fluktuatifnya Ketersediaan Energi Per kapita ini disebabkan oleh turunya perkiraan Produksi Padi dan turunnya perkiraan impor beras sedangkan

protein dipengaruhi oleh rendahnya ekspor dan impor komoditas Perikanan, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pada Bab III Pengawasan Pasal 47 Ayat 1 (satu) menerangkan bahwa Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Segar dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Kabupaten Mamuju walaupun hanya dilaksanakan pengambilan sampel dan diuji oleh Provinsi diakibatkan tenaga penilai Pangan belum terfasilitasi dalam peningkatan kompetensi namun tidak menghalangi dalam memberikan layanan keamanan dan pembinaan pangan kepada masyarakat.

Tabel II - 54

Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/Thn (Beras/Jiwa)	118.69	143.69	169.99	143.403	116,601
2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/Kap/Hr	4480.21	8258	2004.6	5034	3289
3	Ketersediaan protein perkapita	Gr/Kap/Hr	133.72	205.27	55.6	86.61	90,38
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	68	75	80	83	85

Sumber : BPS dan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Terdapat satu indikator dalam urusan pertanahan, yakni indikator Rasio luas lahan Pemda bersertifikat. Indikator Rasio luas lahan Pemda bersertifikat di Kabupaten Mamuju mengalami perbandingan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Tercatat angka rasio 1 : 4 kemudian menurun di tahun 2019 dengan angka 1 : 2 lahan bersertifikat. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II - 55

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanahan						
1	Rasio luas lahan Pemda bersertifikat	Rasio	N/A	1:4	1:4	1:2	N/A

Sumber : PERKIMTA Kabupaten Mamuju, 2021

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Salah satu faktor yang menjadi indikator pertumbuhan daerah yang bersih dan sehat yaitu dengan meningkatnya kebersihan lingkungan hal ini mempengaruhi timbulnya kebutuhan penanganan sampah dan pengaksesan air minum yang sehat. Gambaran Kinerja Urusan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Mamuju berkedudukan sebagai unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju melalui Sekretaris Daerah.

Keberadaan kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan adalah suatu keniscayaan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Kemajuan teknologi, peningkatan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah beberapa fenomena yang mendorong penurunan kondisi kualitas lingkungan hidup. Untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan hidup, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan kelembagaan yang mengarah pada pencegahan, pengendalian, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, diantaranya peraturan perundang-undangan terkait instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; institusi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan baik pada tingkat pusat maupun daerah; pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan lingkungan pada pemerintah daerah; dan alokasi pembiayaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kabupaten Mamuju sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, juga menghadapi fenomena penurunan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan jumlah penduduk- baik natalitas maupun urbanisasi, peningkatan intensitas pembangunan infrastruktur perkotaan, peningkatan aktivitas perekonomian kota Mamuju dan daerah penyangga, perkembangan daerah-daerah baru sebagai wilayah perkebunan, dan wilayah sektor ekonomi lainnya, memberi tekanan yang besar bagi eksistensi kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat di kabupaten Mamuju. Tekanan terhadap lingkungan yang jika tidak diketahui dan dikelola dengan baik dan benar, akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang massif, yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama dalam memulihkan fungsi lingkungan. Jika hal ini terjadi, maka segala investasi publik dibidang pembangunan ekonomi dan sosial tidak memiliki nilai, dan keberlanjutan kehidupan di kabupaten Mamuju akan terancam.

Dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan yang timbul dan mencegah

terjadinya kerusakan lingkungan yang besar, dan menyelaraskan kepentingan pembangunan ekonomi, dan sosial dengan kepentingan menjaga kualitas lingkungan yang baik dan sehat untuk generasi saat ini dan masa mendatang, maka diperlukan usaha dan tindakan nyata yang terorganisir, terukur, objektif, berkesinambungan, dan holistik dari para pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan di kabupaten Mamuju dapat tercapai.

Pemerintah kabupaten Mamuju menyadari pentingnya pembangunan ekonomi dan sosial yang selaras dengan keberadaan lingkungan yang baik dan sehat secara berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, menempatkan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu perhatian utama kebijakan pembangunan pemerintah daerah, dengan membentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan lingkungan hidup yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang dikepalai oleh Eselon II b, yang memiliki tugas dan fungsi utama merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Mamuju.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana yang terdapat dalam rencana strategis yaitu, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sementara sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Bersih dan Sehat, dimana sasaran tersebut terdiri dari 9 (sembilan) indikator sebagai mana yang termuat didalam permendagri 86.

1) Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Pada Tahun 2019, Target Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebanyak 116 Usaha / kegiatan. Pada tahun yang sama, realisasi jumlah usaha yang di awasi terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebanyak 151 Usaha / kegiatan, yang mana melebihi target pengawasan sebesar 35 usaha / kegiatan atau 30,17 % dari target pengawasan. Jika dibandingkan realisasi pengawasan 2018 sebanyak 157 usaha / kegiatan maka realisasi pengawasan pada tahun 2019 berkurang sejumlah 7 usaha / kegiatan atau 4,45 %. Sebaliknya, ditinjau sisi kualitas pengawasan, realisasi pengawasan 2019 lebih baik dibandingkan dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 pembinaan dan pengawasan terkait penerbitan izin PPLH menurun drastis diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran yang mendukung kegiatan tersebut sehingga jumlah usaha yang taat terhadap izin lingkungan cuma 3 usaha Dengan beberapa alasan sebagai berikut:

a) Penambahan variable pengawasan

Kegiatan Pengawasan pada tahun 2018 berfokus pada kataatan usaha/kegiatan dalam kepemilikan dokumen lingkungan/izin lingkungan dan penyampaian laporan periodik pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2019, variable kegiatan pengawasan bertambah dengan pemeriksaan isi konten laporan periodic dibandingkan dengan pemeriksaan peraturan menteri lingkungan Hidup, pemeriksaan (administrasi dan teknis) pengelolaan kualitas air limbah, kualitas udara, pengelolaan sampah domestik dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3.

b) Penambahan cakupan wilayah pengawasan

Pada tahun 2018, cakupan wilayah pengawasan LH mencakup usaha/kegiatan di 8 kecamatan, pada tahun 2019 cakupan wilayah pengawasabn LH bertambah menjadi 10 kecamatan di kabupaten mamuju. Adapun kecamatan tambahan sebagai wilayah pengawasan pada tahun 2019 yakni kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang.

Pengukuran indeks kualitas udara di Kab. Mamuju menggunakan data dari *Passive Sampler*, yang mana diambil pada 4 (empat) titik, yaitu : daerah padat transportasi, daerah/kawasan industri, pemukiman penduduk, dan kawasan komersil/perkantoran.

Pada tahun 2018 hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92,29 sedangkan pada tahun 2019 diperoleh hasil sebesar 92,11. Data ini menunjukkan terjadi penurunan walaupun tidak signifikan, akan tetapi perlu mendapat perhatian serius. Hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat vital baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh kabupaten Mamuju. Berdasarkan data, luasan lahan hutan di Kabupaten

Mamuju pada tahun 2017 sebesar 359.878,50 ha, atau sekitar 71,17% dari total luasan wilayah kabupaten Mamuju. Luas hutan ini cenderung sama dengan data luasan hutan pada tahun sebelumnya, dimana hal ini dikarenakan data yang digunakan berdasarkan “tata batas kawasan hutan” yang disahkan oleh pemerintah pusat. Tersedianya Pemberian Penghargaan Lingkungan setiap tahunnya dilaksanakan dari tahun- ketahun, didalam pemberian penghargaan itu meliputi dari kegiatan Pelaksanaan Adiwiyata, Penguatan jejaring Lingkungan Hidup Pusat daerah dan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Pusat Daerah.

c) Pelaksanaan adiwiyata

Adiwiyata adalah salah satu program Kementrian hidup dan kehutanan yang bertujuan untuk mendorong, terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Pemberian ini berupa penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten dan Propensi dan di usulkan sebagai sekolah Adiwiyata mandiri tingkat nasional

d) Penguatan jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan daerah

Kegiatan Penguatan jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan daerah berupa peringatan hari Lingkungan hidup sedunia, dimana ada 3 kegiatan yang dilaksanakan didalam kegiatan ini yakni keikutsertaan dalam pekan lingkungan hidup tingkat nasional, lomba kebersihan lingkungan tingkat kabupaten dan aksi Bersama membersihkan lingkungan di kabupaten mamuju.

e) Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

Laporan status lingkungan hidup daerah yang saat ini disebut Dokumen Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) adalah laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota yang wajib disusun dan disampaikan kepada pemerintah pusat setiap tahun, DIKPLHD memuat informasi terkait kondisi lingkungan hidup daerah, tantangan dan masalah dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD digunakan sebagai salah satu acuan oleh pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2019 Target jumlah timbulan sampah perkotaan (Kecamatan Mamuju dan Simboro), yang tertangani Sebesar 65 %, sedangkan Realisasi jumlah timbulan sampah perkotaan yang tertangani sebesar 37,75 % dibandingkan

dengan jumlah timbunan sampah pada tahun 2018 4,982%, jika dibandingkan target 2019 dan 2018 memiliki kenaikan jumlah timbunan sampah, Jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2019 memiliki target 14,47% dan memiliki kenaikan jumlah sampah yang tertangani dari tahun 2018. Di tahun 2019 target area pelanan persampahan memiliki 7 %, dan memiliki realisasi target yaitu 4,64 % sedangkan target di 2018 memiliki target yang sama dengan tahun 2019. Di tahun ini memiliki target yang sama dan realisasi yang sama dengan capaian kinerjanya yaitu 6,629 %, dari target dan realisasi ini tidak memiliki perubahan, dikarenakan persentase ini tidak memiliki perubahan luasan areah pelayanan pengelolaan sampah dari kecamatan mamuju sekitar 22,159 ha dan kecamatan simboro sekitar 3,301 ha. Jumlah Oprasional TPA tidak memiliki perubahan sama sekali dari tahun 2019 dan 2018.

2) Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air menjadi istilah sederhana misalnya *Excelent, good, and bad*. Ini mencerminkan tingkat kualitas air di sungai, sungai, dan danau.

Hasil pengukuran indeks kualitas air di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sebesar 2,0956, hal ini disebabkan karena limbah rumah tangga belum terolah dengan sempurna, kemudian eksploitasi tanah oleh rumah tangga dan industri, khususnya air tanah bagian dalam, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang secara alamiah menjadi penyaring sekaligus penampung untuk air hujan dan pembuangan limbah industri ke perairan (sungai, danau, laut).

Sedangkan pada tahun 2019 indeks kualitas air memiliki target 3,115 dan mencapai target kinerjanya, sedangkan pada tahun 2018 memiliki target yang sama pada tahun 2019, karena jumlah titik pantau air sungai tetap, yaitu 14 sungai. Total titik sampling air pada tahun 2018 : 14 Sungai, 7 Instalasi PDAM, 4 Sumur Pantau, dan 5 air limbah sedangkan pada tahun 2019 14 sungai, 7 Instalasi PDAM, 4 Sumur pantau, dan 8 Limbah.

3) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Pengukuran indeks kualitas udara di Kab. Mamuju menggunakan data dari

Passive Sampler, yang mana diambil pada 4 (empat) titik, yaitu: daerah padat transportasi, daerah/kawasan industri, pemukiman penduduk, dan kawasan komersil/perkantoran.

Pada tahun 2018 hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 94,81 mengalami penurunan pada tahun 2019 diperoleh hasil sebesar 92,81, dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 92,88. Terjadinya penurunan walaupun tidak signifikan, akan tetapi perlu mendapat perhatian serius. Hal ini terjadi karena sumber pencemaran udara sendiri ada beragam. Mulai dari berbagai kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan hingga kebakaran hutan, menyebabkan zat-zat beracun seperti *karbon monoksida* (CO), *karbon dioksida*, dan *sulfur dioksida* terlepas ke udara, menyebabkan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global.

4) Pembuangan Sampah Penduduk

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020 jumlah timbunan sampah perkotaan (Kecamatan Mamuju dan Simboro) yang tertangani yang tertangani sebesar 48,17 % dibandingkan dengan jumlah timbunan sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2019 sebesar 44,37%. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dan 2020 yang mengalami peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan.

Persentase jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,64% dan mengalami penurunan jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2020 sebesar 0,13%.

Di tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan persampahan yaitu sebesar 4,64% mengalami kenaikan ditahun 2020 sebesar 6,62%. Hal ini dikarenakan memiliki perubahan luasan area pelayanan pengelolaan sampah dari Kecamatan Mamuju sekitar 22,159 Ha dan Kecamatan Simboro sekitar 3,301 Ha. Jumlah Operasional TPA di Kabupaten Mamuju tidak memiliki perubahan sama sekali dari tahun 2018 sampai 2020.

Adapun gambaran 5 (Lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II - 56

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	N/A	2,411	3,115	3,115	2.0956
2	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	N/A	155	157	151	3
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	N/A	N/A	94,81	92,81	92,88
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	N/A	90,91	90,91	90,91	82.61
5	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	N/A	100%	100%	100%	N/A
6	Timbulan sampah yang ditangani	N/A	29%	33,64%	44,37%	48,179
7	Persentase cakupan area pelayanan	N/A	4,64%	4,64%	4,64%	6,629 %
8	Persentase jumlah sampah yang tertangani	N/A	10%	11,97%	4,64%	0,13 %
9	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	N/A	1	1	1	1

Sumber : BPS dan Dinas Lingkungan Hidup 2017-2021

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan administrasi kependudukan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Adapun Standar Pelayanan Minimal tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.

1) Kepemilikan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Implementasi sistem informasi administrasi

kependudukan (SIAK) online perlu mendapatkan dukungan dengan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pengoperasiannya termasuk pelatihan pemeliharaan peralatan jaringan SIAK online.

Kepemilikan KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2020 sudah mencapai sebesar 167.649 penduduk dari 187.402 jumlah penduduk yang sudah wajib KTP di Kabupaten Mamuju dan masih ada 19.753 penduduk yang belum memiliki KTP karena masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman data untuk pembuatan KTP nasional.

Sedangkan kepemilikan KK pada tahun 2020 sudah mencapai 68.858 (91,28%) dari jumlah keseluruhan penduduk, dan masih ada 6.574 (8,72%) yang belum ada kepemilikan KK di Kabupaten Mamuju. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mendorong masyarakat yang belum memiliki KTP dan KK untuk dapat melakukan pengurusan agar segera mendapatkan kepemilikan KTP dan KK tersebut.

Tabel II - 57
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan KK
Kabupaten Mamuju Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
				KTP				KK			
				Sudah	%	Belum	%	Sudah	%	Belum	%
1	Mamuju	65.663	43.503	39.580	21,12	3.923	2,09	16,493	92,94	1.253	7,06
2	Tapalang	21.304	13.827	12.578	6,71	1.249	0,67	4,734	88,7	603	11,3
3	Kalukku	59.883	39.538	34.340	18,32	5.198	2,77	14,445	91,76	1.297	8,24
4	Kalumpang	12.103	8.328	6.666	3,56	1.662	0,89	2,881	88,51	374	11,49
5	Papalang	24.410	16.644	15.099	8,06	1.545	0,82	6,098	90,72	624	9,28
6	Sampaga	16.182	11.587	10.584	5,65	1.003	0,54	4,321	89,33	516	10,67
7	Tommo	23.270	16.006	14.700	7,84	1.306	0,7	5,706	88,62	733	11,38
8	Simboro	34.795	22.480	20.554	10,97	1.926	1,03	8,738	94,07	551	5,93
9	Tapalang Barat	11.658	7.142	6.481	3,46	661	0,35	2,655	91,05	261	8,95
10	Bonehau	9.637	6.951	5.837	3,11	1.114	0,59	2,287	87,42	329	12,58
11	Kep.Bala Balakang	2.261	1.396	1230	0,66	116	0,09	500	93,81	33	6,19
	JUMLAH	281.166	187.402	167.649	89,46	19.753	10,54	68,858	91,28	6,574	8,72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju, 2021

2) Penduduk Ber Akte Kelahiran dan Ber Akte Nikah

Akta kelahiran merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh Pemerintah terhadap bayi yang lahir, pemenuhannya harus dilakukan oleh orang tua bayi yang bersangkutan. Bayi merupakan anak berusia 0-5 tahun, tahun

2020 bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 25.304 atau 89.31% dari total jumlah penduduk 28.333 jiwa. Sementara kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk sebesar 82.752, dari jumlah penduduk Kab. Mamuju 0-18 Tahun sebesar 106.390 atau 77.78%. Hal ini menunjukkan masih banyak penduduk Kabupaten Mamuju yang belum memiliki akta kelahiran. Masyarakat Mamuju masih menilai bahwa akta kelahiran bukanlah sesuatu yang penting untuk dimiliki. Masyarakat baru akan mengurus akta kelahiran jika diperlukan, seperti saat anak akan sekolah.

Sedangkan terkait Akta nikah merupakan bukti yang sah telah terjadinya pernikahan satu pasangan. Besaran pasangan yang melakukan pernikahan dan memiliki akta nikah tahun 2020 di Kabupaten Mamuju masih sangat rendah yaitu sebesar 32.836 dan jumlah penduduk yang belum memiliki akta nikah sebesar 89.361. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dari pasangan yang telah melakukan pernikahan masih sangat minim.

Tabel II - 58
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah
Tahun 2020 Kabupaten Mamuju

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KESELURUHAN	JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN			
				AKTE KELAHIRAN		AKTE NIKAH	
				SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM
1	MAMUJU	65.663	24.772	20.707	4.065	8558	19733
2	TAPALANG	21.304	8.615	6.107	2.508	2174	6362
3	KALUKKU	59.883	23.286	17.404	5.877	6543	19046
4	KALUMPANG	12.103	4.251	2.990	1.261	1525	3559
5	PAPALANG	24.410	8.926	7.109	1.817	2756	8467
6	SAMPAGA	16.182	5.250	4.304	945	1724	6225
7	TOMMO	23.270	8.290	6.210	2.079	2355	8416
8	SIMBORO	34.795	13.787	10.838	2.948	4743	10454
9	TAPALANG BARAT	11.658	5.121	4.174	947	1041	3575
10	BONEHAU	9.637	3.127	2.133	994	1192	2935
11	BALA BALAKANG	2.261	965	776	189	225	589
	KAB. MAMUJU	281.166	106.390	82.752	23.630	32.836	89.361

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju, 2021

Tabel II - 59

**Gambaran capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	65,47	66,99%	73,12%	76,63%	89.48
2	Rasio bayi berakte kelahiran	32,21%	57,92%	63,93%	84,18%	77.78
3	Rasio pasangan berakte nikah	41,66%	41,66%	40,75%	35%	53.98
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	65,47%	66,99%	73,12%	76,63%	89.48
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	32,21%	57,92%	63,93%	94,42%	77.78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju, 2021

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama (pembangunan) yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal dalam paradigma pembangunan lama harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik, sebaliknya pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi local.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi ruang untuk dipraktikan pada paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Paradigma pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Desa dikenal dengan istilah “Desa Membangun”. Paradigma Desa Membangun sudah dipraktikan oleh desa yang mempunyai *agent of change* (AC) terutama pada struktur pemerintah desa. Hal ini karena AC dapat langsung memberikan masukan ataupun arahan bagi pembangunan desanya. Berkaca dari hal tersebut diperlukan stakeholder lain yang dapat juga berfungsi sebagai AC. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan masyarakat untuk memunculkan keberdayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi

masyarakatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintah tetapi juga stakeholder lain seperti *Non Government Organization* (NGO), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berdaya dari aspek kualitas SDM, berdaya dari aspek ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan. Dengan 3 aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakat dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau sebagai subyek motor penggerak, tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan.

Berkaitan dengan pemerintahan desa, permasalahan masih ditemui berkaitan dengan kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah desa belum mengarah pada pelayanan cepat dan memuaskan bagi masyarakat. Seringkali pengurusan administrasi di desa mengalami hambatan karena ketiadaan perangkat desa, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pengurusannya. Selain itu kapasitas perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya juga masih kurang memadai. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor desa.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Mamuju dapat dikaji melalui 9 (sembilan) indikator. Sampai dengan tahun 2019 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tercatat sebesar 85% hal ini menunjukkan capaian melebihi dari target yaitu 80%, Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) baru mencapai 1 dengan kata lain sudah memenuhi target tetapi masih kurangnya kader yang berpartisipasi aktif, Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK baru mencapai 1 lembaga telah memenuhi target, Persentase LSM aktif mencapai 120,65% dan telah memenuhi target yakni 80%, Persentase LPM Berprestasi baru mencapai 40% belum mencapai target.

Persentase PKK aktif tergolong tinggi yaitu sebesar 100 % telah memenuhi target 80%. Hal ini merupakan perubahan yang luar biasa, karena PKK menjadi

tonggak utama bagi kesejahteraan masyarakat dalam skala kecil yaitu keluarga dan kondisi tersebut tidak lepas dari peran ketua PKK bersama kepala daerah beserta jajarannya untuk terus membangun masyarakat melalui lembaga PKK,

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2016-2020 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Persentase Posyandu aktif mencapai angka 100% dan telah mencapai target.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan telah mencapai target yakni 35% dan indikator Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat mencapai angka 100%, indikator ini juga telah memenuhi target.

Walaupun secara kuantitas dari target capaian untuk 9 (Sembilan) indikator pada urusan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa, masih ada beberapa yang belum tercapai dan memenuhi target, sehingga secara kapasitas dan kualitas perlu ditingkatkan kembali. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencapaian target yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan dan peningkatan aktivitas PKK pada semua tingkatan, sehingga secara kelembagaan PKK bisa aktif dan memberikan kontribusi dalam pembangunan di masyarakat.

Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel II - 60
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	50	50	50	85	N/A
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah	1	1	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah	1	1	1	1	1
4	Persentase LSM aktif	Persen	25	25	50	70	120,65
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	15	25	35	40	N/A
6	Persentase PKK aktif	Persen	25	25	70	70	100
7	Persentase Posyandu aktif	Persen	25	25	96	84	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan	Persen	12	15	30	30	35

9	Pemeliharaan Pasca pemberdayaan masyarakat	Program	Persen	30	50	55	65	100
---	--	---------	--------	----	----	----	----	-----

Sumber: DPMD Kabupaten Mamuju, 2021

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang baru, karena urusan ini baru ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) sub urusan dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Keempat sub urusan tersebut adalah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, serta Standardisasi dan Sertifikasi. Meskipun ada 4 (empat) sub urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun untuk pemerintah kabupaten/kota hanya melaksanakan 3 (tiga) sub urusan kewenangan saja. Untuk sub urusan standarisasi dan sertifikasi dilaksanakan atau menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tabel II - 61

Pembagian Sub Urusan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sub Urusan	Rincian Kewenangan
1.	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju Pertumbuhan Kabupaten Mamuju Periode 2016 – 2020 cenderung meningkat. Data capaian menunjukkan pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk kabupaten mamuju sebesar 0,43% dan mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 2,62%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,12% dengan capaian sebesar 2,50% dan persentase tersebut berlanjut hingga tahun 2019. Di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,96%. Hal ini disebabkan karena naiknya angka kelahiran, angka kemiskinan yang masih tinggi yang berakibat pada kurangnya pendidikan, serta pengaruh meningkatnya arus imigrasi ke Kabupaten Mamuju yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berkenan.

2) Total Fertility Rate (TFR)

Tingginya angka TFR ini yaitu angka rata-rata per wanita disebabkan oleh masih tingginya angka *unmet need* (kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), dan masih relatif tingginya angka putus pemakaian kontrasepsi. Berdasarkan data capaian pada tahun 2020 *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,87%.

3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Pada Tahun 2016 Kampung KB di canangkan oleh Presiden RI, berdasarkan surat edaran Mendagri No: 440/70/SJ, tanggal 11 Januari 2016. Tanggal 27 Oktober 2017, Pada Tahun 2017 telah dicanangkan sebanyak 32 Kampung KB di Kabupaten Mamuju, dan di tahun 2018 jumlah kampung KB meningkat sebesar 46 Kampung KB dan di Tahun 2019 meningkat lagi sebesar 52 Kampung KB. Untuk Tahun 2020 tidak ada penambahan kampung KB sehingga jumlah kampung KB hingga tahun 2020 sebanyak 30. Namun dari 45 Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang ada hanya terdapat 12 OPD yang berperan Aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB atau sebesar 57%.

4) Jumlah kerjasama penyelenggaraan Pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 sebanyak 2 kerjasama dan di tahun 2016 – 2018 tidak tersedia data capaian, terkait Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan. Hal ini

disebabkan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) masih dalam pilot ProjeK untuk semua tingkatan pendidikan (TK, SD dan SMP: untuk kewenangan Kabupaten)

5) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Jumlah rata-rata anak yang lahir dalam satu keluarga cenderung meningkat. Tercatat capaian rata-rata jumlah anak Per keluarga pada tahun 2019 sebesar 69,50%. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat usia pernikahan pada perempuan dan laki-laki yang masih tinggi. Salah satu upaya mencegah pernikahan anak adalah dengan terus mengintervensi remaja melalui pusat informasi dan konseling (PIK) remaja serta sosialisasi program *Genre*.

6) Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan umur subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program 10.

Rata-rata jumlah akseptor KB pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 ratio akseptor KB kabupaten Mamuju sebesar 64,54% terjadi peningkatan 68.08% di tahun 2018 dan meningkat Kembali pada tahun 2019 sebesar 71,65%. Dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 73,70%. Artinya terdapat 73,70% akseptor KB aktif dari Pasangan Usia Subur (PUS) melakukan Advokasi KIE bagi pasangan usia subur.

7) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila sperma bertemu dengan sel telur.

Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama. Di Kabupaten Mamuju Angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2019 sebesar 56,56% terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 63,39%.

8) Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan

Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) adalah Banyaknya kelahiran selama setahun per 1000,100.000, atau 1.000.000 wanita pada kelompok umur tertentu. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) Kabupaten Mamuju tercatat pada tahun 2019 sebesar 40,83%. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 40,83%. Angka ini masih sama dengan tahun 2019 karena pendataan Keluarga baru terlaksana pada tahun 2021

9) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. pada tahun 2019 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 61,41%, hal ini kemungkinan dipicu masih banyak orang tua anak yang menikahkan anaknya pada usia di bawah 20 tahun karena factor ekonomi dan kurangnya edukasi tentang pasangan usia subur.

10) Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Pasangan Usia Subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. pada tahun 2020 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 61,41%, hal ini kemungkinan dipicu masih banyak orang tua anak yang menikahkan anaknya pada usia di bawah 20 tahun karena factor ekonomi dan kurangnya edukasi tentang pasangan usia subur.

Cakupan PUS *Unmet Need* pada tahun 2020 sebesar 9,16 % yang berarti belum tersentuh pelayanan KB dan petugas KB, sehingga memungkinkan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju. Untuk mengurangi angka *Unmet need* ini, maka salah satu yang harus diperhatikan adalah perluasan jangkauan petugas KB untuk melayani akseptor KB, khususnya PUS yang berada di daerah terluar, terpencil dan terbelakang, dengan cara membangun infrastruktur pelayanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang aksesibel terhadap kebutuhan. Perlu pelayanan mobile

bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas KB, menggalang mitra strategis dengan stakeholder dalam penggerakan program. Mengembangkan sistem rujukan alkon (alat kontrasepsi) yang berkelanjutan.

11) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk 3 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 18,80% Angka ini menunjukkan masih terdapat 81,20 % peserta KB aktif yang ber KB dengan metode yang masih memungkinkan *Drop Out* (DO), atau berhenti ber KB, atau terdapat 18,80% peserta KB yang aktif ber KB untuk jangka panjang yang sangat kecil untuk *Drop Out*. Untuk meningkatkan MKJP, maka hal yang harus dilakukan adalah perluasan jangkauan petugas KB untuk melayani akseptor KB, dengan cara membangun infrastruktur pelayanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang aksesibel terhadap kebutuhan, menyusun rencana aksi daerah percepatan target MKJP yang melibatkan semua sector terkait, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis.

12) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2020 sebesar 39,57%. Angka ini menunjukkan masih terdapat 60.43% peserta KB yang masih memungkinkan untuk tidak lanjut memakai kontrasepsi. Untuk meningkatkan keberlangsungan pemakaian Kontrasepsi, maka hal yang perlu disarankan adalah dorongan pemakaian MKJP. Pendampingan PUS yang ber KB yang mengalami komplikasi dan efek samping, sehingga tetap konsisten menggunakan alat kontrasepsi. Memperbanyak calon fasilitator KB, yang dapat memberikan Advokasi dan KIE kepada akseptor KB untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis.

13) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina Keluarga Balita adalah sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran Ibu serta anggota keluarga lainnya

dalam membina tumbuh kembang anak yang berusia balita. Dari 3 tahun terakhir presentase BKB Ber-KB mengalami peningkatan setiap tahunnya (2018-2020). Pada tahun 2018 tercatat capaian BKB ber KB sebesar 80,32%, di tahun 2019 tercatat sebesar 84,31%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 80,92% hal ini disebabkan banyaknya kelompok BKB yang sudah tidak aktif lagi.

14) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Bina Keluarga Remaja adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader. Presentase BKR Ber-KB, dari 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya (2018-2020). Pada tahun 2018 tercatat capaian cakupan anggota BKR ber KB sebesar 82,07% pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 67,03% sedangkan di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,94%. Hal ini kemungkinan disebabkan pembentukan Kelompok BKR hanya berdasarkan sasaran Remaja yang ada di wilayah kerjanya bukan PUS yang Ber-KB.

15) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia di atas 60 tahun ke atas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dari 3 tahun terakhir presentase BKL Ber-KB mengalami peningkatan setiap tahunnya (2018-2020). Pada tahun 2018 tercatat capaian cakupan anggota BKL ber KB sebesar 66,97% pada tahun 2019 sebesar 72,93% dan tahun 2020 tercatat sebesar 77,23%.

16) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan hingga tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) PPKS yaitu di Kecamatan Mamuju. Salah satu penyebabnya sehingga PPKS belum tersebar di setiap kecamatan adalah kurangnya kader terlatih tenaga konseling terkait (Kemenag, Psikolog, PIK Remaja, Bidan dll).

17) Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa PIK R merupakan singkatan dari kata Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dalam buku Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M), menyatakan bahwa Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 sebanyak 45 PIK R/M.

18) Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 telah mencapai angka 100%. Namun masih terkendala masih terdapat kesenjangan jumlah tenaga penyuluh dengan jumlah desa.

19) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri

Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera merupakan suatu wadah kegiatan "*beyond family planning*" untuk lebih memberdayakan ekonomi keluarga, terutamakeluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I peserta KB melalui proses pembelajaran usaha dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan keluarga akan bermanfaat bagi program keluarga berencana. Bagi wilayah dengan tingkat kesertaan ber-KB yang masih rendah, UPPKS memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesertaan ber-KB. Sebaliknya bagi wilayah dengan tingkat kesertaan ber-KB yang sudah tinggi, UPPKS akan memantapkan kesertaan dan kemandirian dalam ber-KB. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 sebesar 82,74%.

20) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio Petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap desa/Kelurahan telah memiliki PPKBD, dimana pada setiap Desa/Kelurahan memiliki terdapat 1 PPKBD.

21) Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 telah mencapai angka 100%. Namun masih terkendala pada stok alokon yang terlambat, Distribusi Alokon dari PKM ke jaringannya yang terlambat, Penyediaan Alokon merupakan Kewenangan Provinsi dan Pusat.

22) Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan mencapai 100% di tahun 2020, artinya seluruh Faskes dan jejaringnya telah bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

23) Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2020 menurun menjadi 80% dari tahun 2019 yang telah mencapai 100%, dikarenakan masih terdapat beberapa POKTAN yang belum melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga. Hal ini disebabkan Dukungan Pembiayaan Pembinaan yang tidak memadai dan sehingga difokuskan pada wilayah kampung KB.

24) Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 yaitu sebesar 70% hal ini dirasakan belum maksimal disebabkan belum tersedianya data sasaran keluarga balita.

25) Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata – rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2020 Kabupaten Mamuju adalah 21 tahun. Pemerintah terus mendorong agar usia nikah terendah bisa naik ke usia 22 tahun dan usia tertinggi yang dipilih 25 tahun. Upaya itu dilakukan dengan terus mengintervensi remaja melalui pusat informasi dan konseling (PIK) remaja serta sosialisasi program Genre.

Tabel II - 62

**Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,43	2,62	2,50	2,50	4,96
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	N/A	N/A	N/A	2,87	2,87
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas /Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	N/A	32	46	52	57
4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Persen	N/A	N/A	N/A	2	2
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	N/A	69,14	69,50	69,50	N/A
6	Ratio Akseptor KB	Persen	N/A	64,54	68,08	71,65	74,18
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	N/A	N/A	N/A	56,56	63,39
8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen	N/A	N/A	N/A	40,83	40,83
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	N/A	N/A	N/A	61,41	61,41
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	N/A	19,40	N/A	9,27	9,16
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	N/A	13,90	15,10	16,17	18,80
12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	N/A	N/A	N/A	39,57	39,57
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	N/A	77,14	80,32	84,31	80,92
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	N/A	90,83	82,07	67,03	71,94
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	N/A	61,43	66,97	72,93	77,23
16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Kecamatan	N/A	N/A	N/A	1	1
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	PIK R/M	N/A	26	44	45	45
18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	N/A	68,71	78,43	82,35	82,74
20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	N/A	98	98	98	1 PPKBD
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	N/A	N/A	N/A	100	80
24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	N/A	N/A	N/A	70	70
25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	N/A	N/A	N/A	21	21

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju Tahun 2021

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Perhubungan merupakan infrastruktur penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah. Penyelenggaraan perhubungan, perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan.

Terminal Bis, Pelabuhan Laut, dan Udara menjadi prasarana transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis terminal di Kabupaten Mamuju tahun 2020 sebanyak 6 Unit. Terdiri dari 3 Pelabuhan Laut, 1 Bandar Udara, dan 2 Terminal.

Kebijakan RPJMD Kabupaten Mamuju yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Yang meliputi Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan dan Pelaksanaan Uji Kir angkutan Umum. Pemasangan rambu rambu di Kabupaten Mamuju di tahun 2020 adalah sebesar 63%.

Jumlah arus penumpang angkutan umum sejak tahun 2016-2020 mengalami peningkatan Penumpang Angkutan Umum. Pada tahun 2019 berjumlah 1.078.296

unit mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 754.848 unit. Dan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di tahun 2019 sebanyak 1.122.187 orang mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 673.691. Persentase layanan angkutan darat di tahun 2019 sebesar 75%, mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 73%. Hal ini disebabkan adanya pembatasan berskala besar akibat dari dampak Pandemic Covid-19 sehingga adanya keterbatasan penumpang angkutan umum.

Dalam hal pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju, jumlah uji KIR angkutan umum di tahun 2019 sebanyak 1.221 unit kendaraan, mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 1.100 unit kendaraan. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di tahun 2019 sebanyak 40% juga mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 37%. Hal ini disebabkan karena ter kendala berupa fasilitas Uji Kir yang belum memenuhi Standar. Setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Capaian kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut.

Tabel II - 63
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Perhubungan						
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Unit	265.882	498.212	918.873	1,078,296.00	754.848
9.2.	Rasio ijin trayek	Persen	-	36%	42%	-	N/A
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit Kendaraan	1.000 Unit	2.000 Unit	1.079 Unit	1.221 unit	1.100 unit
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis	Unit	4 unit	4 unit	6 unit	6 unit	6 unit
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	Persen	75%	75%	75%	75%	73%
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	20%	40%	40%	40%	37%
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	30%	30%	48%	48,32%	63%
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	265.882	498.212	918.873	1.078.296	754,848
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara / terminal per tahun	Orang	324,761	559,702	961,879	1,122,817	673,691

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tahun 2021

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informasi

Media informasi dan komunikasi memiliki fungsi mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi dan komunikasi ke berbagai pihak dan lokasi. Media informasi dan komunikasi yang berkembang dimasyarakat salah satunya adalah *Handphone*. Banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya dalam pengembangan informasi dan komunikasi, selain sebagai media komunikasi, *handphone* memiliki peran dalam menyampaikan berbagai informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah banyak menumbuhkan warung internet (warnet) yang dikelola oleh masyarakat. Warnet adalah sebuah tempat yang menyediakan akses infrastruktur internet dengan mode berbagi koneksi dan perangkat akses komputer sehingga pengguna bisa mengakses internet dengan biaya yang lebih murah.

Dalam rangka mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju di Tahun 2020, telah memanfaatkan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan dan Desa telah mencapai 127 persen.

Cakupan layanan Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Mamuju di tahun 2020 mencapai angka 42 persen. Penduduk Kabupaten Mamuju yang menggunakan HP/Telepon sampai tahun 2020 sebesar 45 persen.

Proporsi rumah tangga dengan akses internet menunjukkan angka yang meningkat setiap tahunnya, yang dimana pada tahun 2018 mencapai 7 persen, dan meningkat ditahun 2020 sebesar 9 persen. Namun hal ini masih menggambarkan interpretasi yang belum tercapai dari target 10 persen yang ditetapkan.

Dan Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi capaian kinerja urusan dari tahun 2016-2020 menunjukkan angka dengan tren yang fluktuatif, ditahun 2018 mencapai 31 persen, mengalami penurunan ditahun 2019 mencapai 30 persen, dan ditahun 2020 meningkat menjadi 31 persen dari target yang ditetapkan sebesar 35 persen.

Selengkapnya mengenai kondisi kinerja bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II - 64

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
10.	Komunikasi dan Informatika					
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	N/A	6%	110%	134%	127%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	N/A	19%	19%	19%	42%
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	N/A	45%	45%	45%	50%
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	N/A	6,54%	7%	7,67%	9%
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	N/A	32%	31%	30%	31%

Sumber : Dinas Kominfo, Informatika dan Persandian 2021

2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif, sebagai bagian dari dinamikanya UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. UKM juga memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar. Selain itu juga usaha kecil dan usaha rumah tangga telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu Pemberdayaan Koperasi dan UMKM harus selaras dengan perkembangan otonomi daerah, sehingga Pembangunan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Mamuju yang tertuang dalam Misi tiga bahwa urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu ditingkatkan, sehingga sasaran umum pembangunannya dapat dicapai, yaitu Meningkatnya produktivitas UKM, meningkatnya proporsi usaha kecil formal, meningkatnya nilai produksi usaha kecil dan menengah, Meningkatnya kelembagaan dan organisasi koperasi. Untuk itu pemberdayaan bagi mereka terus digalakkan, yaitu melalui kebijakan Pemberdayaan dalam berusaha dan Pemberdayaan kelembagaan. Dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala kendala yaitu lemahnya kemampuan manajemen dalam mengelola UKM, kurangnya pengetahuan dan kemampuan ketrampilan dalam meningkatkan kualitas produk yang baik guna menaikkan omset penjualan, kurangnya daya saing dengan produk daerah lain dalam mutu dan desain produk

serta belum luasnya jaringan akses pasar untuk jangkauan pemasaran.

Dinas koperasi UKM dan perindustrian Melaksanakan menyelenggarakan Urusan koperasi usaha kecil menengah yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 UU. No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sesuai amanah UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan PP No. 17 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan sebagai upaya untuk mencapai Visi Misi RPJMD 2016-2021 Serta IKU Daerah 2016-2021,

Sebagai upaya untuk mencapai urusan Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju dengan berdasar kepada Sasaran strategis dan Indikator Utama, maka Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju memiliki 4 (Empat) Indikator.

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan data table di bawah persentase koperasi aktif di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan di tahun 2016-2020. Pada tahun 2018 persentase koperasi aktif di Kabupaten Mamuju sebesar 82%, kemudian stagnan di tahun 2019 hanya sebesar 82%, dan mengalami perkembangan di tahun 2020 sebesar 83,46%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan 3 koperasi yang tidak aktif dan tidak melaporkan Hasil Rapat Anggota 3 (Tiga) Tahun Berturut-turut serta tidak lagi melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat, dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia NOMOR 23/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak

Koperasi pada Pasal 1 (Satu) Ayat 4 (Empat) mengatakan bahwa Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat, hal ini akan bisa diatasi dengan cara Monitoring, Evaluasi terhadap Koperasi dalam Kepatuhan pengurus Koperasi dalam melakukan RAT.

2) Persentase UKM Non BPR / LKM Aktif

Usaha Kecil Menengah non BPR adalah Usaha yang memperoleh Modal Usaha melalui Non BPR Khususnya pada Kabupaten Mamuju masih sangat kecil ini dapat dilihat pada tahun 2018 hanya 7,00 persen dan turun pada tahun 2019 sebesar 4.82% kemudin ditahun 2020 menjadi 6,94%, banyak peluang membuka usaha dengan permodalan tanpa melalui Lembaga Keuangan namun masyarakat Kabupaten Mamuju tidak mau mengambil resiko dalam mengembangkan usahanya dengan pinjaman Non Lembaga Keuangan.

3) Persentase BPR/LKM Aktif

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun Persentase BPR/LKM di Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 sebesar 57 %, meningkat pada tahun 2019 sebesar 59.05% dan meningkat lagi pada tahun 2020 sebesar 61,08%. Hal ini dikarenakan peran aktif dari BPR dan LKM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju.

4) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Menurut Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro dan Kecil adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria yaitu Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta.

Kondisi Usaha Mikro dan Kecil pada Kabupaten Mamuju masih belum berkembang ini dibuktikan pada tahun 2018 presentase Usaha Mikro dan Kecil mencapai 9%, menurun pada tahun 2019 menjadi 5,13% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 12,54%, namun pertumbuhan ini belum

signifikan diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kemampuan penetrasi pasar yang masih rendah karena produksi yang dihasilkan masih berskala kecil walaupun di Kabupaten Mamuju Lembaga Keuangan berkembang tapi pelaku usaha harus didampingi dan diberikan pembinaan sehingga dalam mengelola usahanya menjadi lebih baik.

Adapun gambaran capaian 5 (Lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II - 65
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	81,80%	84%	82%	82%	83,40%
2	Persentase UKM non BPR/ LKM aktif	4,59%	7,50%	7,00%	4,82%	6,94%
3	Persentase BPR/LKM aktif	12,71%	57,04%	57,00%	59,05%	61,08%
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	5,49%	13,47%	9,00%	5,13%	12,54%

Sumber : BPS dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Tahun 2017-2021

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Mamuju 2016-2021 telah ditetapkan 4 (Empat) indikator utama terkait urusan penanaman modal yakni, jumlah investasi dan nilai investasi dimana untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah DPM-PTSP menetapkan Tiga Indikator Kinerja DPM-PTSP berdasarkan IKU DPM-PTSP dan RENSTRA DPM-PTSP sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Peningkatan jumlah investasi, DPM-PTSP menyelenggarakan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang di dukung oleh dua kegiatan. Kegiatan pertama berbentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal di Kabupaten Mamuju dan yang kedua, penyusunan potensi unggulan Kabupaten Mamuju. Meski demikian, tak bisa kita pungkiri bahwa keragaman sektor unggulan yang kita miliki tidak terlalu luas, sehingga jenis usaha/pengusaha tidak memiliki pilihan yang terlalu banyak untuk berinvestasi.

Pada table dibawah dijelaskan bahwa jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Mamuju mengalami penurunan yang sangat drastic di tahun 2020 yaitu sebesar 2 investor, yang di tahun sebelumnya tahun 2019 berjumlah 39 investor dari target pencapaian indikator untuk jumlah investasi sebanyak 65 perusahaan.

Target pencapaian indikator untuk nilai investasi sebesar Rp. 877.000.000.000. Dalam capaiannya jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 menunjukkan angka Rp.165.917.200,00, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan nilai investasi yang dapat dicapai hanya sebesar Rp. 149.030.360.000 nilai investasi, artinya, pada tahun 2019 mengalami penurunan senilai hampir Rp.16.886.840.000,- atau pada angka 11.33%. Hingga di tahun 2020 terus mengalami penurunan senilai hampir Rp. 87.543.750.000. Hal ini disebabkan karena untuk jenis izin penanaman modal lebih banyak dikelola di Provinsi sedangkan di Kabupaten hanya mengelolah jenis usaha dibawah modal 500 juta tidak termasuk dalam nilai investasi penanaman modal.

Pada tahun 2019 target tenaga kerja pada Perusahaan PMDN/PMA sebanyak 300 orang atau 5,82 dan realisasi yang diperoleh sebanyak 335 orang atau 8,58. Dengan demikian target dicapai melebihi target yang sudah ditetapkan.

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 menunjukkan angka realisasi Rp.134.632.805.914, kemudian nilai realisasi PMDN mengalami kenaikan di tahun 2019 di angka realisasi Rp.227.630.568.435, namun nilai realisasi PMDN di tahun 2020 mengalami penurunan angka realisasi Rp. 43.714.875.478. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah investasi yang masuk semakin menurun

Adapun gambaran indikator kinerja selama 5 (Lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II - 66
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	40	25	37	39	2
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	N/A	349.35 1.077. 766	165.91 7.200.0 0	149.0 30.36 0.000	87,543 ,750,0 00
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	N/A	N/A	N/A	8,58	N/A
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	258.1 75.94 5.791	149.13 4.965. 567	134.63 2.805.9 14	227.6 30.56 8.435	43.714 .875.4 78

Sumber : BPS dan Dinas Penanaman Modal Tahun 2017-2021

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi pemuda dan olahraga menjadi bagian dari wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan hobi sekaligus ajang peningkatan prestasi. Idealnya ada pembinaan terhadap organisasi pemuda dan pembinaan prestasi olahraga sehingga dapat eksis pada ajang di tingkat provinsi dan nasional.

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda adalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Mamuju dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Persentase organisasi pemuda yang aktif pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 23,53% dan pada tahun 2020 sebesar 23,65%.

2) Persentase Wira Usaha Muda

Persentase wira usaha muda selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2020 persentase wira usaha muda mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,06% atau sebesar 11,82%. Namun pencapaian tersebut belum sesuai target yang direncanakan yaitu sebesar 12,26%.

3) Cakupan Pembinaan Olahraga

Selain kepemudaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap atlet atlet berprestasi yang ada di Kabupaten Mamuju.

Jumlah keseluruhan cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mamuju sejak tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2020 cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,25% atau sebesar 50,25%.

4) Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat dari tahun 2018 hingga 2020

cenderung meningkat, jumlah pelatih bersertifikat hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 cakupan pelatih yang bersertifikasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 38,37% jika dibandingkan capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 38,18%.

5) Cakupan pembinaan atlet muda

Cakupan pembinaan atlet muda Pada tahun 2018 hingga 2020 cenderung meningkat tercatat di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,25% atau 50,25% jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 50,00%. Namun pencapaian tersebut belum memenuhi target yang direncanakan yaitu sebesar 50,5% hal ini kemungkinan disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana seluruh cabang olahraga

6) Jumlah atlet berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada perkembangan jumlah atlet berprestasi yang pada tahun sebelumnya hanya berjumlah 5 atlet, bertambah menjadi 6 atlet di tahun 2020.

7) Jumlah prestasi olahraga

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Capaian jumlah prestasi olahraga selama kurun waktu 5 tahun stagnan pada 2 cabang olahraga. Peningkatan kualitas pelatih dan kuantitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Diharapkan agar pemerintah mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan di

kabupaten Mamuju.

Tabel II - 67
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	22,53	23,30	23,41	23,53	23,65
2	Persentase wirausaha muda	Persen	10,76	11,64	11,70	11,76	11,82
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	49	49,50	49,75	50,00	50,25
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	37,18	37,80	37,99	38,18	38,37
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	49	49,50	49,75	50,00	50,25
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	5	5	5	5	6
7	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	2	2	2	2	4

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Mamuju Tahun 2021

2.3.2.14 Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegritas

Penyediaan data statistik daerah dilakukan dengan menyusun data dan informasi tentang kondisi sosial budaya, kependudukan dan ekonomi yang dalam penyusunannya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju.

Data dan Statistik Kabupaten Mamuju periode 2016 – 2020 selalu menyediakan data dan statistik setiap tahunnya. Disamping itu dalam upaya mengembangkan sistem data dan informasi untuk menghasilkan data yang

akurat, dilakukan pendampingan dalam penyusunan profil desa/kelurahan yang meliputi kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi pendataan seperti Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Dan salah satu dukungan pemerintah adalah dengan menyediakan server di kabupaten untuk menampung data-data yang dikelola oleh pemerintah Desa/Kelurahan. Diharapkan dengan penyusunan data secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten akan menghasilkan data riil sesuai dengan kondisi yang ada.

2) Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Kabupaten Dalam Angka merupakan sajian data dan informasi mengenai keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, Sosial budaya, pertanian, industri, perekonomian, transportasi, perhotelan dan pariwisata, keuangan dan pendapatan daerah. Kabupaten Dalam Angka berisi informasi data statistik perkecamatan dan digunakan sebagai data basis dalam perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan Buku Kabupaten dalam angka (Daerah Dalam Angka) merupakan kegiatan yang secara rutin selalu dilaksanakan. Dalam penyusunannya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju sebagai lembaga resmi untuk mengolah dan mempublikasikan data-data statistik. Pada tahun 2016 - 2020 Penyusunan Buku Kabupaten Dalam Angka tidak hanya diperuntukkan Kabupaten saja tetapi Buku Kecamatan Dalam Angka juga disusun.

3) Buku (PDRB)

Penyusunan Buku PDRB, bertujuan untuk mengetahui perkembangan perekonomian Kabupaten Mamuju. Produk Domestik Regional Bruto atau biasa disingkat PDRB merupakan salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Dengan adanya data PDRB dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah kedepan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Buku PDRB juga merupakan kegiatan yang secara rutin selalu dilaksanakan. Dalam penyusunannya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju sebagai lembaga resmi untuk mengolah dan mempublikasikan data-data statistik. Pada tahun 2016 - 2020 Penyusunan Buku

PDRB Kabupaten Mamuju selalu disajikan setiap tahunnya.

Tabel II - 68
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegritas	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku (PDRB)	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju Tahun 2021

2.3.2.15 Urusan Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian adalah untuk pelayanan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota. Kewenangan pembangunan pada urusan persandian meliputi indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Mamuju telah berjalan secara baik dilihat dari tabel dibawah ini pada tahun 2017 mencapai 11 persen, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 22 persen hingga di pada tahun 2020, namun hal ini masih menunjukkan interpretasi yang belum tercapai. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait. Secara rinci kinerja urusan persandian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II - 69
Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
15.	Persandian					
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	N/A	11%	22%	22%	22%

Sumber : Dinas Kominfo, Informatika dan Persandian 2020

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kabupaten Mamuju selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kabupaten yang penuh dengan beragam budaya. Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya-

budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kabupaten Mamuju sebagai kabupaten yang beragam budaya yang dikenal luas di tingkat nasional bahkan mancanegara. Sebagai wahana untuk dapat melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Mamuju setiap tahunnya selalu melakukan penyelenggaraan festival seni dan budaya dihari HUT Hari Jadi Mamuju, rangkaian Festival Pameran Adat, dan di festival-festival lainnya. Untuk lebih jelasnya Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya, Karya-karya Budaya, dan Cagar Budaya, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II - 70
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	5	5	5	1
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	0	1	0	1	0
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	obyek	6	6	6	6	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	obyek	3	3	3	3	0

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju Tahun 2021

2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Mamuju. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan.

Perpustakaan merupakan wadah bagi bahan pustaka baik tercetak maupun terekam yang dikelola secara teratur dan sistematis, disamping itu perpustakaan merupakan suatu aspek yang sangat berperan penting dalam memajukan perkembangan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih berwawasan. Sedangkan tinjauan perpustakaan di Kabupaten Mamuju masih menunjukkan minimnya perpustakaan dan kesadaran masyarakat dalam menyadari betapa pentingnya perpustakaan, sebagaimana akan di uraikan pada Capaian Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Mamuju yang dapat dikaji melalui 6 (enam) Indikator

sebagai mana yang termuat didalam Permendagri 86.

Capaian indikator Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Kunjungan Perpustakaan di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2016 jumlah pengunjung mencapai 1.50% atau 4.300 Orang, dan meningkat secara signifikan ditahun 2018 mencapai 10.52% atau 24.892 orang, dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 9.27% atau 22.104 orang. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang Perpustakaan, sehingga pustakawan tidak mengetahui secara pasti mengenai informasi minat baca masyarakat yang bisa menarik pengunjung perpustakaan. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dituntut harus mengetahui tentang latar belakang, minat, selera, kekuatan dan kebiasaan membaca masyarakat yang dilayaninya.

Capaian Indikator Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menggambarkan kondisi tidak tercapai, dimana pada tahun 2017 menunjukkan kinerja 46.24%, ditahun 2018 atau 40.86%, dan menurun hingga 40.13%. Fluktuatifnya ketersediaan Koleksi Buku yang menurun dikarenakan kurangnya fasilitas perpustakaan yang memenuhi standar, Suatu perpustakaan tidak akan ada artinya bila koleksi yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Semua koleksi hendaknya dipilih secara cermat, disesuaikan dengan standar kebutuhan pemakai perpustakaan dalam suatu skala prioritas yang telah ditetapkan dan mencakup persyaratan seperti bagian Isi buku, Bahan yang digunakan, Ciri fisik buku dan Otoritas pengarang/ penerbit. maka Untuk mendukung proses pemilihan koleksi buku perpustakaan secara baik dan optimal tersebut perlu ditetapkan alat bantu seleksi, diantaranya daftar judul buku, bibliografi, katalog, brosur penerbit, daftar terbitan berkala, dan usulan dari siswa/guru/masyarakat.

Indikator Rasio perpustakaan persatuan penduduk diukur dengan Jumlah perpustakaan yang dibangun dibagi jumlah penduduk dan dikali 1000. Dalam kurun waktu 3 tahun 2017-2019 meningkat setiap tahunnya, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya penambahan jumlah perpustakaan yang mencapai 477 perpustakaan dengan capaian rasio 2.00 pada tahun 2019 yang dari capaian semula sebesar 388 perpustakaan atau dengan rasio 1.68 pada tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi karena belum adanya regulasi aturan dari Kepala Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan, sehingga pembangunan perpustakaan masih terbatas. Dengan hal itu juga mempengaruhi kurangnya pengunjung perpustakaan dan keterbatasan jumlah koleksi judul buku baik yang di kelolah oleh pemerintah daerah maupun non pemerintah. Maka kedepannya Pemerintah perlu menetapkan aturan tentang

Pengelolaan Perpustakaan.

Indikator Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun menunjukkan tren yang meningkat meskipun jumlahnya fluktuatif. Peningkatan dari sebesar 4.300 orang pada tahun 2016 menjadi 22.104 orang pada tahun 2019, meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat juga meningkat. Namun peningkatan ini dipengaruhi dengan adanya perpustakaan keliling yang membantu masyarakat untuk membangun minat baca. Tetapi tidak menutupi bahwa tujuan perpustakaan yang dikelola harus mengenali komunitas pengguna perpustakaan dan kebutuhan informasi pengguna harus tepat, cepat, dan akurat, sehingga minat pengunjung Perpustakaan dapat semakin meningkat.

Indikator Jumlah koleksi judul buku perpustakaan, dilihat dari capaiannya selama 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2017-2019 sangat meningkat, yaitu pada tahun 2017 jumlah koleksi judul buku sebesar 801 buku dan di tahun 2019 menjadi 15.840 buku, namun peningkatan koleksi judul buku ini tidak selaras dengan jumlah buku bacaan di perpustakaan. Dikarenakan kurangnya pemahaman pustakawan dalam melakukan proses seleksi koleksi untuk menentukan koleksi judul buku mana yang memang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Maka dalam melakukan penambahan koleksi judul buku, pustakawan tidak boleh melakukan pemilihan bahan koleksi berdasarkan inisiatif atau keinginan subyektif semata. Pengadaan harus di dasarkan pada kebutuhan pengguna dan kebijakan yang selaras dengan visi misi institusi perpustakaan, agar pengembangan jumlah koleksi judul buku bisa terarah dan tepat guna.

Indikator Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat, menunjukkan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2016 menunjukkan angka 40 ditahun 2018 meningkat dengan angka 40 dan ditahun 2019 terjadi penurunan dengan angka 35, sehingga diinterpretasikan belum tercapai. Ini terjadi karna tenaga yang dilatih sering berpindah-pindah karena adanya mutasi pegawai, sehingga kurang maksimalnya Bimbingan Teknis yang dihasilkan. Maka perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan Bimtek Tenaga Pustakawan/tenaga teknis/penilai setiap tahunnya. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II - 71

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	4.300	15.374	24.892	22.104	N/A
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	N/A	46.24%	40.86%	40.13%	N/A
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio/1000	N/A	1.68	1.70	2.00	N/A
3.	Jumlah Perpustakaan	Unit	1	388	403	477	N/A
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Persen	1.50	6.67	10.52	9.27	N/A
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	801	1.701	3.299	15.840	N/A
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	N/A	40	40	35	N/A

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju, 2021

2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik sangat dibutuhkan dalam dunia organisasi, mengingat bahwa kegiatan dan tujuan organisasi selalu berkembang dengan sistem penanganan kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan, sederhana dalam penerapan, dan mudah dilaksanakan. Diharapkan arsip yang memiliki nilai guna dapat digunakan secara optimal, ditemukan dengan cepat dan tepat jika dibutuhkan. Penanganan arsip yang tepat juga dapat mempermudah dalam proses perencanaan pembangunan. Pemimpin dapat menentukan kebijakan dengan cepat dengan ketersediaan arsip yang cepat dan tepat.

Dalam pengelolaan arsip, ada beberapa hal yang dibutuhkan guna menunjang dan mewujudkan sistem pengelolaan dan pelayanan arsip yang prima, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten (tenaga arsiparis dan tenaga pendukung yang melek IT), ruangan/gedung penyimpanan arsip yang memadai, dan prasarana elektronik.

Di Kabupaten Mamuju, capaian kinerja Urusan Kearsipan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja yang masih belum optimal seperti Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, Peningkatan SDM pengelola kearsipan, dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional).

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara

baku, pada kondisi ini capaian indikator kinerja presentase perangkat daerah yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Mamuju sudah menunjukkan tercapainya target indikator yang ditetapkan yaitu tiap tahunnya fluktuatif meningkat. namun jika dilihat pada kondisi kenyataannya tenaga kearsipan yang sudah dilatih juga sering berpindah-pindah karena adanya mutasi pegawai, sehingga penataan kearsipan belum optimal di Perangkat Daerah. kedepannya diperlukan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan SDM arsip paris untuk seluruh Perangkat Daerah baik dalam penetapan personil maupun pengembangan jabatan fungsional.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan selama periode 2016-2020, capaian kerjanya telah menunjukkan tercapainya target indikator yang ditetapkan, namun hal ini tidak menutupi masih kurangnya Tenaga Kearsipan yang Bersertifikat sehingga perlu lagi untuk menerapkan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang berkompeten dan bersertifikat.

Sementara itu, pada indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, selama periode 2016-2020 telah menunjukkan adanya peningkatan dengan capaian yang cenderung fluktuatif. walaupun dengan tingkat ketersediaan arsip yang ditunjukkan ini masih belum mencapai target indikator yang ditetapkan. Kondisi ini dapat terjadi karena kurangnya SDM dalam penatausahaan arsip untuk seluruh Perangkat Daerah baik dalam penetapan personil maupun pengembangan jabatan fungsional dan belum adanya penyajian Sistem Jaringan Informasi Arsip.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan Kearsipan dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel II - 72

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan tahun 2016-2020 di Kabupaten Mamuju

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
18.	Kearsipan						
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	10.86	10.86	13.04	13.04	N/A
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	-	2	2	2	N/A
18.3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja,	%	10.86	10.86 %	13.04	13.04	N/A

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)						

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju, 2021

2.3.3 Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pelayanan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang mencakup : Kelautan Dan Perikanan, Pariwisata Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Dan Transmigrasi.

2.3.3.1 Urusan Kelautan dan perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kabupaten Mamuju dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kabupaten Mamuju memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif

Target Produksi Perikanan Daerah sebesar 76.394 Ton atau persentase kenaikan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 3,74% atau terbagi 2 Yaitu produksi perikanan tangkap sebesar 16.170 ton dan produksi budidaya perikanan sebesar 60.224 ton. Berikut uraian capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan Target RENSTRA produksi perikanan tangkap Tahun 2020 sebesar 17.720 Ton dengan realisasi Produksi Perikanan Tangkap sebesar 17.751 Ton atau 100,18%. Jika dibandingkan target tahun 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.550 Ton atau 8,75% sedangkan realisasi produksi tahun 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 3.884 Ton atau 17,95%. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang paling dirasakan nelayan yaitu harga ikan yang turun drastis dikarenakan permintaan berkurang warung dan restoran ditutup serta daya beli masyarakat jg berkurang. Hal ini tidak sebanding dengan tenaga dan operasional yang dikeluarkan saat melaut sehingga banyak nelayan banyak beralih profesi sementara. Peningkatan produksi perikanan tangkap tersebut di tunjang oleh Program dan Kegiatan yang di Anggarkan di tahun 2020 yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang

mempunyai beberapa kegiatan diantaranya:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan sumber anggaran dari DAK/DAU berupa Kapal 2,5 GT, mesin ganset, mini pureseine, mesin katinting 9 PK, mesin katinting 13 PK, mesin dalam 33 PK, Tandon air. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan produksi hasil perikanan tangkap serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2. Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap dengan kegiatan berupa pengadaan fishfinder, radio komunikasi, lampu tenaga surya dan GPS. Tingkat keberhasilan hasil tangkapan Selama ini nelayan dalam menentukan daerah penangkapan ikan masih menggunakan cara cara traditional. Mereka hanya mengandalkan insting dan navigasi alam yang berdasarkan pada posisi bintang dan lamanya jarak tempuh. Dengan adanya kegiatan ini berupa GPS dapat membantu menentukan posisi lintang dan bujur diatas permukaan bumi secara tepat. Kemudian dapat pula digunakan untuk mencari posisi pemasangan alat tangkap, menandai posisi dasar perairan yang merusak alat penangkap ikan tertentu, memonitor pergerakan alat penangkap ikan yang dihanyutkan, menandai daerah penangkapan ikan yang berpotensi untuk penangkapan hari berikutnya sehingga meningkatkan produksi perikanan tangkap.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Sesuai Target RENSTRA untuk produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020 sebesar 61.269 Ton dengan realisasi sebesar 50.047 ton atau hanya mencapai 81,68%. Jika dibandingkan realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2019 yang mencapai 83.663 Ton atau mengalami penurunan sekitar 11.222 ton atau 22,42%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 ini beberapa pembudidaya yang memasuki masa panen kesulitan memasarkan hasil produksi karena serapan pasar ikan budidaya mengalami penurunan permintaan pasar ditambah lagi adanya refocusing anggaran sehingga banyak kegiatan pengadaan batal dilaksanakan.

1. Program Kegiatan yang dianggarkan di tahun 2020. yaitu Program pengembangan budidaya perikanan dan Program pengembangan kawasan budidaya laut, airpayau dan air tawar dengan sumber anggaran DAK/DAU berupa pengadaan bibit dan pakan BBI, pengadaan bibit dan pakan air tawar dan air payau

c. Konsumsi Ikan Daerah

Target Konsumsi ikan daerah tahun 2020 adalah 41 Kg/kapita/tahun dengan realisasi 40/Perkapita/tahun atau rata-rata konsumsi ikan sekitar 122,7gram/orang/tahun dari 11 kecamatan atau hanya mencapai mencapai 97,59 % sedangkan pada tahun 2019 realisasi konsumsi ikan daerah sebesar 40Kg/kapita/tahun. Hal ini dipengaruhi dampak dari pandemic covid 19 sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat turun sehingga masyarakat mencari alternatif pengganti ikan seperti olahan tempe dan tahu yang lebih terjangkau.

d. Cakupan bina kelompok perikanan

Target RENSTRA tahun 2020 pada cakupan bina kelompok perikanan atau jumlah kelompok perikanan yang dibantu oleh pemda berupa bantuan pengadaan sarana (fisik) maupun pemberdayaan dan peningkatan SDM kelompok perikanan (non fisik).

Target cakupan bina kelompok sampai dengan tahun 2020 sebanyak 480 kelompok dengan realisasi 855 Kelompok atau 178 % dengan target kenaikan sebesar 120 kelompok/tahun dengan realisasi 298 kelompok. Dari 298 Kelompok perikanan yang dibantu oleh pemda di tahun 2020 yang terdiri dari jumlah kelompok penerima bantuan berupa pengadaan sarana perikanan sebanyak 208 kelompok dan 90 kelompok yang mengikuti bimtek dalam rangka peningkatan SDM perikanan. Jika dibandingkan realisasi kenaikan cakupan bina kelompok ditahun 2019 yang sebesar 198 kelompok dengan tahun 2020 yang 298 kelompok mengalami kenaikan 102 kelompok atau 152%.

Tabel II - 73

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2020 di Kabupaten Mamuju

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Persen	6,407	13,772	20.765	21.635	17.751
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	N/A	N/A	61.558	83.663	50.047
3	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	N/A	294	187	196	298
4	Produksi perikanan	Ton	59.70	104	112	138	138
5	Produksi ikan	Ton	42,537	73,859	82,323	105,298	141,400
6	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	37	37	38	41	40
7	Konsumsi ikan	Persen	106	97.37	97.44	113	97,59

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju, 2021

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan baik individu maupun grup dari tempat tinggal menuju suatu tempat tertentu untuk mendapatkan pengalaman diluar aktivitas kesehariannya (seperti: bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dll) dalam waktu yang sementara. Hal ini yang sangat dikejar oleh tiap daerah untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah, untuk mendapatkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju mengamanahkan hal tersebut ke Dinas Pariwisata dengan cara meningkatkan destinasi wisata dan Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata dengan diperkuat oleh 3 (Tiga) indikator sebagai mana yang termuat didalam permendagri 86. Dinas Pariwisata diharuskan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dengan memperkuat Promosi dan pemasaran. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamuju sebanyak 23.700 orang dan naik di tahun 2017 sebanyak 24.216 orang namun pada tahun 2019 turun drastis menjadi 10.000 orang, pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamuju kembali meningkat sebanyak 20.500. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan harus didukung dengan pengembangan objek wisata, cagar budaya dan kearifan lokal sehingga indikator yang menunjang keberhasilan pariwisata bisa berhasil. Adapun gambaran indikator kinerja selama 5(Lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II - 74
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pariwisata					
1.1.	Kunjungan wisata	23,700	24,216	16,100	10,000	20.500
1.2.	Lama kunjungan Wisata	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 jam
1.3.	PAD sektor pariwisata	80,125	81,200	67.36	32,500 jt	50.100

Sumber : BPS dan Dinas Pariwisata Tahun 2017-2021

2.3.3.3 Urusan Pertanian

Urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dilaksanakan untuk memenuhi 6 (Enam) indikator yaitu Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, Kontribusi pertanian, dan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB diperoleh dengan membandingkan antara jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian terhadap jumlah PDRB dikali 100. Berdasarkan buku PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik kategori pertanian, kehutanan dan perikanan meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Subkategori usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 68,31%.

kontribusi sektor pertanian Indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah kontribusi sektor pertanian terhadap jumlah PDRB sektor pertanian dikali 100. Dari data Badan Pusat Statistik diperoleh bahwa kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB mengalami kenaikan pertahunnya dan pada tahun 2017 sebesar 12,07 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 15,17% , Kembali menurun ditahun 2020 sebesar 14,04%. Tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten mamuju yaitu padi, jagung dan kedelai. Untuk mengetahui produktivitas dihitung dengan cara jumlah produksi tanaman pangan dengan satuan ton di bagi dengan luas areal tanaman pangan dalam hektar dikali 100 dan pada Tahun 2019, produktivitas padi 36,27kw/ha, jagung 48,94kw/ha, dan kedelai 12,12 kw/ha.

Tabel II - 75
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Pertanian					
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	N/A	36,68	37,19	35,94	37,26
2.2.	Kontribusi Pertanian	N/A	12,07	14,16	15,17	14,04
2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	5225	5283	5295	5286	N/A

Sumber : BPS dan Dinas Pertanian Tahun 2016-2020

2.3.3.4 Urusan Kehutanan

Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan taman hutan rakyat. Kabupaten Mamuju tidak memiliki taman hutan rakyat.

2.3.3.5 Urusan Energi dan sumber daya mineral

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Mamuju diarahkan pada Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan bagi generasi yang akan datang serta memperlakukannya sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal serta pemanfaatan Energi dan Sumberdaya Mineral yang diimbangi dengan upaya reklamasi dan sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan..

1) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Mamuju dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sampai tahun 2019, belum semua wilayah Kabupaten Mamuju tersambung dalam jaringan PLN. Jumlah pelanggan PLN (Persero) Area Mamuju pada tahun 2019 mencapai 56.671 pelanggan atau meningkat 8,46 persen dibanding tahun 2018. Angka ini terus mengalami peningkatan Sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan, jumlah listrik terjual juga meningkat pada tahun 2019. Jumlah listrik terjual meningkat 10,12 persen. Selain PLN beberapa wilayah kecamatan terjauh masih menggunakan sumber listrik lain diantaranya PLTS, PLTMH dan Genset yang dimanfaatkan oleh masyarakat di desa tetapi jumlah KK yang memanfaatkan belum terdata dengan baik.

2) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan listrik adalah jumlah daya listrik terpasang dibagi jumlah kebutuhan. Jumlah daya listrik terpasang Kabupaten Mamuju pada tahun 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2019 jumlah daya listrik terpasang sebesar 50 MVA sementara jumlah kebutuhan sebesar 14.873.536 WH.

3) Pertambangan

Secara umum potensi tambang dan energi di Kabupaten Mamuju cukup besar baik dari sisi jumlah cadangan yang ada dan banyaknya aktivitas.

Pemanfaatan di sektor pertambangan, namun demikian dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal itu sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaannya oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengawasan dan pemantauan secara ketat sehingga pelanggaran di sektor pertambangan tidak akan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan melakukan kegiatan pengendalian sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.

Tabel II - 76

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	Persen	76,62	84,89	89,82	93,77	N/A

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju Tahun 2021

2.3.3.6 Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan yang bertujuan untuk mencapai target (1) Persentase kasus peredaran barang ilegal yang tertangani, (2) Proporsi usaha perdagangan yang telah memiliki legalitas usaha, (3) persentase peningkatan nilai perdagangan ekspor daerah, (4) cakupan bina usaha perdagangan dan usaha informal. Sebagai upaya untuk mencapai adalah (1) Peningkatan peranan perdagangan sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing, 2) Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengawasan peredaran barang/ jasa dan pengembangan ekspor, 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman. 4) Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme SDM Aparatur, Perdagangan dan Pasar. Adapun capaian urusan perdagangan Kabupaten Mamuju di tahun 2020, adalah sebagai berikut

- a) Di Kabupaten Mamuju Persentase kasus peredaran barang ilegal yang tertangani yaitu di Tahun 2017 tercatat Jumlah UTTP 4.311 Unit atau 54,37% dan yang sudah tertangani sampai Tahun 2020 sebanyak 3.328 Unit atau 76,78 % telah melampaui dari 50 % yang ditargetkan.
- b) Proporsi usaha perdagangan di Kabupaten Mamuju yang telah memiliki legalitas

usaha yaitu Jumlah Perusahaan yang bergerak di Usaha Perdagangan yang memiliki izin sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 5.573 Usaha, untuk perusahaan yang tidak memiliki izin usaha (ilegal) tidak ada data awal untuk hal tersebut. Namun dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 terdapat permohonan izin yang baru dan perpanjangan izin usaha sebanyak 831 Usaha. dari hasil tersebut diatas terdapat 14,73 % dari Target Capaian 55 %. Target Tahun 2020 sebesar 55 % tidak tercapai dikarenakan ada 4.809 pelaku usaha yang Izin Usahnya masih berlaku.

- c) Persentase peningkatan nilai perdagangan ekspor daerah yaitu Data Awal untuk Nilai Ekport Daerah tidak ada, dari hasil identifikasi terdapat semua potensi produk ekspor daerah belum ada yang secara langsung terkirim dari Kab. Mamuju. Sehingga Dinas Perdagangan tidak bisa mengidentifikasi secara pasti nilai dari Komiditi ekport tersebut. Namun selama ini Dinas Perdagangan menggunakan Data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju dan untuk Tahun 2020 Data tersebut belum ada.
- d) cakupan bina usaha perdagangan dan usaha informal yaitu Data Usaha Perdagangan dan Usaha Informal sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 5.573. untuk Tahun 2020 Target Capaian sebesar 70 % dan untuk pembinaan Usaha Sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 4.030 Usaha atau 71.45 % sehingga Dari hasil tersebut telah melampaui target.

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat kami gambarkan sebagai berikut :

Tabel II - 77
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

NO	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase kasus peredaran barang ilegal yang tertangani	N/A	54,37	60,68	72,53	76,76
2.	Proporsi usaha perdagangan yang telah memiliki legalitas usaha	N/A	11,07	12,27	14,37	14,73
3.	persentase peningkatan nilai perdagangan ekspor daerah	N/A	7,45	0,23	0	0
4.	cakupan bina usaha perdagangan dan usaha informal	N/A	46,46	58,75	65,95	71,45

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Mamuju Tahun 2021

2.3.3.7 Urusan Perindustrian

Pertumbuhan industri terlihat dari persentase pertumbuhan industri 13,17% pada tahun 2020, persentase peningkatan omset penjualan produk IKM 12,53%, dan

Persentase kluster industri yang berkembang 0 %.

Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi baru mencapai 12 % pada tahun 2020, dan Persentase industri yang telah menerapkan teknologi baru mencapai 15,41%. Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal 3,7 % pada tahun 2020.

Tabel II - 78
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan industri	N/A	N/A	N/A	N/A	13,17%
2	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	12,53%,
3	Persentase kluster industri yang berkembang	N/A	N/A	N/A	N/A	0 %.
4	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi baru	N/A	N/A	N/A	N/A	12 %
5	Persentase industri yang telah menerapkan teknologi baru	N/A	N/A	N/A	N/A	15,41%
6	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	N/A	N/A	N/A	N/A	3,7 %

Sumber : BPS dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Tahun 2017-2021

2.3.3.8 Urusan Transmigrasi

Salah satu dimensi pembangunan yang memiliki peran sebagai pemersatu dan perekat bangsa adalah Pembangunan Transmigrasi, disamping tujuan lain sebagai suatu pendekatan untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung (*direct policy*) maupun tidak langsung (*indirect policy*). Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (*human rights*), yaitu perlindungan negara atas hak-hak

warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara bangsanya. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah. Pembangunan Ketransmigrasian dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan penempatan transmigran.

Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Pembentukan formasi Kelembagaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju salah satunya dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi merupakan penempatan penduduk secara merata yang dilakukan oleh Pemerintah.

Kabupaten Mamuju adalah salah satu daerah penempatan transmigrasi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Data terakhir adalah sebagai berikut :

1. Pencadangan areal yang sudah SK Gubernur 10488 Ha.
2. Rencana kawasan transmigrasi yang diusulkan ke kementerian untuk ditetapkan seluas 82.000 Ha, termasuk di dalamnya eks UPT sebanyak 17 UPT yang akan ditingkatkan sarana dan prasarannya.

Ada seluas 1248 Ha sudah mendapatkan SK pelepasan alih fungsi lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lokasi transmigrasi di Kecamatan Kalukku UPTD Sinyonyoi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II - 79
Pencadangan Lahan Permukiman Transmigrasi
Menurut Transmigrasi Lokal, Tahun 2016-2020

Kecamatan	Luas Pencadangan Lahan Sudah Ditetapkan (Ha)					Luas Pencadangan Lahan dalam Rencana (Ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1). Mamuju	4.000	4.000	4.000	N/A	N/A	400	400	400	N/A	N/A
2). Tapalang	3.000	3.000	3.000	N/A	N/A	3.000	3.000	3.000	N/A	N/A
3). Kalukku	4.500	4.500	4.500	1.244	N/A	4.500	4.500	4.500	N/A	N/A
4). Kalumpang	15.000	15.000	15.000	N/A	N/A	15.000	15.000	15.000	N/A	N/A
5). Papalang	4.000	4.000	4.000	N/A	N/A	4.000	4.000	4.000	N/A	N/A
6). Sampaga	670	670	670	N/A	N/A	670	670	670	N/A	N/A

Kecamatan	Luas Pencadangan Lahan Sudah Ditetapkan (Ha)					Luas Pencadangan Lahan dalam Rencana (Ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
7). Tommo	10.000	10.000	10.000	N/A	N/A	10.000	10.000	10.000	N/A	N/A
8). Simboro dan	1.978	1.978	1.978	N/A	N/A	1.978	1.978	1.978	N/A	N/A
9). Tapalang Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10). Bonehau	10.000	10.000	10.000	N/A	N/A	10.000	10.000	10.000	N/A	N/A
11). Kep. Bala Balakang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : SIPD, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021

Pelaksanaan urusan transmigrasi mendukung pembangunan pada aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan pilihan). Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan transmigrasi dinilai dengan indikator kinerja Permendagri 86 yang digambarkan pada 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Indikator Persentase transmigran swakarsa ini menggambarkan kinerja yang tidak tercapai selama kurun waktu 5 tahun, pelaksanaan kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan tidak ada penempatan transmigran swakarsa. maka Pemerintah perlu mendorong permukiman yang telah berkembang untuk berusaha secara mandiri dengan cara memfasilitasi mereka dengan pihak pemerintah lokasi tujuan transmigran untuk mendorong masuknya investor, menciptakan/ menyediakan kebijakan (regulasi, insentif), memberikan informasi lokasi, kesempatan kerja, dan pemberian kredit usaha.

Capaian Indikator Jumlah Pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi juga menggambarkan interpretasi yang belum tercapai, hal ini di karenakan kurangnya koordinasi dan keterpaduan baik antar sektor dan antar daerah maupun pemerintah pusat dan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunannya, maka perlunya pemerhatian untuk memfasilitasi hubungan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah, dengan daerah yang memiliki sumberdaya melimpah tetapi kurang tenaga kerja.

Indikator Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang dikembangkan juga menggambarkan interpretasi yang belum tercapai, hal ini karena Pengalaman pembangunan transmigrasi yang lebih mengutamakan pertimbangan demografis-sentris, yang ternyata berimplikasi pada rendahnya solusi pemenuhan kepentingan masyarakat (pendatang dan lokal). Kemungkinan besar, masih banyak masyarakat Mamuju yang sebenarnya berminat untuk mengikuti program transmigrasi, tetapi kurang berminat terhadap karakteristik daerah tujuannya. Aspek ini terkait dengan jenis/topografi wilayah, jenis tanah atau komoditas pertanian yang dikelola di

daerah permukiman baru. Karena itu transmigrasi kedepan haruslah didasarkan atas paradigma pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu mengusahakan penataan kembali lahan transmigrasi dan pembinaan usaha dikawasan transmigrasi dan penduduk setempat serta dipadukan dengan upaya pengembangan industri terutama yang mengolah hasil-hasil pertanian dan usaha perdagangan didaerah transmigrasi.

Tabel II - 80

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju

NO	Bidang Urusan / Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1.	Jumlah Transmigrasi	300	300	250	250	250
1.2.	Jumlah Satuan Permukiman yang dibangun	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP
1.3.	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan	1 SP	1 SP	1 SP	50 SP	50 SP

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mamuju, 2021

2.3.4 Urusan Penunjang Pemerintah Daerah

2.3.4.1 Urusan Pendukung

1) Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki sejumlah indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur kinerja. Indikator Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan masing-masing kelompok, meliputi kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pembangunan, dan administrasi.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat meliputi bagian hukum, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat diukur dengan delapan indikator kinerja, meliputi 1) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, 2) Presentase produk hukum yang ditetapkan, 3) Persentase produk hukum yang dipublikasikan, 4) Persentase pemenuhan fasilitasi bidang tata pemerintahan, 5) Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunan LPPD, 6) Persentase Jumlah MoU yang dihasilkan, 7) Persentase pemenuhan fasilitasi

bidang kesra, dan 8) Persentase usulan hibah keagamaan yang terverifikasi. Kinerja pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020.

Capaian indikator kinerja pada kelompok ekonomi dan pembangunan ditunjukkan dengan sepuluh indikator, meliputi 1) Jumlah Pemda yang mengintegrasikan, 2) penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP), 3) Persentase BUMD sehat, 4) Persentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi, 5) Persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan, 6) Persentase realisasi anggaran pengadaan dibagi anggaran dalam RUP, 7) Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik, 8) Nilai Kematangan Organisasi, 9) Persentase UPP yang telah melakukan SKM.

2) Fungsi Sekretariat DPRD

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat di dalam Daerah Kabupaten Mamuju.

Dasar hukum pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD adalah peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007. Sekretariat DPRD Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Kabupaten. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki 3 (tiga) Indikator utama dalam Permendagri 86, sebagai berikut :

Indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, pada kondisi indikator ini menunjukkan kinerja yang sudah sesuai sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, namun dalam dalam tahapan Rencana Kerjanya terkadang mengalami

perubahan dari yang direncanakan, sehingga diperlukan fokus perencanaan Kerja Tahunan yang konsisten untuk tahun selanjutnya.

Indikator Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) selama periode 5 tahun berjalan dari tahun 2016-2020 kinerja yang ditunjukkan juga sudah sesuai namun belum jelasnya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat sehingga indikator pada kegiatan ini tampak tidak terlaksana secara maksimal.

Indikator Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD, pada kondisi indikator ini juga menunjukkan kinerja yang sudah sesuai ataupun terlaksana setiap tahunnya, namun terkadang ditemukan hambatan dalam penyesuaian jadwal dari setiap dewan, hal ini mengakibatkan rapat-rapat pembahasan anggaran terkadang menemukan masalah dalam waktu pelaksanaan fungsinya.

Tabel II - 81

Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Sekretariat DPRD 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dewan yang difasilitasi oleh setwan	orang	35	35	35	35	30
2	Jumlah Alat Kelengkapan Dewan terbentuk						
	Pimpinan DPRD	orang	3	3	3	3	3
	Komisi	jumlah komisi	3	3	3	3	3
	Badan kehormatan	ada/tdk ada	Ada	Ada	ada	ada	ada
	Badan Musyawarah	ada/tdk ada	Ada	Ada	ada	ada	ada
	Bapemperda	ada/tdk ada	ada	Ada	ada	ada	ada
	Badan Anggaran	ada/tdk ada	ada	Ada	ada	ada	ada
3	Jumlah Fraksi Yang dibentuk	Jumlah fraksi	5	5	5	5	6
4	Jumlah Ranperda						
	Usulan	buah	14	18	10	21	27
	Dibahas	buah	8	10	8	8	3
	Disahkan	buah	4	8	7	8	0
5	Jumlah kasus yang tertangani oleh Badan Kehormatan	kasus	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
7	Jumlah Pengaduan Masyarakat terlapor dan	aduan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	1	4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	terselesaikan						
8	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	ada/tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Jumlah pelaksanaan						
	Rapat	kali	154	165	192	126	143
	Paripurna	kali	25	9	32	16	15
12	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dewan	kali	0	0	0	4	1

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Mamuju, 2021

2.3.4.2 Urusan Penunjang

1) Fungsi Perencanaan dan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025.

Tabel II - 82

Ketersediaan Dokumen RPJPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju, 2021

- a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021.

Tabel II - 83

Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju, 2021

- b) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahunnya. Namun dokumen perencanaan tahunan daerah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menaati jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan mengoptimalkan proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkualitas.

Tabel II - 84

Ketersediaan Dokumen RKPd Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju, 2021

- c) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Mamuju pada Tahun 2019 telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun

2019-2039.

Tabel II - 85
Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan
Perda Kabupaten Mamuju 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		-	-	-	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju, 2021

- d) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd
Program RKPd didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2019 Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPd sebesar 98,58%.

Tabel II - 86
Konsistensi Program RPJMD dan RKPd Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	97,44	100	95,80	98,58	N/A

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju, 2021

- e) Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD
Program RKPd didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2019 Program RKPd yang diakomodir dalam APBD sebesar 99,52%.

Tabel II - 87
Konsistensi Program RKPd dan APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	-	84,63	84,99	99,52	N/A

Sumber : BAPPEPAN Kab. Mamuju, 2021

2) Fungsi Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan dalam sistem terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mentaati azas pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan daerah, sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Daerah dimasa depan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Kinerja keuangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, Berikut dijelaskan kinerja Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset ada 9 (Sembilan) Indikator dari tahun 2015-2019 yaitu Perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini diakibatkan adanya pengelolaan keuangan yang tidak sesuai ini diakibatkan kesalahan dalam administrasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga, hal ini telah diperbaiki sehingga pada tahun 2018 sampai dengan 2020 Kabupaten Mamuju meraih kembali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan capaian yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju, seperti kita ketahui bahwa bahwa dalam meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai aturan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK, pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK). Hasil pemeriksaan keuangan adalah: pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

SILPA atau biasa disebut Sisa Lebih Penganggaran Adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus

dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. SILPA Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 sebesar 0,24% dan naik pada tahun 2019 sebesar 2,05 % ini menandakan bahwa penerimaan pembiayaan tidak dapat menutupi *deficit* anggaran pada Kabupaten Mamuju. Presentase SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran menurut Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, Program dan Kegiatan Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan sejak Tahun 2016 sampai dengan 2019 terealisasi 100 %, Pemenuhan Belanja Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanahkan Pemenuhan Belanja Pendidikan 20 persen dari total Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengamanahkan Pemenuhan Belanja Kesehatan 10 Persen dari Total APBD, pemenuhan tersebut sudah dilakukan oleh Kabupaten Mamuju dari tahun 2016 sebesar 28 % untuk Belanja Pendidikan dan 18 % untuk Belanja Kesehatan dan pada tahun 2019 Belanja Pendidikan 29 % dan Belanja Kesehatan 17 %. Perbandingan Belanja langsung dan tidak langsung bervariasi tiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Mamuju, pada tahun 2016 belanja langsung dan tidak langsung berbanding 49% : 55% dan pada tahun 2019 berbanding 51% : 49%. Dana Bagi Hasil (DBH) Desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN/APBD yang dibagikan ke Desa namun hal ini belum pernah dilakukan oleh Kabupaten Mamuju. Adapun gambaran secara utuh realisasi indikator urusan Keuangan sebagai berikut:

Tabel II - 88

Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Keuangan					
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	0,24%	2,02%	1,19%	2,05%	N/A
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	100%	100%	100%	100%	N/A
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	28%	26%	26%	29%	N/A
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	18%	20%	16%	17%	N/A
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	49%/55%	46%/54%	55%/45%	51%/49%	N/A
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0%	0%	0%	0%	N/A
2.9	Penetapan APBD	100%	100%	100%	100%	N/A

Sumber : BPS dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2020

3) Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik semakin dituntut profesional maka peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana dan kelembagaan. Berlakunya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan PNS semakin profesional dan pelayanan semakin baik di tahun-tahun mendatang.

a) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi pegawai baru maupun pegawai yang sudah lama, pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja dimasa mendatang. Kegiatan pendidikan dan pelatihan memberikan dividen kepada pegawai di dalam suatu organisasi, berupa keahlian dan keterampilan yang selanjutnya akan menjadi aset yang berharga bagi organisasi. Melalui pendidikan dan pelatihan pegawai akan bertambah kemampuannya dan demikian pula bagi organisasi.

Capaian rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2015 – 2019 Kabupaten Mamuju cenderung meningkat. Tercatat di tahun 2016 – 2019 capaian kinerja pada indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 24,41 JP/Tahun jika dibandingkan data tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,76%, hal ini kemungkinan disebabkan setiap OPD harus menganggarkan biaya diklat

untuk setiap ASN, sementara ketersediaan APBD masih sangat rendah dan fluktuatif.

b) Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase keikutsertaan ASN dalam Pendidikan dan pelatihan disebabkan karena ketersediaan biaya pada setiap tahun APBD masih sangat rendah dan sangat fluktuatif dari tahun ketahun. Tercatat persentase ASN yang mengikuti diklat pada tahun 2017 – 2019 mengalami stagnan di angka 9,79%.

c) Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural pada tahun 2016 – 2019 cenderung menurun. Tercatat pada tahun 2016 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural sebesar 31,99% meningkat 35,15% di tahun 2017, lalu mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 sebesar 22,26. Hal ini dipengaruhi kuota untuk calon peserta diklat terbatas.

d) Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dalam hal ini instansi daerah yaitu perangkat daerah Kabupaten yang meliputi sekretariat dewan, sekretariat DPRD, dinas/badan daerah, dan Lembaga teknis daerah. JPT terdiri atas JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah meliputi :

- Kepeloporan dalam bidang; keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen;
- Pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Pada periode tahun 2016 - 2019 terjadi peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Mamuju. Pada tahun 2019 yakni berjumlah 37 jabatan, sebagaimana amanat PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan serta tipologi perangkat daerah .

e) Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas:

- Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III;
- Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV;
- Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada tahun 2016 s/d tahun 2017 terjadi peningkatan, namun di tahun 2018 terjadi penurunan dan meningkat kembali di tahun 2019 sebanyak 173 jabatan.

f) Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

- Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.
- Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Tabel di atas menunjukkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang setiap tahunnya mengalami penurunan sepanjang tahun 2016 s/d 2018 dan terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 2293 Orang.

Tabel II - 89

**Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Belajar	1,53	1,56	1,58	1,59	0,16
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	1,12	1,10	1,37	1,39	0,27
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	2,92	1,99	2,61	0,71	N/A

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	33	34	35	37	N/A
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	153	170	168	173	N/A
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2495	2183	1383	2293	N/A

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamuju, 2021

4) Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Terkait Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju belum dijadikan acuan dikarenakan belum diimplementasikannya sektor kelitbangan pada periode tahun 2016 – 2021.

2.3.4.3 Unsur Pengawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai bentuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah mengamanahkan bahwa Pembinaan dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Sedangkan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/ kota.

Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju, agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. dengan menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. Fokus pengawasan pada pengawasan internal secara berkala pada semua obyek pemeriksaan (obrik) yaitu sejumlah 33 Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. Capaian kinerja pengawasan ditunjukkan dengan hasil capaian 2 (dua) indikator kinerja yakni : Persentase tindak lanjut temuan dan Jumlah temuan BPK. Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, indikator Persentase tindak lanjut temuan baru mencapai angka sebesar 69% dari target 75% hal ini berarti belum dapat mencapai

target demikian pula halnya dengan indikator Jumlah temuan BPK juga belum mencapai target yakni capaian baru pada angka 69%. Gambaran capaian indikator bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II - 90
Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	45	59	60	69	N/A
2	Jumlah temuan BPK	Persen	45	59	60	69	N/A

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mamuju, 2021

2.3.4.4 Urusan Kewilayahan

Kabupaten Mamuju secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 88 Desa, yang terdiri dari 1 kecamatan berada di kepulauan dan 10 kecamatan berada di daratan, sementara desa dan kelurahan terdapat 3 desa berada di kepulauan dan 85 Desa berada di daratan bersama 13 kelurahan. secara terperinci indikator kinerja untuk kecamatan dapat dilihat pada table berikut

Tabel II - 91
Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Kewilayahan						
9.1	Hasil Survei IKM terhadap pelayanan di kecamatan/ kelurahan	Nilai	90,68	75,31	71,80	78,62	N/A
9.2	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana di kecamatan	Persen	64	69	83	85	N/A
9.3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di kecamatan	Persen	72	68	76	73	N/A
9.4	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	0	0	0	0	N/A
9.5	Persentase jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	80	83	76	88	N/A

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Mamuju posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sekaligus penyelenggara

urusan Pemerintahan umum. Sebagai pelaksana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Camat melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan yang meliputi Hasil Survei IKM terhadap pelayanan di kecamatan, Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana di kecamatan, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di kecamatan, Persentase desa yang tertib administrasi, Persentase jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang ditangani dari tahun 2016 sampai dengan 2019 belum mencapai target yang diharapkan hal ini disebabkan Peran Camat sebagai pelaksana Perangkat Daerah belum maksimal karena belum ditunjang Fasilitas yang memadai dan kondisi akses kewilayahan cukup luas dan segi Sumber daya aparatur Kecamatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih sangat terbatas.

2.3.4.5 Urusan Pemerintahan Umum

Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun sampai 2019 dapat lihat melalui 4 (empat) indicator sebagai alat ukur, yakni : Persentase pengendalian kasus konflik SARA, Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Tingkat Partisipasi Ormas dan Lembaga, dan Partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (bela negara).

Capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Mamuju, pada indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2019 telah mencapai 77,61% dan meningkat 6,38% pada tahun 2020 menjadi 83,99%. Untuk indikator Tingkat Partisipasi Ormas dan Lembaga telah mencapai 100% hal ini berarti bahwa capaian kinerja indikator sudah memenuhi target. Dan untuk indikator Partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (bela negara) mengalami penurunan capaian yang cukup signifikan yakni 60 orang dari target tahun 2019 yang mencapai 120 orang, angka ini berkurang sebesar 50%. Sedangkan untuk capaian indikator Persentase pengendalian kasus konflik SARA yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan menunjukkan data yang nihil, namun demikian pada masa yang akan

datang indikator ini akan tetap menjadi salah satu indikator yang diutamakan untuk mewujudkan masyarakat yang aman dari konflik SARA/Sosial mengingat Kabupaten Mamuju adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dan heterogen terdiri dari berbagai suku, agama dan ras (*Plural and heterogeneous society*), dengan demikian perlu adanya konstruksi institusi yang dapat menghambat munculnya sebab-sebab *social conflict*, kekerasan dll, tidak hanya menekankan pada organisasi *social control agents* seperti militer dan kepolisian. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel II - 92
Capaian Kesbangpol Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengendalian kasus konflik SARA	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	N/A	74,73	N/A	77,61	83,99
3	Tingkat Partisipasi Ormas dan Lembaga	Persen	100	100	100	100	100
4	Partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (bela negara)	Orang	290	245	180	120	60

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Mamuju, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan pendukung perkembangan suatu wilayah. Fasilitas infrastruktur pada pembahasan ini menguraikan tentang rasio panjang jalan per jumlah kendaraan; jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum; jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun; ketaatan terhadap RTRW; luas wilayah produktif; luas wilayah industri; luas wilayah banjir; luas wilayah kekeringan; luas wilayah perkotaan; jenis dan jumlah bank

dan cabang; jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang; jenis, kelas, dan jumlah restoran; jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel; persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih; rasio ketersediaan daya listrik; persentase rumah tangga yang menggunakan listrik; dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.4.1.1 Ketaatan Terhadap RTRW;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju tahun 2019-2039, disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 10 Tahun 2019, hal ini berarti pelaksanaan RTRW menjelang 1 (satu) tahun dan belum dilakukan evaluasi ketaatan terhadap RTRW sehingga pelanggaran pemanfaatan penataan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju belum dapat diketahui presentase besaran defiasi.

2.4.1.2 Luas Wilayah Produktif;

Wilayah produktif di Kabupaten Mamuju meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 – 2039, luas wilayah produktif di Kabupaten Mamuju seluas 41,15 Ha. Kawasan Wilayah Produktif ini berada pada semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Mamuju, kecuali Kecamatan Bala-balakang.

2.4.1.3 Luas Wilayah Industri;

Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta. Perkembangan luas kawasan industri di Kabupaten Mamuju dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian kawasan industri sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperluas karena keterbatasan lahan yang tersedia. Sampai tahun 2020, realisasi luas kawasan industri yang dikembangkan di Kabupaten Mamuju baru mencapai 0,51 Ha sementara wilayah kawasan industri yang ditetapkan masih berada pada Kecamatan Kalukku.

2.4.1.4 Luas Wilayah Perkotaan;

Kawasan perkotaan di Kabupaten Mamuju menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang ditetapkan menurut Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi kabupaten dihitung berdasarkan bagian/wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Sedangkan untuk kawasan perkotaan pada wilayah administrasi kota dihitung secara utuh. Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh mengenai luas wilayah perkotaan diseluruh wilayah di Kabupaten Mamuju sampai tahun 2020, sebesar 2.141,88 Ha, dengan peruntukan wilayah untuk Kecamatan Mamuju seluas 1.409,15 Ha dan untuk wilayah Kecamatan Simboro seluas 732,67 Ha.

2.4.1.5 Jenis, Jumlah Bank Dan Cabang;

Sektor perbankan mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Beberapa bentuk dukungan bank dalam pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah sebagai mediator yang mempertemukan kreditur dan debitur, menjadi jembatan bagi pembiayaan sektor rill, baik dalam rangka peningkatan iklim usaha dan investasi maupun dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Hingga tahun 2019 jumlah Bank di kabupaten Mamuju sebanyak 36 yang terdiri dari Bank Swasta Nasional dan BUMN atau BUMD. Jumlah aktiva rupiah dan valuta asing di bank umum dan BPR di kabupaten Mamuju pada akhir 2019 tercatat sebesar 3,16 Triliun rupiah.

Tabel II - 93
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Di Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2020

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional					
	BRI Cabang	1	1	1	1	1
	BRI Unit	19	19	19	19	19
	BPD Cabang	1	1	1	1	1
	BNI Cabang	1	1	1	1	1
	Bank Mandiri Cabang	1	1	1	1	1
	Bank Mandiri Unit	1	1	1	1	1
	Bank Panin Cabang	1	1	1	1	1
	BII Cabang/Maybank	1	1	1	1	1
	Bank Mega Cabang	1	1	1	1	1
	BTN Cabang	1	1	1	1	1
	Bank Sinar Mas Cabang	1	1	1	1	1
	BTPN Cabang	1	1	1	1	1
	Bank Danamon Cabang	-	-	-	-	-
	Bank Danamon Unit	1	1	1	1	1
	Bank Indonesia	1	1	1	1	1
1.2.	Syariah					
	Bank Muamalat Cabang	1	1	1	1	1
	Bank Mandiri Syariah	1	1	1	1	1
	BPD Syariah	1	1	1	1	1
	BRI Syariah	1	1	1	1	1
2.	BPR					
2.1.	Konvensional	-	-	-	-	-
2.2.	Syariah	-	-	-	-	-
JUMLAH		36	36	36	36	36

Sumber : DPM-PTSP Kab. Mamuju, 2021

2.4.1.6 Jumlah Rumah Makan/Restoran;

Pada tahun 2020 jumlah rumah makan/restoran sebanyak 326, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 275.

2.4.1.7 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel;

Salah satu pendukung ketersediaan penginapan fasilitas infrastruktur adalah ketersediaan penginapan. Ketersediaan penginapan pada pembahasan ini membahas mengenai jenis, kelas dan jumlah jumlah penginapan/hotel.

Jenis, Kelas dan Jumlah penginapan/Hotel di kabupaten Jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Mamuju diuraikan berdasarkan jenis penginapan/hotel. Jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 sebanyak 5 unit, pada tahun 2020 telah mengalami kemajuan sebanyak 11 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II - 94
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Mamuju Tahun 2016 dan 2020

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2016			Tahun 2020		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel Bintang 4	-	-	-	1	46	73
3.	Hotel Bintang 3	1	130	209	1	131	210
4.	Hotel Bintang 2	1	54	81	1	54	81
5.	Hotel Bintang 1	-	-	-	-	-	-
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	3	64	117	8	199	359
	Total Jumlah penginapan /Hotel	5	248	407	11	430	723

Sumber : DPM-PTSP Kab. Mamuju, 2021

2.4.1.8 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih;

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang

berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat.

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat berbahaya.

Data persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih di Kabupaten Mamuju dijabarkan pada table dibawah ini :

Tabel II - 95
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih (PAMSIMAS)
Di Kabupaten Mamuju Tahun 2020

No	Wilayah	Jml. Penduduk dgn akses SAM yang layak						
		Pamsimas			Non Pamsimas (PDAM)		belum akses	
		KK	Jiwa	(Dis)	KK	Jiwa	KK	Jiwa
A	MAMUJU	16.083	70.223	293	98	450	27.650	118.491
1	AHU, Kec. TAPALANG BARAT	198	846	4	0	0	157	623
2	Bala`Balakang, Kec. Bala`Balakang	87	428	0	0	0	251	1255
3	Bambu, Kec. Mamuju	87	432	16	0	0	844	4174
4	Banuada, Kec. Bonehau	51	260	0	0	0	168	840
5	BATU AMPA, Kec. PAPALANG	198	796	3	0	0	212	858
6	BATU MAKKADA, Kec. KALUMPANG	161	800	0	0	0	51	225
7	BATU PANU, Kec. MAMUJU	154	683	3	0	0	182	808
8	Bebanga, Kec. Kalukku	1017	4054	0	0	0	813	5065
9	BELA, Kec. TAPALANG	109	430	4	0	0	63	233
10	Belang-Belang, Kec. Kalukku	0	0	0	0	0	851	3623

No	Wilayah	Jml. Penduduk dgn akses SAM yang layak						
		Pamsimas			Non Pamsimas (PDAM)		belum akses	
		KK	Jiwa	(Dis)	KK	Jiwa	KK	Jiwa
11	Beru-Beru, Kec. Kalukku	0	0	16	98	450	1064	4967
12	BODA-BODA, Kec. PAPALANG	252	1047	1	0	0	162	613
13	Bonda, Kec. Papalang	443	1482	5	0	0	546	1847
14	Bonehau, Kec. Bonehau	123	499	0	0	0	507	2016
15	BOTTENG, Kec. SIMBORO	113	432	3	0	0	449	1671
16	Botteng Utara, Kec. Simboro Dan Kepulauan	216	956	12	0	0	368	1624
17	BUANA SAKTI, Kec. TOMMO	110	620	2	0	0	348	989
18	Buttuada, Kec. Bonehau	104	392	0	0	0	250	829
19	Campaloga, Kec. Tommo	628	2596	2	0	0	117	504
20	Dungkait, Kec. Tapalang Barat	259	1062	2	0	0	241	931
21	GULILING, Kec. KALUKKU	175	800	2	0	0	121	535
22	Hinua, Kec. Bonehau	103	490	0	0	0	157	815
23	K E A N G, Kec. KALUKKU	202	1010	0	0	0	539	2155
24	Kabuloang, Kec. Kalukku	766	4507	2	0	0	14	82
25	KAKULLASAN, Kec. TOMMO	224	1017	5	0	0	512	2083
26	KALEPU, Kec. TOMMO	199	803	5	0	0	37	77
27	Kalonding, Kec. Sampaga	201	745	2	0	0	870	2796
28	Kalumpang, Kec. Kalumpang	65	299	0	0	0	130	703
29	Kanataun, Kec. Kalumpang	194	960	0	0	0	191	440
30	KARAMA, Kec. KALUMPANG	152	770	0	0	0	148	755
31	Karampuang, Kec. Mamuju	80	350	1	0	0	679	2967
32	Keang, Kec. Bonehau	202	1010	0	0	0	539	2155
33	Kinatang, Kec. Bonehau	185	765	0	0	0	35	325
34	KONDO BULO, Kec. KALUMPANG	179	870	0	0	0	133	854
35	KOPEANG, Kec. TAPALANG	126	475	3	0	0	261	982
36	Labuang Rano, Kec. Tapalang Barat	435	2127	11	0	0	75	367

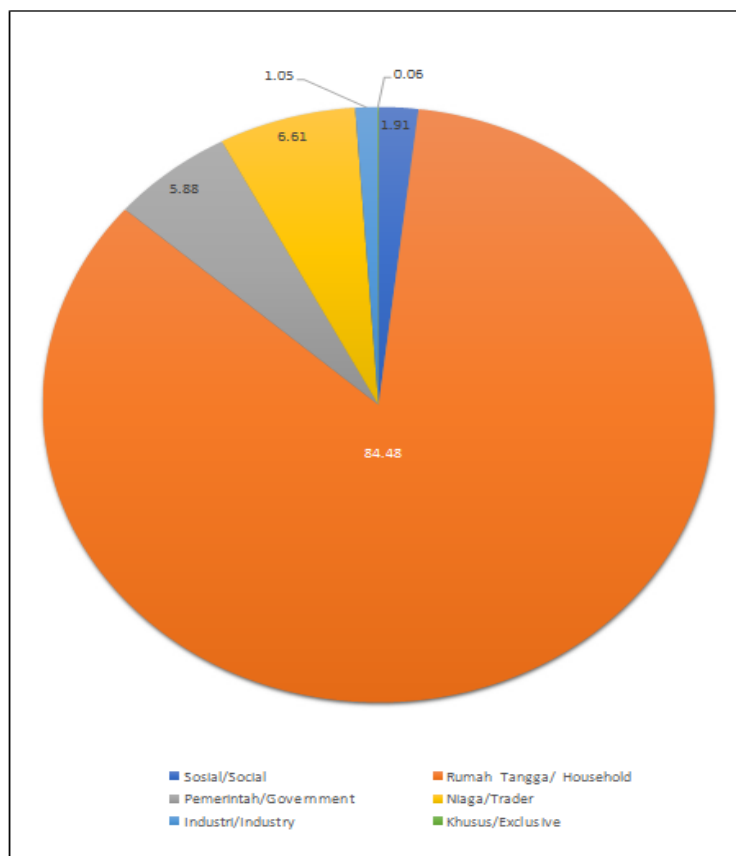
No	Wilayah	Jml. Penduduk dgn akses SAM yang layak						
		Pamsimas			Non Pamsimas (PDAM)		belum akses	
		KK	Jiwa	(Dis)	KK	Jiwa	KK	Jiwa
37	Lasa, Kec. Kalumpang	138	450	0	0	0	27	185
38	Lebani, Kec. Tapalang Barat	263	1270	4	0	0	186	887
39	LELING, Kec. TOMMO	228	830	2	0	0	80	251
40	LELING BARAT, Kec. TOMMO	105	495	5	0	0	243	895
41	LELING UTARA, Kec. TOMMO	264	1127	6	0	0	218	1006
42	LIMBONG, Kec. KALUMPANG	132	600	1	0	0	133	600
43	Losso, Kec. Sampaga	150	588	12	0	0	120	464
44	LUMIKA, Kec. BONEHAU	144	933	1	0	0	126	811
45	MAKKALIKI, Kec. KALUMPANG	153	722	1	0	0	0	0
46	MALINO, Kec. TOMMO	211	720	2	0	0	20	50
47	MAPPU, Kec. BONEHAU	254	810	3	0	0	43	227
48	Orobatu, Kec. Tapalang	199	912	5	0	0	36	155
49	PAMMULUKANG, Kec. KALUKKU	184	862	1	0	0	186	723
50	PANGASAAN, Kec. TAPALANG BARAT	105	431	5	0	0	148	581
51	Papalang, Kec. Kalukku	85	398	2	0	0	1126	4957
52	Passabu, Kec. Tapalang Barat	106	480	9	0	0	275	1220
53	PATI'DI, Kec. SIMBORO	213	1041	4	0	0	311	1539
54	Pokkang, Kec. Kalukku	102	477	2	0	0	617	2618
55	POLIO, Kec. KALUMPANG	167	810	1	0	0	53	510
56	Rangas, Kec. Simboro	114	434	15	0	0	819	3109
57	RANTE MARIO, Kec. TOMMO	185	720	0	0	0	141	686
58	Saletto, Kec. Simboro Dan Kepulauan	120	475	6	0	0	800	3131
59	SALOKAYU I, Kec. PAPALANG	286	905	3	0	0	281	959
60	Salubara`Na, Kec. Sampaga	191	739	2	0	0	38	128
61	SALUDENGEN, Kec. TOMMO	107	648	0	0	0	268	1273
62	Salumakki, Kec. Kalumpang	200	1016	0	0	0	170	853

No	Wilayah	Jml. Penduduk dgn akses SAM yang layak						
		Pamsimas			Non Pamsimas (PDAM)		belum akses	
		KK	Jiwa	(Dis)	KK	Jiwa	KK	Jiwa
63	Salutiwo, Kec. Bonehau	189	795	0	0	0	41	319
64	SAMPAGA, Kec. SAMPAGA	117	494	3	0	0	256	1083
65	SANDANA, Kec. TOMMO	98	410	3	0	0	277	945
66	SANDAPANG, Kec. KALUMPANG	107	554	4	0	0	142	622
67	Sinyonyol, Kec. Kalukku	67	332	10	0	0	2418	11598
68	Siraun, Kec. Kalumpang	179	805	0	0	0	141	800
69	SISANGO, Kec. PAPALANG	27	96	1	0	0	196	699
70	SONDOANG, Kec. KALUKKU	224	1024	15	0	0	611	2488
71	SUKADAMAI, Kec. PAPALANG	241	798	2	0	0	28	126
72	Sumare, Kec. Simboro Dan Kepulauan	198	831	3	0	0	443	1809
73	Taan, Kec. Tapalang	101	498	18	0	0	533	2633
74	Tadui, Kec. Mamuju	114	493	3	0	0	829	3581
75	Takandeang, Kec. Tapalang	432	1781	8	0	0	120	490
76	TAMALEA, Kec. BONEHAU	130	451	1	0	0	23	314
77	TAMEMONGGA, Kec. TOMMO	263	1154	1	0	0	191	572
78	TAMMEJARRA, Kec. TOMMO	109	485	2	0	0	300	1043
79	TANETE PAO, Kec. TAPALANG BARAT	110	348	3	0	0	148	456
80	TAPANDULLU, Kec. SIMBORO	153	638	2	0	0	32	141
81	Toabo, Kec. Papalang	129	490	12	0	0	1177	4390
82	Tommo, Kec. Tommo	98	491	0	0	0	596	1899
83	Topore, Kec. Papalang	552	2291	4	0	0	321	1404
84	TUMONGA, Kec. KALUMPANG	91	408	1	0	0	150	674
85	UHAIMATE, Kec. KALUKKU	150	850	1	0	0	127	801

Volume air bersih yang disalurkan kepada pelanggan pada tahun 2019 mencapai 4.568.640 m³ atau meningkat sebesar 21,27 persen dibandingkan tahun 2018. Kondisi ini juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah pelanggan PDAM di

2019 sekitar 1.615 pelanggan baru. atau meningkat sebesar mengalami peningkatan sebesar 10,73 persen dibandingkan 2018.

Grafik II - 15
Persentase Distribusi Air Bersih yang Disalurkan PDAM
di Kabupaten Mamuju, 2019



Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra

2.4.1.10 Rasio Ketersediaan Daya Listrik;

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk mengaliri listrik hingga dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Daya listrik terpasang di lingkup Daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu tahun 5 (lima) tahun cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Ditahun

2015 memiliki daya 30 MVA kemudian meningkat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 50 MVA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II - 96
Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Mamuju
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebutuhan						
	- rumah tangga	WH	4.900.755	4.976.000	5.317.080	5.932.820	N/A
	- Komersial	WH	1.671.861	1 770.776	2 170491	7.351 304	N/A
	- Public	WH	919.922	974.41S	1.058.361	1_264.123	N/A
	- Industri	WH	298.665	282.259	284.561	325.289	N/A
2	Susut & Losses (T&D)	persen	14,64	8,73	6,19	9,03	N/A
3	Susut Pemakaian Sendiri	persen	0,0006	0,0006	0,0006	0,0008	N/A
4	Total Susut & Losses	persen	14,64	8,73	6,19	9,03	N/A
5	Faktor Beban	persen	0,76	0,79	0,78	0,79	N/A
6	Produksi	GWH	108.786	107.289	114.893	132.174	N/A
7	Beban Puncak	MW	23,78	22,72	22,64	22,73	N/A
8	Kapasitas Terpasang (Existing)	MVA	50,00	50,00	50,00	50,00	N/A

Sumber : PLN Kabupaten Mamuju, 2020

2.4.1.11 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik;

Pencapaian persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Mamuju telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun 2015-2019, ditunjukkan pada tahun 2015 sebesar 37.324 RT, tahun 2016 sebesar 41.737 RT, ditahun 2017 sebesar 47.098 RT, ditahun 2018 sebesar 52.047 RT, dan ditahun 2019 sebesar 56.671 RT. Namun capaian ini belum optimal disebabkan banyak rumah tangga yang belum memasang meteran listrik sendiri.

Perkembangan Presentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II - 97
Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	RT dengan daya 450 watt	7.854	7.681	7.473	7.299	N/A
2.	RT dengan daya 900 watt	17.896	22.036	25.759	29.018	N/A
3.	RT dengan daya 1.300 watt	13.636	14.784	15.790	16.927	N/A
4.	RT dengan daya 2.200 watt	1.937	2.116	2.417	2.732	N/A
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	414	481	608	695	N/A
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	41.737	47.098	52.047	56.671	N/A

Sumber : PLN Kabupaten Mamuju, 2021

2.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

2.4.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga yang berlaku yang merupakan penggerak utama perekonomian Kabupaten Mamuju meningkat hingga 2.94 persen, yakni dari 5.578,53 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 5.873,19 miliar rupiah pada tahun 2020. Perekonomian Kabupaten Mamuju jika dibandingkan dengan kondisi 2016 sudah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Dari 2016 terlihat jika perekonomian Mamuju sudah hampir mengalami perkembangan signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian PDRB atas dasar harga

berlaku pada tahun 2020 yang sebesar 11.624,39 miliar rupiah dibanding kondisi 2016 yang sebesar 9.090,27 miliar rupiah. Kedepannya perekonomian Kabupaten Mamuju diharapkan dapat terus meningkat mengingat Kabupaten Mamuju merupakan daerah pemekaran dengan potensi sumber daya perkebunan yang cukup besar.

Tabel II - 98
Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mamuju
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Makanan, Minuman, dan Rokok	48.24	47.76	47.89	47.14	49.65
2.	Pakaian dan Alas Kaki	2.96	2.94	2.96	2.94	2.87
3.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16.33	16.85	16.86	16.71	16.92
4.	Kesehatan dan Pendidikan	3.17	3.07	2.95	2.90	6.63
5.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18.64	18.64	18.39	19.26	16.23
6.	Hotel dan Restoran	5.96	6.28	6.62	6.82	3.21
7.	Lainnya	4.71	4.46	4.33	4.23	4.49
	Total Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2021

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan penambahan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan, salah satu indikator yang dapat menunjukkan perkembangan konsumsi rumah tangga adalah rata-rata konsumsi per kapita. Selama kurun waktu 2016-2020, rata-rata konsumsi per kapita penduduk di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan yang cukup baik. Selama kurun waktu tersebut terlihat jika perkembangan rata rata konsumsi per kapita penduduk di Kabupaten Mamuju atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 menjadi yang tertinggi, hingga mencapai 19,63 juta dari 19,56 juta rupiah pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata konsumsi per kapita penduduk di Kabupaten Mamuju atas dasar harga konstan pada tahun 2019 mencapai 13,78 juta rupiah dan menurun pada tahun 2020 masing-senilai 13,33 juta rupiah.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga.

2.4.2.2 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) diukur dari besarnya indeks yang diterima petani (It) dengan jumlah indeks yang dibayar petani (Ib). Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa nilai tukar petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat rata-rata di atas 100 dari tahun 2016-2020.

Tabel II - 99
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016-2020
Provinsi Sulawesi Barat

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks yang diterima petani (It)	137,59	140,67	145,93	106,15	115,39
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	131,91	134,73	139,96	102,47	105,43
3.	NTP	104,31	104,41	104,26	103,59	109,45

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2021

Berdasarkan pendekatan dari nilai indikator terhadap nilai tukar petani (NTP), telah menunjukkan stagnasi pada angka 100-105 selama kurung waktu 5 (lima) tahun (2016-2020) namun tetap pada angka di atas 100 yang artinya petani secara umum di Sulawesi Barat dan secara khusus Kabupaten Mamuju surplus atau masih dapat memperoleh atau menikmati keuntungan dari hasil pengelolaan dan pengembangan usaha taninya. Dalam perjalanan waktu tersebut juga terjadi kestabilan terhadap harga sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat/petani dalam menjalankan usaha taninya, misalnya penggunaan pupuk, benih, obat-obatan serta sarana lainnya, sehingga pengeluaran (*cost*) tidak terlalu besar dibandingkan dengan penerimaan (*revenue*). Kondisi tersebut di atas menjadikan indeks harga hasil-hasil produksi pertanian secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat/petani dalam kaitannya pengelolaan usaha taninya.

Hal inilah yang dapat mendorong masyarakat/petani kita dalam penerimaan hasil usahataniya memberikan keuntungan dari apa yang telah dihasilkan

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu yang mempengaruhi perkembangan suatu daerah adalah baiknya Iklim Berinvestasi pada daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhi iklim investasi adalah Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Lama Proses Perijinan.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas;

Faktor yang mempengaruhi iklim berinvestasi salah satunya adalah tingkat keamanan dan ketertiban. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Total Tindak Kriminalitas selama satu tahun di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 sebanyak 478 kasus, menurun sebanyak 88 kasus di tahun 2017 menjadi 390 kasus dan ditahun 2018 terjadi peningkatan secara signifikan sebesar 384 Kasus menjadi sebanyak 774 kasus. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat jumlah kriminalitas yang terjadi pada tabel di bawah ini :

Tabel II - 100
Angka Kriminalitas menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

NO	Jenis kriminalitas	2016	2017	2018	2019	2020
	Angka Kriminalitas	478	390	774	N/A	N/A

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, 2021

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi;

Jumlah demonstrasi merupakan salah satu aspek strategis yang mempengaruhi iklim berinvestasi. Semakin tinggi demonstrasi dapat mempengaruhi investor yang masuk pada suatu daerah. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 sebanyak 1 demonstrasi, tahun 2017 sebanyak 4 demonstrasi, tahun 2018 sebanyak 2 demonstrasi dan tahun 2019 sebanyak 1 demonstrasi. Data jumlah demonstrasi di Kabupaten Mamuju tahun 2016 hingga 2019 lebih jelasnya sebagaimana table dibawah ini :

Tabel II - 101
Jumlah Demonstrasi Kabupaten Mamuju
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa	1	4	2	1	N/A

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Kab. Mamuju, 2021

2.4.3.3 Lama Proses Perizinan;

Dalam mendukung pelayanan perizinan yang baik dan transparan BPPT memberikan akses informasi dan pengaduan pelayanan perizinan melalui beberapa media seperti Website, sms, Akun Facebook, email, dan pengaduan langsung pada loket pengaduan dan informasi yang telah BPPT sediakan.

Untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha BPPT menyediakan loket pelayanan bagi SKPD teknis untuk memberikan pelayanan pendukung berupa rekomendasi teknis yang dibutuhkan oleh pemohon izin maupun non perizinan.

Standar pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dalam peraturan Bupati Mamuju nomor 2 tahun 2012 tentang Standar Operational Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju, secara umum SOP ini mengatur tentang standar waktu, biaya dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II - 102
perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

NO	NAMA IZIN	WAKTU (HARI)	BIAYA
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Mendirikan Bangunan Reklame; Duplikasi Izin Mendirikan Bangunan; Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan; Perubahan Izin Mendirikan Bangunan; Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan;	5 Hari	Retribusi pembangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ Retribusi Rehabilitas/Renovasi Bangunan : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ Retribusi Prasarana Bangunan sebelum tahun 2009 (Sebelum terbitnya perda retribusi IMB) : $L \times I \times 1,00 \times (100\% - Dibun \times 2\%) \times HSbg$ Retribusi Rehabilitas Prasarana Bangunan : $V \times I \times Tk \times HSbg$ Retribusi Prasarana Bangunan : $V \times I \times Tk \times HSbg$
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 Hari	GRATIS
3	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	5 Hari	GRATIS
4	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	5 Hari	GRATIS
5	Izin Lokasi	5 Hari	GRATIS
6	Izin Lingkungan	5 Hari	GRATIS
7	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Hari	GRATIS
8	Izin Pengelolaan Persampahan	5 Hari	GRATIS
9	Izin Toko Obat	5 Hari	GRATIS
10	Izin Apotek	5 Hari	GRATIS

NO	NAMA IZIN	WAKTU (HARI)	BIAYA
11	Izin Pendirian Optik	5 Hari	GRATIS
12	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Hari	GRATIS
13	Izin Pengumpulan Sumbangan	5 Hari	GRATIS
14	Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah	5 Hari	GRATIS
15	Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan	5 Hari	GRATIS
16	Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi)	5 Hari	GRATIS
17	Izin Usaha Angkutan Laut	5 Hari	GRATIS
18	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat	5 Hari	GRATIS
19	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	5 Hari	GRATIS
20	Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan	5 Hari	GRATIS
21	Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal	5 Hari	GRATIS
22	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	5 Hari	GRATIS
23	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	5 Hari	GRATIS
24	Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan	5 Hari	GRATIS
25	Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpul Lokal	5 Hari	GRATIS
26	Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal	5 Hari	GRATIS
27	Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan	5 Hari	GRATIS
28	Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan	5 Hari	GRATIS
29	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di lembaga Kearsipan	5 Hari	GRATIS
30	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	5 Hari	Untuk IUP Penangkapan, Ukuran Kapal : Budidaya Air Tawar, Luas Lahan 1 – 3 Ha Sebesar Rp. 50.000,- Lebih Dari 3 Ha Sebesar Rp. 100.000,- - - - Lebih dari 5 Ha Sebesar Rp. 250.000,- Budidaya Air Payau, Luas Lahan: 1 – 3 Ha Sebesar Rp. 100.000,- Lebih dari 3 – 5 Ha Sebesar Rp. 350.000,- 10 – 50 Ha Sebesar Rp. 1.000.000,- Budidaya Laut : Rumput Laut - 0,5 – 1 Ha Rp. 150.000,- - Lebih Dari 1 Ha Rp. 200.000,- Karamba Ukuran 4 x 4 x 3 (1 Unit) Rp. 200.000, Teripang dan Lobster Ukuran 4 x 1 m (1 unit) Rp. 200.000,-
31	Izin Usaha Peternakan	5 Hari	GRATIS
32	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	5 Hari	GRATIS

NO	NAMA IZIN	WAKTU (HARI)	BIAYA
33	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	5 Hari	GRATIS
34	Izin Usaha Minuman Beralkohol	5 Hari	
35	Izin Usaha Toko Swalayan	5 Hari	GRATIS
36	Izin Usaha Industri (IUI)	5 Hari	GRATIS
37	Izin Usaha Pertanian	5 Hari	GRATIS
38	Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah sakit Hewan, Rumah Potong Hewan	5 Hari	GRATIS
39	Izin Usaha Pengecer Obat hewan	5 Hari	GRATIS
40	Izin Usaha	5 Hari	GRATIS
41	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	5 Hari	GRATIS
42	Izin Membuka Tanah	5 Hari	GRATIS
43	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5 Hari	GRATIS
44	Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 Hari	GRATIS
45	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	5 Hari	GRATIS
46	Izin Toko Alat Kesehatan	5 Hari	GRATIS
47	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 Hari	GRATIS
48	Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	5 Hari	GRATIS
49	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	5 Hari	GRATIS
50	Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat	5 Hari	GRATIS
51	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat	5 Hari	GRATIS
52	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan	5 Hari	GRATIS
53	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Dalam Daerah	5 Hari	GRATIS
54	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	5 Hari	GRATIS
55	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	5 Hari	GRATIS
56	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Dalam Daerah Kabupaten	5 Hari	GRATIS

NO	NAMA IZIN	WAKTU (HARI)	BIAYA
57	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Dalam Daerah Kabupaten	5 Hari	GRATIS
58	Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringananya Dalam Daerah Kabupaten	5 Hari	GRATIS
59	Izin Usaha Simpan Pinjam	5 Hari	GRATIS
60	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari	GRATIS
61	Izin Perluasan Usaha Industri	5 Hari	GRATIS
62	Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri	5 Hari	GRATIS
63	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 Hari	GRATIS
64	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5 Hari	GRATIS
65	Rekomendasi Kegiatan	5 Hari	GRATIS
66	Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum	5 Hari	GRATIS
67	Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	5 Hari	GRATIS
68	Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan	5 Hari	GRATIS
69	Surat Keterangan Asal	5 Hari	GRATIS
70	Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)	5 Hari	GRATIS
71	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	5 Hari	GRATIS
72	Surat Keterangan Asal	5 Hari	GRATIS
73	Rekomendasi Penerbitan PKAPT dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu atau Pulau	5 Hari	GRATIS
74	Rekomendasi Kegiatan	5 Hari	GRATIS
75	Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum	5 Hari	GRATIS
76	Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	5 Hari	GRATIS
77	Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan	5 Hari	GRATIS
78	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	5 Hari	GRATIS
79	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	5 Hari	GRATIS
80	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara	5 Hari	GRATIS

NO	NAMA IZIN	WAKTU (HARI)	BIAYA
81	Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan	5 Hari	GRATIS
82	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian	5 Hari	GRATIS
83	Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan	5 Hari	GRATIS
84	Rekomendasi Penelitian	5 Hari	GRATIS
85	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1(satu) tertentu dan PKRT Kelas 1(satu) tertentu Perusahaan Rumah Tangga	5 Hari	GRATIS
86	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	5 Hari	GRATIS

Sumber : DPM-PTSP Kab. Mamuju, 2021

2.4.3.4 Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan demikian perlu kiranya dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana peran pajak dan retribusi daerah terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;

- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek Retribusi terdiri atas tiga yaitu:

- 1) Jasa Umum;
- 2) Jasa Usaha dan;
- 3) Perizinan Tertentu

Dari ketiga Objek retribusi tersebut diatas maka dijelaskan Definisi dan Jenis Objek retribusi dengan uraian sebagai berikut :

1) **Objek Retribusi Jasa Umum** adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

a) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) **Objek Retribusi Jasa Usaha** adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) **Objek Retribusi Perizinan Tertentu** adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- a) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek; dan
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu dunia usaha. Sumber daya manusia selalu menjadi subjek dan objek pembangunan, dalam hal ini akan membahas dalam kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan.

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 di Kabupaten Mamuju mengalami angka yang fluktuatif naik-turun. Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Mamuju sebesar 27,40 yang artinya dari 1.000 penduduk terdapat 27 lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Mamuju.

Tabel II - 103
Rasio Lulusan (S1/S2/S3)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	9.606	10.295	10.612	17.151	7.638
2	Jumlah Penduduk	272.258	279.393	286.389	293.326	278.764
3	Rasio	35,28	36,85	37,05	58,47	27,40

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat Ketergantungan di Kabupaten Mamuju diuraikan berdasarkan gambaran jumlah penduduk. Pada tabel ini dijelaskan pada rasio Ketergantungan dimana pada tahun 2018 didapatkan rasio ketergantungan sebesar 53% sedangkan di tahun 2019 didapatkan rasio ketergantungan sebesar 54.43%, dan ditahun 2020 rasio ketergantungan didapatkan menurun menjadi 52.56%. Trend yang menurun ini memberi gambaran bahwa struktur Kependudukan di Kabupaten Mamuju mengarah pada proporsi penduduk usia produktif dan non produktif yang seimbang. Kondisi ini menuju pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Mamuju. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II - 104
Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2018
Kabupaten Mamuju

No	Uraian	2016		2017		2018	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
		Male	Female	Male	Female	Male	Female
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	44.796	42.782	45.516	43.726	46.296	44.657
2	Jumlah penduduk > 64	3.852	3.936	3.974	4.079	4.110	4.233
3	Jumlah penduduk usia belum produktif	87.578		89.242		90.953	
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	176.892		182.098		187.093	
5	Rasio ketergantungan	54%		53%		53%	

Sumber: Analisis Kab. Mamuju , 2019

Tabel II - 105
Rasio Ketergantungan Tahun 2019-2020
Kabupaten Mamuju

No	Uraian	2019		2020	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
		Male	Female	Male	Female
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	48.265	46.483	44,999	42,683
2	Jumlah penduduk > 64	4.268	4.393	4,162	4,199
3	Jumlah penduduk usia belum produktif	94.748		87,682	
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	189.971		182,721	
5	Rasio ketergantungan	54.43%		52.56%	

Sumber: Analisis Kab. Mamuju , 2021

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan harus berdasarkan proses perencanaan, yang disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, dengan mendayagunakan segala potensi yang ada pada daerah, seperti potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi keuangan daerah.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pembangunan daerah akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik apabila ditunjang oleh analisis keuangan daerah yang memadai. Analisis keuangan daerah penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik. Secara substansial, analisis keuangan daerah mencakup tiga aspek, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah dalam suatu periode tertentu, maka dilakukan analisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, APBD merupakan cerminan dari analisis keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju .
18. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
19. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 49 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan dalam sistem terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mentaati azas pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan daerah, sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Daerah dimasa depan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Berikut dijelaskan kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016-2020.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Secara umum pelaksanaan APBD Kabupaten. Mamuju Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup berarti, baik rencana maupun realisasi. Salah satu indikasi kenaikan APBD ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2016-2020. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020 secara umum dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel III - 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1,058,332,923,221.60	1,087,434,107,522.14	1,090,319,370,020.37	1,125,649,491,486.73	1,035,060,933,752
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	66,800,589,252.87	74,023,409,603.06	75,433,707,053.44	80,120,391,427.47	72,705,099,970
1.1.1.	Pajak daerah	19,300,334,511.00	23,104,600,501.00	26,446,053,866.33	31,245,030,046.32	25,915,030,837
1.1.2.	Retribusi daerah	22,611,325,028.00	27,566,466,824.00	26,810,246,336.00	5,388,042,313.00	3,925,951,041
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3,898,686,872.00	4,227,677,393.32	3,590,058,392.50	3,410,219,185.81	3,713,283,439
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	20,990,242,841.87	19,124,664,884.74	18,587,348,458.61	40,077,099,882.34	39,150,834,653
1.2.	Dana Perimbangan	838,247,143,070.00	811,286,767,504.00	861,685,904,274.00	860,704,209,101.00	788,394,172,114
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	21,508,879,901.00	15,758,459,873.00	14,655,058,232.00	10,425,836,951.00	12,916,141,152
1.2.2.	Dana alokasi umum	626,855,666,000.00	621,672,713,000.00	627,775,288,000.00	651,748,764,000.00	598,579,576,000
1.2.3.	Dana alokasi khusus	189,882,597,169.00	173,855,594,631.00	219,255,558,042.00	198,529,608,150.00	176,898,454,962
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	95,471,958,399.73	202,123,930,415.08	153,199,758,692.93	184,824,890,958.26	173,961,661,668
1.3.1	Hibah	917,989,302.00	43,980,851,624.00	41,674,623,724.00	49,394,119,300.00	53,076,881,242
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)	30,733,248,959.73	31,303,448,791.08	32,204,153,968.93	35,632,285,658.26	36,903,729,426
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	63,102,062,787.00	122,139,630,000.00	70,314,731,000.00	97,548,486,000.00	80,981,051,000

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	718,657,530.00	4,700,000,000.00	9,000,000,000.00	2,250,000,000.00	2,000,000,000
2	Belanja	1,068,561,365,788.70	1,066,538,493,988.00	1,096,531,508,870.50	1,127,451,706,789.00	1,015,917,790,103.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	507,967,653,133.00	481,100,574,854.00	494,267,662,773.50	553,237,758,291.00	594,553,987,569.00
2.1.1	Belanja Pegawai	397,156,905,538.00	362,125,198,403.00	376,693,191,724.50	389,666,698,445.00	382,122,136,823.00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-			
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	2,925,343,580.00	118,010,184,500.00	16,708,600,000.00	16,993,958,000.00	57,475,022,497.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21,111,294,864.00	292,500,000.00	476,000,000.00	118,000,000.00	91,787,613.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	86,774,109,151.00	672,691,951.00	99,811,377,000.00	146,223,842,846.00	132,465,614,607.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	578,494,049.00	235,259,000.00	22,399,426,029.00
2.2	Belanja Langsung	560,593,712,655.70	585,437,919,134.00	602,263,846,097.00	574,213,948,498.00	421,363,802,534.00
2.2.1	Belanja Pegawai	26,310,054,044.00	5,230,213,600.00	58,337,829,323.00	54,953,869,012.00	52,400,283,966.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237,271,777,211.70	310,947,142,172.00	271,435,396,137.00	284,846,063,111.00	226,062,437,158.00
2.2.3	Belanja Modal	297,011,881,400.00	269,260,563,362.00	272,490,620,637.00	234,414,016,375.00	142,901,081,410.00
3	Pembiayaan	13,088,131,849.51	2,859,689,282.41	19,607,894,853.55	13,395,756,003.42	11,592,954,212.15
3.1	Penerimaan Pembiayaan	13,587,575,051.51	2,859,689,282.41	23,607,894,853.55	13,395,756,003.42	11,592,954,212.15
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	499,443,202.00	0	4,000,000,000	-	

Sumber : BPKAD Kab. Mamuju, 2020

Selanjutnya diuraikan masing-masing rata-rata pertumbuhan per tahun dan kinerja aspek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mamuju. Tahun 2016-2020.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah diperoleh melalui mekanisme pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III - 2

**Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		%	%	%	%	%	%
1.	PENDAPATAN	15.72	2.75	0.27	3.24	(8.05)	2.79
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	13.56	10.81	1.91	6.21	(9.26)	4.65
1.1.1	Pajak daerah	1.60	19.71	14.46	18.15	(17.06)	7.37
1.1.2	Retribusi daerah	(22.17)	21.91	(2.74)	(79.90)	(27.14)	22.01
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	16.80	8.44	(15.08)	(5.01)	8.89	2.81
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	182.20	(8.89)	(2.81)	115.61	(2.31)	56.76
1.2.	Dana Perimbangan	24.88	(3.22)	6.21	(0.11)	(8.40)	2.26
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	(4.20)	(26.74)	(7.00)	(28.86)	23.89	(8.58)
1.2.2	Dana alokasi umum	11.15	(0.83)	0.98	3.82	(8.16)	1.39
1.2.3	Dana alokasi khusus	88.97	(8.44)	26.11	(9.45)	(10.90)	8.44
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.92	31.88	(24.21)	20.64	(5.88)	6.67
1.3.1	Hibah	131.55	4,691.00	(5.23)	18.51	7.46	968.66

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		%	%	%	%	%	%
1.3.2	Dana darurat						-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	5.48	1.86	2.88	10.64	6.37	5.45
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	(38.96)	1.01	(42.43)	38.73	(16.98)	(0.54)
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	(86.39)	554.00	91.49	(75.00)	(11.11)	94.60

Sumber BPKAD Kab. Mamuju, 2021

Berdasarkan data yang tergambar dalam tabel III.2, selama tahun 2016-2020 pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju mengalami Penurunan. Pada tahun 2016 pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju adalah sebesar 15,72 Persen. Angka tersebut terus mengalami Penurunan hingga tahun 2018 sebesar 0,27 Persen dan pada tahun 2019 naik tapi melambat sebesar 3,24 Persen dan pada Tahun 2020 pertumbuhan pendapatan sangat signifikan turun mencapai - 8,05 Persen, gambaran pertumbuhan Pendapatan secara umum dapat dilihat pada Grafik III.1

Grafik III - 1

**Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju
Tahun 2016-2020**



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

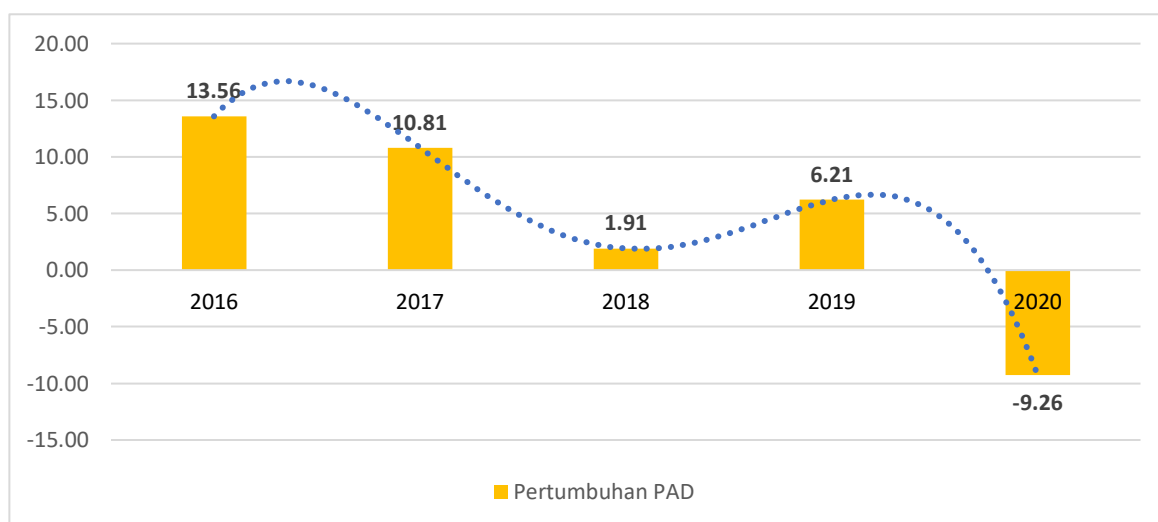
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan baik itu dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang diungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 ada 4 sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, adapun Pertumbuhan Penerimaan PAD Daerah Kabupaten Mamuju dari 2016 sampai dengan 2020 tergambar pada grafik III.2

Grafik III - 2

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

Pada grafik pertumbuhan PAD dapat dilihat pada tahun 2016 naik sebesar 13,56 Persen dari tahun 2015 yang tumbuh 5,92 Persen namun pada tahun 2017 sampai dengan 2018 pertumbuhan PAD menurun sebesar 1.91 Persen, kemudian pada Tahun 2019 Pendapatan bertumbuh 6.21 Persen dan turun drastic pada tahun 2020 sebesar –9.26 Persen. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju ditunjang oleh beberapa komponen didalamnya yang akan dijelaskan satu persatu sehingga ditemukan factor apa yang membuat

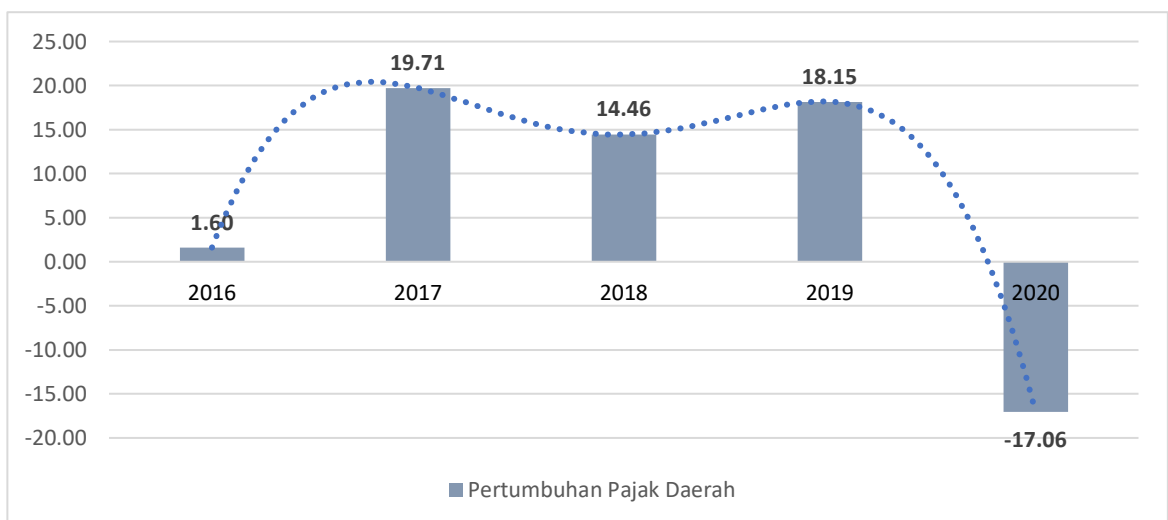
Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju agak menurun sangat signifikan pada tahun 2020, Berikut akan diuraikan Pertumbuhan masing-masing komponen PAD Kabupaten Mamuju.

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tahun 2016 Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Mamuju telah menetapkan 9 (sembilan) Perda jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian PAD Kabupaten Mamuju, meliputi : pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; pajak air bawah tanah; pajak bumi dan bangunan; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, pertumbuhan penerimaan pajak daerah mengalami Fluktuatif, ini dapat terlihat dari Grafik III.3 :

Grafik III - 3

**Pertumbuhan Pajak Daerah
Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020**

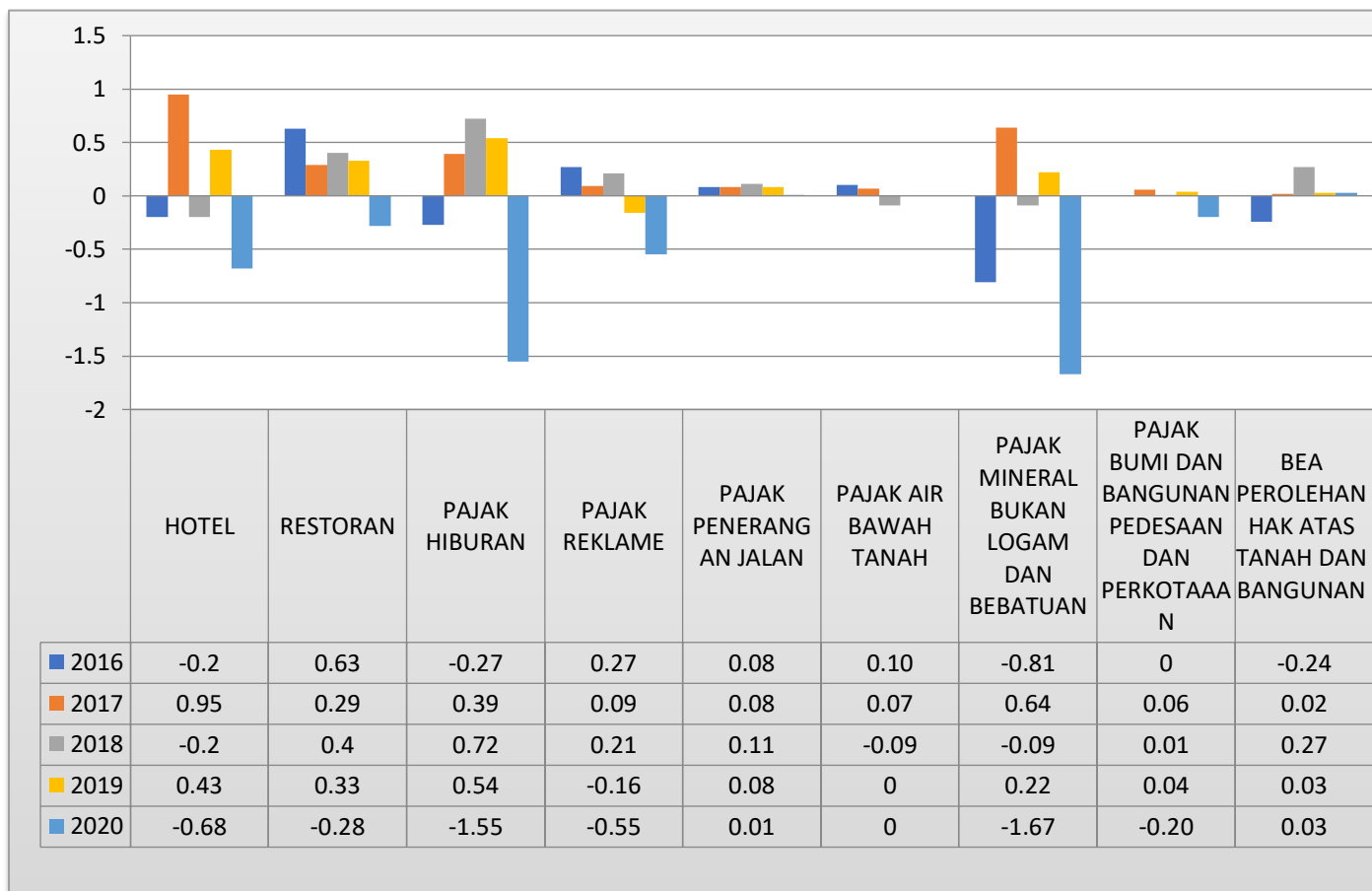


Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

Dari tahun 2016-2020 penurunan Pajak terjadi di tahun 2020 hal ini dipengaruhi adanya beberapa obyek pajak daerah yang berkurang dan mengalami penurunan status (hotel menjadi wisma) serta musibah yang dilanda seluruh Indonesia yaitu Covid-19 sehingga seluruh perekonomian khususnya di kabupaten Mamuju mengalami krisis tanpa terkecuali. Sementara dari sisi pertumbuhan, realisasi perolehan pajak daerah dari tahun 2016-2020 tren perolehannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pajak Daerah diprioritaskan bersumber dari Pajak BPHTB dan Galian C disamping Pajak dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Adapun gambaran rincian objek pertumbuhan rincian objek pajak dapat dilihat pada Grafik III.4 dibawah ini :

Grafik III - 4

**Pertumbuhan Rincian Objek Pajak tahun 2016-2020
Kabupaten Mamuju**



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

2) Retribusi Daerah

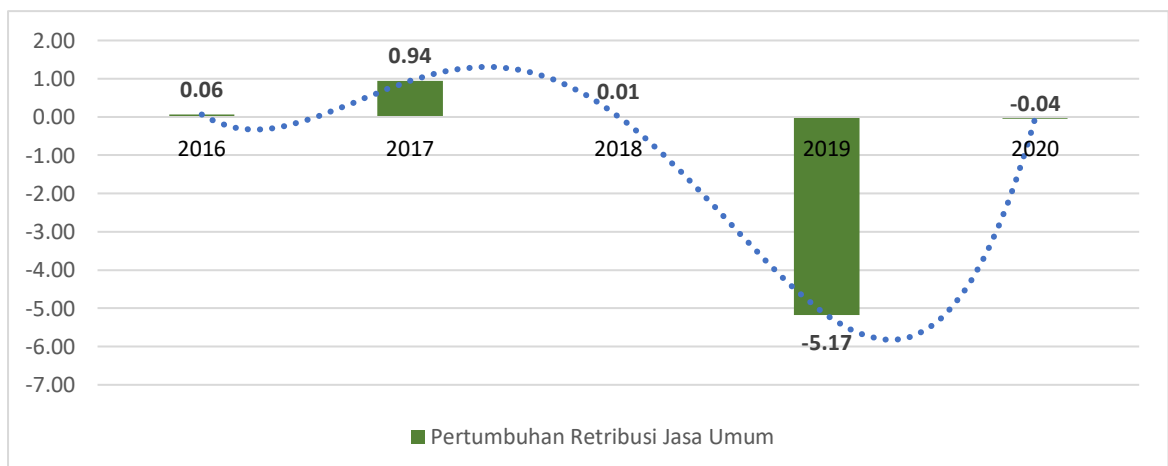
Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.” Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut system Closed List menetapkan 30 jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota, jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (Tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selama kurun 4 Tahun perkembangan Retribusi Jasa Umum dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik III - 5

Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

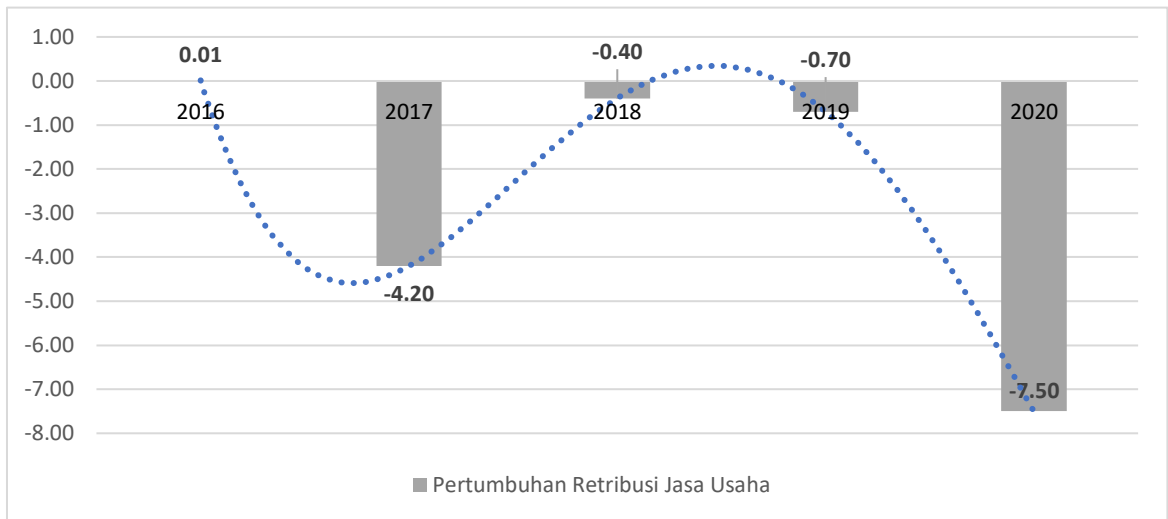
Pada tabel diatas menggambarkan pertumbuhan per tahun didapatkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan yang sangat besar dari sumber jasa umum yang didalamnya didukung oleh banyaknya leges yang terpakai dari segi pelayanan umum namun pada tahun 2018 smpai dengan 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis disebabkan penggunaan Leges dihentikan berdasarkan regulasi yang sudah tidak mendukung penarikan retribusi dalam pelayanan yang berkaitan ketatausahaan untuk pelayanan ke masyarakat, pada tahun 2020 jasa Umum mulai tumbuh melambat sebesar -0.04 Persen ini dipengaruhi oleh jasa kesehatan, lingkungan hidup dan jasa parkir pada Dinas perhubungan walaupun ada musibah Covid-19 .

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah Retribusi dari segi sektor yaitu sector pertanian, perhubungan, Pariwisata, Perikanan, Ketenagakerjaan dan Izin yang dikeluarkan oleh kecamatan dan kelurahan. Perkembangan retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Mamuju Dapat dilihat pada grafik pertumbuhan selama 5 (lima) tahun pertumbuhannya.

Grafik III - 6

Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

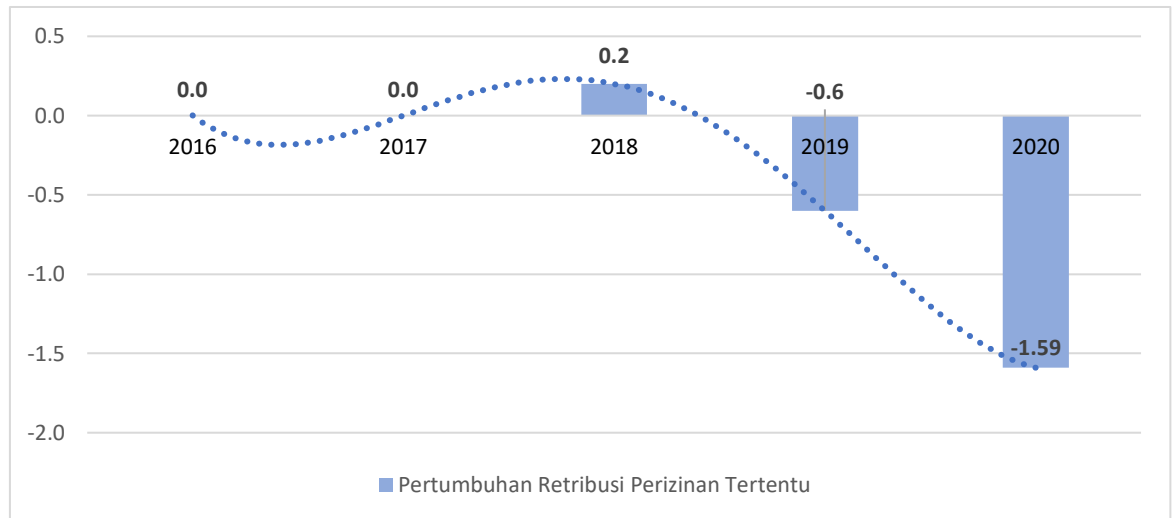
Dari grafik diatas pertumbuhan retribusi jasa usaha sangat kurang baik posisi pertumbuhan melambat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 masih sangat minim dan jauh dari target yang diberikan tiap tahun ini perlu menjadi perhatian daerah untuk perubahan lima tahun akan datang

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pertumbuhan Retribusi perizinan tertentu di kabupaten mamuju pada tahun 2015 sampai 2017 belum ada pemasukan perzinan tentang perizinan tertentu sehingga belum adanya retribusi terkait perizinan tersebut, pertumbuhan retribusi perizinan tertentu dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik III - 7

Pertumbuhan Retribusi Perizinan Tertentu



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

Pada tahun 2018 retribusi perizinan tertentu dari tahun sebelumnya tumbuh hanya 0 Persen menjadi 0,2 persen ini didukung tumbuhnya usaha-usaha dan keahlian yang memerlukan izin khusus seperti apotek, izin praktek Dokter, izin kerja perawat, penjualan minuman yang beralkohol, Namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 retribusi ini turun drastis ini diakibatkan dari 86 perizinan yang ada, 82 jenis perizinan diantaranya dianggap tidak sesuai dengan regulasi sehingga oleh Tim Koorsupgah KPK melarang untuk dilakukan pemungutan sehingga yang tersisa sampai sekarang hanya 4 jenis saja yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Izin Minuman Beralkohol, Izin Trayek dan Izin Budidaya Ikan. Dari 4 jenis perizinan ini hanya Izin Mendirikan Bangunan saja yang terdapat realisasi di tahun 2020 dan ini perlu perhatian untuk dievaluasi.

3) Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan pada Kabupaten Mamuju di

dukung dari penghasilan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan Deviden.

Grafik III - 8

Pertumbuhan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

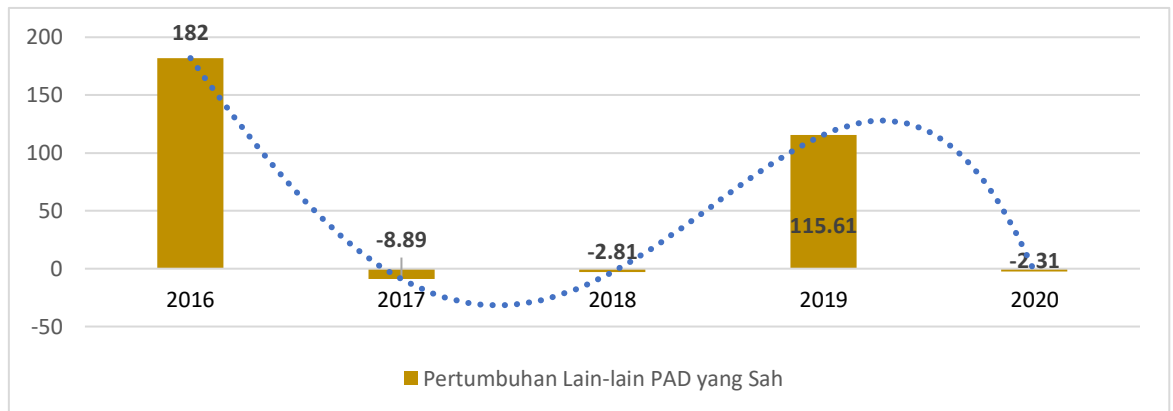
Dari grafik diatas menunjukkan pertumbuhan pendapatan sektor ini fluktuatif karena dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan serta regulasi yang mengatur terkait pembagian laba perusahaan daerah kepada Pemerintah Daerah.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian atas temuan BPK/BPKP/Inspektorat, tuntutan ganti rugi; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah. Pertumbuhan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Mamuju dapat dilihat dilihat pada grafik III.9.

Grafik III - 9

Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah



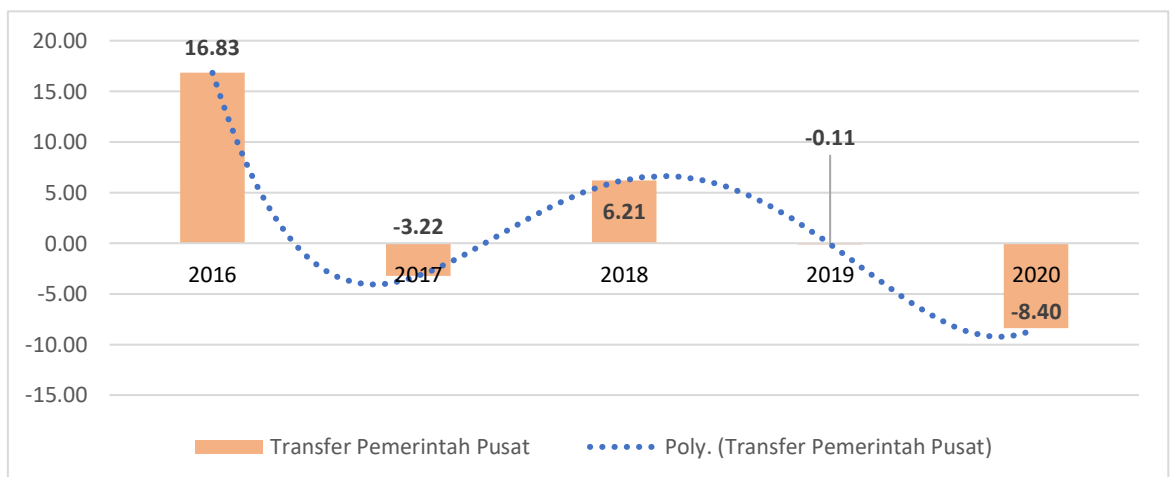
Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan meliputi dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pencapaian dana perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 pertumbuhan dana perimbangan fluktuatif cenderung menurun dari sebesar 16,83 persen pada tahun 2016 menjadi -8,40 persen pada tahun 2020. Secara rata-rata dana perimbangan bertumbuh sebesar 2,26 Persen. Pertumbuhan dana perimbangan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III - 10

**Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020**



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

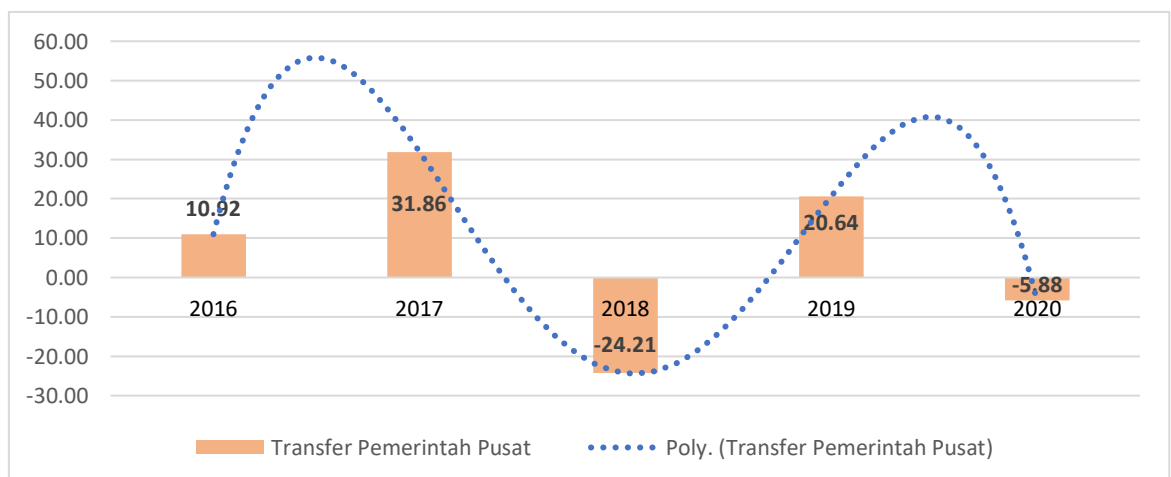
Penerimaan Dana Perimbangan berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus meningkat. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 nilainya mengalami penurunan. Secara rata-rata dana perimbangan bertumbuh sebesar 2,26 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Pusat memberikan transfer dana begitu kecil untuk Kabupaten Mamuju. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan daerah Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik III - 11

**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020**



Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

Pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah di kabupaten mamuju mengalami tren fluktuatif seperti diketahui bahwa lain – lain pendapatan yang sah berasal dari pengembalian dana temuan dan transfer daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Daerah (DBH) dari propinsi yang di transfer ke

kas daerah berdasarkan perolehan hasil pajak daerah yang masuk ke propinsi. Dari hasil grafik diatas, pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami fluktuatif adapun uraian penjelasan tiap tahun sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2016 lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar -10.92 Persen atau sebesar Rp.15.094.746.717 dari tahun 2015 kenaikan ini didukung oleh perolehan dana hibah naik sebesar 131.55 Persen, Dana bagi hasil pajak propinsi naik 5.48 Persen dan Dana Penyesuaian naik Sebesar 16.97 Persen.
- b) Pada tahun 2017 pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah naik signifikan sebesar 31.86 Persen kenaikan pertumbuhan ini disebabkan adanya 3 faktor yang tumbuh yaitu pemberian dana hibah yang tumbuh 4,691 Persen atau sebesar Rp.43,980,851,624 dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya Rp.917.989.302 dengan kenaikan Rp.43.062.862.322, hal ini disebabkan karena hibah dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat harus masuk dalam struktur APBD sesuai aturan, walaupun dananya tidak melalui RKUD , selanjutnya pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang tumbuh sebesar 93,56 Persen atau sebesar Rp 122.139.630.000 dibandingkan pada tahun 2016 dengan selisih Rp.40.273.527.163 sedangkan pada pemberian dana bantuan keuangan yang tumbuh signifikan sebesar 554 Persen atau sebesar Rp 4.700.000.000,- dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya Rp.718.657.350 dengan selisih Rp.4.562.800.850,- .
- c) Pada tahun 2018 pertumbuhan turun signifikan sebesar -24,21 Persen ini diakibatkan menurunnya pertumbuhan pendapatan dari 3 faktor yaitu Dana Hibah yang turun - 5.23Persen dibanding dari tahun 2017
- d) Pada tahun 2019 tumbuh melambat sebesar 20.64 Persen ini diakibatkan dana bantuan yang berasal dari propinsi mengalami kenaikan sehingga dapat membantu sebesar 9,43Persen.
- e) Pada tahun 2020 turun sangat signifikan yaitu -5.88 persen ini disebabkan turunnya dana penyesuaian sebesar -16.98 Persen dan Bantuan Keuangan Sebesar -11.11 Persen ini kemungkinan terjadi diakibatkan oleh Bencana Covid -19.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 kekuatan belanja daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp 1,068 Triliun lebih dan tahun 2020 menurun sebesar Rp 1,15 Triliun lebih dengan peningkatan rata-rata Pertumbuhan sebesar -9.89 Persen. Rincian perkembangan Belanja Daerah disajikan sebagaimana tabel III.3. berikut :

Tabel III - 3

**Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Terhadap Anggaran Belanja
TA 2016 - 2020**

No.	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja	16.95	- 0.19	2.81	2.82	- 9.89	2.50
2.1	Belanja Tidak Langsung	11.02	- 5.29	2.74	11.93	7.47	5.57
2.1.1	Belanja Pegawai	7.28	- 8.82	4.02	3.44	- 1.94	0.80
2.1.2	Belanja Bunga						-
2.1.3	Belanja Subsidi						-
2.1.4	Belanja Hibah	- 92.36	39.34	- 0.86	0.02	238.21	36.87
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	62.58	- 98.61	0.63	- 75.21	- 22.21	- 26.57
2.1.6	Belanja Bagi Hasil						-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	141.32	- 99.22	147.38	46.50	- 9.41	45.31

No.	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-100.00			- 59.33	9,42	1,85
2.2	Belanja Langsung	22.90	4.43	2.87	- 4.66	- 26.62	- 0.21
2.2.1	Belanja Pegawai	- 10.94	-80.12	10.15	- 5.80	- 4.65	- 18.27
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	- 2.06	31.05	- 12.71	4.94	- 20.64	0.12
2.2.3	Belanja Modal	61.14	- 9.34	1.20	- 13.97	- 39.04	- 0.00

Selama periode Tahun 2016-2020, pelaksanaan APBD khususnya aspek Belanja Daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi antara lain :

- 1) Proses perencanaan dan penganggaran APBD yang belum sesuai jadwal yang ditetapkan, meskipun penetapan APBD masih bisa tepat waktu.
- 2) Realisasi belanja yang belum sesuai dengan target anggaran kas.
- 3) Realisasi DAK yang masih terkendala dalam pelaksanaannya.
- 4) Proses pengadaan barang yang masih perlu pembenahan pada SKPD.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi suatu pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk menjadi catatan perbaikan masa mendatang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun realisasinya dapat dilihat pada tabel III.4.

Tabel III - 4

**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju
Tahun 2016 – 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Pembiayaan	13,088,131,849.51	2,859,689,282.41	19,607,894,853.55	13,395,756,003.42	11,592.954.212.15
3.1	Penerimaan Pembiayaan	13,587,575,051.51	2,859,689,282.41	23,607,894,853.55	13,395,756,003.42	11,592.954.212.15
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	499,443,202.00	0	4,000,000,000	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Mamuju

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Mamuju cenderung mengalami fluktuatif ini di pengaruhi oleh penerimaan SilPA Daerah. Pada Tahun 2017 dan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju mengalami surplus sehingga penerimaan pembiayaan tahun berkenaan menyebabkan bertambahnya Sisa Lebih pembiayaan Tahun Berkenaan, Sementara pada Tahun 2016, 2018,2019 dan 2020 anggaran mengalami defisit dan penerimaan pembiayaan mampu menutupi defisit bahkan menyisahkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun padatahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pengeluaran Daerah di Kabupaten Mamuju dilakukan pada tahun 2016 dan 2018 hanya untuk Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Dalam hal ini PDAM.

3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara

bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju selama kurun waktu 2016-2020 seperti terlihat pada Tabel III.5 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut

Tabel III - 5
Neraca Daerah Kabupaten Mamuju
Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1.	Aset Lancar	35,139,035,200.29	74,868,270,157.58	38,974,863,123	42,479,286,757.07	52,342,345,611.25	16.47
1.1.1.	Kas	3,879,215,851.41	23,872,322,785.55	13,610,298,364	11,628,314,538.87	30,886,044,023.03	8.30
1.1.2.	Piutang	19,646,745,342.68	18,276,580,625.70	16,389,679,019	13,768,463,487.78	12,438,180,605.22	4.99
1.1.3.	Beban Dibayar Dimuka	82,571,200.50	82,116,583.33	197,182,140	436,508,575.42	24,122,500.00	25.91
1.1.4.	Persediaan	11,530,502,805.70	32,637,250,163.00	8,777,703,600	16,646,000,155.00	8,993,998,883.00	25.82

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.	Investasi Jangka Panjang	17,408,993,452.14	18,544,387,245.43	22,653,111,838	22,387,801,884.90	22,898,545,646.89	5.63
1.2.1.	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	0.00
1.2.2.	Investasi Permanen	17,408,993,452.14	18,544,387,245.43	22,653,111,838	22,387,801,884.90	22,898,545,646.89	5.63
1.3.	Aset Tetap	1,798,546,234,808.89	1,836,685,566,541.82	1,942,182,633,243	2,042,437,403,302.39	2,016,144,335,303.30	4.34
1.3.1.	Tanah	491,202,690,184.00	476,536,582,684.00	478,151,610,834	482,577,851,181.00	483,230,796,011.00	(0.68)
1.3.2.	Peralatan dan mesin	303,711,735,746.09	329,187,459,312.88	284,685,604,925	318,631,970,797.25	346,657,901,963.04	8.36
1.3.3.	Gedung dan bangunan	625,768,729,689.38	616,595,343,861.74	643,828,322,382	733,458,719,229.74	790,780,639,733.74	6.92
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	901,259,116,366.08	1,090,105,005,580.90	1,254,962,506,059	1,368,562,638,193.13	1,444,524,260,896.73	13.52
1.3.5.	Aset tetap lainnya	48,128,972,115.39	45,275,927,530.39	39,944,151,226	35,237,176,277.86	36,573,097,457.86	13.52
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	67,285,618,203.82	8,229,499,936.60	44,899,881,700	36,563,809,634.60	21,082,318,071.00	253.07
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(638,810,627,495.87)	(729,244,252,364.69)	(804,289,443,882)	(932,594,762,011.19)	(1.106,704,678,830.07)	15.23
1.4.	Aset Lainnya	73,594,544,998.00	75,218,156,680.00	96,437,911,173	88,215,526,404.05	88,201,097,893.06	4.14
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran						0.00

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah						0.00
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	61,022,871,030.00	61,022,871,030.00	61,022,871,030	61,022,871,030.00	61,022,871,030.00	0.58
1.4.4.	Aset tak berwujud	3,113,208,500.00	2,057,948,001.00	2,702,071,992	2,394,095,760.00	2,166,962,024.00	(5.74)
1.4.5.	Aset Lain-Lain	9,458,465,468.00	12,137,337,649.00	32,712,968,151	24,798,559,614.05	25,011,264,839.06	30.80
	Jumlah Aset Daerah	1,924,688,808,459.32	2,005,316,380,624.83	2,100,248,519,377	2,195,520,018,348.41	2,179,586,324,454.50	5.07
2	Kewajiban	42,425,734,257.86	4,874,532,082.86	4,911,201,745	6,555,928,358.16	35,280,990,873.66	165.38
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	42,425,734,257.86	4,874,532,082.86	4,911,201,745	6,555,928,358.16	35,280,990,873.66	165.38
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	165,054,231.00	117,019,969.00	214,542,361		128,016,453.00	35.82
2.1.2.	Utang muka dari kas daerah						0.00
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	358,972,500.00	198,270,000.00	1,259,907,917	1,081,850,879.16	696,514,166.66	82.33
2.1.4.	Utang Belanja	40,173,567,158.00	2,548,921,481.00	3,124,528,327	1,074,801,610.00	19,133,835,882.00	434.10

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	1,728,140,368.86	2,010,320,632.86	312,223,140	4,399,275,869.00	15,322,624,372.00	297.83
3	Ekuitas Dana	1,882,263,074,201.46	2,000,441,848,541.97	2,095,337,317,632.53	2,188,964,089,990.25	2,144,305,333,580.84	4.82
3.1	Ekuitas	1,882,263,074,201.46	2,000,441,848,541.97	2,095,337,317,632.53	2,188,964,089,990.25	2,144,305,333,580.84	4.82
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	1,924,688,808,459.32	2,005,316,380,624.83	2,100,248,519,377.05	2,195,520,018,348.41	2,179,586,324,454.50	5.07

Sumber : BPKAD Kab. Mamuju, 2020

Selama kurun waktu 2016-2020, perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalami perkembangan yang melambat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,07 Persen. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan), aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019).

Tabel III - 6
Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju
Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
A	Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar (<i>Curren Ratio</i>)	0.83	15.36	7.94	6.48	1.48
2	Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	0.56	8.66	6.15	3.94	1.23
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2	Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02

Sumber : BPKAD Kab. Mamuju, 2020

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :
 - a. Rasio Lancar adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan sumber daya dalam bentuk asset lancar untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca dengan cara menghitung (Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek) hasil yang didapatkan harus lebih dari 150 Persen -300Persen yang menunjukkan kondisi keuangan yang baik
 - b. Quick Rasio (Rasio Cepat) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan asset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca dengan cara mengukur (Quick Ratio = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek)hasil yang didapatkan harus lebih dari 100 Persen-200Persen ini menunjukkan kondisi keuangan yang baik

2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. Rasio total Hutang/kewajiban terhadap Total Aset adalah rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan asset pemerintah daerah cara mengukurnya adalah Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total asset (semakin kecil dari 1 Persen, maka ratio ini semakin baik). Rasio total hutang/kewajiban terhadap total asset Pemerintah Kabupaten Mamuju dari tahun 2016-2020 makin baik dengan angka lebih kecil dari 1Persen artinya keseluruhan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Mamuju didanai sebelum jatuh tempo dalam periode yang sama
 - b. Ratio total kewajiban terhadap ekuitas dana/modal adalah rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana pemerintah daerah, ratio ini didapatkan dengan rumus Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas (semakin kecil dari 1Persen, maka ratio ini semakin baik) hasil ratio total kewajiban terhadap ekuitas kabupaten mamuju dari tahun 2016-2020 menunjukkan lebih kecil dari 1 Persen ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten mamuju mampu membiayai kewajibannya melalui ekuitas dana pemerintah kabupaten mamuju dalam periode yang sama
3. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.
 Rata-rata umur piutang = $365 : \text{perputaran piutang}$
 Dimana :
 Perputaran piutang = $\text{pendapatan daerah} / \text{rata-rata piutang pendapatan daerah}$.
 Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = $(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}) : 2$
 - b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = $365 : \text{perputaran persediaan}$

Dimana :

Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun:
rata-rata nilai persediaan.

Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = $(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan}) : 2$

Tabel III - 7

**Hasil Analisa Neraca Keuangan
Pemerintah Kabupaten Mamuju 2016 – 2020**

NO	URAIAN	NILAI	OPINI
A	Rasio Likuiditas		
1	Rasio Lancar (Current Ratio) (Persen)	< 100 Persen	Masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
2	Rasio Quick (quick ratio)(Persen)	<100 Persen	Mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat
B	Rasio Solvabilitas		
1	Rasio total hutang terhadap total asset (total debt to total asset)(Persen)	>1	Mampu melunasi hutang dengan asset yang tersedia
2	Rasio Hutang terhadap modal (total debt to equity)(Persen)	>1	Mampu melunasi hutang dengan modal yang tersedia

Sumber : BPKAD Kabupaten Mamuju 2016-2020

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan system yang terintegritasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribus, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilitas, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam persyaratan LKJP Akhir Masa Jabatan Tahun 2016-2020 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK,

A. Kebijakan Pendapatan daerah

Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi daerah, peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat, propinsi dan daerah secara adil dan proporsional berdasarakan potensi dan pemerataan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, untuk itu

dapat digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. Antara lain

1. Memaksimalkan kelembagaan dan system operasional pemungutan pendapatan daerah
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi
3. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan OPD terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Instansi Vertikal Lainnya;
5. Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan Kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah dan Aset Daerah
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan system administrasi dan efesiensi penggunaan anggaran daerah dengan memanfaatkan Informasi Teknologi
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang professional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat

B. Kebijakan Belanja Daerah

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah Daerah atau antar pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tabel III.8 di bawah ini akan menampilkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel III - 8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020 (anaudited)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	397,156,905,538.00	362,125,198,403.00	376,693,191,724.50	389,666,698,445.00	382,122,136,823.00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	303,318,818,137.00	276,054,082,468.00	283,911,347,462.00	295,693,435,047.00	296,344,728,432
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	89,427,698,984.00	81,480,086,486.00	86,074,862,661.50	87,507,266,125.00	80,149,205,655
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2,151,400,000.00	2,410,800,000.00	4,410,000,000.00	4,600,000,000.00	4,159,000,000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	2,258,988,417.00	2,180,229,449	2,296,981,601.00	1,865,997,273.00	1,469,202,736
B	Belanja Langsung	147,098,121,414	245,490,591,521	243,665,140,208	261,305,366,839	157,738,655,334
1	Belanja Honorarium PNS**)	17615968090	17,907,820,785	12,411,899,715	13,952,318,352	15,269,166,967
	Belanja Honorarium Non PNS	4,677,500,604.00	43,443,582,911	41,582,242,500	38,055,495,960	36,750,010,999
2	Belanja Uang Lembur**)	4,016,585,350.00	5,230,159,820	4,343,687,108	2,946,054,700	381,106,000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	375,000,000		10,000,000		
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	8,663,512,421	6,391,433,824	3,052,670,763	2,747,682,149	366,578,210
5	Belanja premi asuransi kesehatan	1,957,293,724	18,730,806,630	17,486,179,744	19,892,167,176	
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	19,370,504,132	27,272,716,960	29,098,446,581	22,146,143,392	12,723,794,554
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	824,147,569	1,292,808,866	1,216,165,452	1,166,110,000	587,777,000
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4,780,583,800	4,917,356,000	5,009,314,284	1,062,016,400	493,311,650
9	Belanja perjalanan dinas**)	51,462,889,988	50,277,891,140	49,034,303,424	53,377,240,924	26,544,115,729
10	Belanja perjalanan pindah tugas					
11	Belanja Pemulangan Pegawai					
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	33,354,135,736	70,026,014,585	80,420,230,637	105,960,137,786	64,622,794,225
	TOTAL	544,255,026,952	607,615,789,924	620,358,331,933	650,972,065,284	539,860,792,157

Sumber : BPKAD Kab. Mamuju, 2019

Berdasarkan tabel III.8 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja pegawai selama periode 2016-2020, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal serta mutasi pada tahun anggaran berjalan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pegawai.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2016-2020 sebagai berikut:

1. Prioritas penyelesaian tiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten terutama penyelesaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Belanja Pemenuhan kewajiban Daerah seperti Pelayanan Dasar, Pendidikan Kesehatan dan Desa
3. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021.
4. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja,
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bantuan kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif,
6. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021,
7. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
8. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan
9. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan khusus (DAK, Cukai Hasil Tembakau) untuk menstimulasi capaian

target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mamuju sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tabel III.9 di bawah ini akan menampilkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran (total belanja ditambah dengan pembiayaan pengeluaran).

Tabel III - 9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2016	544,255,026,952	1,069,060,808,991	50.91
2	Tahun anggaran 2017	607,615,789,924	1,066,538,493,988	56.97
3	Tahun anggaran 2018	620,358,331,933	1,100,531,508,871	56.37
4	Tahun anggaran 2019	650,972,065,284	1,127,451,706,789	57.74
5	Tahun anggaran 2020 (<i>anaudited</i>)	539,860,792,157	1,015,917,790,103	53.14
Rata - rata %				55.03

Sumber: BPKAD Kab. Mamuju 2020

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel Tabel III.10 memperlihatkan fluktuatif pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Pembiayaan Netto sebesar Rp. 13 Milyar lebih Menurun menjadi Rp. 2 Milyar lebih pada tahun 2017 atau Turun -78.15 persen dari tahun sebelumnya, selanjutnya meningkat lagi menjadi sebesar Rp.19 Milyar pada Tahun 2018 atau naik 5,86 persen, namun pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.13 Milyar lebih atau turun -31,68 persen. Pada Periode Tahun 2016-2020 Pembiayaan netto ini diperoleh dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Tabel III - 10
Penutup Defisit Rill Anggaran
Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020

N O	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020 (anaudited)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,058,332,923,222	1,087,434,107,522	1,090,319,370,020.37	1,125,649,491,486.73	1,035,060,933,751.88
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,068,561,365,789	1,066,538,493,988	1,096,531,508,870.50	1,127,451,706,789.00	1,015,917,790,103.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	499,443,202	-	4,000,000,000.00	-	-
	Defisit riil	10,727,885,769.10	20,895,613,534.14	10,212,138,850.13	1,802,215,302.27	19,143,143,648.88

Sumber: BPKAD Kab.Mamuju, 2020

Dengan mencermati tabel tersebut di atas, komponen terbesar dalam menutup defisit masih mengutamakan penerimaan dari SiLPA dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk masa pemerintahan lima tahun kedepan, kebijakan penutup defisit diupayakan secara bertahap pada sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya, artinya pemerintah Kabupaten Mamuju perlu terus meningkatkan upaya untuk mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Adapun SiLPA yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya diakibatkan oleh faktor-faktor antara lain:

1. Sisa penghematan belanja/efisiensi anggaran belanja atau akibat lainnya;
2. Sisa anggaran karena kegiatan yang tertunda yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya;

Tabel III - 11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020* (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-126.66	13.69	-231.17	-743.29	60.56
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Kab.Mamuju, 2020

Dari table III.11 di atas nampak bahwa penutup defisit riil anggaran Kabupaten Mamuju tahun Anggaran 2016 – 2020, hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Tabel III - 12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Riil
Kabupaten Mamuju TA 2016 – 2020

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020 (anaudited)		Rata-rata pertumbuhan*)
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
Jumlah SiLPA	13,587,575,052		2,859,689,282		23,607,894,854		13,395,756,003		11,592,954,212		
Pelampauan penerimaan PAD											
Pelampauan penerimaan dana perimbangan											
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah											

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020 (anaudited)		Rata-rata pertumbuhan*)
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	13,587,575,052	100	2,859,689,282	100	23,607,894,854	100	13,395,756,003	100	11,592,954,212	100	
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan											
Kegiatan lanjutan											

Sumber: BPKAD Kab.Mamuju, 2020

Dari tabel III.12 di atas terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir (2016-2019), sebagai tujuan rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Dari 4 (empat) item SiLPA pada tabel diatas terdapat 2 item yang secara signifikan berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA selama tahun 2016-2020, yakni dari: Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan Kewajiban kepada pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Mamuju.

Kebijakan pembiayaan Daerah selama tahun anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja,
2. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ke tiga.
3. Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Daerah dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan Daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja Daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju periode tahun 2021-2026 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dijelaskan tentang posisi surplus belanja dan/atau defisit belanja selama periode pemerintahan yang lalu.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja Daerah dan pengeluaran Daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan Daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pospos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Suatu kapasitas keuangan Daerah adalah total pendapatan dan penerimaan Daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan

akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Proyeksi Lima Tahun kedepan Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah.

3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik Daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi Daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan Aset dan keuangan Daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran Daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, untuk menentukan Proyeksi Pendapatan Daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel III - 13
Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN		1.063.939.133.803,56	1.093.623.035.636,68	1.124.135.118.330,94	1.155.498.488.132,37	1.187.736.895.951,27	1.220.874.755.348,31
4.1	Pendapatan Asli Daerah		74.733.572.259	76.818.638.925	78.961.878.951	81.164.915.374	83.429.416.513	85.757.097.233
4.1.1.	Pajak daerah	2,79	26.638.060.196,94	27.381.262.076,44	28.145.199.288,37	28.930.450.348,51	29.737.609.913,24	30.567.289.229,82
4.1.2.	Retribusi daerah	2,79	4.035.485.075,04	4.148.075.108,64	4.263.806.404,17	4.382.766.602,84	4.505.045.791,06	4.630.736.568,63
4.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2,79	3.816.884.046,76	3.923.375.111,67	4.032.837.277,28	4.145.353.437,32	4.261.008.798,22	4.379.890.943,69
4.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	2,79	40.243.142.940,29	41.365.926.628,33	42.520.035.981,26	43.706.344.985,13	44.925.752.010,22	46.179.180.491,30
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER		932.592.035.315,87	958.611.353.101,18	985.356.609.852,70	1.012.848.059.267,59	1.041.106.520.121,16	1.070.153.392.032,54
4.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		810.390.369.515,98	833.000.260.825,48	856.240.968.102,51	880.130.091.112,57	904.685.720.654,61	929.926.452.260,87
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	2,79	12.362.539.570,34	12.707.454.424,35	13.061.992.402,79	13.426.421.990,83	13.801.019.164,37	14.186.067.599,06
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,79	913.961.919,80	939.461.457,36	965.672.432,02	992.614.692,88	1.020.308.642,81	1.048.775.253,94
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	2,79	615.279.946.170,40	632.446.256.668,55	650.091.507.229,61	668.229.060.281,31	686.872.651.063,16	706.036.398.027,82
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	2,79	181.833.921.855,44	186.907.088.275,21	192.121.796.038,09	197.481.994.147,55	202.991.741.784,26	208.655.211.380,05

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		83.240.422.322,90	85.562.830.105,71	87.950.033.065,66	90.403.838.988,19	92.926.106.095,96	95.518.744.456,04
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	2,79	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	2,79	83.240.422.322,90	85.562.830.105,71	87.950.033.065,66	90.403.838.988,19	92.926.106.095,96	95.518.744.456,04
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		38.961.243.476,99	40.048.262.169,99	41.165.608.684,54	42.314.129.166,83	43.494.693.370,59	44.708.195.315,63
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2,79	38.961.243.476,99	40.048.262.169,99	41.165.608.684,54	42.314.129.166,83	43.494.693.370,59	44.708.195.315,63
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2,79	0,00	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		56.613.526.228,65	58.193.043.610,43	59.816.629.527,16	61.485.513.490,97	63.200.959.317,37	64.964.266.082,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	2,79	54.557.726.228,65	56.079.886.790,43	57.644.515.631,88	59.252.797.618,01	60.905.950.671,56	62.605.226.695,29
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	2,79	0,00	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	2,79	2.055.800.000,00	2.113.156.820,00	2.172.113.895,28	2.232.715.872,96	2.295.008.645,81	2.359.039.387,03
2	Belanja		1.041.315.734.855,58	1.067.348.628.226,97	1.094.032.343.932,64	1.121.383.152.530,96	1.149.417.731.344,23	1.178.153.174.627,84
2,1	Belanja Operasi		736.105.459.758,43	754.508.096.252,39	773.370.798.658,70	792.705.068.625,16	812.522.695.340,79	832.835.762.724,31
2.1.1	Belanja Pegawai	2,50	392.065.823.893,58	401.867.469.490,91	411.914.156.228,19	422.212.010.133,89	432.767.310.387,24	443.586.493.146,92
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	2,50	255.131.324.414,63	261.509.607.524,99	268.047.347.713,12	274.748.531.405,94	281.617.244.691,09	288.657.675.808,37
2.1.3	Belanja Bunga	2,50	0,00	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	2,50	0,00	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.5	Belanja Hibah	2,50	88.814.229.146,90	91.034.584.875,57	93.310.449.497,46	95.643.210.734,90	98.034.291.003,27	100.485.148.278,35
2.1.6	Bantuan Sosial	2,50	94.082.303,33	96.434.360,91	98.845.219,93	101.316.350,43	103.849.259,19	106.445.490,67
2,2	Belanja Modal	2,50	146.473.608.445,25	150.135.448.656,38	153.888.834.872,79	157.736.055.744,61	161.679.457.138,23	165.721.443.566,68
2.2.1	Belanja Tanah	2,50	267.199.542,00	273.879.530,55	280.726.518,81	287.744.681,78	294.938.298,83	302.311.756,30
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	2,50	29.028.667.027,98	29.754.383.703,67	30.498.243.296,27	31.260.699.378,67	32.042.216.863,14	32.843.272.284,72
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2,50	45.850.513.968,75	46.996.776.817,97	48.171.696.238,42	49.375.988.644,38	50.610.388.360,49	51.875.648.069,50
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,50	64.574.966.473,28	66.189.340.635,11	67.844.074.150,98	69.540.176.004,76	71.278.680.404,88	73.060.647.415,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,50	6.752.261.433,25	6.921.067.969,08	7.094.094.668,31	7.271.447.035,02	7.453.233.210,89	7.639.564.041,16
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	2,50	0,00	-	-	-	-	-
3	Belanja Tidak Terduga		22.959.411.679,73	23.533.396.971,72	24.121.731.896,01	24.724.775.193,41	25.342.894.573,25	25.976.466.937,58
3,1	Belanja Tidak Terduga	2,50	22.959.411.679,73	23.533.396.971,72	24.121.731.896,01	24.724.775.193,41	25.342.894.573,25	25.976.466.937,58
3,2	BELANJA TRANSFER		135.777.254.972,18	139.171.686.346,48	142.650.978.505,14	146.217.252.967,77	149.872.684.291,96	153.619.501.399,26
	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak	2,50	0,00	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	2,50	0,00	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2,50	0,00	-	-	-	-	-
	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN		135.777.254.972,18	139.171.686.346,48	142.650.978.505,14	146.217.252.967,77	149.872.684.291,96	153.619.501.399,26

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2,50	135.777.254.972,18	139.171.686.346,48	142.650.978.505,14	146.217.252.967,77	149.872.684.291,96	153.619.501.399,26
	Bantuan Keuangan Keuangan ke Desa	2,50	135.777.254.972,18	139.171.686.346,48	142.650.978.505,14	146.217.252.967,77	149.872.684.291,96	153.619.501.399,26
	Bantuan Keuangan Lainnya	2,50	0,00	-	-	-	-	-
	Pembiayaan		6.772.388.452,33	4.638.066.341,88	3.023.024.800,90	1.800.922.866,84	876.158.333,34	176.389.010,84
	Penerimaan Pembiayaan	-24,33	8.772.388.452,33	6.638.066.341,88	5.023.024.800,90	3.800.922.866,84	2.876.158.333,34	2.176.389.010,84
	Pengeluaran Pembiayaan		2.000.000.000,0	2.000.000.000,0	2.000.000.000,0	2.000.000.000,0	2.000.000.000,0	2.000.000.000,0

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Tabel III - 14

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Mamuju**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1	Pendapatan	1,061,883,333,803.56	1,091,509,878,816.68	1,121,963,004,435.66	1,153,265,772,259.42	1,185,441,887,305.45
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	8,772,388,452.33	6,638,066,341.88	5,023,024,800.90	3,800,922,866.84	2,876,158,333.34
	Total penerimaan	1,070,655,722,255.89	1,098,147,945,158.56	1,126,986,029,236.56	1,157,066,695,126.26	1,188,318,045,638.79
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	609,417,837,258.23	624,653,283,189.68	640,269,615,269.42	656,276,355,651.16	672,683,264,542.44
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	461,237,884,997.67	473,494,661,968.88	486,716,413,967.14	500,790,339,475.10	515,634,781,096.36

Sumber: BPKAD Kab.Mamuju, 2020

Tabel III - 15

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Mamuju

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	461,237,884,9 97.67	473,494,661,9 68.88	486,716,413,9 67.14	500,790,339,4 75.10	515,634,781,0 96.36
1	Prioritas I	276,742,730,9 98.60	284,096,797,1 81.33	292,029,848,3 80.28	300,474,203,6 85.06	309,380,868,6 57.81
2	Prioritas II	110,697,092,3 99.44	113,638,718,8 72.53	116,811,939,3 52.11	120,189,681,4 74.02	123,752,347,4 63.13
3	Prioritas III	73,798,061,59 9.63	75,759,145,91 5.02	77,874,626,23 4.74	80,126,454,31 6.02	82,501,564,97 5.42

Sumber: BPKAD Kab.Mamuju, 2020

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan Daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

A. Prioritas I

Dialokasikan untuk mendanai Prioritas Utama yaitu penyelesaian Indikator SPM, Indikator Permendagri 86 dan indikator yang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah

B. Prioritas II

Dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2025 terpilih. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada

:

- 1) Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan system jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin.
- 2) Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan.
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sector pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
- 4) Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

C. Prioritas III

Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja- belanja untuk memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan belanja tidak langsung yang dilakukan dengan prinsip pengembangan Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui pendekatan sektoral dan spasial, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/distribusi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 2) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada

pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- 4) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, dan kepada pemerintah Daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan kondisi capaian indikator kinerja pada semua urusan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada bab II RPJMD dan hasil analisis kondisi keuangan daerah pada bab III. Permasalahan pembangunan daerah merupakan **“gap expectation”** antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut ini hasil identifikasi seluruh permasalahan pembangunan yang dihadapi pada masing-masing urusan pemerintahan daerah.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Pendidikan

1. Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, terlihat dari APK PAUD yang belum mencapai 100%.
2. Masih adanya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs terutama pada jenjang SMP/Mts.

4.1.1.2. Kesehatan

1. Masih adanya kasus kematian ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian balita (AKBa).
2. Masih ditemukannya gizi buruk dan gizi kurang pada balita
3. Masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat
4. Belum optimalnya sarana, prasarana dan tenaga layanan kesehatan
5. Masih tingginya persentase stunting pada balita yaitu 41,06%

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rendahnya Konektifitas antar wilayah;
Kondisi jalan baik di Kabupaten Mamuju menunjukkan trend Penurunan dari tahun ketahun dari 30% pada tahun 2017 menjadi 16,86% di tahun 2019, dan ditahun 2020 sebesar 47,33%. Hal ini berarti masih ada 52,67% dari 666,86 km jalan rusak di Kabupaten Mamuju atau masih ada 351,25 km ruas jalan di Kabupaten Mamuju dalam keadaan Tidak Baik. Penyebab utama kerusakan

jalan di Kabupaten Mamuju antara lain adalah Kapasitas Jalan tidak sesuai dengan kendaraan yang akan melintas (Tonase), Belum Terpadunya Perencanaan Jalan.

2. Masih Kurangnya Drainase

Keberadaan drainase di Kabupaten Mamuju masih perlu mendapatkan perhatian karena persentase salurah drainase dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 26%. Ini yang menyebabkan banyaknya timbunan genangan dijalan.

3. Masih rendahnya akses terhadap Air Minum

Berdasarkan arahan RPJMN III (2015-2019) Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan target 100- 0-100 yaitu 100 % akses air minum yang layak, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi. Untuk mendukung hal tersebut pada tahun 2020 cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Mamuju sudah mencapai 65 %. Meskipun akses air minum di atas 50%, namun masih ada sekitar 2 kecamatan yang akses air minum sangat minim, yakni kecamatan Tommo dan Kecamatan Bala-balakang

4. Tingginya pelanggaran terhadap Penataan Ruang

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain tersediannya dokumen perencanaan tata ruang juga terlihat dari indikator lain salah satunya rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB. Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk. Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB kabupaten Mamuju sebesar 1:1,6 kondisi ini perlu mendapatkan perhatian. Sementara itu untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan didalam RTRW juga masih terjadi di Kabupaten Mamuju.

4.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih tingginya luasan Kawasan kumuh perkotaan

Kawasan kumuh Perkotaan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Mamuju. Kawasan permukiman kumuh Perkotaan yang perlu menjadi prioritas seluas 50.64 ha, meliputi empat Kelurahan di Kecamatan Mamuju, yaitu: Simboro, Binanga, Rimuku, dan Karema. Kawasan kumuh perkotaan Danga seluas 10,8 ha terletak di Kelurahan Binanga, Kawasan Kasiwa Seluas 16,44 Ha

terletak di Kelurahan Binanga, Kawasan Kanal Rimuku Seluas 12,14 Ha terletak di Kelurahan Rimuku, Kawasan Karema Selatan Seluas 6,12 Ha Di kelurahan Karema dan Kawasan Terminal Simbuang Seluas 5,86 Ha Terletak di Kelurahan Simboro. Pemerintah Kabupaten Mamuju terus melakukan pembenahan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh melalui perbaikan sistem drainase lingkungan, pembangunan jalan lingkungan, dan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.

2. Masih terdapat rumah tidak layak huni

Rasio rumah layak huni sampai tahun 2020 1: 5, yang idealnya rasio harus mencapai 1 : 1. Seiring dengan bertambahnya penduduk urban yang masuk ke Kabupaten Mamuju dimana penduduk urban tersebut adalah pencari kerja sektor informal akan menambah makin banyaknya persoalan Kawasan kumuh ataupun rumah tidak layak huni.

4.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran;

- a. Belum optimalnya penyediaan data sector terkait;
- b. Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kejahatan;
- c. Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol Pamong Praja, disebabkan keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana dan keterbatasan anggaran untuk operasional patrol;
- d. Belum maksimalnya Penegakan PERDA dan Pemberantasan penyakit masyarakat;
- e. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum mematuhi standar layanan maksimal 15 menit disetiap kejadian kebakaran, hal ini disebabkan oleh keterbatasan personil dan sarana prasarana yang tidak memenuhi standar Nasional pemadam kebakaran.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- a. Belum tersedianya Peta Resiko Bencana;
- b. Belum tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana;
- c. Belum tersedianya rencana kontijensi per ancaman;
- d. Masih kurangnya sistem peringatan dini per ancaman;
- e. Belum optimalnya rencana evakuasi. jalur evakuasi, dan tempat

- evakuasi sementara;
- f. Belum optimalnya penyediaan logistik bantuan selama masa tanggap darurat;
 - g. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;
 - h. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan bencana.

4.1.1.6. Sosial

- 1. Masih Belum optimalnya ketersediaan data PMKS;
- 2. Masih kurangnya penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
- 3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
- 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana;
- 5. Belum maksimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
- 6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia terhadap pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- 7. Masih adanya RTM (Rumah Tangga Miskin) yang belum terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Tenaga Kerja

- 1. Masih banyaknya pengangguran, dan rendahnya penempatan kerja.
- 2. Terbatasnya pelatihan peningkatan keterampilan pencari kerja, terlihat dari tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
- 3. Sulitnya menyatukan kesepakatan perselisihan hak dan kepentingan antar pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja
- 4. Permintaan tenaga kerja lebih tinggi dibanding lapangan kerja.
- 5. Masih terjadinya kasus sengketa perusahaan dengan tenaga kerja dan pelaksanaan K3 di perusahaan.
- 6. Masih rendahnya pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan.
- 7. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja

8. Tidak adanya kesepakatan tentang upah antara pengusaha dengan tenaga pekerja serta sarana hubungan industrial di perusahaan belum berjalan sesuai peran dan fungsinya terhadap angka sengketa pengusaha-pekerja setiap tahunnya.
9. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama disebabkan
10. Pihak yang berselisih kurang memahami aspek positif/penyelesaian perselisihan lewat perjanjian bersama.
11. Besaran pencarian kerja yang terdaftar yang ditempatkan disebabkan ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Terbatasnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap keselamatan dan perlindungan kerja.
12. Belum semua pekerja/buruh di perusahaan didaftarkan dalam kepesertaan jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
13. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kelembagaan gender dan anak belum berjalan secara optimal, meliputi pokja PUG, *focal point* perangkat daerah dan forum anak
2. Masih rendahnya pelaksanaan perencanaan dan penanganan responsif gender di perangkat daerah.
3. Masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

4.1.2.3. Pangan

1. Masih adanya desa rawan pangan dan belum semua Desa tertangani, pertahun 2020 masih terdapat 1 Desa yang rawan pangan.
2. Terdapat beberapa sumber bahan pangan dalam rangka memenuhi ketersediaan energi yang produksinya belum memenuhi kebutuhan pangan, seperti ubi kayu, kedelai, bawang merah, dan gulapasir.
3. Belum optimalnya stabilitas harga dan pasokan pangan, terlihat dari Stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 95% pada tahun 2020.
4. Belum optimalnya pola pangan harapan, dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Hal ini terlihat dari Skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 90,50% pada tahun 2020.

4.1.2.4. Pertanahan

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan aset tanah kas desa. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya:

1. Belum optimalnya pengelolaan pertanahan;
2. Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat.
3. Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

4.1.2.5. Lingkungan Hidup

1. Pencemaran Air

Hasil pengukuran indeks kualitas air di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sebesar 2,0956, hal ini disebabkan karena limbah rumah tangga belum terolah dengan sempurna, kemudian eksploitasi tanah oleh rumah tangga dan industri, khususnya air tanah bagian dalam, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang secara alamiah menjadi penyaring sekaligus penampung untuk air hujan dan pembuangan limbah industri ke perairan (sungai, danau, laut).

2. Pengelolaan Persampahan

Timbulan sampah yang terus meningkat baik dari sisi volume yang tidak dibarengi dengan kemampuan pengelohan persampahan yang disebabkan minimnya sarana dan prasarana persampahan. Pada tahun 2019 Target jumlah timbulan sampah perkotaan (Kecamatan Mamuju dan Simboro), yang tertangani Sebesar 40,37% dengan target yaitu 55% dengan capaian kinerja 73% sedangkan Realisasi jumlah timbulan sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2018 sebesar 33,64% dengan terget 50% dan capaian kinerja di tahun 2018 sebesar 67,28%. Jika kita melihat dari segi realisasi dari jumlah timbulan sampah yang tertangani adanya kenaikan 6,28 % dari tahun 2018 ke 2019, adanya kenaikan realisasi jumlah timbulan sampah dikarena bertambahnya jumlah penduduk di kecamatan mamuju dan simboro.

4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP;
2. Masih adanya penduduk yang belum mengurus akta kelahiran anaknya;

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya akte kelahiran.

4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kurangnya Regulasi dan sarana prasarana di tingkat Kabupaten yang mendukung terhadap upaya peningkatan keberdayaan masyarakat;
2. Banyaknya inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang tidak teridentifikasi ditingkat desa serta sarana dan prasarana pembentukan posyantek masih sangat kurang;
3. Kurangnya kompetensi, kualifikasi dan motivasi pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
4. Kurang Maksimalnya pembinaan ke desa mengenai pentingnya profil desa/kelurahan;
5. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa, termasuk pengelolaan profil desa/kelurahan;

4.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
2. Belum optimalnya Petugas Pembantu Pembina KB Desa dalam pelayanan KB secara mandiri;
3. Belum optimalnya PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.

4.1.2.9. Perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan umum sejak tahun 2016-2020 mengalami peningkatan Penumpang Angkutan Umum. Pada tahun 2019 berjumlah 1.078.296 unit mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 754.848 unit. Dan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di tahun 2019 sebanyak 1.122.187 orang mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 673.691. Persentase layanan angkutan darat di tahun 2019 sebesar 75%, mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 73%. Hal ini disebabkan adanya pembatasan berskala besar akibat dari dampak Pandemic Covid-19 sehingga adanya keterbatasan penumpang angkutan umum.

Jumlah uji KIR angkutan umum di tahun 2019 sebanyak 1.221 unit kendaraan, mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 1.100 unit kendaraan. Persentase

kepemilikan KIR angkutan umum di tahun 2019 sebanyak 40% juga mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 37%. Hal ini disebabkan karena ter kendala berupa fasilitas Uji Kir yang belum memenuhi Standar. Setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

4.1.2.10. Komunikasi dan Informasi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Layanan infrastruktur komunikasi di beberapa wilayah kecamatan belum memadai
2. Perlu optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat
3. Masih rendahnya pemberian informasi kebijakan kepada masyarakat,

4.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Belum optimalnya pertumbuhan koperasi dilihat dari persentase pertumbuhan koperasi yaitu 5,83% pada tahun 2020 dan persentase koperasi aktif pada tahun 2020 yaitu 83,46%
2. Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat nomor induk koperasi yang masih sangat sedikit dilihat dari persentasenya yaitu 2,3 % pada tahun 2020 kemudian koperasi yang telah mengikuti pelatihan belum secara keseluruhan yaitu diangka 70,7%
3. Usaha skala Mikro yang mengalami pertumbuhan menjadi wirausaha baru di tahun 2020 yang masih sedikit yaitu 24,39% kemudian jumlah usaha mikro yang bermitra sampai dengan tahun 2020 juga belum maksimal, dilihat dari persentasenya yaitu 6,94%
4. Belum optimalnya pertumbuhan UMKM dilihat dari persentase pertumbuhannya yaitu 12,54% ditahun 2020.

4.1.2.12. Penanaman Modal

1. Perlunya peningkatan kualitas kajian penanaman modal di Kabupaten Mamuju
2. Belum optimalnya realisasi investasi berskala nasional (PMA dan PMDN), terlihat dari nilai realisasi investasi PMDN Rp. 43.714.875.478 pada tahun 2020 dan nilai realisasi investasi PMA Rp. 1.835.351.221
3. Kurangnya data pendukung potensi investasi untuk dituangkan dalam promosi penanaman modal.
4. Perlunya penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan,

dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan.

5. Dalam menyelenggarakan iklim penanaman modal yang kondusif dapat didukung dengan adanya penetapan regulasi terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Mamuju serta beberapa dokumen wajib terkait Penanaman Modal belum terpenuhi.
6. Kurangnya Sosialisasi ke pelaku usaha terkait Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara online, serta penyampaian LKPM online.
7. Database yang belum akurat.
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti :
 - a. Sistem Antrian Elektronik
 - b. Partisi/Sekat ruangan untuk : Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak dan Kantin
 - c. Foto Copy
 - d. Lobby/Ramp untuk Penyandang disabilitas
 - e. Kursi Roda
 - f. Petugas Parkir
 - g. Toilet Khusus Difabel, Ibu Hamil dan Lansia
 - h. Satpam
 - i. Rehabilitasi Kantor, Pagar, dan Halaman Kantor
9. Belum terwujudnya Mal Pelayanan Publik.
10. Diperlukan peningkatan dalam pengendalian penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku usaha
11. Penyusunan regulasi penyelenggaraan penanaman modal sekaligus percepatan pelaksanaan berusaha
12. Pengimplementasian penyelenggaraan perizinan *Online Single Submission* (OSS) berbasis resiko

4.1.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Masih kurangnya prestasi pemuda karena pembinaan kelembagaan pemuda yang belum optimal.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pemuda tentang kewirausahaan.
3. Masih kurangnya prestasi olahraga karena pembinaan terhadap atlet dan pelatih belum optimal.

4.1.2.14. Statistik

Lemahnya ketersediaan data sektoral guna menunjang perencanaan pembangunan pada masing-masing perangkat daerah.

4.1.2.15. Persandian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan persandian yaitu Kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan.

4.1.2.16. Kebudayaan

1. Belum adanya Dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah sehingga kabupaten mamuju belum mendapat bantuan dari pusat untuk kegiatan penyelenggaraan Festival seni dan budaya;
2. Belum adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan masyarakat belum cukup kuat dalam usaha untuk memajukan kebudayaan daerah. Banyak kegiatan pelestarian kebudayaan belum memiliki landasan hukum yang kuat yang berkaitan dengan tata kelola kebudayaan.

4.1.2.17. Perpustakaan

1. Perlunya peningkatan Sosialisasi tentang Perpustakaan;
2. Belum optimalnya perpustakaan yang memenuhi standar;
3. Belum adanya regulasi aturan dari Kepala Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan;
4. Sarana dan prasarana Layanan Perpustakaan yang belum memadai;
5. Belum tersedianya data hasil analisis kebutuhan buku;
6. Belum optimalnya Layanan perpustakaan keliling;
7. Jumlah Koleksi Baca masih terbatas.

4.1.2.18. Kearsipan

1. Tidak tersedianya Sistem Jaringan Informasi Arsip;
2. Kurangnya Tenaga Kearsipan yang Bersertifikat;
3. Kurangnya SDM dalam penatausahaan arsip untuk seluruh Perangkat Daerah.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

1. Masih kurangnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di

perairan umum, terlihat dari produksi perikanan sebanyak 67.798 Ton pada tahun 2020.

2. Belum optimalnya produksi hasil olahan ikan, pada tahun 2020 hanya mencapai 141,4 Ton.
3. Masih kurangnya tingkat konsumsi ikan, terlihat dari tingkat konsumsi ikan penduduk hanya 40 kg/kapita tahun 2020.

4.1.3.2. Pariwisata

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat rendah;
2. Pengembangan infrastruktur, daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata (akses, amenities dan atraksi wisata) belum tertata dengan baik dan belum terintegrasi dengan lintas sektor;
3. Rendahnya Investasi di Sektor Pariwisata;
4. Regulasi Kepariwisataan (Ripparkab dan Ripow) belum tersedia dan masih dalam proses penetapan;
5. Kepemilikan lahan pengembangan destinasi masih sangat kurang serta dokumen (sertifikasi) kepemilikan lahan belum tertata dengan baik;
6. Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi serta belum adanya event tetap daerah;
7. Belum adanya destinasi unggulan daerah serta dukungan pengembangan sentra produk ekonomi kreatif lokal disetiap kawasan destinasi.
8. Masih kurangnya program dukungan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai Amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

4.1.3.3. Pertanian

1. Cenderung tidak stabilnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Kondisi 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan pada Tahun 2018 berada di angka 37,19 persen, yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berada pada 35,94 persen.
2. Menurunnya Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB.
3. Pada umumnya produksi tanaman pangan di Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi.
4. Belum optimalnya pendataan dan penerbitan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)
5. Belum adanya regulasi tentang RAD-KSB di Kabupaten Mamuju dan pelaksanaan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang merupakan Instruksi

Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit yang berkelanjutan Tahun 2019-2024

6. Secara umum akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:
 - a. Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan nilai tambah petani.
 - b. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir.
 - c. Menurunnya luas lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan dan revisi permen PU terkait daerah irigasi kewenangan kabupaten
 - d. Ketersediaan data pertanian belum memadai.
 - e. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian.
 - f. Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan.

4.1.3.4. Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Kabupaten Mamuju, yaitu: cenderung menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Secara umum akar permasalahan di bidang perdagangan, antara lain:

1. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.
2. Produk dan Promosi produk industri lokal (asal Kabupaten Mamuju) masih dirasa kurang.
3. Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern.
4. Sertifikasi produk UMKM masih kurang.
5. Distribusi produk UMKM ke pasar modern belum terakomodir.
6. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai.
7. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.
8. Masih kurangnya cakupan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan terutama yang berkaitan dengan kelayakan produk perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 71.45 %.

4.1.3.5. Perindustrian

1. Belum optimalnya pertumbuhan industri terlihat dari persentase pertumbuhan industri 13,17% pada tahun 2020, persentase peningkatan omset penjualan produk IKM 12,53%, dan Persentase klaster industri yang berkembang 0 %.
2. Kualitas industri belum memenuhi standar, terlihat dari persentase industri yang

telah memenuhi standar kelayakan produksi baru mencapai 12 % pada tahun 2020, dan Persentase industri yang telah menerapkan teknologi baru mencapai 15,41%.

3. Banyaknya IKM yang belum memiliki Izin Usaha Industri Kecil (P-IRT dan Halal), terlihat dari Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal 3,7 % pada tahun 2020.

4.1.3.6. Transmigrasi

1. Belum adanya penempatan Transmigran swakarsa;
2. Belum Optimalnya fasilitasi hubungan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi;
3. Perlunya pengembangan permukiman transmigrasi sesuai dengan standar minat kebutuhan masyarakat.

4.1.4. Unsur Pendukung

4.1.4.1. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan daerah, hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan target penetapan perda, penyusunan berbagai peraturan bupati dan peningkatan kapasitas SDM bidang hukum
2. Belum semua perangkat daerah menyusun SOP, SPP dan SKM dengan baik
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi terhadap pembangunan daerah
4. Rendahnya ketersediaan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa
5. Masih rendahnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai CC pada tahun 2020

4.1.4.2. Sekretariat DPRD

1. Belum optimalnya standar operasional prosedur dilaksanakan;
2. Kebutuhan operasional AKD lebih besar dibanding ketersediaan dukungan operasional AKD;
3. Program DPRD untuk melaksanakan fungsinya dilakukan dengan dukungan operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional yang rasional dan ideal.

4.1.5. Unsur Penunjang

4.1.5.1. Perencanaan

1. Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
2. Program Kegiatan OPD belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap capaian indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD.

4.1.5.2. Keuangan

1. Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
2. Kurangnya instrumen penganggaran/Peraturan/Juklak/Juknis/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
3. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
4. Masih kurang jelasnya alur penyusunan anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
5. Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;
6. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual;
7. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
8. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
9. Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai;
10. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
11. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kabupaten Mamuju belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan;
12. Prosedur penilaian BMD belum memadai;
13. Realisasi pendapatan asli daerah belum optimal, disebabkan karena regulasi yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya perda yang belum ditetapkan baik berkaitan dengan pajak daerah maupun retribusi daerah.

4.1.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih adanya kasus indisipliner pegawai dan belum optimalnya penegakan disiplin aparatur;
2. Belum Optimal tenaga fungsional daerah.

4.1.5.4. Penelitian dan Pengembangan

1. Terkait presentase implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan belum menjadi acuan utama dalam penerapan perencanaan pembangunan daerah;
2. Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah masih sangat terbatas; serta
3. Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah masih sangat lemah.

4.1.6. Unsur Pengawasan

4.1.6.1. Inspektorat

1. Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (perangkat daerah).
2. Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa sehingga tingkat kelulusan dalam diklat penjenjangan belum optimal.
3. Kurangnya kepedulian perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

4.1.7. Unsur Kewilayahan

4.1.7.1. Kecamatan

1. Belum meratanya Infrastruktur antar wilayah Kecamatan
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan.
3. Belum optimalnya implementasi pelimpahan kewenangan kepada Camat

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

4.1.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
2. Masih Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan;
3. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;

4. Terbatasnya jumlah pembinaan politik daerah guna meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu;
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih;
6. Penyelesaian Konflik SARA belum dapat ditangani secara maksimal;
7. Masih tingginya angka penyalahgunaan NAPZA;
8. Belum optimalnya upaya deteksi dini dalam penanganan konflik sosial.

4.2 Perumusan Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Gambar IV - 1

Lingkungan Strategis yang Perlu Diperhatikan dalam Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mamuju



Perincian kondisi isu aktual dan tantangan global, isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Sulawesi Barat dan isu strategis RPJPD Kabupaten Mamuju dapat diuraikan berikut ini.

4.2.1. Isu Aktual dan Tantangan Global (Internasional)

1. Tantangan yang termuat dalam Kesepakatan Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

- a. **Tidak Ada Kemiskinan:** Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
- b. **Menghapuskan Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- c. **Kesehatan yang Baik:** Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
- d. **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- e. **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
- f. **Air Bersih dan Sanitasi:** Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- g. **Energi Terbarukan:** Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- h. **Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:** Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- i. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- j. **Berkurangnya Ketidaksetaraan:** Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- k. **Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:** Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- l. **Pemakaian yang Bertanggungjawab:** Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- m. **Aksi Iklim:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.
- n. **Kehidupan di Bawah Air:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.

- o. **Kehidupan di Darat:** Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.
- p. **Perdamaian dan Keadilan:** Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
- q. **Kemitraan:** Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

2. Isu Penting Akibat Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 memberikan dampak tidak hanya pada bidang kesehatan tetapi juga bidang-bidang lain, termasuk ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Wabah covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya menyebabkan ketidakpastian dan perluantisipasi baik dari sisi pencegahan maupun penanganan dampak Pandemi Covid-19 ini.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi dan sosial budaya yang sangat dirasakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan rumah sakit
- b. Menurunnya kunjungan wisatawan dan terganggunya aktivitas industri pariwisata (perhotelan, restoran, kerajinan, dll), dan aktivitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE).
- c. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri.
- d. Menurunnya arus perdagangan dan permintaan ekspor.
- e. Terhambatnya pasokan bahan pangan pokok.
- f. Meningkatnya inflasi.
- g. Menurunnya omset usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif.
- h. Menurunnya pendapatan tenaga kerja.
- i. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja.
- j. Meningkatnya penyandang masalah sosial dan penduduk miskin.
- k. Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih.
- l. Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

4.2.2. Isu Strategis Nasional yang Tercantum dalam RPJMN Tahun 2020- 2024

Permasalahan strategis yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
 1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam.
 2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi.
 3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat.
 4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
 2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk.
 3. Pemenuhan Layanan Dasar.
 4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
 5. Pengentasan Kemiskinan.
 6. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
 1. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
 2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
 3. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
 4. Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan
 5. Belum Optimalnya Peran Keluarga
 6. Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
 2. Infrastruktur Ekonomi
 3. Infrastruktur Perkotaan
 4. Energi dan Ketenagalistrikan
 5. Transformasi Digital
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 3. Pembangunan Rendah Karbon
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
1. Konsolidasi Demokrasi
 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 3. Penegakan Hukum Nasional
 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

4.2.3. Isu Strategis Skala Provinsi yang Termuat dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

Isu Strategis daerah Provinsi Sulawesi Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 meliputi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Sulbar “*go clean and green*”
3. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis;
4. Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6. Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
7. Indeks Gini Ratio;
8. Disparitas Wilayah;
9. Penanggulangan Kemiskinan;
10. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
11. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
12. Ketahanan Pangan;
13. Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
14. Pengembangan Industri;
15. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
16. Kualitas demokrasi;
17. Keamanan dan ketertiban daerah;
18. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19. Ketahanan Energi. (energi baru terbarukan);

20. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
21. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;
22. Keadilan dan kesetaraan Gender.

4.2.4. Isu Strategis Skala Kabupaten yang termuat dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025

Isu Strategis yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025 meliputi:

1. Masih rendahnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan
2. Masih rendahnya akses penduduk terhadap layanan kesehatan
3. Masih besarnya jumlah penduduk miskin
4. Masih tingginya angka pengangguran
5. Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia
6. Perdagangan bebas dan regionalisasi ekonomi
7. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
8. Pembangunan regional Pulau Sulawesi
9. Pemekaran Kabupaten Mamuju
10. Kelestarian lingkungan hidup
11. Perubahan iklim dan pemanasan global
12. Keberlanjutan desentralisasi dan otonomi daerah
13. Mamuju sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat
14. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

4.2.5. Isu Strategis Prioritas yang Dihasilkan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis capaian target kinerja dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Mamuju, dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026 dirumuskan isu strategis TPB berdasarkan program-kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), indikator yang terdapat datanya tetapi belum menjadi indikator dalam RPJMD (TT) dan indikator yang belum memiliki data (NA). Penentuan isu strategis KLHS Kabupaten Mamuju didahului dengan penentuan isu panjang pembangunan berkelanjutan, kemudian dilakukan penentuan isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas.

Berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, isu strategis prioritas Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum digalakkannya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi
2. Belum dilaksanakannya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja
3. Belum dipertahankannya pertumbuhan ekonomi per kapita
4. Belum kuatnya kapasitas lembaga keuangan domestik
5. Belum meningkatnya produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi
6. Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
7. Belum berkembangnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh
8. Belum kuatnya riset ilmiah dalam meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri
9. Belum terpromosikannya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan
10. Belum meningkatnya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua
11. Belum tercapai dan dipertahankannya pertumbuhan pendapatan penduduk
12. Belum dioperasionalisasinya bank teknologi dan sains khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
13. Belum kuatnya mobilisasi sumber daya domestik bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
14. Belum berkembangnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
15. Belum berkurangnya bentuk kekerasan dan angka kematian
16. Belum terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
17. Belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua
18. Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
19. Belum berkurangnya dampak lingkungan perkotaan khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
20. Belum berkurangnya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak yang

disebabkan oleh bencana

21. Belum kuatnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
22. Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua
23. Belum terjaminnya kepemilikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar.
24. Masih adanya kemiskinan di semua dimensi
25. Masih rentannya ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
26. Belum terjaminnya akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
27. Masih adanya kekurangan gizi untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
28. Belum berkurangnya angka kematian dini akibat penyakit tidak menular
29. Belum kuatnya pelaksanaan the *Framework Convention on Tobacco Control WHO*
30. Belum tercapainya cakupan kesehatan universal
31. Belum terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi
32. Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita
33. Masih rendahnya dukungan penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular untuk menyediakan akses obat bagi semua.
34. Masih tingginya rasio angka kematian ibu
35. Belum terjaminnya akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini
36. Belum terjaminnya penyelesaian pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas
37. Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
38. Belum penuh dan efektif partisipasi yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan
39. Belum terjaminnya akses *universal* terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.

Tabel IV - 1

Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

ISU Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Isu Strategis RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia. • Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas. • Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan. • Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja. • Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya pendapatan tenaga kerja • Meningkatnya pemutusan hubungan kerja • Meningkatnya penyandang masalah sosial dan penduduk miskin • Peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan rumah sakit 	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan • Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk • Pemenuhan Layanan Dasar • Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda • Pengentasan Kemiskinan • Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing <p>Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa • Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia • Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai- Nilai Ajaran Agama • Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) • Penanggulangan Kemiskinan • Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat • Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan • Keadilan dan kesetaraan Gender • Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) • Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan • Masih rendahnya akses penduduk terhadap layanan kesehatan • Masih besarnya jumlah penduduk miskin • Masih tingginya angka pengangguran • Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua • Belum terjaminnya kepemilikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar. • Masih adanya kemiskinan di semua dimensi • Masih rentannya masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana • Belum terjaminnya akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Masih adanya kekurangan gizi untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, remaja 	<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia</p>

ISU Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Isu Strategis RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
berkelanjutan		Toleransi dan Kerukunan <ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Peran Keluarga • Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 			perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. <ul style="list-style-type: none"> • Belum berkurangnya angka kematian dini akibat penyakit tidak menular • Belum kuatnya pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO • Belum tercapainya cakupan kesehatan universal • Belum terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi • Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita • Masih rendahnya dukungan penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular untuk menyediakan akses obat bagi semua. • Masih tingginya rasio angka kematian ibu • Belum terjaminnya akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini • Belum terjaminnya penyelesaian 	

ISU Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Isu Strategis RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
					<p>pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu memiliki kemampuan literasi dan numerasi. • Belum penuh dan efektif partisipasi yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan • Belum terjaminnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi • Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kunjungan wisatawan dan berhentinya aktivitas industri pariwisata (perhotelan, restoran, kerajinan, dll), dan aktivitas <i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i> (MICE) • Berkurangnya pasokan impor Bahan baku industri 	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</p> <p>Isu strategis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Sumber Daya Alam • Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi • Transformasi Struktural Berjalan Lambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas • Ketahanan Pangan • Indeks Gini Ratio • Pengembangan Industri • Pengangguran dan ketenagakerjaan • Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka 	Perdagangan bebas dan regionalisasi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakannya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja • Belum dipertahankannya pertumbuhan ekonomi per kapita • Belum kuatnya 	Dampak covid-19 dan Bencana alam gempa bumi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

ISU Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Isu Strategis RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian Yang Bertanggung jawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya arus perdagangan dan permintaan ekspor • Meningkatnya inflasi • Menurunnya omset usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif • Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital 	<p>meningkatkan perekonomian daerah</p>		<p>kapasitas lembaga keuangan domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum meningkatnya produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi • Belum digalakkanya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi • Belum tercapai dan dipertahankannya pertumbuhan pendapatan penduduk • Belum kuatnya mobilisasi sumber daya domestik bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 	

ISU Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Isu Strategis RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<ul style="list-style-type: none"> Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh. Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang. Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara- negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih. 	<p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar <i>Infrastruktur Pelayanan Dasar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Akses Perumahan Layak, Aman dan Terjangkau Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi <p><i>Infrastruktur Ekonomi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Konektivitas Jalan Konektivitas Kereta Api Konektivitas Laut Konektivitas Udara Konektivitas Darat <p><i>Infrastruktur Perkotaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Transportasi Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis Disparitas Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ketahanan Energi. (energi baru terbarukan) Pengembangan Kawasan Perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pembangunan regional Pulau Sulawesi Pemekaran Kabupaten Mamuju 	<ul style="list-style-type: none"> Belum berkembangnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh Belum kuatnya riset ilmiah dalam meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri Belum terpromosikannya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan Belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Belum meningkatnya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua 	<p>Pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar berwawasan lingkungan</p>

ISU Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Isu Strategis RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
		<ul style="list-style-type: none"> • Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan • Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan • Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan • Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan <p><i>Energi dan Ketenagalistrikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan • Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan • Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan • Transformasi Digital • Penuntasan Infrastruktur TIK • Pemanfaatan Infrastruktur TIK • Fasilitas Pendukung Transformasi Digital <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi</p>				

ISU Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Isu Strategis RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
		<p>Kesenjangan Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya • Kehidupan di Bawah Air : Mengambil tindakansegera Untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya • Kehidupan di Darat : Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati. 		<p>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim • Pembangunan Rendah Karbon 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Sulbar “go clean and green” 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelestarian lingkungan hidup • Perubahan iklim dan pemanasan global 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum berkurangnya dampak lingkungan perkotaan khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. • Belum berkurangnya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak yang disebabkan oleh bencana • Belum kuatnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 	<p>Pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar berwawasan lingkungan</p>

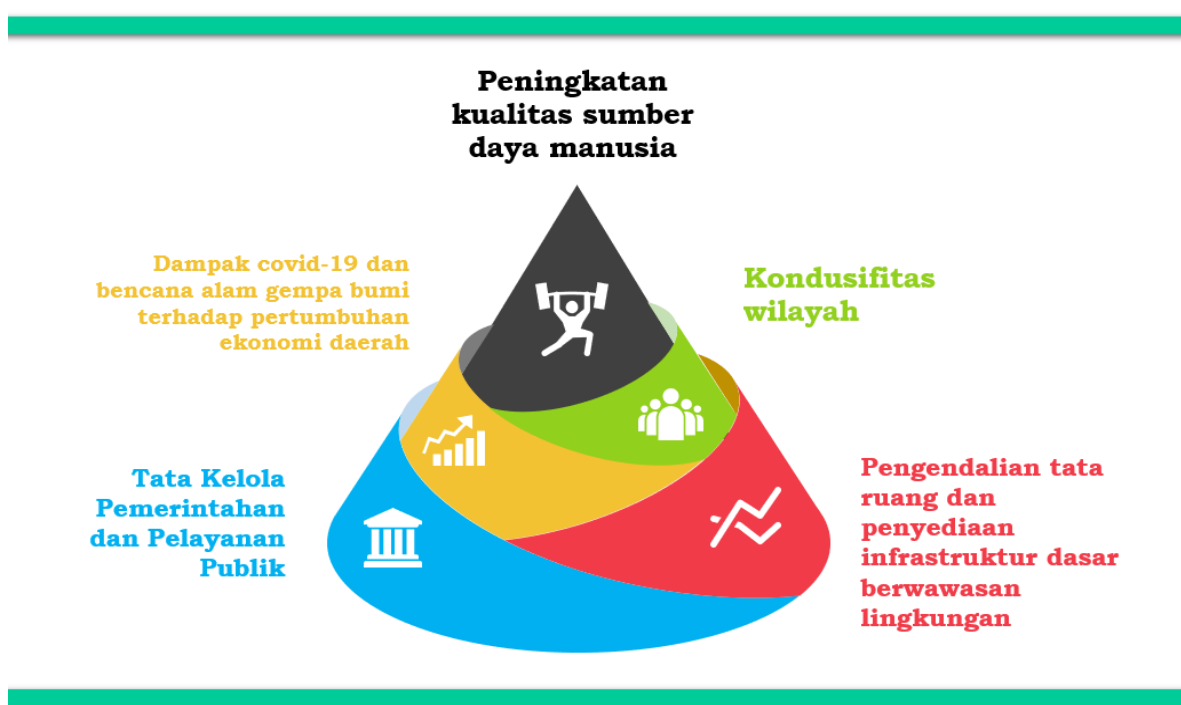
ISU Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Isu Strategis RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<ul style="list-style-type: none"> • Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua strata. • Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Demokrasi • Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri • Penegakan Hukum Nasional • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola • Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien • Kualitas demokrasi • Keamanan dan ketertiban daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • keberlanjutan desentralisasi dan otonomi daerah • Mamuju sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat • Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum berkurangnya bentuk kekerasan dan angka kematian • Belum dioperasionalisikannya bank teknologi dan sains khususnya teknologi informasi dan komunikasi. • Belum berkembangnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. • Belum terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Kondusifitas wilayah

4.2.6. Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

Berdasarkan isu dan tantangan global (internasional), isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Sulawesi Barat, dan isu strategis RPJPD Kabupaten Mamuju, maka ditetapkan isu strategis RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 sebagaimana tergambar pada skema berikut ini.

Gambar IV - 2

Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026



1. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah

strategis untuk membangun aparatur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dampak covid 19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemberlakuan *Work From Home* (WFH) bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Selain itu bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju baru-baru ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana beberapa kantor-kantor Pemerintahan dan Pelayanan Publik seperti Rumah Sakit mengalami kelumpuhan akibat bencana tersebut. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain itu Ketersediaan data yang aktual dan akurat sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Dengan menggunakan sample pendataan yang besar dan standard error sekecil mungkin, tentu data yang dihasilkan akan semakin akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat ini pada level tertentu sangat sulit diperoleh belum lagi ditambah dengan kesulitan mendapatkan data yang terbaru (*up to-date*). Tanpa data yang akurat dan *up to-date*, hasil evaluasi dan perencanaan akan menghasilkan data ataupun informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Mamuju perlu menerapkan implementasi single data yang didukung teknologi informasi terintegrasi.

Delapan area perubahan reformasi birokrasi, meliputi mental aparatur (terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel); Organisasi (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran); Tata laksana (sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*); Peraturan perundang-

undangan (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif); Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera); Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN); Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi); Pelayanan publik (pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat)

2. Pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar berwawasan lingkungan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Dalam setiap aktivitas pembangunan akan selalu ada *trade-off*. Di satu sisi pembangunan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain pembangunan bisa menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini tentunya menjadi catatan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pencemaran air dan tanah, bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca (gas karbon dioksida, gas metan, dll), perubahan fungsi lahan, pengalihan DAS, dan sebagainya. Kerusakan tersebut tidak selalu menimbulkan dampak yang segera, namun akumulasinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, seperti terjadinya bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*). Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kualitas lingkungan yang ada akan mengalami degradasi dan berdampak buruk bagi generasi selanjutnya.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat

meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Mamuju akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan infrastruktur menjadi permasalahan di Kabupaten Mamuju.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Ketaatan pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mamuju adalah lingkungan pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten pada tahun 5 (lima) tahun kedepan. Kabupaten Mamuju memiliki persentase rumah tangga kumuh yang cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mencapai target Nasional 0% kawasan kumuh.

Disamping itu resiko bencana daerah Kabupaten Mamuju penting menjadi perhatian. Sebagai wilayah yang dijuluki “*ring of fire*” atau cincin api yang terletak di daerah interaksi lempeng-lempeng bumi sehingga sangat rentan terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Dalam menghadapi bencana perlu dilakukan manajemen bencana yang merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana. Kegiatan kesiapsiagaan (*Preparedness*) meliputi mengadakan pelatihan, gladi lapangan dan sosialisasi, mengaktifkan ronda kampung atau siskamling, cek ulang kesiapan sistem peringatan dini, mengevakuasi penduduk (balita, ibu-ibu hamil, manula), menyiapkan masyarakat menghadapi bencana.

Kegiatan Tanggap Darurat (*Response*) dan Pertolongan (*Relief*) adalah menyelamatkan korban dengan evakuasi, memberikan bantuan (fisik, medis, mental, dan sosial), *need assessment dan damage assessment*, mengumpulkan dan memobilisasi bantuan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Mamuju juga harus memperhatikan bangunan dan atau tempat tinggal yang tahan gempa. Hal ini mesti diupayakan penanganannya. Sementara itu, terkait dengan fenomena perubahan iklim, infrastruktur juga berperan dalam upaya

mitigasi dan adaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (*climate change*) terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, longsor, dan lain-lain.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Mamuju sendiri sampai pada tahun 2020 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

Kecenderungan rendahnya kebutuhan dasar ini dapat dilihat dari bidang pendidikan yaitu masih rendahnya akses dan kualitas masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan bernegara “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam akses dan mutu pendidikan. Rendahnya akses dan mutu pendidikan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Pandemi Covid 19 lagi-lagi memberikan dampak besar kepada pelayanan Pendidikan dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta siswa untuk belajar dari rumah secara online, sehingga proses aktifitas belajar tidak berjalan efektif. Ditambah lagi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Mamuju, membuat beberapa bangunan-bangunan sekolah mengalami kerusakan yang cukup berat.

Tidak hanya pada urusan pendidikan, pada urusan Kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih, pencegahan stunting masih menjadi fokus pemerintah pusat hingga daerah dimana prevalensi stunting Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 sebesar

41,06%. Di samping itu angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Mamuju khususnya daerah perdesaan. Selain infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Mamuju.

Lain halnya dengan Isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender yang mengalami progress positif. momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat Kabupaten Mamuju menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi dengan terpilihnya Bupati Perempuan pertama yang akan memimpin Kabupaten Mamuju 5 (lima) Tahun kedepan. Hal ini memberikan sinyal positif kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Mamuju. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat sustain dan semakin berkualitas

Selain itu, PMKS juga menjadi isu tersendiri yang perlu untuk menjadi perhatian. Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Mamuju masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial perlu ditingkatkan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan pressure tersendiri terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Mamuju. Sehingga indeks pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya terkait layanan sosial perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

4. Kondusifitas wilayah

Kondusifitas wilayah memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan suatu daerah. Jika kondisi wilayah dan masyarakatnya kondusif, maka semua kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan lancar. Kondusifitas daerah harus terus ditingkatkan dengan menjaga kekompakan dalam masyarakat dan kerjasama

antara pemerintah daerah, TNI, POLRI dan masyarakat mulai dari tingkat terendah hingga tingkat kabupaten, termasuk menciptakan kesadaran dan solidaritas dalam kehidupan beragama. Isu kondusifitas wilayah terutama terkait dengan antisipasi potensi konflik sosial, isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), pelanggaran HAM serta pelanggaran ketenteraman dan ketertiban,

5. Dampak Covid-19 dan bencana alam gempa bumi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Februari tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian daerah, kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Mamuju. Kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah secara nyata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju, misalnya terganggunya aktivitas perdagangan baik dipasar maupun pertokoan serta arus transportasi barang dan jasa merosotnya tingkat hunian penginapan dan hotel serta sepiunya kedai serta rumah makan, macetnya sektor UKM/IKM seta menurunnya PAD. Tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju sebesar -2,08%. Ditambah lagi kejadian bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Mamuju dengan kekuatan magnitudo 6,2 juga melumpuhkan perekonomian diberbagai sektor perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi akan sangat terkait dengan pengembangan potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Mamuju, seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro kecil dan menengah. Isu pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi permasalahan utama terkait: (1) daya saing investasi daerah; (2) kunjungan wisata dan ekonomi kreatif; (3) perdagangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok; (4) omset usaha mikro, kecil dan menengah; (5) revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital; dan (6) keberlanjutan produksi pertanian sebagai sektor unggulan.

Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 7,4 persen, meningkat 0,34 persen poin dibanding tahun 2019. Peningkatan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya meningkatnya harga-harga bahan pokok, serta adanya awal pandemi Covid-19 yang terjadi pada Maret 2020. Isu kemiskinan perlu menjadi prioritas pembangunan yang penanganannya bersifat lintas sektor yang mengarah pada pengurangan beban penduduk miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,

pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, peningkatan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta verifikasi dan validasi data fakir miskin.

Dari sisi ketenagakerjaan, Pandemi Covid-19 juga berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka selain itu isu revolusi industri 4.0 juga akan berdampak terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2020 menjadi 2,89% dari 2,46% pada tahun 2019. Dampak adanya pandemi Covid-19 tidak hanya pada peningkatan TPT tetapi juga berdampak pada mereka yang masih bekerja hingga saat ini. Isu pengangguran sangat terkait dengan peluang kerja, kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Pengurangan pengangguran perlu menjadi prioritas pembangunan dengan mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan wilayah segitiga emas serta penopang calon ibukota Negara, Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu memanfaatkan potensi sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia

Dari identifikasi potensi dan kendala tersebut, Kabupaten Mamuju cukup mempunyai peluang dalam meningkatkan investasi dengan pertimbangan bahwa investasi mempunyai nilai strategis dalam mengungkit perekonomian daerah, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, Kabupaten Mamuju perlu distimulasi melalui penguatan bargaining position UMKM, sumberdaya wirausahawan dan pengembangan Bumdes sebagai pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan yang memberi kontribusi terhadap kesenjangan pendapatan (*gini ratio*) antar wilayah satu dengan wilayah lainnya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2025 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka Panjang Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri pada tahun 2025.

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat diukur dengan indikator pendapatan (PDRB) per kapita. Ditargetkan hingga tahun 2025, pendapatan (PDRB) per kapita Kabupaten Mamuju meningkat dikisaran 10 persen per tahun, sehingga pada tahun 2025 PDRB per kapita telah mencapai Rp 80 juta.
2. Membaiknya kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ditargetkan hingga tahun 2025, IPM Kabupaten Mamuju berada di atas 75 poin dan tetap menempati posisi teratas di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menurunnya angka kemiskinan diukur dengan indikator jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Ditargetkan pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju ditargetkan sekitar 13.000 orang, sedangkan persentase penduduk diharapkan berada pada level 4,0 persen.
4. Meningkatnya akses penduduk terhadap pendidikan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dan angka melek huruf. Ditargetkan pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah berada di atas sembilan tahun, angka partisipasi sekolah untuk SD/MI sebesar 98 persen, untuk SMP/MTs sebesar 95 persen, dan SMA/SMK/MA sebesar 85 persen. Sedangkan angka melek huruf ditargetkan sebesar 96 persen pada tahun 2025.
5. Meningkatnya aktivitas ekonomi secara berkelanjutan diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ditargetkan pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi akan berada dikisaran 9±1 persen per tahun. Sedangkan PDRB-ADHB ditargetkan mencapai Rp 34 Trilyun.
6. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT). Ditargetkan pada tahun 2025, TPT di Kabupaten Mamuju berada di angka satu persen.

7. Stabilitasnya perekonomian daerah diukur dengan indikator tingkat inflasi. Ditargetkan pada tahun 2025, tingkat inflasi di Kabupaten Mamuju berada dikisaran 4 ± 1 persen per tahun.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan peduli diukur dengan indikator jumlah kasus korupsi. Ditargetkan pada tahun 2025, Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang bebas korupsi.
9. Membaiknya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator indeks kepuasan publik. Ditargetkan pada tahun 2025, indeks kepuasan publik di Kabupaten Mamuju berada dikisaran 80 persen.
10. Membaiknya sarana dan prasarana wilayah diukur dengan indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak, dan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik. Ditargetkan pada tahun 2025, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 70 persen, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak mencapai 75 persen, dan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik mencapai 85 persen.
11. Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat diukur dengan indikator indeks Gini atau Rasio Gini. Ditargetkan pada tahun 2025, Indeks Gini berada di bawah 0,40.
12. Membaiknya kualitas lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. Ditargetkan pada tahun 2025, IKLH mencapai 75 poin dan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan berada di atas 30 persen.
13. Terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat diukur dengan indikator angka kriminalitas dan jumlah konflik yang dipicu oleh isu SARA. Ditargetkan pada tahun 2025, angka kriminalitas berkurang setengah dibandingkan tahun 2014. Sedangkan jumlah konflik yang dipicu oleh isu SARA tetap nihil.

Matriks Matriks Visi, Misi, Sasaran Pokok, Indikator Dan Target Kinerja, dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Mamuju secara rinci disajikan pada table berikut:

Tabel V - 1

**MATRIKS VISI, MISI, SASARAN POKOK, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA,
DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN MAMUJU**

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pendapatan (PDRB) per kapita	Rp 80 Juta	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri pengolahan untuk memperbesar nilai tambah, pengembangan sentra-sentra produksi komoditas unggulan, peningkatan intensitas perdagangan dengan daerah lain, pengintensifan penggunaan teknologi tepat guna, dsb
		Membaiknya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75 Poin	Peningkatan akses penduduk terhadap layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, peningkatan akses penduduk terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat di semua wilayah.
		Menurunnya angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	13.000 Orang	Perbaikan infrastruktur dasar perdesaan, peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan dasar, peningkatan akses penduduk miskin terhadap sumberdaya keuangan, pengembangan program padat karya terutama di wilayah perdesaan, peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar SKPD untuk penanggulangan kemiskinan, pelibatan berbagai <i>stakeholder</i> dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sistem basis data penduduk miskin.
			Persentase penduduk miskin	4 Persen	
		Meningkatnya akses penduduk terhadap pendidikan	Rata-rata lama sekolah	9 Tahun	Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan di semua wilayah, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara merata, peningkatan kualitas proses belajar- mengajar di semua jenjang pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan kepada keluarga yang tidak mampu, pengintensifan gerakan pemberantasan buta huruf, dsb.
			Angka melek huruf	96 Persen	
			Angka partisipasi sekolah 7-12 Tahun	99 Persen	
			Angka partisipasi sekolah 13-15 Tahun	92,5 Persen	
			Angka partisipasi sekolah 16-18 Tahun	80 Persen	
		Meningkatnya akses penduduk terhadap kesehatan	Angka harapan hidup	70 Tahun	Peningkatan perluasan dan pemerataan layanan kesehatan di semua wilayah, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan,
			Angka kematian ibu	4 Kasus	
			Angka kematian bayi	23 Kasus	

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	ARAH KEBIJAKAN
			Jumlah kasus balita gizi buruk	51 Kasus	pelaksanaan gerakan pola hidup sehat, pemberian kemudahan untuk mengakses layanan kesehatan, penyediaan bantuan kesehatan bagi penduduk tidak mampu, dsb.
	Membangun ekonomi yang maju.	Meningkatnya aktivitas ekonomi secara berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	9±1 Persen	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan Koperasi dan UMKM, pengembangan pasar-pasar tradisional, pengembangan sentra-sentra produk/ komoditas unggulan, penyediaan sistem informasi potensi daerah, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, pemberian kemudahan untuk melakukan kegiatan usaha, pengembangan kemitraan usaha antar pelaku ekonomi, dsb
PDRB-ADHB			Rp 34 Trilyun		
Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja		Tingkat pengangguran terbuka	1 Persen		
Stabilnya perekonomian daerah		Tingkat inflasi	4 ±1 Persen		
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan peduli		Jumlah kasus korupsi	0 Kasus	Penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan daerah, pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, pelaksanaan pembangunan daerah yang partisipatif, penataan pola relasi yang efektif antara eksekutif dengan legislatif, peningkatan kapasitas SDM aparatur pada semua level pemerintahan (kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa), dsb.
			Membbaiknya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan publik	80 Persen

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	ARAH KEBIJAKAN
					koordinasi antar unit kerja (SKPD) dalam memberikan pelayanan publik, dsb.
	Mewujudkan wilayah yang nyaman, asri dan berwawasan lingkungan.	Membaiknya sarana dan prasarana wilayah	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	70 Persen	Peningkatan jalan kabupaten terutama yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan wilayah perkotaan, pengembangan sarana dan prasarana transportasi kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa, peningkatan kapasitas air PDAM, pengembangan sumber- sumber air bersih terutama di wilayah perdesaan dan wilayah terpencil, peningkatan jangkauan jaringan listrik PLN, pengembangan pembangkit listrik non-PLN.
Proporsi RT yang memiliki akses terhadap air bersih			75 Persen		
Proporsi RT yang memiliki akses terhadap air listrik			85 Persen		
		Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini	0,40 Poin	Pengembangan daerah tertinggal dan daerah transmigrasi, peningkatan jaringan transportasi antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, pengembangan industri rumah tangga dan industri kecil di wilayah perdesaan, pengembangan keterkaitan antara hasil pertanian dengan produk industri pengolahan, pemetaan ruang berdasarkan potensi sumberdaya alam dan daya dukung lahan, dsb.
		Membaiknya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	75 poin	Penataan dan pengembangan taman kota, pengendalian konversi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan, dan pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas pertambangan.
			Ruang terbuka hijau	30 persen	
	Menjamin stabilitas daerah.	Terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat	Angka kriminalitas	250 Kasus	Penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, perwujudan kepastian hukum, penciptaan iklim demokrasi yang sehat, pengembangan pendidikan politik dan demokrasi, pengembangan pembinaan keagamaan dan budaya lokal.
			Jumlah demonstrasi	13 Kasus	
			Jumlah kasus yang dipicu oleh isu SARA	0 Kasus	

Memperhatikan Visi tersebut di atas, maka tujuan akhir dari perodesasi RPJPD adalah Tahap Mamuju yang Maju dan Mandiri.

Tantangan tahapan priode ini sangat berat untuk memenuhi target RPJPD 2025 setelah Kabupaten Mamuju terdampak covid 19 dan gempa bumi yang melumpuhkan hampir semua sendi kehidupan. Sangat diperlukan Visi yang kuat, kreatifitas dan inovasi yang tinggi agar harapan untuk mencapai Mamuju yang maju dan Mandiri dapat dicapai. Kenyataan tersebut menjadi latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan focus dan perhatian pada peletakan Kembali sendi-sendi pembangunan yang berorientasi pada hasil (*out come*) dengan memanfaatkan semua kekuatan berupa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, peluang letak geografi dan demografi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tema Visi **“Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri”** dapat di rumuskan bahwa Mamuju Maju dan Mandiri menjadi arah pembangunan Kabupaten Mamuju dalam lima tahun ke depan dengan Visi :

MAMUJU KEREN
(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah,
Energik dan Nyaman)

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Mamuju dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V - 2
Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026

VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)	Kreatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovatif baik dalam Tata kelola pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan
	Edukatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat selalu mengedepankan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merata sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman
	Ramah	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai adat

VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
	Energik	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani, tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
	Nyaman	Kondisi Mamuju yang tenang dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap segala sumber kehidupan dan penghidupan

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Visi Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel V - 3

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2020/2021	Target Kinerja				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih		1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A
			Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan	a.	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
				b.	Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	c.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80	90	90	90	90	90
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	50	60	70	80	90
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	a.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	50	60	70	80	90

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2020/2021	Target Kinerja				
								2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	b.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	77,14	77,41	77,68	77,95	78,22	78,49
				c.	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
3	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	68,15%	68,35%	68,50%	68,70%	68,85%	69,05%
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	a.	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55
				b.	Indeks Kesehatan	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632
				c.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.500	12.000	24.000	32.500	44.000	52.000
				d.	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55
				e.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	50	55	60	65	70	75

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2020/2021	Target Kinerja				
								2022	2023	2024	2025	2026
4	Mewujudkan daerah yang beradab dengan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal	Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara		1	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	N/A	100	100	100	100	100
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	a.	Indeks Kriminilitas	Persen	N/A	100	100	100	100	100
5	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi		1	Indeks Gini	Persen	0,36	0,32	0,28	0,25	0,20	0,19
			Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah	a.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%
			Meningkatnya investasi daerah	b.	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15	15	15	15	15
		Mengentaskan Kemiskinan		2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,4	6	5,5	5	4,5	4
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2,00
			Meningkatnya kemandirian desa	b.	Indeks Desa Membangun	Skala	0,611 (Berkembang)	0,624 (Berkembang)	0,645 (Berkembang)	0,687 (Berkembang)	0,700 (Berkembang)	0,707 (Maju)

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel VI - 1

Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan	Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai
				Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi melalui perbaikan proses dan pelayanan perijinan dengan menerapkan system aplikasi berbasis online
				Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP
				Peningkatan implementasi single data dan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi melalui Kartu Mamuju Keren
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaan pemerintahan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik
2.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru
				Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
				Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, sanitasi dan air bersih serta pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan
				Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan
				Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
				meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tutupan lahan dan udara

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah
				Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana
3.	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	<p>a. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui: pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan;</p> <p>b. peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah;</p> <p>c. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah;</p> <p>d. peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan</p> <p>e. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang SD dan SMP melalui Gerakan Kembali Bersekolah</p> <p>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat</p> <p>Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana</p> <p>Adanya Regulasi atau kebijakan terkait permasalahan ketimpangan gender</p> <p>Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga.</p> <p>Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.</p> <p>Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.</p> <p>Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak</p> <p>Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial</p>

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
4.	Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.	Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
				Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS.
5.	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian
				Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
				Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan penyediaan sarana produksi perikanan
				Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.
				Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah
				Memfokuskan penyelesaian administrasi persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mamuju
				Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru
			Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan pembangunan museum.	
Meningkatnya investasi daerah	Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi			
Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)	
			Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	
		Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan kemandirian melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa	

6.2. Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Tabel VI - 2
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
KEREN I Penguatan birokrasi penopang utama pemulihan ekonomi	KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan	KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan	KEREN IV Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Transisi Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: **“Memantapkan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Mamuju yang berketahanan Sosial”**

Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

- a. Penurunan Kemiskinan
- b. Daya saing ekonomi lokal
- c. Penurunan ketimpangan wilayah

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **“KEREN I : Penguatan birokrasi penopang utama pemulihan ekonomi”**

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Implementasi single data didukung teknologi informasi terintegrasi
- b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi
- d. Peningkatan PAD dengan membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
- e. Peningkatan kapasitas SDM UMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
- f. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata.

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **“KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”**

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Peningkatan produktivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi berbasis potensi daerah
- b. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
- c. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
- d. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel).

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **“KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan”**

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
- b. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
- c. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
- d. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **“KEREN IV Memperkuat Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”**

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- b. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- c. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan.

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: **“Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju”**.

Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

- a. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.
- b. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal
- c. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter
- d. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
- e. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

6.3. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

Program Pembangunan daerah Kabupaten Mamuju merupakan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam lima tahun kedepan dengan penjabaran kedalam program, sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel VI - 3
Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																
Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	210.09 3.524. 365	B	215.34 7.003. 322	B	220.71 2.506. 253	BB	226.20 7.992. 375	A	234.12 6.503. 778	A	1.106. 487.53 0.093	
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Keuangan dan Pengawasan	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	161.21 3.730. 314	Baik	165.24 4.073. 574	Baik	169.37 5.175. 410	Baik	173.60 9.554. 795	Baik	177.94 9.793. 669	Baik	847.39 2.327. 762	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan	Persen	100	100	31.761. 440.70 1	100	32.555. 476.71 9	100	33.369. 363.63 6	100	34.203. 597.72 7	100	35.058. 687.67 1	100	166.94 8.566.4 54	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	31.761. 440.70 1	100	32.555. 476.71 9	100	33.369. 363.63 6	100	34.203. 597.72 7	100	35.058. 687.67 1	100	166.94 8.566.4 54	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	Persen	100	100	31.761. 440.70 1	100	32.555. 476.71 9	100	33.369. 363.63 6	100	34.203. 597.72 7	100	35.058. 687.67 1	100	166.94 8.566.4 54	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Persen	100	100	31.761. 440.70 1	100	32.555. 476.71 9	100	33.369. 363.63 6	100	34.203. 597.72 7	100	35.058. 687.67 1	100	166.94 8.566.4 54	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan	Persen	100	100	31.761. 440.70 1	100	32.555. 476.71 9	100	33.369. 363.63 6	100	34.203. 597.72 7	100	35.058. 687.67 1	100	166.94	BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Keuangan Daerah sesuai ketentuan														8.566.454	DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	85	85	1.189.496.389	85	1.219.233.799	85	1.249.714.644	85	1.280.957.510	85	1.312.981.448	85	6.252.383.790	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7.04	7.04	608.515.210	7.04	623.728.090	7.04	639.321.293	7.04	655.304.325	7.04	671.686.933	7.04	3.198.555.851	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd	Persen	(0.87)	(0.87)	608.515.210	(0.87)	623.728.090	(0.87)	639.321.293	(0.87)	655.304.325	(0.87)	671.686.933	(0.87)	3.198.555.851	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	34.666.090.159	Sangat Tinggi	35.533.883.257	Sangat Tinggi	36.403.380.067	Sangat Tinggi	37.291.833.112	Sangat Tinggi	38.275.794.622	Sangat Tinggi	182.170.981.217	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	633.162.495	100	661.353.263	100	670.367.647	100	676.937.250	100	757.080.363	100	3.398.901.018	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Persen	100	100	259.777.250	100	262.323.067	100	264.893.833	100	267.489.793	100	270.111.193	100	1.324.595.136	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Manusia yang tercapai																
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Persen	100	100	233.36 4.200	100	235.65 1.169	100	237.96 0.551	100	240.29 2.564	100	242.64 7.431	100	1.189.9 15.915	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang tercapai	Persen	100	100	245.07 3.104	100	247.47 4.820	100	249.90 0.074	100	252.34 9.094	100	254.82 2.115	100	1.249.6 19.207	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Rasio	8.15	9	32.000. 000	9.95	32.800. 000	10	33.620. 000	10	34.460. 500	10	35.322. 013	10	168.20 2.513	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	Rasio	N/A	50	50.000. 000	70	51.250. 000	80	52.531. 250	90	53.844. 531	100	55.190. 645	100	262.81 6.426	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara																
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Persen	70	70	37.327.000	80	38.260.175	90	39.216.679	90	40.197.096	100	41.202.024	100	196.202.974	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	11.682.981.659	100	13.102.556.490	100	13.773.273.745	100	14.464.995.391	100	15.178.298.842	100	100	68.202.106.127	SEKRETARIAT DPRD	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	80	83	402.500.000	85	412.562.500	90	422.876.563	95	433.448.477	100	444.284.688	100	2.115.672.228	INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Audit dengan Tujuan tertentu	Persen	100	100	402.500.000	100	412.562.500	100	422.876.563	100	433.448.477	100	444.284.688	100	2.115.672.228	INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Obyek Pengawasan yang diawasi	Persen	100	100	345.000.000	100	353.625.000	100	362.465.625	100	371.527.266	100	380.815.447	100	1.813.433.338	INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Zona Integritas, Persentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa,	Persen	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	420.250.000	100	430.756.250	100	441.525.156	100	2.102.531.406	INSPEKTORAT DAERAH	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKS																
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	35.6	2.0	1.622.500.000	2.1	1.663.062.500	1.9	1.704.639.063	2.3	1.747.255.039	2.0	1.790.936.415	2.0	8.528.393.017	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen	6.2	11.0	2.530.000.000	11.0	2.593.250.000	11.0	2.658.081.250	11.0	2.724.533.281	11.0	2.792.646.613	11.0	13.298.511.144	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	80	90	14.213.703.892	90	14.569.046.491	90	14.933.950.776	90	15.306.604.468	90	17.900.915.487	90	76.924.221.114		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	Persen	100	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	161.533.594	100	200.000.000	100	822.877.344	SEKRETARIAT DAERAH	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	5.025.113.000	100	5.150.740.825	100	5.279.509.346	100	5.411.497.079	100	7.357.267.943	100	28.224.128.193	SEKRETARIAT DAERAH	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	100	100	522.89 4.882	100	535.96 7.254	100	549.36 6.435	100	563.10 0.596	100	765.57 0.397	100	2.936.8 99.564	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	100	100	495.00 0.000	100	507.37 5.000	100	520.05 9.375	100	533.06 0.859	100	724.72 9.500	100	2.780.2 24.734	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	100	100	314.54 3.998	100	322.40 7.598	100	330.46 7.788	100	338.72 9.483	100	347.19 7.720	100	1.653.3 46.587	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	Persen	100	100	158.27 2.950	100	162.22 9.774	100	166.28 5.518	100	170.44 2.656	100	174.70 3.722	100	831.93 4.620	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara	Persen	100	100	814.22 5.998	100	834.58 1.648	100	855.44 6.189	100	876.83 2.344	100	898.75 3.152	100	4.279.8 39.331	SEKRETARIAT DAERAH

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana																
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	Persen	100	100	193.68 6.900	100	198.52 9.073	100	203.49 2.299	100	208.57 9.607	100	213.79 4.097	100	1.018.0 81.976	SEKRETARIA T DAERAH	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	91	100	683.03 8.500	100	700.11 4.463	100	717.61 7.324	100	735.55 7.757	100	753.94 6.701	100	3.590.2 74.745	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIK A DAN PERSANDIA N	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	100	100	683.03 8.500	100	700.11 4.463	100	717.61 7.324	100	735.55 7.757	100	753.94 6.701	100	3.590.2 74.745	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIK A DAN PERSANDIA N	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang	Persen	31	67	2.983.7 97.600	78	3.058.3 92.540	89	3.134.8 52.354	100	3.213.2 23.662	100	3.293.5 54.254	100	15.683. 820.41 0	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIK	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	telemenerapkan layanan SPBE																A DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	N/A	50	500.000.000	75	512.500.000	100	525.312.500	100	538.445.313	100	551.906.445	100	2.628.164.258		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	N/A	31	184.501.115	44	189.113.643	56	193.841.484	67	198.687.521	89	203.654.709	89	969.798.472		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100	100	715.000.000	100	732.875.000	100	751.875.000	100	769.976.797	100	789.226.217	100	3.758.953.014		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Persen	100	100	443.000.000	100	454.075.000	100	465.426.875	100	477.062.547	100	488.989.111	100	2.328.553.533		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	313.056.522	100	320.882.935	100	328.905.008	100	337.127.634	100	345.555.824	100	1.645.527.923		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	34.533.927	100	35.397.275	100	36.282.207	100	37.189.262	100	38.118.994	100	181.521.665		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan																
Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	50	167.35 9.411. 907	60	171.57 3.397. 206	70	176.23 7.732. 134	80	180.64 3.675. 442	90	185.15 9.767. 328	90	880.97 3.984. 017	
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	50	149.55 2.017. 546	60	153.32 0.817. 986	70	157.52 8.838. 434	80	161.46 7.059. 397	90	165.50 3.735. 883	90	787.37 2.469. 246	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	persen	N/A	60	5.014.9 06.655	63	5.140.2 79.321	66	5.268.7 86.304	69	5.400.5 05.962	73	5.535.5 18.611	73	26.359. 996.85 3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	N/A	60	5.014.9 06.655	63	5.140.2 79.321	66	5.268.7 86.304	69	5.400.5 05.962	73	5.535.5 18.611	73	26.359. 996.85 3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	persen	73.1	82.1	7.786.7 07.311	86.6	7.981.3 74.994	91.1	8.180.9 09.369	95.6	8.385.4 32.103	100	8.595.0 67.906	100	40.929. 491.68 3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	persen	N/A	N/A	0	30	1.000.000.000	35	1.090.000.000	40	1.180.000.000	45	1.280.000.000	45	4.550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	60	70	2.629.974.900	75	2.695.724.273	80	2.763.117.379	85	2.832.195.314	90	2.903.000.197	90	13.824.012.063	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	21.49	27.49	1.328.925.100	30.49	1.362.148.228	33.49	1.396.201.933	36.49	1.431.106.982	39.49	1.466.884.656	39.49	6.985.266.899	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan permukiman kondisi baik	persen	30	44	6.643.155.225	50	6.809.234.106	56	6.979.464.958	62	7.153.951.582	68	7.332.800.372	68	34.918.606.243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	24.30	26.10	18.789.537.550	27.10	19.259.275.989	28.10	19.740.757.889	19.10	20.234.276.836	30.10	20.740.133.757	30.10	98.763.982.021	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	persen	10.30	39.90	240.300.000	53.90	246.307.500	68.80	252.465.188	83.70	258.776.817	98.60	265.246.238	98.60	1.263.095.743	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	48.72	54.72	80.000.000.000	57.72	81.000.000.000	60.72	82.960.000.000	63.72	84.971.250.000	66.72	87.025.031.250	66.72	415.956.281.250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	10	20	191.60 4.150	25	196.39 4.254	30	201.30 4.110	35	206.33 6.713	40	211.49 5.131	40	1.007.1 34.358	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	persen	9	9	900.00 0.000	18	922.50 0.000	27	1.320.5 62.500	36	1.353.5 76.563	45	1.387.4 15.977	45	5.884.0 55.040	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	100	100	11.400. 000.00 0	100	11.685. 000.00 0	100	11.977. 125.00 0	100	12.276. 553.12 5	100	12.583. 466.95 3	100	59.922. 145.07 8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	49.84	49.64	930.00 0.000	49.49	953.25 0.000	49.35	977.08 1.250	49.22	1.001.5 08.281	49.10	1.026.5 45.988	246.8	4.888.3 85.519	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Permukiman yang tertata	persen	10.13	14.89	1.550.0 00.000	14.85	1.588.7 50.000	15.79	1.628.4 68.750	16.24	1.669.1 80.469	16.69	1.710.9 09.980	78.46	8.147.3 09.199	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di	persen	78	80	3.500.0 00.000	80	3.587.5 00.000	80	3.677.1 87.500	80	3.769.1 17.188	80	3.863.3 45.117	80	18.397. 149.80 5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
DAN UTILITAS UMUM (PSU)	dukung dengan PSU																PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi	persen	N/A	30	10.000.000	40	10.250.000	45	10.506.250	50	10.768.906	55	11.038.129	55	52.563.285		DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	hektar	N/A	45	22.000.000	50	22.550.000	55	23.113.750	60	23.691.594	65	24.283.884	65	115.639.228		DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	persen	N/A	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	100	131.408.213		DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	hektar	85	86	3.250.000.000	87	3.331.250.000	88	3.414.531.250	89	3.499.894.531	90	3.587.391.895	90	17.083.067.666		DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	N/A	87	75.000.000	88	76.875.000	89	78.796.875	90	80.766.797	91	82.785.967	91	394.224.639	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	N/A	N/A	0	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	124.575.469	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	250.000.000	100	256.250.000	100	262.656.250	100	269.222.656	100	275.953.223	100	1.314.082.129	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	77.14	77.41	13.897.394.361	77.68	14.244.829.220	77.95	14.600.949.950	80,5	14.965.973.701	78.22	15.340.123.043	78,49	73.049.270.275	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100	100	257.567.000	100	264.006.175	100	270.606.329	100	277.371.488	100	284.305.775	100	1.353.856.767	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	persen	N/A	50	205.00 0.000	55	210.12 5.000	60	215.37 8.125	65	220.76 2.578	70	226.28 1.643	70	1.077.5 47.346	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	persen	0.01	0.01	4.860.0 00.000	0.01	4.981.5 00.000	0.01	5.106.0 37.500	0.01	5.233.6 88.438	0.01	5.364.5 30.648	0.01	25.545. 756.58 6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	persen	N/A	100	125.00 0.000	100	128.12 5.000	100	131.32 8.125	100	134.61 1.328	100	137.97 6.611	100	657.04 1.064	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	persen	N/A	82	150.00 0.000	84	153.75 0.000	86	157.59 3.750	88	161.53 3.594	90	165.57 1.934	90	788.44 9.278	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	persen	N/A	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	33.114.387	100	157.689.856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persen	N/A	100	50.000.000	100	51.250.000	100	52.531.250	100	53.844.531	100	55.190.645	100	262.816.426	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	N/A	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	33.114.387	100	157.689.856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	persen	N/A	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	21.537.813	100	22.076.258	100	105.126.571	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	74	73	8.169.827.361	72	8.374.073.045	71	8.583.424.871	70	8.798.010.493	72	9.017.960.755	72	42.943.296.525	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																	KEBERSIHAN
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	3.910.000.000	Tinggi	4.007.750.000	Sedang	4.107.943.750	Sedang	4.210.642.344	Sedang	4.315.908.402	Sedang	20.552.244.496		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	50	55	3.910.000.000	60	4.007.750.000	65	4.107.943.750	70	4.210.642.344	80	4.315.908.402	80	20.552.244.496		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.																	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	68,15	68,35	320.217.652.766	68,5	328.299.499.083	68,7	336.380.891.557	68,85	344.766.812.850	69,05	353.362.394.324	69,05	1.683.027.250.580		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,3	129.081.460.311	0,36	132.384.901.817	0,42	135.568.429.361	0,5	138.934.045.099	0,55	142.383.801.223	0,55	678.352.637.811		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persen	48.30	50.72	105.038.435.535	53.25	107.664.396.423	55.91	110.356.006.334	58.71	113.114.906.492	61.64	115.942.779.155	61.64	552.116.523.939		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	Paket	2500 Paket	3000 Paket	82.500.000	3500 Paket	84.562.500	4000 Paket	86.676.563	4500 Paket	88.843.477	5000 Paket	91.064.563	20.000 Paket	433.647.103		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid	Rasio	1:20 Rasio	1:20 Rasio	16.819.264.088	1:20 Rasio	17.339.745.690	1:20 Rasio	17.670.739.332	1:20 Rasio	18.112.507.816	1:20 Rasio	18.565.320.511	1:20 Rasio	88.507.577.437		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan	Persen	63.39	63.89	150.000.000	64.39	153.750.000	64.89	157.593.750	65.39	161.533.594	65.89	165.571.934	65.89	788.449.278		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B																DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	Persen	12.32	12.82 Persen	857.99 9.998	13.32 Persen	879.44 9.998	13.82 Persen	901.43 6.248	14.32 Persen	923.97 2.154	14.82 Persen	947.07 1.458	14.82 Persen	4.509.9 29.856	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	4 Prestasi	5 Prestasi	447.70 0.000	6 Prestasi	458.89 2.500	7 Prestasi	470.36 4.812	8 Prestasi	482.12 3.933	8 Prestasi	494.17 7.031	34 Prestasi	2.353.2 58.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	Orang	6 Orang	7 Orang	447.70 0.000	8 Orang	458.89 2.500	9 Orang	470.36 4.812	10 Orang	482.12 3.933	10 Orang	494.17 7.031	44 Orang	2.353.2 58.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50.75	51.25 Persen	447.70 0.000	51.75 Persen	458.89 2.500	52.25 Persen	470.36 4.812	52.75 Persen	482.12 3.933	53.25 Persen	494.17 7.031	53.25 Persen	2.353.2 58.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	38.87	39.37 Persen	447.70 0.000	39.87 Persen	458.89 2.500	40.37 Persen	470.36 4.812	40.87 Persen	482.12 3.933	41.37 Persen	494.17 7.031	41.37 Persen	2.353.2 58.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarpras olahraga yang layak	Persen	0.05	0.06 Persen	447.70 0.000	0.07 Persen	458.89 2.500	0.07 Persen	470.36 4.812	0.08 Persen	482.12 3.933	0.08 Persen	494.17 7.031	0.08 Persen	2.353.2 58.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah Pemuda yang aktif dalam	Orang	0 Orang	100 Orang	943.79 9.998	100 Orang	943.79 9.998	100 Orang	943.79 9.998	100 Orang	943.79 9.998	100 Orang	943.79 9.998	100 Orang	4.718.9 99.990	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KAPASITAS KEPRAMUKAAN	organisasi keperamukaan																DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	persen	1:18 Rasio	1:18 Rasio	712.74 0.173	1:17 Rasio	730.55 8.677	1:16 Rasio	748.82 2.644	1:15 Rasio	767.54 3.210	1:14 Rasio	786.73 1.790	1:14 Rasio	3.746.3 96.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	persen	1:20.000 Rasio	1:20.000 Rasio	712.74 0.173	1:19.000 Rasio	730.55 8.677	1:18.000 Rasio	748.82 2.644	1:17.000 Rasio	767.54 3.210	1:16.000 Rasio	786.73 1.790	1:16.000 Rasio	3.746.3 96.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	orang	0.21	0.21	712.74 0.173	0.21	730.55 8.677	0.21	748.82 2.644	0.21	767.54 3.210	0.21	786.73 1.790	0.21	3.746.3 96.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	prestasi	10	10	712.74 0.173	11	730.55 8.677	12	748.82 2.644	13	767.54 3.210	14	786.73 1.790	14	3.746.3 96.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	orang	100	100	100.00 0.000	100	102.50 0.000	100	105.06 2.500	100	107.68 9.063	100	110.38 1.289	100 Perse n	525.63 2.852	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Indeks Kesehatan	Skala	0,508	0,522	181.29 2.086.187	0,556	185.82 4.388.341	0,578	190.46 9.998.049	0,612	195.23 1.747.998	0,632	200.11 2.541.702	0,632	952.93 0.762.277		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	8.3	100	133.61 8.065.166	100	136.95 8.641.796	100	140.38 2.732.840	100	143.89 2.426.161	100	147.48 9.861.815	100	702.34 1.727.778	DINAS KESEHATAN	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Persen	100	100	36.932.424.796	100	37.855.735.416	100	38.802.128.801	100	39.772.182.021	100	40.766.486.572	100	194.128.957.606	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Jumlah	25	30	1.942.974.000	40	1.991.548.350	60	2.041.337.059	80	2.092.370.485	100	2.144.679.747	100	10.212.909.641	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	80	85	230.565.500	100	236.329.638	100	242.237.878	100	248.293.825	100	254.501.171	100	1.211.928.012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	persen	70	75	1.024.930.210	80	1.050.553.465	85	1.076.817.302	90	1.103.737.734	95	1.131.331.178	95	5.387.369.889	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	41.27	50	599.126.514	55	614.104.677	60	629.457.293	65	645.193.726	70	661.323.569	70	3.149.205.779	DINAS KESEHATAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berwawasan Kependudukan	Persen	n/a	53.00	245.000.000	55.00	251.125.000	57.00	257.403.125	59.00	263.838.203	61.00	270.434.158	61.00	1.287.800.486	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed	Persen	9.16	8.25	6.119.000.000	8.00	6.271.975.000	7.70	6.428.774.375	7.40	6.589.493.734	7.00	6.754.231.078	7.00	32.163.474.187	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Persen	53.57	53.57	575.000.000	55.00	589.375.000	57.00	604.109.375	59.00	619.212.109	61.00	634.692.412	61.00	3.022.388.896	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah /Orang /Tahun	9.500	12.000	6.746.152.726	24.000	6.914.806.544	32.500	7.087.676.707	44.000	7.264.868.625	52.000	7.446.490.344	52.000	35.459.994.946	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU	persen	14.37	15.19	45.000.000	15.55	46.125.000	15.90	47.278.125	16.25	48.460.078	16.61	49.671.580	16.61	236.534.783	DINAS PERDAGANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	P Toko (IKK Outcome)																
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	71.43	73.32	6.000.000.000	75.09	6.150.000.000	76.68	6.303.750.000	78.63	6.461.343.750	80.41	6.622.877.344	80.41	31.537.971.094	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	persen	2	3	50.000.000	5	51.250.000	6	52.531.250	7	53.844.531	8	55.190.645	8	262.816.426	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	Persen	2	3	75.000.000	5	76.875.000	7	78.796.875	8	80.766.797	9	82.785.967	9	394.224.639	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	76.78	79.08	59.976.000	83.69	61.475.400	85.99	63.012.285	88.29	64.587.592	88.29	66.202.282	88.29	315.253.559	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	persen	N/A	1.50	150.000.000	2	153.750.000	2.5	157.593.750	3.00	161.533.594	3.50	165.571.934	3.50	788.449.278	DINAS PERDAGANGAN	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Persentase Ketersediaan Pangan	persen	100	100	71.180.842	100	72.960.363	100	74.784.372	100	76.653.981	100	78.570.331	100	374.149.889	DINAS KETAHANAN PANGAN	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terhadap Kebutuhan Masyarakat																
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	persen	3.2	3.4	75.180.842	3.6	77.060.363	3.8	78.986.872	4	80.961.544	4.2	82.985.583	4.2	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	persen	100	100	75.180.842	100	77.060.363	100	78.986.872	100	80.961.544	100	82.985.583	100	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	persen	100	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.156	100	99.343.160	100	473.069.566	DINAS KETAHANAN PANGAN	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	persen	85	85	50.634.200	85	51.900.055	85	53.197.556	85	54.527.495	85	55.890.683	85	266.149.989	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	58,96	59,12	1.715.000.000	59,58	1.757.875.000	59,87	1.801.821.875	60,12	1.846.861.423	60,55	1.893.039.108	60,55	9.014.597.406		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	20	23	280.000.000	25	287.000.000	27	294.175.000	30	301.523.375	35	309.067.609	35	1.471.765.984	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan	Persen	100	100	275.000.000	100	281.875.000	100	288.921.875	100	296.144.922	100	303.548.545	100	1.445.490.342	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Perempuan yang Terlayani																DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	Persen	n/a	29.03	250.00 0.000	35.16	256.25 0.000	41.29	262.65 6.250	50.65	269.22 2.656	60.00	275.95 3.223	60.00	1.314.0 82.129	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen	n/a	100	150.00 0.000	100	153.75 0.000	100	157.59 3.750	100	161.53 3.594	100	165.57 1.934	100	788.44 9.278	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan ,Kecamatan layak anak)	Persen	22.22	29.63	500.00 0.000	33.33	512.50 0.000	40.74	525.31 2.500	48.15	538.44 5.313	55.56	551.90 6.445	55.56	2.628.1 64.258	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	260.00 0.000	100	266.50 0.000	100	273.16 2.500	100	279.99 1.563	100	286.99 1.352	100	1.366.6 45.415	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	50	55	1.382.953.542	60	1.417.527.381	65	1.452.965.565	70	1.489.289.705	75	1.526.521.947	75	7.269.258.140		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	Persen	50	50	529.39 4.800	58	542.62 9.670	67	556.19 5.411	75	570.10 0.297	75	584.35 2.804	75	2.782.6 72.982	DINAS SOSIAL	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	12.425.160	100	12.735.789	100	13.054.184	100	13.380.538	100	13.715.052	100	65.310.723	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen	100	100	300.000.000	100	307.500.000	100	315.187.500	100	323.067.188	100	331.143.867	100	1.576.898.555	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Persen	62,67	58,46	400.268.902	56,69	410.275.625	55,12	420.532.515	53,73	431.045.828	52,49	441.821.974	52,49	2.103.944.844	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	Persen	N/A	100	132.946.880	100	136.270.552	100	139.677.316	100	143.169.249	100	146.748.480	100	698.812.477	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan	Persen	100	100	7.917.800	100	8.115.745	100	8.318.639	100	8.526.605	100	8.739.770	100	41.618.559	DINAS SOSIAL

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Kesetiakawanan Sosial																
Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya dan kearifan lokal																	
Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara	Indeks ketentrangan dan ketertiban	Persen	N/A	100	7.144.258.876	100	7.322.865.349	100	7.505.936.982	100	7.693.585.406	100	7.885.925.041	100	37.552.571.654		
Meningkatnya ketentrangan dan ketertiban umum	Indeks kriminilitas	Persen	N/A	100	7.144.258.876	100	7.322.865.349	100	7.505.936.982	100	7.693.585.406	100	7.885.925.041	100	37.552.571.654		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	N/A Persen	100 Persen	112.478.400	100 Persen	115.290.360	100 Persen	118.172.619	100 Persen	121.126.934	100 Persen	124.155.108	100 Persen	100	591.223.421	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	100 Persen	100 Persen	718.041.746	100 Persen	735.992.790	100 Persen	754.392.609	100 Persen	773.252.425	100 Persen	792.583.735	100 Persen	100	3.774.263.305	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terbina	100 Persen	100 Persen	85.000.000	100 Persen	87.125.000	100 Persen	89.303.125	100 Persen	91.535.703	100 Persen	93.824.096	100 Persen	100	446.787.924	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	100 Persen	100 Persen	120.000.000	100 Persen	123.000.000	100 Persen	126.075.000	100 Persen	129.226.875	100 Persen	132.457.547	100 Persen	100	630.759.422	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	100 Persen	100 Persen	156.000.000	100 Persen	159.900.000	100 Persen	163.897.500	100 Persen	167.994.938	100 Persen	172.194.811	100 Persen	100	819.987.249	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	5.171.967.955	100	5.301.267.154	100	5.433.798.833	100	5.569.643.804	100	5.708.884.899	100	27.185.562.645	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran	Persen	100	100	706.200.000	100	723.855.000	100	741.951.375	100	760.500.159	100	779.512.663	100	3.712.019.197	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal																	
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Indeks Gini	Persen	0,36	0,32	39.661.866.962	0,28	40.727.008.624	0,25	41.870.600.726	0,2	42.941.661.826	0,19	44.038.792.212	0,19	209.239.930.350		
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,08	5.0-5.5%	38.854.293.962	5.5-5.6%	39.899.246.299	5.6-5.7%	41.022.144.343	5.7-5.8%	42.071.994.032	5.8-6.0%	43.147.382.725	5.8-6.0%	204.995.061.361		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	persen	100	100	15.000.000	100	15.375.000	100	15.759.375	100	16.153.359	100	16.557.193	100	78.844.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	persen	17	19	30.000.000	21	30.750.000	23	31.518.750	25	32.306.719	30	33.114.387	30	157.689.856	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																	PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	Persen	9.5	10	25.000.000	11	25.625.000	12	26.265.625	15	26.922.266	20	27.595.322	20	131.408.213		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persen	7	9	50.000.000	10	51.250.000	12	52.531.250	14	53.844.531	15	55.190.645	15	262.816.426		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	Persen	5	5	30.000.000	7	30.750.000	8	31.518.750	10	32.306.719	15	33.114.387	15	157.689.856		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	5	5	85.000.000	5	87.125.000	5	89.303.125	5	91.535.703	5	93.824.096	5	446.787.924		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	25	25	1.401.516.944	25.5 Persen	1.436.554.868	26.2 Persen	1.472.468.739	26.8 Persen	1.509.280.458	27.5 Persen	1.547.012.469	27.5 Persen	7.366.833.478	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	Persen	5	10	593.936.000	10	608.784.400	15	624.004.010	20	639.604.110	25	655.594.213	25	3.121.922.733	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	21.537.813	100	22.076.258	100	105.126.571	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan informasi industri	Persen	100	100	66.434.000	100	68.094.850	100	69.797.221	100	71.542.152	100	73.330.706	100	349.198.929	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																	PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	Persen	4.42	5.88	4.985.671.701	11.76	5.110.313.493	17.65	5.238.071.331	23.53	5.369.023.114	29.41	5.503.248.692	29.41	26.206.328.331		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	Persen	3.33	6.45	99.880.000	12.9	102.377.000	19.35	104.936.425	25.81	107.559.836	32.26	110.248.832	32.26	525.002.093		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi budidaya	Persen	1.87	1.96	3.148.841.741	3.92	3.227.562.785	5.88	3.308.251.854	7.84	3.390.958.151	9.8	3.475.732.104	9.8	16.551.346.635		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	Persen	1.22	1.22	773.946.580	2.24	793.295.245	3.36	813.127.626	4.48	833.455.816	5.56	854.292.212	5.56	4.068.117.479		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	Persen	2.50	2.44	50.000.000	4.88	51.250.000	7.32	52.531.250	9.76	53.844.531	12.20	55.190.645	12.20	262.816.426		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	90	90	242.444.809	95	223.037.592	95	270.419.161	95	285.278.333	95	300.273.237	95	1.321.453.132		DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	3.715.415.180	100	3.808.300.560	100	3.903.508.073	100	4.001.095.775	100	4.101.123.170	100	19.529.442.758		DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	N/A	90	2.802.742.791	90	2.872.811.361	90	2.944.631.645	95	3.018.247.436	100	3.093.703.622	100	14.732.136.855	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	6.539.733.179	100	6.703.226.508	100	6.870.807.171	100	7.042.577.350	100	7.218.641.784	100	34.374.985.992	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	100	100	124.883.855	100	128.005.951	100	131.206.100	100	134.486.253	100	137.848.409	100	656.430.568	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	Persen	70	75	16.795.608	75	17.215.498	80	17.645.886	80	18.087.033	85	18.539.209	85	88.283.234	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100	100	39.189.752	100	40.169.496	100	41.173.733	100	42.203.077	100	43.258.153	100	205.994.211	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian	Persen	75	75	242.444.809	75	223.037.592	80	270.419.161	80	285.278.333	85	300.273.237	85	1.321.453.132	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	N/A	100	101.636.800	100	104.177.720	100	106.782.163	100	109.451.717	100	112.188.010	100	534.236.410	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																	URA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	Persen	85	85	242.44 4.809	90	223.03 7.591	90	270.41 9.160	90	285.27 8.332	95	300.27 3.238	95	1.321.4 53.130		DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100	100	796.45 8.404	100	816.36 9.864	100	836.77 9.111	100	857.69 8.588	100	879.14 1.053	100	4.186.4 47.020		DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2.2	2.3	9.500.0 00.000	2.4	9.737.5 00.000	2.5	9.980.9 37.500	2.5	10.230. 460.93 8	2.6	10.486. 222.46 1	2.6	49.935. 120.89 9		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	N/A	20	690.00 0.000	25	707.25 0.000	40	724.93 1.250	45	743.05 4.531	50	761.63 0.895	50	3.626.8 66.676		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Kelompok	1	5	150.00 0.000	8	153.75 0.000	11	157.59 3.750	14	161.53 3.594	16	165.57 1.934	16	788.44 9.278		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	N/A	N/A	0	15	150.00 0.000	20	153.75 0.000	25	157.59 3.750	30	161.53 3.594	30	622.87 7.344		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	Persen	100	100	1.000.000.000	100	1.025.000.000	100	1.050.625.000	100	1.076.890.625	100	1.103.812.891	100	5.256.328.516	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Kelompok	8	8	250.000.000	6	256.250.000	6	262.656.250	7	269.222.656	7	275.953.223	7	1.314.082.129	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	10	20	912.877.000	20	935.698.925	25	959.091.398	30	983.068.683	35	1.007.645.400	35	4.798.381.406	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum	Persen	2.3	3.3	112.000.000	4.3	114.800.000	5.3	117.670.000	6.3	120.611.750	7.3	123.627.044	7.3	588.708.794	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15	807.573.000	15	827.762.325	15	848.456.383	15	869.667.794	15	891.409.487	15	4.244.868.989	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	Miliar Rupiah	310	325	300.000.000	340	307.500.000	355	315.187.500	360	323.067.188	375	331.143.867	375	1.576.898.555	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	35	39	70.000.000	44	71.750.000	51	73.543.750	59	75.382.344	65	77.266.902	65	367.942.996	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.156	100	99.343.160	100	473.069.566	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	50	322.573.000	50	330.637.325	50	338.903.258	50	347.375.840	50	356.060.236	50	1.695.549.659	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	100	131.408.213	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mengentaskan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,4	6	2.790.240.000	5,5	2.859.996.000	5	2.931.495.901	4,5	3.004.783.299	4	3.079.902.880	4	14.666.418.080	
Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89	2,75	368.240.000	2,49	377.446.000	2,27	386.882.151	2,05	396.554.204	2	406.468.059	2	1.935.590.414	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	persen	N/A	20	25.000.000	20	25.000.000	20	27.000.000	22	27.000.000	25	27.000.000	25	131.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	persen	62	68	106.600.000	70	109.265.000	75	111.996.625	80	114.796.541	85	117.666.454	85	560.324.620	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	0.93	21	190.140.000	23	194.893.500	25	199.765.838	27	204.759.983	29	209.878.983	29	999.438.304	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	44	46	46.500.000	46	48.287.500	47	48.119.688	48	49.997.680	49	51.922.622	49	244.827.490	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,611 (Berkembang)	0,624 (Berkembang)	2.422.000.000	0,645 (Berkembang)	2.482.550.000	0,687 (Berkembang)	2.544.613.750	0,7 (Berkembang)	2.608.229.095	0,707 (Maju)	2.673.434.821	0,707 (Maju)	12.730.827.666	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	persen	N/A	50	500.000.000	60	512.500.000	70	525.312.500	80	538.445.313	90	551.906.445	90	2.628.164.258	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Yang Terjalin	persen	51.85	33.33	100.000.000	50	102.500.000	66.67	105.062.500	83.33	107.689.063	100	110.381.289	100	525.632.852	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	persen	48.15	51.85	1.422.000.000	56	1.457.500.000	59.26	1.493.988.750	62.96	1.531.338.469	67	1.569.621.930	67	7.474.499.149	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan nya Diberdayakan	persen	55,1	83.79	240.000.000	87.72	246.000.000	91.64	252.150.000	95.57 Persen	258.453.750	100	264.915.094	100	1.261.518.844	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	100	100	160.00 0.000	100	164.00 0.000	100	168.10 0.000	100	172.30 2.500	100	176.61 0.063	100	841.01 2.563	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Program prioritas beserta Indikator Kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1.

Tabel VII - 1

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Mamuju**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	0102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	48.30 Persen	50.72 Persen	105,038,435,535	53.25 Persen	107,664,396,423	55.91 Persen	110,356,006,334	58.71 Persen	113,114,906,492	61.64 Persen	115,942,779,155	61.64 Persen	552,116,523,939	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	0103	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	2500 Paket	3000 Paket	82,500,000	3500 Paket	84,562,500	4000 Paket	86,676,563	4500 Paket	88,843,477	5000 Paket	91,064,563	20000 Paket	433,647,103	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	0104	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid	1:20 Rasio	1:20 Rasio	16,819,264,088	1:20 Rasio	17,239,745,690	1:20 Rasio	17,670,739,332	1:20 Rasio	18,112,507,816	1:20 Rasio	18,565,320,511	1:20 Rasio	88,407,577,437	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	0105	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B	63.39 Persen	63.89 Persen	150,000,000	64.39 Persen	153,750,000	64.89 Persen	157,593,750	65.39 Persen	161,533,594	65.89 Persen	165,571,934	65.89 Persen	788,449,278	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	0	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	8.3 Persen	100 Persen	133,618,065,166	100 Persen	136,958,641,796	100 Persen	140,382,732,840	100 Persen	143,892,426,161	100 Persen	147,489,861,815	100 Persen	702,341,727,778	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	5,000,000	100 Persen	5,000,000	100 Persen	5,000,000	100 Persen	5,000,000	100 Persen	5,000,000	100 Persen	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	100 Persen	100 Persen	36,932,424,796	100 Persen	37,855,735,416	100 Persen	38,802,128,801	100 Persen	39,772,182,021	100 Persen	40,766,486,572	100 Persen	194,128,957,606	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	25 Persen	30 Persen	1,942,974,000	40 Persen	1,991,548,350	60 Persen	2,041,337,059	80 Persen	2,092,370,485	100 Persen	2,144,679,747	100 Persen	10,212,909,641	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Tingkat kepuasan pegawai	80 Persen	85 Persen	230,565,500	100 Persen	236,329,638	100 Persen	242,237,878	100 Persen	248,293,825	100 Persen	254,501,171	100 Persen	1,211,928,012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	terhadap peningkatan kapasitas SDM RS														
1	024	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	70 Persen	75 Persen 1,024,930,210	80 Persen	1,050,553,465	85 Persen	1,076,817,302	90 Persen	1,103,737,734	95 Persen	1,131,331,178	95 Persen	5,387,369,889		DINAS KESEHATAN
1	025	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	41.27 Persen	50 Persen 599,126,514	55 Persen	614,104,677	60 Persen	629,457,293	65 Persen	645,193,726	70 Persen	661,323,569	70 Persen	3,149,205,779		DINAS KESEHATAN
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	032	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	N/A Persen	60 Persen 5,014,906,655	63 Persen	5,140,279,321	66 Persen	5,268,786,304	69 Persen	5,400,505,962	73 Persen	5,535,518,611	73 Persen	26,359,996,853		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	032	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	N/A Persen	60 Persen 5,014,906,655	63 Persen	5,140,279,321	66 Persen	5,268,786,304	69 Persen	5,400,505,962	73 Persen	5,535,518,611	73 Persen	26,359,996,853		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	033	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	73.1 Persen	82.1 Persen 7,786,707,311	86.6 Persen 7,981,374,994	91.1 Persen 8,180,909,369	95.6 Persen 8,385,432,103	100 Persen 8,595,067,906	100 Persen 40,929,491,683	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	034	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	N/A Persen	N/A Persen 0	30 Persen 1,000,000,000	35 Persen 1,090,000,000	40 Persen 1,180,000,000	45 Persen 1,280,000,000	45 Persen 4,550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	035	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	60 Persen	70 Persen 2,629,974,900	75 Persen 2,695,724,273	80 Persen 2,763,117,379	85 Persen 2,832,195,314	90 Persen 2,903,000,197	90 Persen 13,824,012,063	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	036	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	21.49 Persen	27.49 Persen 1,328,925,100	30.49 Persen 1,362,148,228	33.49 Persen 1,396,201,933	36.49 Persen 1,431,106,982	39.49 Persen 1,466,884,656	39.49 Persen 6,985,266,899	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	037	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase infrastruktur jalan	30 Persen	44 Persen 6,643,155,225	50 Persen 6,809,234,106	56 Persen 6,979,464,958	62 Persen 7,153,951,582	68 Persen 7,332,800,372	68 Persen 34,918,606,243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		AN PERMUKIMAN	permukiman kondisi baik														PENATAAN RUANG
1	0308	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	24.30 Persen	26.10 Persen	18,789,537,550	27.10 Persen	19,259,275,989	28.10 Persen	19,740,757,889	19.10 Persen	20,234,276,836	30.10 Persen	20,740,133,757	30.10 Persen	98,763,982,021	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0309	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	10.30 Persen	39.90 Persen	240,300,000	53.90 Persen	246,307,500	68.80 Persen	252,465,188	83.70 Persen	258,776,817	98.60 Persen	265,246,238	98.60 Persen	1,263,095,743	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	48.72 Persen	54.72 Persen	80,000,000,000	57.72 Persen	81,000,000,000	60.72 Persen	82,960,000,000	63.72 Persen	84,971,250,000	66.72 Persen	87,025,031,250	66.72 Persen	415,956,281,250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0311	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10 Persen	20 Persen	191,604,150	25 Persen	196,394,254	30 Persen	201,304,110	35 Persen	206,336,713	40 Persen	211,495,131	40 Persen	1,007,134,358	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	9 Persen	9 Persen	900,000,000	18 Persen	922,500,000	27 Persen	1,320,562,500	36 Persen	1,353,576,563	45 Persen	1,387,415,977	45 Persen	5,884,055,040	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	042	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 Persen	100 Persen	11,400,000,000	100 Persen	11,685,000,000	100 Persen	11,977,125,000	100 Persen	12,276,553,125	100 Persen	12,583,466,953	100 Persen	59,922,145,078	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	043	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	49.84 Ha	49.64 Ha	930,000,000	49.49 Ha	953,250,000	49.35 Ha	977,081,250	49.22 Ha	1,001,508,281	49.10 Ha	1,026,545,988	246.8 Ha	4,888,385,519	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	044	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman yang tertata	10.13 Ha	14.89 Ha	1,550,000,000	14.85 Ha	1,588,750,000	15.79 Ha	1,628,468,750	16.24 Ha	1,669,180,469	16.69 Ha	1,710,909,980	78.46 Ha	8,147,309,199	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	045	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	78 Persen	80 Persen	3,500,000,000	80 Persen	3,587,500,000	80 Persen	3,677,187,500	80 Persen	3,769,117,188	80 Persen	3,863,345,117	80 Persen	18,397,149,805	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	046	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi	N/A Persen	30 Persen 10,000,000	40 Persen 10,250,000	45 Persen 10,506,250	50 Persen 10,768,906	55 Persen 11,038,129	55 Persen 52,563,285							DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	052	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	100 Persen 5,171,967,955	100 Persen 5,301,267,154	100 Persen 5,433,798,833	100 Persen 5,569,643,804	100 Persen 5,708,884,899	100 Persen 27,185,562,645							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	053	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	50 Persen	55 Persen 3,910,000,000	60 Persen 4,007,750,000	65 Persen 4,107,943,750	70 Persen 4,210,642,344	80 Persen 4,315,908,402	80 Persen 20,552,244,496							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	054	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran	100 Persen	100 Persen 706,200,000	100 Persen 723,855,000	100 Persen 741,951,375	100 Persen 760,500,159	100 Persen 779,512,663	100 Persen 3,712,019,197							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		AN NON KEBAKARAN																
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	062	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	50 Persen	50 Persen	529,394,800	58 Persen	542,629,670	67 Persen	556,195,411	75 Persen	570,100,297	75 Persen	584,352,804	75 Persen	2,782,672,982		DINAS SOSIAL
1	063	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 Persen	100 Persen	12,425,160	100 Persen	12,735,789	100 Persen	13,054,184	100 Persen	13,380,538	100 Persen	13,715,052	100 Persen	65,310,723		DINAS SOSIAL
1	064	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100 Persen	100 Persen	300,000,000	100 Persen	307,500,000	100 Persen	315,187,500	100 Persen	323,067,188	100 Persen	331,143,867	100 Persen	1,576,898,555		DINAS SOSIAL
1	065	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	62,67 Persen	58,46 Persen	400,268,902	56,69 Persen	410,275,625	55,12 Persen	420,532,515	53,73 Persen	431,045,828	52,49 Persen	441,821,974	52,49 Persen	2,103,944,844		DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	066	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	N/A Persen	100 Persen	132,946,880	100 Persen	136,270,552	100 Persen	139,677,316	100 Persen	143,169,249	100 Persen	146,748,480	100 Persen	698,812,477	DINAS SOSIAL
1	067	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 Persen	100 Persen	7,917,800	100 Persen	8,115,745	100 Persen	8,318,639	100 Persen	8,526,605	100 Persen	8,739,770	100 Persen	41,618,559	DINAS SOSIAL
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	072	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	N/A Persen	20 Persen	25,000,000	20 Persen	25,000,000	20 Persen	27,000,000	22 Persen	27,000,000	25 Persen	27,000,000	25 Persen	131,000,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	073	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	62 Persen	68 Persen	106,600,000	70 Persen	109,265,000	75 Persen	111,996,625	80 Persen	114,796,541	85 Persen	117,666,454	85 Persen	560,324,620	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		AS TENAGA KERJA															
2	074	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0.93 Persen	21 Persen 190,140,000	23 Persen 194,893,500	25 Persen 199,765,838	27 Persen 204,759,983	29 Persen 209,878,983	29 Persen 999,438,304							DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	075	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	44 Persen	46 Persen 46,500,000	46 Persen 48,287,500	47 Persen 48,119,688	48 Persen 49,997,680	49 Persen 51,922,622	49 Persen 244,827,490							DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	082	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	20 Persen	23 Persen 280,000,000	25 Persen 287,000,000	27 Persen 294,175,000	30 Persen 301,523,375	35 Persen 309,067,609	35 Persen 1,471,765,984							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	083	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100 Persen	100 Persen 275,000,000	100 Persen 281,875,000	100 Persen 288,921,875	100 Persen 296,144,922	100 Persen 303,548,545	100 Persen 1,445,490,342							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																		PERLINDUNGAN ANAK
2084	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	n/a Persen	29.03 Persen	250,000,00	35.16 Persen	256,250,00	41.29 Persen	262,656,250	50.65 Persen	269,222,656	60.00 Persen	275,953,223	60.00 Persen	1,314,082,129			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2085	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	n/a Persen	100 Persen	150,000,00	100 Persen	153,750,00	100 Persen	157,593,750	100 Persen	161,533,594	100 Persen	165,571,934	100 Persen	788,449,278			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2086	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekelra (desa/kelurahan, Kecamatan layak anak)	22.22 Persen	29.63 Persen	500,000,00	33.33 Persen	512,500,00	40.74 Persen	525,312,500	48.15 Persen	538,445,313	55.56 Persen	551,906,445	55.56 Persen	2,628,164,258			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2087	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100 Persen	100 Persen	260,000,00	100 Persen	266,500,00	100 Persen	273,162,500	100 Persen	279,991,563	100 Persen	286,991,352	100 Persen	1,366,645,415			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2092	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA	Persentase Nilai Tukar Petani	100 Persen	100 Persen	4,000,000	100 Persen	4,100,000	100 Persen	4,202,500	100 Persen	4,307,563	100 Persen	4,415,252	100 Persen	21,025,315			DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN															
2	0 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	100 Persen	100 Persen 75,180,842	100 Persen	100 Persen 77,060,363	100 Persen	100 Persen 78,986,872	100 Persen	100 Persen 80,961,544	100 Persen	100 Persen 82,985,583	100 Persen	100 Persen 395,175,204		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	0 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	100 Persen	100 Persen 71,180,842	100 Persen	100 Persen 72,960,363	100 Persen	100 Persen 74,784,372	100 Persen	100 Persen 76,653,981	100 Persen	100 Persen 78,570,331	100 Persen	100 Persen 374,149,889		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	0 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	3.2 Persen	3.4 Persen 75,180,842	3.6 Persen	3.8 Persen 77,060,363	4.0 Persen	4.2 Persen 78,986,872	4.4 Persen	4.6 Persen 80,961,544	4.8 Persen	5.0 Persen 82,985,583	5.2 Persen	5.4 Persen 395,175,204		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	0 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100 Persen	100 Persen 90,000,000	100 Persen	100 Persen 92,250,000	100 Persen	100 Persen 94,556,250	100 Persen	100 Persen 96,920,156	100 Persen	100 Persen 99,343,160	100 Persen	100 Persen 473,069,566		DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
20905	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	85 Persen	85 Persen 50,634,200	85 Persen 51,900,055	85 Persen 53,197,556	85 Persen 54,527,495	85 Persen 55,890,683	85 Persen 266,149,989								DINAS KETAHANAN PANGAN
210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2102	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	N/A Persen	45 Persen 22,000,000	50 Persen 22,550,000	55 Persen 23,113,750	60 Persen 23,691,594	65 Persen 24,283,884	65 Persen 115,639,228								DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2104	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	N/A Persen	100 Persen 25,000,000	100 Persen 25,625,000	100 Persen 26,265,625	100 Persen 26,922,266	100 Persen 27,595,322	100 Persen 131,408,213								DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2105	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	85 Persen	86 Persen 3,250,000,000	87 Persen 3,331,250,000	88 Persen 3,414,531,250	89 Persen 3,499,894,531	90 Persen 3,587,391,895	90 Persen 17,083,067,676								DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	106	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	N/A Persen	87 Persen	75,000,000	88 Persen	76,875,000	89 Persen	78,796,875	90 Persen	80,766,797	91 Persen	82,785,967	91 Persen	394,224,639	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	108	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya tanah untuk masyarakat	N/A Persen	N/A Persen	0	100 Persen	30,000,000	100 Persen	30,750,000	100 Persen	31,518,750	100 Persen	32,306,719	100 Persen	124,575,469	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	110	PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	250,000,000	100 Persen	256,250,000	100 Persen	262,656,250	100 Persen	269,222,656	100 Persen	275,953,223	100 Persen	1,314,082,129	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	112	PROGRAM PERENCANAAN	Persentase penyusunan dokumen perencanaan	100 Persen	100 Persen	257,567,000	100 Persen	264,006,175	100 Persen	270,606,329	100 Persen	277,371,488	100 Persen	284,305,775	100 Persen	1,353,856,767	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		LINGKUNGAN HIDUP	lingkungan hidup														DAN KEBERSIHAN
2	1 1	0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	N/A Persen	50 Persen 205,000,00	55 Persen 210,125,00	60 Persen 215,378,125	65 Persen 220,762,578	70 Persen 226,281,643	70 Persen 1,077,547,346						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	1 1	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	0.01 Persen	0.01 Persen 4,860,000,000	0.01 Persen 4,981,500,000	0.01 Persen 5,106,037,500	0.01 Persen 5,233,688,438	0.01 Persen 5,364,530,648	0.01 Persen 25,545,756,586						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	1 1	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	N/A Persen	100 Persen 125,000,000	100 Persen 128,125,000	100 Persen 131,328,125	100 Persen 134,611,328	100 Persen 137,976,611	100 Persen 657,041,064						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	N/A Persen	82 Persen	150,000,000	84 Persen	153,750,000	86 Persen	157,593,750	88 Persen	161,533,594	90 Persen	165,571,934	90 Persen	788,449,278	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	1017	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	N/A Persen	100 Persen	30,000,000	100 Persen	30,750,000	100 Persen	31,518,750	100 Persen	32,306,719	100 Persen	33,114,387	100 Persen	157,689,856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	1018	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan	N/A Persen	100 Persen	50,000,000	100 Persen	51,250,000	100 Persen	52,531,250	100 Persen	53,844,531	100 Persen	55,190,645	100 Persen	262,816,426	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	hidup untuk masyarakat														
2	109	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	N/A Persen	100 Persen 30,000,000	100 Persen 30,750,000	100 Persen 31,518,750	100 Persen 32,306,719	100 Persen 33,114,387	100 Persen 157,689,856							DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	N/A Persen	100 Persen 20,000,000	100 Persen 20,500,000	100 Persen 21,012,500	100 Persen 21,537,813	100 Persen 22,076,258	100 Persen 105,126,571							DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	74 Persen	73 Persen 8,169,827,361	72 Persen 8,374,073,045	71 Persen 8,583,424,871	70 Persen 8,798,010,493	72 Persen 9,017,960,755	72 Persen 42,943,296,525							DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	122	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 Persen	100 Persen 715,000,000	100 Persen 732,875,000	100 Persen 751,875,000	100 Persen 769,976,797	100 Persen 789,226,217	100 Persen 3,758,953,014							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1 2 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen 443,000,000	100 Persen 454,075,000	100 Persen 465,426,875	100 Persen 477,062,547	100 Persen 488,989,111	100 Persen 2,328,553,533	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	1 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	100 Persen 313,056,522	100 Persen 320,882,935	100 Persen 328,905,008	100 Persen 337,127,634	100 Persen 345,555,824	100 Persen 1,645,527,923	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	1 2 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	100 Persen 34,533,927	100 Persen 35,397,275	100 Persen 36,282,207	100 Persen 37,189,262	100 Persen 38,118,994	100 Persen 181,521,665	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2	1 3 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	N/A Persen	50 Persen 500,000,000	60 Persen 512,500,000	70 Persen 525,312,500	80 Persen 538,445,313	90 Persen 551,906,445	90 Persen 2,628,164,258	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	1 3 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Yang Terjalin	51.85 Persen	33.33 Persen 100,000,000	50 Persen 102,500,000	66.67 Persen 105,062,500	83.33 Persen 107,689,063	100 Persen 110,381,289	100 Persen 525,632,852	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	1 3 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	48.15 Persen	51.85 Persen 1,422,000,000	56 Persen 1,457,550,000	59.26 Persen 1,493,988,750	62.96 Persen 1,531,338,469	67 Persen 1,569,621,930	67 Persen 7,474,499,149	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1 3 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan	55,10 Persen	83.79 Persen 240,000,00	87.72 Persen 246,000,00	91.64 Persen 252,150,00	95.57 Persen 258,453,75	100 Persen 264,915,09	100 Persen 1,261,518,844	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	1 3 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	100 Persen	100 Persen 160,000,00	100 Persen 164,000,00	100 Persen 168,100,00	100 Persen 172,302,50	100 Persen 176,610,06	100 Persen 841,012,563	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2	1 4 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berwawasan Kependudukan	n/a Persen	53.00 Persen 245,000,00	55.00 Persen 251,125,00	57.00 Persen 257,403,125	59.00 Persen 263,838,203	61.00 Persen 270,434,158	61.00 Persen 1,287,800,486	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2	1 4 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed	9.16 Persen	8.25 Persen 6,119,000,000	8.00 Persen 6,271,975,000	7.70 Persen 6,428,774,375	7.40 Persen 6,589,493,734	7.00 Persen 6,754,231,078	7.00 Persen 32,163,474,187	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	53.57 Persen	53.57 Persen 575,000,000	55.00 Persen	589,375,000	57.00 Persen	604,109,375	59.00 Persen	619,212,109	61.00 Persen	634,692,412	61.00 Persen	3,022,388,896	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2	102	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	65 Persen	70 Persen 534,957,143	75 Persen	548,331,071	80 Persen	562,039,348	85 Persen	576,090,332	90 Persen	590,492,590	90 Persen	2,811,910,484	DINAS PERHUBUNGAN
2	102	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraa n terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	29 Persen	35 Persen 534,957,143	42 Persen	548,331,071	50 Persen	562,039,348	57 Persen	576,090,332	64 Persen	590,492,590	64 Persen	2,811,910,484	DINAS PERHUBUNGAN
2	102	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	30 Persen	35 Persen 534,957,143	40 Persen	548,331,071	45 Persen	562,039,348	50 Persen	576,090,332	55 Persen	590,492,590	55 Persen	2,811,910,484	DINAS PERHUBUNGAN
2	102	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	30 Persen	40 Persen 534,957,143	45 Persen	548,331,071	50 Persen	562,039,348	55 Persen	576,090,332	60 Persen	590,492,590	60 Persen	2,811,910,484	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	1	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0.12 Persen	0.18 Persen	534,957,143	0.20 Persen	548,331,071	0.21 Persen	562,039,348	0.22 Persen	576,090,332	2.00 Persen	590,492,590	2.00 Persen	2,811,910,484	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	22 Persen	22 Persen	534,957,143	33 Persen	548,331,071	55 Persen	562,039,348	77 Persen	576,090,332	100 Persen	590,492,590	100 Persen	2,811,910,484	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase tersedianya perlengkapan transportasi	13 Persen	13 Persen	534,957,143	20 Persen	548,331,071	35 Persen	562,039,348	60 Persen	576,090,332	70 Persen	590,492,590	70 Persen	2,811,910,484	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	30 Persen	30 Persen	325,000,000	35 Persen	333,125,000	40 Persen	341,453,125	45 Persen	349,989,453	50 Persen	358,739,189	50 Persen	1,708,306,767	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	1	0	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan	91 Persen	100 Persen	683,038,500	100 Persen	700,114,463	100 Persen	717,617,324	100 Persen	735,557,757	100 Persen	753,946,701	100 Persen	3,590,274,745	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	102	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	100 Persen	100 Persen 683,038,500	100 Persen	100 Persen 700,114,463	100 Persen	100 Persen 717,617,324	100 Persen	100 Persen 735,557,757	100 Persen	100 Persen 753,946,701	100 Persen	100 Persen 3,590,274,745			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	103	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	31 Persen	67 Persen 2,983,797,600	78 Persen	89 Persen 3,058,392,540	89 Persen	100 Persen 3,134,852,354	100 Persen	100 Persen 3,213,223,662	100 Persen	100 Persen 3,293,554,254	100 Persen	100 Persen 15,683,820,410			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2	102	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	100 Persen	100 Persen 15,000,000	100 Persen	100 Persen 15,375,000	100 Persen	100 Persen 15,759,375	100 Persen	100 Persen 16,153,359	100 Persen	100 Persen 16,557,193	100 Persen	100 Persen 78,844,927			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2	103	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	17 Persen	19 Persen 30,000,000	21 Persen	23 Persen 30,750,000	23 Persen	25 Persen 31,518,750	25 Persen	30 Persen 32,306,719	30 Persen	30 Persen 33,114,387	30 Persen	30 Persen 157,689,856			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																	PERINDUSTRIAN
2	1704	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat 9.5 Persen	10 Persen 25,000,000	11 Persen 25,625,000	12 Persen 26,265,625	15 Persen 26,922,266	20 Persen 27,595,322	20 Persen 131,408,213								DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2	1705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian 7 Persen	9 Persen 50,000,000	10 Persen 51,250,000	12 Persen 52,531,250	14 Persen 53,844,531	15 Persen 55,190,645	15 Persen 262,816,426								DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2	1706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab. 5 Persen	5 Persen 30,000,000	7 Persen 30,750,000	8 Persen 31,518,750	10 Persen 32,306,719	15 Persen 33,114,387	15 Persen 157,689,856								DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2	1707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan 5 Persen	5 Persen 85,000,000	5 Persen 87,125,000	5 Persen 89,303,125	5 Persen 91,535,703	5 Persen 93,824,096	5 Persen 446,787,924								DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DAN USAHA MIKRO (UMKM)															DAN PERINDUSTRIAN
2	1 7 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	25 Persen	25 Persen 1,401,516,944	25.5 Persen 1,436,554,868	26.2 Persen 1,472,468,739	26.8 Persen 1,509,280,458	27.5 Persen 1,547,012,469	27.5 Persen 7,366,833,478							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2	1 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	1 8 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	310 Miliar/Rupiah	325 Miliar/Rupiah 300,000,000	340 Miliar/Rupiah 307,500,000	355 Miliar/Rupiah 315,187,500	360 Miliar/Rupiah 323,067,188	375 Miliar/Rupiah 331,143,867	375 Miliar/Rupiah 1,576,898,555							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Investor	35 Investor	39 Investor 70,000,000	44 Investor 71,750,000	51 Investor 73,543,750	59 Investor 75,382,344	65 Investor 77,266,902	65 Investor 367,942,996							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen 90,000,000	100 Persen 92,250,000	100 Persen 94,556,250	100 Persen 96,920,156	100 Persen 99,343,160	100 Persen 473,069,566							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	50 Persen	50 Persen 322,573,000	50 Persen 330,637,325	50 Persen 338,903,258	50 Persen 347,375,840	50 Persen 356,060,236	50 Persen 1,695,549,659	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2	186	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	100 Persen	100 Persen 25,000,000	100 Persen 25,625,000	100 Persen 26,265,625	100 Persen 26,922,266	100 Persen 27,595,322	100 Persen 131,408,213	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2	192	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	12.32 Persen	12.82 Persen 857,999,998	13.32 Persen 879,449,998	13.82 Persen 901,436,248	14.32 Persen 923,972,154	14.82 Persen 947,071,458	14.82 Persen 4,509,929,856	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
2	193	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Jumlah Prestasi Olahraga	4 Prestasi	5 Prestasi 447,700,000	6 Prestasi 458,892,500	7 Prestasi 470,364,812	8 Prestasi 482,123,933	8 Prestasi 494,177,031	34 Prestasi 2,353,258,276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
2	193	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Jumlah atlet berprestasi	6 Orang	7 Orang 447,700,000	8 Orang 458,892,500	9 Orang 470,364,812	10 Orang 482,123,933	10 Orang 494,177,031	44 Orang 2,353,258,276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
2	193	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	Cakupan pembinaan atlet muda	50.75 Persen	51.25 Persen 447,700,000	51.75 Persen 458,892,500	52.25 Persen 470,364,812	52.75 Persen 482,123,933	53.25 Persen 494,177,031	53.25 Persen 2,353,258,276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DAYA SAING KEOLAHKRAGAN															DAN OLAHRAGA
2	103	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHKRAGAN	Cakupan pelatih yang bersertifikat	38.87 Persen	39.37 Persen 447,700,000	39.87 Persen 458,892,500	40.37 Persen 470,364,812	40.87 Persen 482,123,933	41.37 Persen 494,177,031	41.37 Persen 2,353,258,276							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	103	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHKRAGAN	Persentase sarpras olahraga yang layak	0.05 Persen	0.06 Persen 447,700,000	0.07 Persen 458,892,500	0.07 Persen 470,364,812	0.08 Persen 482,123,933	0.08 Persen 494,177,031	0.08 Persen 2,353,258,276							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	104	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	0 Orang	100 Orang 943,799,998	100 Orang 943,799,998	100 Orang 943,799,998	100 Orang 943,799,998	100 Orang 943,799,998	100 Orang 4,718,999,990							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	202	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	N/A Persen	50 Persen 500,000,000	75 Persen 512,500,000	100 Persen 525,312,500	100 Persen 538,445,313	100 Persen 551,906,445	100 Persen 2,628,164,258							DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	212	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem	N/A Persen	31 Persen 184,501,115	44 Persen 189,113,643	56 Persen 193,841,484	67 Persen 198,687,521	89 Persen 203,654,709	89 Persen 969,798,472							DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PENGAMANAAN INFORMASI	manajemen keamanan informasi															
2	2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Event Kesenian dan Kebudayaan yang disiapkan	100 Persen	100 Persen	1,000,000,000	100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,200,000,000	100 Persen	1,300,000,000	100 Persen	1,300,000,000	100 Persen	5,900,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Komunitas/sangkar kesenian yang difasilitasi	8 Kelompok	8 Kelompok	250,000,000	6 Kelompok	270,000,000	6 Kelompok	350,000,000	7 Kelompok	350,000,000	7 Kelompok	350,000,000	7 Kelompok	1,570,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2	0	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	10 Persen	20 Persen	912,877,000	20 Persen	927,000,000	25 Persen	950,000,000	30 Persen	950,000,000	35 Persen	950,000,000	35 Persen	4,689,877,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2	0	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Kegiatan pelestarian cagar budaya	2 Persen	10 Persen	400,000,000	10 Persen	440,000,000	15 Persen	484,000,000	15 Persen	500,000,000	15 Persen	500,000,000	15 Persen	2,324,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum	2.3 Persen	3.3 Persen	112,000,000	4.3 Persen	123,200,000	5.3 Persen	135,520,000	6.3 Persen	139,520,000	7.3 Persen	139,520,000	7.3 Persen	649,760,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	2	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	2	0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	1:18 Rasio	1:18 Rasio	712,740,173	1:17 Rasio	730,558,677	1:16 Rasio	748,822,644	1:15 Rasio	767,543,210	1:14 Rasio	786,731,790	1:14 Rasio	3,746,396,494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	1:20.00 Rasio	1:20.00 Rasio	712,740,173	1:19.00 Rasio	730,558,677	1:18.00 Rasio	748,822,644	1:17.00 Rasio	767,543,210	1:16.00 Rasio	786,731,790	1:16.00 Rasio	3,746,396,494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0.21 Persen	0.21 Persen	712,740,173	0.21 Persen	730,558,677	0.21 Persen	748,822,644	0.21 Persen	767,543,210	0.21 Persen	786,731,790	0.21 Persen	3,746,396,494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	10 Persen	10 Persen	712,740,173	11 Persen	730,558,677	12 Persen	748,822,644	13 Persen	767,543,210	14 Persen	786,731,790	14 Persen	3,746,396,494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100 Persen	102,500,000	100 Persen	105,062,500	100 Persen	107,689,063	100 Persen	110,381,289	100 Persen	525,632,852	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan	8.15 Persen	9 Persen	32,000,000	9.95 Persen	32,800,000	10 Persen	33,620,000	10 Persen	34,460,500	10 Persen	35,322,013	10 Persen	168,202,513	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	2 4 3	0 3		akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban nasional														
2	2 4 3	0 3		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara	N/A Persen	50 Perse n	50,000,000	70 Perse n	51,250,000	80 Perse n	52,531,250	90 Perse n	53,844,531	100 Perse n	55,190,645	100 Perse n	262,816,426	DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN
2	2 4 4	0 4		Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	70 Persen	70 Perse n	37,327,000	80 Perse n	38,260,175	90 Perse n	39,216,679	90 Perse n	40,197,096	100 Perse n	41,202,024	100 Perse n	196,202,974	DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	2 5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3	2 5	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	4.42 Persen	5.88 Persen	4,985,671,701	11.76 Persen	5,110,313,493	17.65 Persen	5,238,071,331	23.53 Persen	5,369,023,114	29.41 Persen	5,503,248,692	29.41 Persen	26,206,328,331	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	3.33 Persen	6.45 Persen	99,880,000	12.9 Persen	102,377,000	19.35 Persen	104,936,425	25.81 Persen	107,559,836	32.26 Persen	110,248,832	32.26 Persen	525,002,093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi budidaya	1.87 Persen	1.96 Persen	3,148,841,741	3.92 Persen	3,227,562,785	5.88 Persen	3,308,251,854	7.84 Persen	3,390,958,151	9.8 Persen	3,475,732,104	9.8 Persen	16,551,346,635	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	1.22 Persen	1.22 Persen	773,946,580	2.24 Persen	793,295,245	3.36 Persen	813,127,626	4.48 Persen	833,455,816	5.56 Persen	854,292,212	5.56 Persen	4,068,117,479	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	2.50 Persen	2.44 Persen	50,000,000	4.88 Persen	51,250,000	7.32 Persen	52,531,250	9.76 Persen	53,844,531	12.20 Persen	55,190,645	12.20 Persen	262,816,426	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
3	2 6	0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.2 Persen	2.3 Persen	8,212,073,259	2.4 Persen	8,297,327,969	2.5 Persen	8,231,534,473	2.5 Persen	8,402,691,002	2.6 Persen	8,650,049,809	2.6 Persen	41,793,676,512	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	203	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	N/A Persen	20 Persen 690,000,000	25 Persen 700,000,000	40 Persen 760,000,000	45 Persen 780,000,000	50 Persen 850,000,000	50 Persen 3,780,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
3	204	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprosi, berpromosi dan berinteraksi	1 Kelompok	5 Kelompok 150,000,000	8 Kelompok 153,750,000	11 Kelompok 157,593,750	14 Kelompok 161,533,594	16 Kelompok 165,571,934	16 Kelompok 788,449,278	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
3	205	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	N/A Persen	N/A Persen 0	15 Persen 150,000,000	20 Persen 153,750,000	25 Persen 176,533,594	30 Persen 196,533,594	30 Persen 676,817,188	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
3	207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3	202	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	90 Persen	90 Persen 242,444,809	95 Persen 223,037,592	95 Persen 270,419,161	95 Persen 285,278,333	95 Persen 300,273,237	95 Persen 1,321,453,132	DINAS PERKEBUNAN					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen 3,715,415,180	100 Persen 3,808,300,560	100 Persen 3,903,508,073	100 Persen 4,001,095,775	100 Persen 4,101,123,170	100 Persen 19,529,442,758	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN				
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	N/A Persen	90 Persen 2,802,742,791	90 Persen 2,872,811,361	95 Persen 2,944,631,645	100 Persen 3,018,247,436	100 Persen 3,093,703,622	100 Persen 14,732,136,855	DINAS PERKEBUNAN				
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen 6,539,733,179	100 Persen 6,703,226,508	100 Persen 6,870,807,171	100 Persen 7,042,577,350	100 Persen 7,218,641,784	100 Persen 34,374,985,992	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN				
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100 Persen	100 Persen 124,883,855	100 Persen 128,005,951	100 Persen 131,206,100	100 Persen 134,486,253	100 Persen 137,848,409	100 Persen 656,430,568	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN				
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	70 Persen	75 Persen 16,795,608	75 Persen 17,215,498	80 Persen 17,645,886	80 Persen 18,087,033	85 Persen 18,539,209	85 Persen 88,283,234	DINAS PERKEBUNAN				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 Persen	100 Persen 39,189,752	100 Persen 40,169,496	100 Persen 41,173,733	100 Persen 42,203,077	100 Persen 43,258,153	100 Persen 205,994,211	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN				
3	2	0	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian	75 Persen	75 Persen 242,444,809	75 Persen 223,037,592	80 Persen 270,419,161	80 Persen 285,278,333	85 Persen 300,273,237	85 Persen 1,321,453,132	DINAS PERKEBUNAN				
3	2	0	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	N/A Persen	100 Persen 101,636,800	100 Persen 104,177,720	100 Persen 106,782,163	100 Persen 109,451,717	100 Persen 112,188,010	100 Persen 534,236,410	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN				
3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	85 Persen	85 Persen 242,444,809	90 Persen 223,037,591	90 Persen 270,419,160	90 Persen 285,278,332	95 Persen 300,273,238	95 Persen 1,321,453,130	DINAS PERKEBUNAN				
3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	100 Persen	100 Persen 796,458,404	100 Persen 816,369,864	100 Persen 836,779,111	100 Persen 857,698,588	100 Persen 879,141,053	100 Persen 4,186,447,020	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN				
3	3	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3	3	0	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	14.37 Persen	15.19 Persen 45,000,000	15.55 Persen 46,125,000	15.90 Persen 47,278,125	16.25 Persen 48,460,078	16.61 Persen 49,671,580	16.61 Persen 236,534,783	DINAS PERDAGANGAN				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)														
3	303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	71.43 Persen	73.32 Persen 6,000,000,000	75.09 Persen 6,150,000,000	76.68 Persen 6,303,750,000	78.63 Persen 6,461,343,750	80.41 Persen 6,622,877,344	80.41 Persen 31,537,971,094							DINAS PERDAGANGAN
3	304	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	2 Persen	3 Persen 50,000,000	5 Persen 51,250,000	6 Persen 52,531,250	7 Persen 53,844,531	8 Persen 55,190,645	8 Persen 262,816,426							DINAS PERDAGANGAN
3	305	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	2 Persen	3 Persen 75,000,000	5 Persen 76,875,000	7 Persen 78,796,875	8 Persen 80,766,797	9 Persen 82,785,967	9 Persen 394,224,639							DINAS PERDAGANGAN
3	306	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang	76.78 Persen	79.08 Persen 59,976,000	83.69 Persen 61,475,400	85.99 Persen 63,012,285	88.29 Persen 64,587,592	88.29 Persen 66,202,282	88.29 Persen 315,253,559							DINAS PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		berlaku (IKK Outcome)															
3	307	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	N/A Persen	1.50 Persen 150,000,000	2 Persen 153,750,000	2.5 Persen 157,593,750	3.00 Persen 161,533,594	3.50 Persen 165,571,934	3.50 Persen 788,449,278							DINAS PERDAGANGAN
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	312	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	5 Persen	10 Persen 593,936,000	10 Persen 608,784,400	15 Persen 624,004,010	20 Persen 639,604,110	25 Persen 655,594,213	25 Persen 3,121,922,733							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
3	313	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan	100 Persen	100 Persen 20,000,000	100 Persen 20,500,000	100 Persen 21,012,500	100 Persen 21,537,813	100 Persen 22,076,258	100 Persen 105,126,571							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		oleh instansi terkait															
3	304	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan informasi industri	100 Persen	100 Persen 66,434,000	100 Persen 68,094,850	100 Persen 69,797,221	100 Persen 71,542,152	100 Persen 73,330,706	100 Persen 349,198,929							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	302	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	N/A Persen	55 Persen 34,100,000	60 Persen 34,952,500	70 Persen 35,826,313	80 Persen 36,721,970	95 Persen 37,640,020	95 Persen 179,240,803							DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	303	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100 Persen	60 Persen 4,799,325,700	70 Persen 4,919,308,843	80 Persen 5,042,291,564	90 Persen 5,168,348,853	100 Persen 5,297,557,574	100 Persen 25,226,832,534							DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	304	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100 Persen	100 Persen 60,500,000	100 Persen 62,012,500	100 Persen 63,562,813	100 Persen 65,151,883	100 Persen 66,780,680	100 Persen 318,007,876							DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01	SEKRETARIAT DAERAH															
4	002	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan,	100 Persen	100 Persen 150,000,000	100 Persen 153,750,000	100 Persen 157,593,750	100 Persen 161,533,594	100 Persen 200,000,000	100 Persen 822,877,344							SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	012	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT	administrasi kewilayahan dan otonomi	100 Persen	100 Persen 5,025,113,000	100 Persen	100 Persen 5,150,740,825	100 Persen	100 Persen 5,279,509,346	100 Persen	100 Persen 5,411,497,079	100 Persen	100 Persen 7,357,267,943	100 Persen	100 Persen 28,224,128,193			SEKRETARIAT DAERAH
4	012	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100 Persen	100 Persen 522,894,882	100 Persen	100 Persen 535,967,254	100 Persen	100 Persen 549,366,435	100 Persen	100 Persen 563,100,596	100 Persen	100 Persen 765,570,397	100 Persen	100 Persen 2,936,899,564			SEKRETARIAT DAERAH
4	012	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	100 Persen	100 Persen 495,000,000	100 Persen	100 Persen 507,375,000	100 Persen	100 Persen 520,059,375	100 Persen	100 Persen 533,060,859	100 Persen	100 Persen 724,729,500	100 Persen	100 Persen 2,780,224,734			SEKRETARIAT DAERAH
4	013	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi,	100 Persen	100 Persen 314,543,998	100 Persen	100 Persen 322,407,598	100 Persen	100 Persen 330,467,788	100 Persen	100 Persen 338,729,483	100 Persen	100 Persen 347,197,720	100 Persen	100 Persen 1,653,346,587			SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	013	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	pelaporan yang terlaksana	100 Persen	158,272,950	100 Persen	162,229,774	100 Persen	166,285,518	100 Persen	170,442,656	100 Persen	174,703,722	100 Persen	831,934,620			SEKRETARIAT DAERAH
4	013	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100 Persen	814,225,998	100 Persen	834,581,648	100 Persen	855,446,189	100 Persen	876,832,344	100 Persen	898,753,152	100 Persen	4,279,839,331			SEKRETARIAT DAERAH
4	013	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan	100 Persen	193,686,900	100 Persen	198,529,073	100 Persen	203,492,299	100 Persen	208,579,607	100 Persen	213,794,097	100 Persen	1,018,081,976			SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana															
4	02	SEKRETARIAT DPRD																
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	11,682,981,659	100 Persen	13,102,556,490	100 Persen	13,773,273,745	100 Persen	14,464,995,391	100 Persen	15,178,298,842	100 Persen	68,202,106,127	SEKRETARIAT DPRD
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01	PERENCANAAN																
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	633,162,495	100 Persen	661,353,263	100 Persen	670,367,647	100 Persen	676,937,250	100 Persen	757,080,363	100 Persen	3,398,901,018	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	100 Persen	100 Persen	259,777,250	100 Persen	262,323,067	100 Persen	264,893,833	100 Persen	267,489,793	100 Persen	270,111,193	100 Persen	1,324,595,136	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	0	0	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	100 Persen	100 Persen	233,364,200	100 Persen	235,651,169	100 Persen	237,960,551	100 Persen	240,292,564	100 Persen	242,647,431	100 Persen	1,189,915,915	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	0	0	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang tercapai	100 Persen	100 Persen	245,073,104	100 Persen	247,474,820	100 Persen	249,900,074	100 Persen	252,349,094	100 Persen	254,822,115	100 Persen	1,249,619,207	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	0	2	KEUANGAN															
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan	100 Pesen	100 Pesen	31,761,440,701	100 Pesen	32,555,476,719	100 Pesen	33,369,363,636	100 Pesen	34,203,597,727	100 Pesen	35,058,687,671	100 Pesen	166,948,566,454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	31,761,440,701	100 Persen	32,555,476,719	100 Persen	33,369,363,636	100 Persen	34,203,597,727	100 Persen	35,058,687,671	100 Persen	166,948,566,454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase SP2D yang	100 Persen	100 Persen	31,761,440,701	100 Persen	32,555,476,719	100 Persen	33,369,363,636	100 Persen	34,203,597,727	100 Persen	35,058,687,671	100 Persen	166,948,566,454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		N KEUANGAN DAERAH	Terbit sesuai Ketentuan														DAN ASET DAERAH
5	0202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjaban sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen 31,761,440,701	100 Persen	100 Persen 32,555,476,719	100 Persen	100 Persen 33,369,363,636	100 Persen	100 Persen 34,203,597,727	100 Persen	100 Persen 35,058,687,671	100 Persen	100 Persen 166,948,566,454		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	0202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen 31,761,440,701	100 Persen	100 Persen 32,555,476,719	100 Persen	100 Persen 33,369,363,636	100 Persen	100 Persen 34,203,597,727	100 Persen	100 Persen 35,058,687,671	100 Persen	100 Persen 166,948,566,454		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	0203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	85 Persen	85 Persen 1,189,496,389	85 Persen	85 Persen 1,219,233,799	85 Persen	85 Persen 1,249,714,644	85 Persen	85 Persen 1,280,957,510	85 Persen	85 Persen 1,312,981,448	85 Persen	85 Persen 6,252,383,790		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	0204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	7.04 Persen	7.04 Persen 608,515,210	7.04 Persen	7.04 Persen 623,728,090	7.04 Persen	7.04 Persen 639,321,293	7.04 Persen	7.04 Persen 655,304,325	7.04 Persen	7.04 Persen 671,686,933	7.04 Persen	7.04 Persen 3,198,555,851		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	0204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd	(0.87) Persen	(0.87) Persen 608,515,210	(0.87) Persen	(0.87) Persen 623,728,090	(0.87) Persen	(0.87) Persen 639,321,293	(0.87) Persen	(0.87) Persen 655,304,325	(0.87) Persen	(0.87) Persen 671,686,933	(0.87) Persen	(0.87) Persen 3,198,555,851		BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	03		KEPEGAWAIAN														
5	0302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN	35.6 Persen	2.0 Persen	1,622,500,000	2.1 Persen	1,663,062,500	1.9 Persen	1,704,639,063	2.3 Persen	1,747,255,039	2.0 Persen	1,790,936,415	2.0 Persen	8,528,393,017	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5	0402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	6.2 Persen	11.0 Persen	2,530,000,000	11.0 Persen	2,593,250,000	11.0 Persen	2,658,081,250	11.0 Persen	2,724,533,281	11.0 Persen	2,792,646,613	11.0 Persen	13,298,511,144	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5	0502	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian Yang Dikembangkan Menjadi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	N/A Persen	N/A Persen	0	N/A Persen	0	100 Persen	22,843,045	N/A Persen	0	100 Persen	25,127,350	100 Persen	47,970,395	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	0502	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan	N/A Persen	100 Persen	24,256,600	100 Persen	25,954,562	100 Persen	24,843,045	N/A Persen	0	N/A Persen	0	100 Persen	75,054,207	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	052	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	N/A Persen	N/A Persen	0	N/A Persen	0	N/A Persen	0	100 Persen	72,742,089	N/A Persen	0	100 Persen	72,742,089	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01	INSPEKTORAT DAERAH															
6	012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	80 Persen	83 Persen	402,500,00	85 Persen	412,562,50	90 Persen	422,876,563	95 Persen	433,448,477	100 Persen	444,284,688	100 Persen	2,115,672,228	INSPEKTORAT DAERAH
6	012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Audit dengan Tujuan tertentu	100 Persen	100 Persen	402,500,00	100 Persen	412,562,500	100 Persen	422,876,563	100 Persen	433,448,477	100 Persen	444,284,688	100 Persen	2,115,672,228	INSPEKTORAT DAERAH
6	012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Obyek Pengawasan yang diawasi	100 Persen	100 Persen	345,000,00	100 Persen	353,625,00	100 Persen	362,465,625	100 Persen	371,527,266	100 Persen	380,815,447	100 Persen	1,813,433,338	INSPEKTORAT DAERAH
6	013	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	100 Persen	100 Persen	400,000,00	100 Persen	410,000,00	100 Persen	420,250,00	100 Persen	430,756,250	100 Persen	441,525,156	100 Persen	2,102,531,406	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01			KECAMATAN														
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	64,138,071	100 Persen	65,741,523	100 Persen	67,385,061	100 Persen	69,069,687	100 Persen	70,796,429	100 Persen	337,130,771	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	64,138,071	100 Persen	65,741,523	100 Persen	67,385,061	100 Persen	69,069,687	100 Persen	70,796,429	100 Persen	337,130,771	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	65,138,071	100 Persen	66,766,523	100 Persen	68,435,686	100 Persen	70,146,578	100 Persen	71,900,242	100 Persen	342,387,100	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	64,138,071	100 Persen	65,741,523	100 Persen	67,385,061	100 Persen	69,069,687	100 Persen	70,796,429	100 Persen	337,130,771	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	64,138,071	100 Persen	65,741,523	100 Persen	67,385,061	100 Persen	69,069,687	100 Persen	70,796,429	100 Persen	337,130,771	KANTOR KECAMATAN TOMMO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PELAYANAN PUBLIK															
7	0102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen 64,138,071	100 Persen 65,741,523	100 Persen 67,385,061	100 Persen 69,069,687	100 Persen 70,796,429	100 Persen 337,130,771							KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
7	0102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen 64,138,071	100 Persen 65,741,523	100 Persen 67,385,061	100 Persen 69,069,687	100 Persen 70,796,429	100 Persen 337,130,771							KANTOR KECAMATAN PAPALANG
7	0102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen 64,138,071	100 Persen 65,741,523	100 Persen 67,385,061	100 Persen 69,069,687	100 Persen 70,796,429	100 Persen 337,130,771							KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
7	0102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen 64,138,071	100 Persen 65,741,523	100 Persen 67,385,061	100 Persen 69,069,687	100 Persen 70,796,429	100 Persen 337,130,771							KANTOR KECAMATAN SIMBORO
7	0102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen 64,138,071	100 Persen 65,741,523	100 Persen 67,385,061	100 Persen 69,069,687	100 Persen 70,796,429	100 Persen 337,130,771							KANTOR KECAMATAN TAPALANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PELAYANAN PUBLIK																
7	0102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen 99,585,000	100 Persen	102,074,625	100 Persen	104,626,491	100 Persen	107,242,153	100 Persen	109,923,207	100 Persen	523,451,476		KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	
7	0103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 1,709,713,357	100 Persen	1,752,456,191	100 Persen	1,796,267,596	100 Persen	1,841,174,286	100 Persen	1,887,203,643	100 Persen	8,986,815,073		KANTOR KECAMATAN KALUKKU	
7	0103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 2,219,617,809	100 Persen	2,275,108,255	100 Persen	2,331,985,961	100 Persen	2,390,285,610	100 Persen	2,450,042,750	100 Persen	11,667,040,385		KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
7	0103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 67,070,960	100 Persen	68,747,734	100 Persen	70,466,427	100 Persen	72,228,088	100 Persen	74,033,790	100 Persen	352,546,999		KANTOR KECAMATAN TOMMO	
7	0103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 67,070,960	100 Persen	68,747,734	100 Persen	70,466,427	100 Persen	72,228,088	100 Persen	74,033,790	100 Persen	352,546,999		KANTOR KECAMATAN PAPALANG	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 26,854,282	100 Persen 27,525,639	100 Persen 28,213,780	100 Persen 28,919,125	100 Persen 29,642,103	100 Persen 141,154,929	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA				
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 1,199,808,905	100 Persen 1,229,804,127	100 Persen 1,260,549,230	100 Persen 1,292,062,961	100 Persen 1,324,364,535	100 Persen 6,306,589,758	KANTOR KECAMATAN SIMBORO				
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 1,709,713,357	100 Persen 1,752,456,191	100 Persen 1,796,267,596	100 Persen 1,841,174,286	100 Persen 1,887,203,643	100 Persen 8,986,815,073	KANTOR KECAMATAN TAPALANG				
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 67,070,960	100 Persen 68,747,734	100 Persen 70,466,427	100 Persen 72,228,088	100 Persen 74,033,790	100 Persen 352,546,999	KANTOR KECAMATAN BONEHAU				
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen 77,681,000	100 Persen 79,623,025	100 Persen 81,613,601	100 Persen 83,653,941	100 Persen 85,745,289	100 Persen 408,316,856	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG				
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di	100 Persen	100 Persen 9,013,322	100 Persen 9,238,655	100 Persen 9,469,622	100 Persen 9,706,362	100 Persen 9,949,021	100 Persen 47,376,982	KANTOR KECAMATAN KALUKKU				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Wilayah Kecamatan														
7	014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen 9,013,322	100 Persen 9,238,655	100 Persen 9,469,622	100 Persen 9,706,362	100 Persen 9,949,021	100 Persen 47,376,982							KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALAKANG
7	014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen 9,013,322	100 Persen 9,238,655	100 Persen 9,469,621	100 Persen 9,706,362	100 Persen 9,949,021	100 Persen 47,376,981							KANTOR KECAMATAN BONEHAU
7	014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen 9,013,322	100 Persen 9,238,655	100 Persen 9,469,622	100 Persen 9,706,362	100 Persen 9,949,021	100 Persen 47,376,982							KANTOR KECAMATAN MAMUJU
7	014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen 9,013,322	100 Persen 9,238,655	100 Persen 9,469,622	100 Persen 9,706,362	100 Persen 9,949,021	100 Persen 47,376,982							KANTOR KECAMATAN TOMMO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	9,013,322	100 Persen	9,238,655	100 Persen	9,469,622	100 Persen	9,706,362	100 Persen	9,949,021	100 Persen	47,376,982	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	9,013,322	100 Persen	9,238,655	100 Persen	9,469,622	100 Persen	9,706,362	100 Persen	9,949,021	100 Persen	47,376,982	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	49,230,000	100 Persen	50,460,750	100 Persen	51,722,269	100 Persen	53,015,325	100 Persen	54,340,709	100 Persen	258,769,053	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	9,013,322	100 Persen	9,238,655	100 Persen	9,469,622	100 Persen	9,706,362	100 Persen	9,949,021	100 Persen	47,376,982	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman	100 Persen	100 Persen	9,013,322	100 Persen	9,238,655	100 Persen	9,469,622	100 Persen	9,706,362	100 Persen	9,949,021	100 Persen	47,376,982	KANTOR KECAMATAN TAPALANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		KETERTIBAN UMUM	Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan														
7	014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen 19,652,000	100 Persen	100 Persen 20,143,300	100 Persen	100 Persen 21,081,380	100 Persen	100 Persen 22,086,362	100 Persen	100 Persen 23,164,263	100 Persen	100 Persen 106,127,305		KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
7	015	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen	100 Persen 13,811,135	100 Persen	100 Persen 14,156,413	100 Persen	100 Persen 14,510,323	100 Persen	100 Persen 14,873,082	100 Persen	100 Persen 70,825,231		KANTOR KECAMATAN KALUKKU
7	015	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen	100 Persen 13,811,135	100 Persen	100 Persen 14,156,413	100 Persen	100 Persen 14,510,323	100 Persen	100 Persen 14,873,082	100 Persen	100 Persen 70,825,231		KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
7	015	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 17,012,466	100 Persen	100 Persen 17,437,778	100 Persen	100 Persen 17,873,722	100 Persen	100 Persen 18,320,565	100 Persen	100 Persen 18,778,579	100 Persen	100 Persen 89,423,110		KANTOR KECAMATAN BONEHAU
7	015	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen	100 Persen 13,811,135	100 Persen	100 Persen 14,156,413	100 Persen	100 Persen 14,510,323	100 Persen	100 Persen 14,873,082	100 Persen	100 Persen 70,825,231		KANTOR KECAMATAN MAMUJU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen 13,811,135	100 Persen 14,156,413	100 Persen 14,510,323	100 Persen 14,873,082	100 Persen 70,825,231	KANTOR KECAMATAN TOMMO				
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen 13,811,135	100 Persen 14,156,413	100 Persen 14,510,323	100 Persen 14,873,082	100 Persen 70,825,231	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT				
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen 13,811,135	100 Persen 14,156,413	100 Persen 14,510,323	100 Persen 14,873,082	100 Persen 70,825,231	KANTOR KECAMATAN PAPALANG				
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen 13,811,135	100 Persen 14,156,413	100 Persen 14,510,323	100 Persen 14,873,082	100 Persen 70,825,231	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA				
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen 13,811,135	100 Persen 14,156,413	100 Persen 14,510,323	100 Persen 14,873,082	100 Persen 70,825,231	KANTOR KECAMATAN SIMBORO				
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 13,474,278	100 Persen 13,811,135	100 Persen 14,156,413	100 Persen 14,510,323	100 Persen 14,873,082	100 Persen 70,825,231	KANTOR KECAMATAN TAPALANG				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen 19,370,000	100 Persen 19,854,250	100 Persen 20,811,856	100 Persen 21,839,528	100 Persen 22,943,628	100 Persen 104,819,262	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG				
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 19,050,588	100 Persen 19,526,853	100 Persen 20,015,024	100 Persen 20,515,400	100 Persen 21,028,285	100 Persen 100,136,150	KANTOR KECAMATAN KALUKKU				
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 19,050,588	100 Persen 19,526,853	100 Persen 20,015,024	100 Persen 20,515,400	100 Persen 21,028,285	100 Persen 100,136,150	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG				
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 20,441,440	100 Persen 20,952,476	100 Persen 21,476,288	100 Persen 22,013,195	100 Persen 22,563,525	100 Persen 107,446,924	KANTOR KECAMATAN BONEHAU				
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 19,050,588	100 Persen 19,526,853	100 Persen 20,015,024	100 Persen 20,515,400	100 Persen 21,028,285	100 Persen 100,136,150	KANTOR KECAMATAN MAMUJU				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 19,050,588	100 Persen 19,526,853	100 Persen 20,015,024	100 Persen 20,515,400	100 Persen 21,028,285	100 Persen 100,136,150	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT						
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 19,050,588	100 Persen 19,526,853	100 Persen 20,015,024	100 Persen 20,515,400	100 Persen 21,028,285	100 Persen 100,136,150	KANTOR KECAMATAN PAPALANG						
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 19,050,588	100 Persen 19,526,853	100 Persen 20,015,024	100 Persen 20,515,400	100 Persen 21,028,285	100 Persen 100,136,150	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA						
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 19,050,588	100 Persen 19,526,853	100 Persen 20,015,024	100 Persen 20,515,400	100 Persen 21,028,285	100 Persen 100,136,150	KANTOR KECAMATAN SIMBORO						
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 19,050,588	100 Persen 19,526,853	100 Persen 20,015,024	100 Persen 20,515,400	100 Persen 21,028,285	100 Persen 100,136,150	KANTOR KECAMATAN TAPALANG						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7 0 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen 62,747,000	100 Persen 64,315,675	100 Persen 65,923,567	100 Persen 67,571,656	100 Persen 69,260,947	100 Persen 329,818,845					KANTOR KECAMATAN KALUMPANG		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8 0 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8 0 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	N/A Persen	100 Persen 112,478,400	100 Persen 115,290,360	100 Persen 118,172,619	100 Persen 121,126,934	100 Persen 124,155,108	100 Persen 591,223,421					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 0 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	100 Persen	100 Persen 718,041,746	100 Persen 735,992,790	100 Persen 754,392,609	100 Persen 773,252,425	100 Persen 792,583,735	100 Persen 3,774,263,305					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terbina	100 Persen	100 Persen 85,000,000	100 Persen 87,125,000	100 Persen 89,303,125	100 Persen 91,535,703	100 Persen 93,824,096	100 Persen 446,787,924	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
8005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	100 Persen	100 Persen 120,000,000	100 Persen 123,000,000	100 Persen 126,075,000	100 Persen 129,226,875	100 Persen 132,457,547	100 Persen 630,759,422	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
8006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	100 Persen	100 Persen 156,000,000	100 Persen 159,900,000	100 Persen 163,897,500	100 Persen 167,994,938	100 Persen 172,194,811	100 Persen 819,987,249	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
X				NON URUSAN															
X	X	X		NON URUSAN															
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,935,477,597	100 Persen	3,008,864,537	100 Persen	3,084,086,151	100 Persen	3,161,188,304	100 Persen	3,240,218,012	100 Persen	15,429,834,601	DINAS SOSIAL
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,723,390,010	100 Persen	2,791,474,760	100 Persen	2,861,261,629	100 Persen	2,932,793,170	100 Persen	3,006,112,999	100 Persen	14,315,032,568	DINAS KETAHANAN PANGAN
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,033,287,904	100 Persen	3,109,120,102	100 Persen	3,186,848,104	100 Persen	3,266,519,307	100 Persen	3,348,182,289	100 Persen	15,943,957,706	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	82,361,309,932	100 Persen	84,420,342,680	100 Persen	86,530,851,247	100 Persen	88,694,122,529	100 Persen	89,699,829,684	100 Persen	431,706,456,072	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	27,913,593,768	100 Persen	28,611,433,612	100 Persen	29,326,719,452	100 Persen	30,059,887,438	100 Persen	30,811,384,624	100 Persen	146,723,018,894	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	7,431,652,820	100 Persen	7,617,444,141	100 Persen	7,807,880,244	100 Persen	8,003,077,250	100 Persen	8,203,154,182	100 Persen	39,063,208,637	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,788,569,572	100 Persen	2,858,283,811	100 Persen	2,929,740,906	100 Persen	3,002,984,429	100 Persen	3,078,059,040	100 Persen	14,657,637,758	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4,503,225,996	100 Persen	4,615,806,646	100 Persen	4,731,201,813	100 Persen	4,849,481,858	100 Persen	4,970,718,904	100 Persen	23,670,435,217	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2,894,502,923	100 Persen	2,966,865,496	100 Persen	3,041,037,134	100 Persen	3,117,063,062	100 Persen	3,194,989,638	100 Persen	15,214,458,253	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,304,697,866	100 Persen	3,387,315,312	100 Persen	3,471,998,195	100 Persen	3,558,798,150	100 Persen	3,647,768,104	100 Persen	17,370,577,627	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4,486,841,587	100 Persen	4,599,012,627	100 Persen	4,713,987,942	100 Persen	4,831,837,641	100 Persen	4,952,633,582	100 Persen	23,584,313,379	DINAS PERKEBUNAN
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5,807,427,918	100 Persen	5,952,613,616	100 Persen	6,101,428,956	100 Persen	6,253,964,680	100 Persen	6,410,313,797	100 Persen	30,525,748,967	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4,269,895,835	100 Persen	4,385,489,277	100 Persen	4,538,038,204	100 Persen	4,624,169,148	100 Persen	4,717,383,186	100 Persen	22,534,975,650	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,101,259,853	100 Persen	3,178,791,349	100 Persen	3,258,261,133	100 Persen	3,339,717,661	100 Persen	3,423,210,603	100 Persen	16,301,240,599	DINAS PERDAGANG AN
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,345,012,262	100 Persen	3,428,637,569	100 Persen	3,514,353,508	100 Persen	3,602,212,346	100 Persen	3,692,267,654	100 Persen	17,582,483,339	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4,381,333,875	100 Persen	4,490,867,222	100 Persen	4,603,138,903	100 Persen	4,718,217,375	100 Persen	4,836,172,809	100 Persen	23,029,730,184	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,650,738,759	100 Persen	3,742,007,228	100 Persen	3,835,557,409	100 Persen	3,931,446,344	100 Persen	4,029,732,503	100 Persen	19,189,482,243	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,937,406,008	100 Persen	4,035,841,158	100 Persen	4,136,737,187	100 Persen	4,240,155,617	100 Persen	4,346,159,507	100 Persen	20,696,299,477	INSPEKTORAT DAERAH
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5,012,441,504	100 Persen	5,137,752,542	100 Persen	5,266,196,356	100 Persen	5,397,851,264	100 Persen	5,532,797,546	100 Persen	26,347,039,212	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,977,942,000	100 Persen	4,075,158,158	100 Persen	4,174,804,721	100 Persen	4,276,942,448	100 Persen	4,381,633,618	100 Persen	20,886,480,945	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																	PENGEMBAN GAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 3,891,231,037	100 Persen 3,988,511,813	100 Persen 4,088,224,609	100 Persen 4,190,430,224	100 Persen 4,295,190,979	100 Persen 20,453,588,662						DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN KEBERSIHAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 7,033,969,259	100 Persen 7,209,818,491	100 Persen 7,390,063,953	100 Persen 7,574,815,552	100 Persen 7,764,185,940	100 Persen 36,972,853,195						BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 3,495,424,826	100 Persen 3,582,810,447	100 Persen 3,672,380,708	100 Persen 3,764,190,226	100 Persen 3,858,294,982	100 Persen 18,373,101,189						DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMA N DAN PERTANAHA N
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 5,372,438,665	100 Persen 5,506,749,632	100 Persen 5,644,418,373	100 Persen 5,785,528,832	100 Persen 5,930,167,053	100 Persen 28,239,302,555						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 3,948,676,862	100 Persen 4,047,393,784	100 Persen 4,148,578,628	100 Persen 4,252,293,094	100 Persen 4,358,600,422	100 Persen 20,755,542,790						DINAS PERHUBUNG AN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Persen	100 Persen	3,642,136,443	100 Persen	3,733,189,854	100 Persen	3,826,519,600	100 Persen	3,922,182,590	100 Persen	4,020,237,155	100 Persen	19,144,265,642	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,405,539,316	100 Persen	3,490,677,799	100 Persen	3,577,944,744	100 Persen	3,667,393,362	100 Persen	3,759,078,197	100 Persen	17,900,633,418	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,410,890,968	100 Persen	3,496,163,243	100 Persen	3,583,567,324	100 Persen	3,673,156,507	100 Persen	3,764,985,420	100 Persen	17,928,763,462	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4,164,736,592	100 Persen	4,268,855,007	100 Persen	4,375,576,382	100 Persen	4,484,965,792	100 Persen	4,597,089,937	100 Persen	21,891,223,710	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,293,224,198	100 Persen	2,350,554,802	100 Persen	2,409,318,673	100 Persen	2,469,551,639	100 Persen	2,531,290,430	100 Persen	12,053,939,742	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,560,447,279	100 Persen	2,624,458,461	100 Persen	2,690,069,922	100 Persen	2,757,321,671	100 Persen	2,826,254,712	100 Persen	13,458,552,045	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4,412,109,029	100 Persen	4,522,411,755	100 Persen	4,635,472,049	100 Persen	4,751,358,850	100 Persen	4,870,142,821	100 Persen	23,191,494,504	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,542,229,732	100 Persen	2,605,785,476	100 Persen	2,670,930,112	100 Persen	2,737,703,365	100 Persen	2,806,145,949	100 Persen	13,362,794,634	KANTOR KECAMATAN TOMMO
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	9,608,339,530	100 Persen	9,826,828,273	100 Persen	9,948,147,140	100 Persen	10,070,963,772	100 Persen	10,195,296,658	100 Persen	49,649,575,373	SEKRETARIAT DPRD
X	X X	0 1	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan	Memuaskan Nilai	Memuaskan Nilai	17,947,742,314	Memuaskan Nilai	17,290,655,328	Memuaskan Nilai	17,504,120,208	Memuaskan Nilai	17,720,220,458	Memuaskan Nilai	17,938,988,611	Memuaskan Nilai	88,401,726,919	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		KABUPATEN/KOTA	administrasi keuangan															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,662,766,981	100 Persen	2,729,336,156	100 Persen	2,797,569,560	100 Persen	2,867,508,799	100 Persen	2,939,196,519	100 Persen	13,996,378,015	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,790,418,390	100 Persen	2,860,178,850	100 Persen	2,931,683,321	100 Persen	3,004,975,404	100 Persen	3,080,099,789	100 Persen	14,667,355,754	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,621,205,405	100 Persen	2,686,735,540	100 Persen	2,753,903,929	100 Persen	2,822,751,527	100 Persen	2,893,320,315	100 Persen	13,777,916,716	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,318,409,825	100 Persen	3,401,370,071	100 Persen	3,486,404,322	100 Persen	3,573,564,430	100 Persen	3,662,903,541	100 Persen	17,442,652,189	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,348,334,239	100 Persen	3,432,042,595	100 Persen	3,517,843,660	100 Persen	3,605,789,751	100 Persen	3,695,934,495	100 Persen	17,599,944,740	KANTOR KECAMATAN TAPALANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		KABUPATEN/KOTA															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 3,067,633,489	100 Persen 3,144,324,326	100 Persen 3,222,932,434	100 Persen 3,303,505,745	100 Persen 3,386,093,389	100 Persen 16,124,489,383						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana 2. Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana 3. Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi	100 Persen	100 Persen 29,807,571,636	100 Persen 29,913,721,208	100 Persen 30,757,079,951	100 Persen 31,526,006,950	100 Persen 32,314,157,123	100 Persen 154,318,536,868						SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
X	X X	0 1		pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana 4. Persentase kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang terlaksana 5. Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
X	X X	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 2,334,499,192	100 Persen	2,392,861,672	100 Persen	2,451,787,466	100 Persen	2,512,096,831	100 Persen	2,573,815,398	100 Persen	12,265,060,559		KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
X	X X	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 2,842,427,252	100 Persen	2,913,487,934	100 Persen	2,986,325,132	100 Persen	3,060,983,259	100 Persen	3,137,507,841	100 Persen	14,940,731,418		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	X X	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen 7,033,969,259	100 Persen	7,209,818,491	100 Persen	7,390,063,953	100 Persen	7,574,815,552	100 Persen	6,764,185,940	100 Persen	35,972,853,195		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Mamuju dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.

Tabel VIII - 1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020/2021	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	%	68,15	68,35	68,50	68,70	68,85	69,05	69,05
2.	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Skala	0,26	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55	0,55
3.	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632	0,632
4.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.500	12.000	24.000	32.500	44.000	52.000	52.000
5.	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$	%	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55	60,55
6.	Indeks Kesejahteraan Sosial	40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30% Persentase PSKS yang aktif	%	50	55	60	65	70	75	75

No	Indikator Kinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020/2021	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	[40%{50% (50% kualitas sarpras jalan& jembatan + 50% kualitas PJU) } + {40 % (50% kualitas saluran pengairan + 50%drainase kondisi baik)} + (10 % Pemenuhan bangunansesuai standar)] + [20%{50% pengurangansampah + 50 % pengangkutan sampah }]+30%Level of Service + [10% ({50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi} +{30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi proteksi kebakaran+ 40 % response time })/2]	%	N/A	50	60	70	80	90	90
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Survey kepuasan layanan infranstruktur : 1. Ketersediaan Fisik (<i>availability</i>) 2. Kualitas Fisik (<i>quality</i>) 3. Kesesuaian (<i>Appropriateness</i>) 4. Efektifitas Pemanfaatan (<i>Utility</i>) 5. Penyerapan Tenaga Kerja (<i>Job Creation</i>) 6. Kontribusi pada Perekonomian	%	N/A	50	60	70	80	90	90
	Indeks kualitas lingkungan hidup	30%IKU + 30% IKA + 40% ITV	%	77.14	77.41	77.68	77.95	78.22	78.49	78.49
	Indeks Resiko Bencana	<i>Risk = Hazard x $\frac{Vulnerability}{Capacity}$</i>	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

No	Indikator Kinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020/2021	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indeks ketentraman dan ketertiban	Jumlah kasus tertangani tahun n-1 dibagi jumlah kasus tahun n dikali 100	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kriminilitas	$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} (F_{Ci-1} + Y_{Ci})$	%	0,36	0,32	0,28	0,25	0,20	0,19	0,19
	Pertumbuhan ekonomi	$R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%$	%	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%	5.8-6.0%
	Pertumbuhan Investasi	$CAGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\left(\frac{1}{\# \text{ of years}} \right)} - 1$	%	15	15	15	15	15	15	15
	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	%	7,4	6	5,5	5	4,5	4	4
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	%	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2,00	2,00
	Indeks Desa Membangun	$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$	Skala	0,683	0,690	0,695	0,698	0,700	0,707	0,707
	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandiri reformasi birokrasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	A
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran + pengalokasian anggaran belanja dalam APBD + Transparansi pengelolaan keuangan + Penyerapan anggaran + Kondisi keuangan daerah + Opini BPK	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

No	Indikator Kinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020/2021	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Nilai LPPD	Hasil Penilaian LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Skor	80	90	90	90	90	90	90

8.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju tertuang pada Tabel 8.2.

Tabel VIII - 2

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026**

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	68,15	68,35	68,50	68,70	68,85	69,05	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,3	0,36	0,42	0,5	0,55	
3	Indeks Kesehatan	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632	
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/Orang /Tahun	9500	12.000	24.000	32.500	44.000	52.000	
5	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55	
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	50	55	60	65	70	75	
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	50	60	70	80	90	
8	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	50	60	70	80	90	
9	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	77,14	77,41	77,68	77,95	78,22	78,49	
10	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
11	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	N/A	100	100	100	100	100	
12	Indeks Kriminilitas	Persen	N/A	100	100	100	100	100	
13	Indeks Gini	Persen	0,36	0,32	0,28	0,25	0,2	0,19	
14	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%	
15	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15	15	15	15	15	
16	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,4	6	5,5	5	4,5	4	
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2	
18	Indeks Desa Membangun	Skala	0,683	0,69	0,695	0,698	0,7	0,707	
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	
20	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	
21	Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80	90	90	90	90	90	
B	Aspek Pelayanan Umum								
1)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,3	0,36	0,42	0,5	0,55	DIKPORA

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	APK PAUD	Persen	55.97	55.97	56.47	56.97	57.47	57.97	DIKPORA
3	APK SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	DIKPORA
4	APK SMP/MTs	Persen	97.66	97.66	98.16	98.66	99.16	99.66	DIKPORA
5	APM SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	DIKPORA
6	APM SMP/MTs	Persen	88.52	88.52	89.02	89.52	90.02	90.52	DIKPORA
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9	9	9	9	9	9	DIKPORA
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12	12	12	12	12	12	DIKPORA
9	Nilai Rata-Rata Hasil Ujian SD/MI	Nilai	236,18	236,18	236,20	236,21	236,21	236,22	DIKPORA
10	Nilai Rata-Rata Hasil Ujian SMP/MTs	Nilai	261,66	261,66	261,68	261,70	261,70	261,71	DIKPORA
11	APS SD Sederajat	Persen	98,35	98,60	98,90	99,20	99,50	99,80	DIKPORA
12	Aps SMP Sederajat	Persen	80,35	80,60	80,90	81,20	81,50	81,80	DIKPORA
13	Persentase Guru atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal D.IV/S1 disemua Jenjang Pendidikan dan Pendidikan Non formal	Persen	87,22	87,22	88,09	88,97	89,86	90,76	DIKPORA
14	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	B	BB	A	A	DIKPORA
15	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persen	48,3	50,72	53,25	55,91	58,71	61,64	DIKPORA
16	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	Paket	2500	3000	3500	4000	4500	5000	DIKPORA
17	Rasio Guru Murid	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	DIKPORA
18	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B	Persen	63.39	63.89	64.39	64.89	65.39	65.89	DIKPORA
2)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.60	67.60	67.75	67.92	68.15	68.50	DINKES
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	KH	193/100.000	193/100.000	192/100.000	192/100.000	191/100.000	191/100.000	DINKES

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	KH	0.7/1.000	0.7/1.000	0.6/1.000	0.6/1.000	0.5/1.000	0.5/1.000	DINKES
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	KH	0.17/1.000	0.17/1.000	0.16/1.000	0.16/1.000	0.15/1.000	0.15/1.000	DINKES
5	Persentase Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	DINKES
6	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan SPM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	DINKES
7	Angka Kesakitan	Persen	30	30	29	28	27	26	DINKES
8	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	DINKES
9	Nilai IKM	Persen	80	80	80	80	80	80	DINKES
10	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	DINKES
11	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	8,3	100	100	100	100	100	DINKES
12	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	25	30	40	60	80	100	DINKES
13	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	Persen	70	75	80	85	90	95	DINKES
14	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	41.27	50	55	60	65	70	DINKES
15	Nilai AKREDITASI	Skor	Teakreditasi 1 Tahun	Teakreditasi 1 Tahun	Penyampaian PPS 1 Tahun	Penyampaian PPS 1 Tahun	Penyampaian PPS 1 Tahun	Penyampaian PPS 1 Tahun	RSUD
16	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN RSUD MAMUJU	Persen	100	100	100	100	100	100	RSUD
17	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	RSUD
18	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	RSUD
19	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	25	30	40	60	80	100	RSUD

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
20	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	80	85	100	100	100	100	RSUD
3)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar yang baik	Persen	75.70	85.50	89.90	94.90	98.90	100	DPUPR
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	10	10	10	10	10	10	DPUPR
3	Rasio panjang jalan Kondisi Mantap	Persen	50	54.72	57.72	60.72	63.72	66.72	DPUPR
4	Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar yang baik	Persen	58	58	58	58	58	58	DPUPR
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	CC	B	BB	A	DPUPR
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	Persen	48.72	54.72	57.72	60.72	63.72	66.72	DPUPR
7	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	N/A	60	63	66	69	73	
8	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	N/A	60	63	66	69	73	DPUPR
9	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	73.1	82.1	86.6	91.1	95.6	100	DPUPR
10	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	N/A	N/A	30	35	40	45	DPUPR
11	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	60	70	75	80	85	90	DPUPR
12	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	21.49	27.49	30.49	33.49	36.49	39.49	DPUPR

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
13	Persentase infrastruktur jalan permukiman kondisi baik	Persen	30	44	50	56	62	68	DPUPR
14	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persen	24.30	26.10	27.10	28.10	19.10	30.10	DPUPR
15	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	Persen	10.30	39.90	53.90	68.80	83.70	98.60	DPUPR
16	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	10	20	25	30	35	40	DPUPR
17	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persen	9	9	18	27	36	45	DPUPR
4)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	persen	9.30	10	12	13	14	15	DISPERKIMTA
2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	persen	50	55	60	65	70	75	DISPERKIMTA
3	Rasio rumah layak huni	angka	0.15	0.17	0.2	0.22	0.25	0.26	DISPERKIMTA
4	Rasio Permukiman Layak Huni	angka	0.82	0.85	0.90	0.92	0.95	0.97	DISPERKIMTA
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	BB	BB	A	A	DISPERKIMTA
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPERKIMTA
7	Persentase Permukiman yang tertata	Persen	10	11	12	14	15	16	DISPERKIMTA
8	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	Persen	78	80	80	80	80	80	DISPERKIMTA
9	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi	Persen	N/A	30	40	45	50	55	DISPERKIMTA
10	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	49.84	49.64	49.49	49.35	49.22	49.10	DISPERKIMTA

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOP PP & DAMKAR
2	Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOP PP & DAMKAR
3	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pelanggaran K3 per 100.000 Penduduk	Rasio	35	30	25	20	15	10	SATPOP PP & DAMKAR
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOP PP & DAMKAR
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC	B	B	B	B	A	SATPOP PP & DAMKAR
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOP PP & DAMKAR
7	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOP PP & DAMKAR
8	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	BPBD
9	Indeks ketahanan daerah	Kelas Resiko	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	sedang	BPBD
10	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	B	B	BB	BB	BPBD
11	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	50	55	60	65	70	80	BPBD
6)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase PMKS yang mandiri	Persen	N/A	20	42	50	60	75	DINSOS
2	Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial	Persen	23	60	75	100	100	100	DINSOS
3	Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	Persen	81,33	79,23	78,34	77,56	76,86	76,24	DINSOS

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	DINSOS
6	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	Persen	50	50	58	67	75	75	DINSOS
7	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
8	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Persen	62,67	58,46	56,69	55,12	53,73	52,49	DINSOS
9	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	Persen	N/A	100	100	100	100	100	DINSOS
10	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
11	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
7)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Persen	3,15	3,2	3,5	4	4,2	4,5	DISTRANSNAKER
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	DISTRANSNAKER
3	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persen	N/A	20	20	20	22	25	DISTRANSNAKER
4	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	Persen	62	68	70	75	80	85	DISTRANSNAKER
5	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	0,93	21	23	25	27	29	DISTRANSNAKER

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	44	46	46	47	48	49	DISTRANSNAKER
8)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55	DPPPA
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 10.000 Penduduk Perempuan)	Angka	30	25	20	15	10	5	DPPPA
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	76,13	77,10	80,90	82,50	85,60	88,00	DPPPA
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	DPPPA
5	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	20	23	25	27	30	35	DPPPA
6	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100	DPPPA
7	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen	n/a	100	100	100	100	100	DPPPA
8	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	Persen	n/a	29.03	35.16	41.29	50.65	60.00	DPPPA
9	Persentase Dekelra (desa/ kelurahan, Kecamatan layak anak)	Persen	22.22	29.63	33.33	40.74	48.15	55.56	DPPPA
10	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	DPPPA
9)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Skor PPH Ketersediaan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
2	Skor PPH Konsumsi	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
3	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4	Pemetaan Wilayah Desa Rentan dan Tahan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
5	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	Persen	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	DISKETAPANG
6	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok (Beras) Di tingkat Konsumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	DISKETAPANG
7	Persentase Rata Rata Tingkat Konsumsi Energi dan Protein	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
8	Tingkat Keamanan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
9	Persentase Rawan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
10	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	A	A	A	A	A	DISKETAPANG
11	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
12	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Persen	135	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
13	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Persen	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	DISKETAPANG
14	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
15	Persentase Nilai Tukar Petani	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKETAPANG
10)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase Pemanfaatan tanah negara	persen	N/A	20	22	23	24	25	DISPERKIMTA
2	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	Persen	N/A	N/A	45	50	55	60	DISPERKIMTA
3	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	DISPERKIMTA

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	85	86	87	88	89	90	DISPERKIMTA
5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	N/A	87	88	89	90	91	DISPERKIMTA
6	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	DISPERKIMTA
7	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPERKIMTA
11)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase Luas wilayah yang Daya dukung Lingkungannya telah Terlampaui	Persen	22.43	21.43	20.43	19.43	18.43	17.43	DLHK
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	77.14	77.41	77.68	77.95	78.22	78.49	DLHK
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	C	CC	B	B	BB	DLHK
4	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	DLHK
5	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	Persen	N/A	50	55	60	65	70	DLHK
6	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	Persen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	DLHK
7	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	Persen	N/A	100	100	100	100	100	DLHK

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	N/A	82	84	86	88	90	DLHK
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persen	N/A	100	100	100	100	100	DLHK
10	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen	N/A	100	100	100	100	100	DLHK
11	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	Persen	N/A	100	100	100	100	100	DLHK
12	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	N/A	100	100	100	100	100	DLHK
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	74	73	72	71	70	72	DLHK
12)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	A	A	A	A	A	DISDUKCAPIL
2	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	DISDUKCAPIL
4	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
5	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
7	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
13)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7	6	5.5	5	4.5	4	DPMD
2	Persentase Desa Mandiri	Persen	0	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	DPMD
3	Persentase Desa Maju	Persen	7.95	9	10.22	11.36	12.5	13.63	DPMD
4	Persentase Desa Berkembang	Persen	54.55	56.81	59	61.63	63.63	65.9	DPMD
5	Persentase BUM Desa Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif	Persen	20	25	30	35	40	45	DPMD
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	DPMD
7	Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	Persen	N/A	50	60	70	80	90	DPMD
8	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Yang Terjalin	Persen	51.85	33.33	50	66.67	83.33	100	DPMD
9	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Persen	48.15	51.85	56	59.26	62.96	67	DPMD
10	Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan	Persen	55,1	83.79	87.72	91.64	95.57	100	DPMD
11	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Skala	1	1	1	1	1	1	DPMD
14)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2.26	2.24	2.21	2.19	2.10	2.00	DPPKB

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	Persentase Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persen	63.39	65.00	67.00	68.00	69.00	70.00	DPPKB
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	DPPKB
4	Persentase Berwawasan Kependudukan	Persen	n/a	53.00	55.00	57.00	59.00	61.00	DPPKB
5	Persentase Unmetneed	Persen	9.16	8.25	8.00	7.70	7.40	7.00	DPPKB
6	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Persen	53.57	53.57	55.00	57.00	59.00	61.00	DPPKB
15)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Tingkat ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ	Persen	30	30	30	35	40	45	DISHUB
2	Tingkat pelayanan angkutan darat	Persen	40	40	40	45	50	55	DISHUB
3	Tingkat Keselamatan Transportasi	Persen	30	30	32	35	40	45	DISHUB
4	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Persen	30	30	35	40	45	50	DISHUB
5	Rasio konektivitas kab/kota	Bobot	30	32	35	40	45	50	DISHUB
6	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	40	40	45	50	55	60	DISHUB
7	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC	B	B	B	BB	A	DISHUB
8	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persen	0.12	0.18	0.20	0.21	0.22	2.00	DISHUB
9	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	Persen	22	22	33	55	77	100	DISHUB
10	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	30	35	40	45	50	55	DISHUB
11	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	Persen	30	40	45	50	55	60	DISHUB
12	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	65	70	75	80	85	90	DISHUB
13	persentase tersedianya perlengkapan transportasi	Persen	13	13	20	35	60	70	DISHUB

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
14	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen	29	35	42	50	57	64	DISHUB
15	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	Persen	30	30	35	40	45	50	DISHUB
16	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persen	0.12	0.18	0.2	0.2	0.2	2.0	DISHUB
17	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	Persen	22	22	33	55	77	100	DISHUB
18	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	30	35	40	45	50 P	55	DISHUB
19	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	Persen	30	40	45 P	50	55	60	DISHUB
20	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	65	70	75	80	85	90	DISHUB
21	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen	29	35	42	50	57	64	DISHUB
22	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persen	0.12	0.18	0.20	0.21	0.22	2.00	DISHUB
23	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	Persen	22	22	33	55	77	100	DISHUB
24	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	30	35	40 P	45	50	55	DISHUB
25	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	Persen	30	40	45	50	55	60	DISHUB
26	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	65	70	75	80 P	85	90	DISHUB
27	persentase tersedianya perlengkapan transportasi	Persen	13	13	20	35	60	70	DISHUB
28	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen	29	35	42	50	57	64	DISHUB
29	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	Persen	30	30	35	40	45	50	DISHUB

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
16)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik	Persen	80	90	90	90	90	90	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Persen	62	62	69	79	84	94	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
3	Indeks SPBE	Indeks	1.8	2.5	3	3.5	3.8	4	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	BB	BB	A	AA	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
5	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	91	100	100	100	100	100	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
17)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	83.46	84	85	86	88	90	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persen	0.5	1.25	1.5	2	2.5	3	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	3.29	3.82	4.05	4.55	4.87	5.29	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
4	Persentase Koperasi Aktif	Persen	82	84	86	88	90	92	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
5	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Persen	14	16	16.5	17	17.5	18	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
7	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
8	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	17	19	21	23	25	30	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
9	Persentase KSP/USP yang sehat	Persen	9.5	10	11	12	15	20	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
10	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persen	7	9	10	12	14	15	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
11	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	Persen	5	5	7	8	10	15	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
12	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	5	5	5	5	5	5	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
13	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	25	25	25.5	26.2	26.8	27.5	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
18)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	80	90	90	90	90	90	DPM-PTSP

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Persen	15	15	15	15	15	15	DPM-PTSP
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	DPM-PTSP
4	Persentase Nilai Investasi Persentase jumlah	Miliar/Rupiah	310	325	340	355	360	375	DPM-PTSP
5	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	35	39	44	51	59	65	DPM-PTSP
6	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	DPM-PTSP
7	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	50	50	50	50	50	DPM-PTSP
8	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100	100	100	100	100	100	DPM-PTSP
19)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Persentase Prestasi Olah Raga Pelajar	Persen	20	20	30	40	50	60	DIKPORA
2	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	Persen	12.32	12.82	13.32	13.82	14.32	14.82	DIKPORA
3	Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	38.87	39.37	39.87	40,37	40,87	41,37	DIKPORA
4	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50.75	51.25	51.75	52,25	52,75	53,25	DIKPORA
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	6	7	8	9	10	10	DIKPORA
6	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	4	5	6	7	8	8	DIKPORA
7	Persentase sarpras olahraga yang layak	Persen	0.05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	DIKPORA
8	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi keperamukaan	Orang	0	100	100	100	100	100	DIKPORA
20)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Jenis Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	N/A	50	75	100	100	100	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
21)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	22	33	44	56	67	78	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	N/A	31	44	56	67	89	DISKOMINFO, PERSANDIAN & STATISTIK
22)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Persentase Peningkatan Pemajuan Budaya Lokal	Persen	30	30	30	30	30	30	DISPARBUD
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	DISPARBUD
3	Presentase Event Kesenian dan Kebudayaan yang disiapkan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPARBUD
4	Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Kelompok	8	8	6	6	7	7	DISPARBUD
5	Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	10	20	20	25	30	35	DISPARBUD
6	Persentase pengunjung museum	Persen	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	DISPARBUD
23)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	INDEKS BUDAYA LITERASI	Skala	N/A	50	55	60	65	70	DPK
2	INDEKS PEMANFAATAN ARSIP	Indeks	40	40	45	50	55	60	DPK

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	N/A	8,62	8,87	9,14	9,41	9,7	DPK
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	N/A	10	10	10	10	10	DPK
5	Indeks Budaya Literasi Masyarakat	Nilai	N/A	50	55	60	65	70	DPK
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC	CC	B	B	BB	A	DPK
7	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Persen	10	10	11	12	13	14	DPK
8	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	DPK
9	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	01:18	01:18	01:17	01:16	01:15	01:14	DPK
10	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	1:20.000	1:20.000	1:19.000	1:18.000	1:17.000	1:16.000	DPK
11	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100	100	DPK
24)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Persentase OPD dan Lembaga Publik yang telah Melakukan pengarsipan secara Baku	Persen	10,86	20	30	40	50	60	DPK
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	8,15	9	9,95	10	10	10	DPK
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara	Persen	N/A	50	70	80	90	100	DPK

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Persen	70	70	80	90	90	100	DPK
25)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Persentase PDRB sektor Perikanan	Persen	13,53	13,59	13,68	13,80	13,95	14,14	DKP
2	Persentase produksi hasil perikanan	Persen	87,18	89,74	92,31	94,87	97,44	100	DKP
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	CC	B	B	BB	DKP
4	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	Persen	5,56	6,32	12,63	16,32	22,63	28,95	DKP
5	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	Persen	4,42	5,88	11,76	17,65	23,53	29,41	DKP
6	Persentase kenaikan produksi budidaya	Persen	1,87	1,96	3,92	5,88	7,84	9,8	DKP
7	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	Persen	2,50	2,44	4,88	7,32	9,76	12,20	DKP
8	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	Persen	1,12	1,12	2,24	3,36	4,48	5,56	DKP
26)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	DISPARBUD
2	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	Hari	3	3	3	3	3	3	DISPARBUD
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	DISPARBUD
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	N/A	20	25	40	45	50	DISPARBUD
5	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprei, berpromosi dan berinteraksi	Kelompok	1	5	8	11	14	16	DISPARBUD

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	N/A	N/A	15	20	25	30	DISPARBUD
27)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	PDRB sektor perkebunan	Persen	11,63	11,66	11,69	11,71	11,72	11,72	DISBUN
2	Produktifitas tanaman kakao, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Cengkeh, Kopi, Lada dan Nilam per Hektar (kg/ha/thn)	Kg/Ha/Thn	2601,89	6287,91	10158,22	13392,70	15962,31	17345,95	DISBUN
3	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	90	90	95	95	95	95	DISBUN
4	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISBUN
5	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	N/A	90	90	90	95	100	DISBUN
6	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	DISBUN
7	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	DISBUN
8	Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	Persen	70	75	75	80	80	85	DISBUN
9	Persentase perizinan usaha pertanian	Persen	75	75	75	80	80	85	DISBUN
10	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	N/A	100	100	100	100	100	DISBUN
11	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	Persen	85	85	90	90	90	95	DISBUN
12	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100	100	100	100	100	100	DISBUN
13	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen	23.65	23.85	24.25	24.87	25.47	26.10	DTPHP

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
14	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Persen	0	60	65	65	70	70	DTPHP
15	Indeks Ketersediaan sarana Pertanian	Persen	0	65	65	70	75	75	DTPHP
16	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	DTPHP
17	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	DTPHP
18	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	DTPHP
19	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	Persen	0	50	55	60	60	65	DTPHP
20	Persentase serangan OPT yang di tangani	Persen	0	50	55	60	60	65	DTPHP
21	Persentase serangan DPI yang di tangani	Persen	0	50	55	60	60	65	DTPHP
22	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	100	100	100	100	100	100	DTPHP
23	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	0	100	100	100	100	100	DTPHP
24	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan	Persen	0	35	40	45	50	50	DTPHP
25	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	N/A	100	100	100	100	100	DTPHP
26	Persentase sdm pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	45	50	55	60	60	DTPHP
27	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	45	50	55	60	60	DTPHP
28	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100	100	100	100	100	100	DTPHP
28)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDAG

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	PDRB Sektor Perdagangan	Persen	N/A	3,2	3,5	4	4,3	5	DISDAG
3	Tingkat Inflasi pada Tahun berjalan	Persen	N/A	3,2+1	3,2+1	3,1+1	3,1+1	3,1	DISDAG
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	C	CC	B	BB	A	DISDAG
5	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	71,43	73,32	75,09	76,68	78,63	80,41	DISDAG
6	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	Persen	2	3	5	6	7	8	DISDAG
7	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Daerah	Rupiah	N/A	25.005.504.000	25.775.669.120	26.785.895.885	8.125.190.679	29.812.702.120	DISDAG
8	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	Persen	2	3	5	7	8	9	DISDAG
9	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	N/A	1,5	2	2,5	3	3,5	DISDAG
10	Persentase Penyelesaian Permasalahan Metrologi Legal dan Pengaduan konsumen	Persen	76,78	79,08	83,69	85,99	88,29	90,59	DISDAG
11	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	76,78	79,08	83,69	85,99	88,29	88,29	DISDAG
29)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	13.17	14	14.5	15	15.5	16	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	Persen	5	10	10	15	20	25	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (UI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
4	Tingkat Ketersediaan informasi industri	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKOP, UKM DAN PERINDUSTRIAN
30)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Persentase transmigran yang berhasil dan mampu hidup mandiri	Persen	85	86	87	88	90	92	DISTRANSNAKER
2	Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Persen	100	100	100	100	100	100	DISTRANSNAKER
3	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persen	N/A	55	60	70	80	95	DISTRANSNAKER
4	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persen	100	60	70	80	90	100	DISTRANSNAKER
5	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	DISTRANSNAKER
31)	UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH								
1	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	SEKRETARIS DAERAH
2	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
4	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
5	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
6	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
7	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
8	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
9	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
10	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
11	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
12	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
32)	UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD								
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	SEKRETARIS DPRD
2	Hasil Penilaian Kualitas Layanan SETWAN terhadap DPRD	Nilai	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	SEKRETARIS DPRD
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	SEKRETARIS DPRD
4	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DPRD
5	Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan	Nilai	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	SEKRETARIS DPRD
33)	UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN								
1	Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah Yang Tercapai (Progam, Indikator)	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEPAN
2	Presentase Hasil Penerapan Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEPAN
3	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan RPJMD- RKPD diterapkan di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEPAN
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	BAPPEPAN
5	Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEPAN
6	Persentase Indikator Program Daerah Mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEPAN

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7	Persentase indikator program daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEPAN
8	Persentase indikator program daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Tercapai	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEPAN
34)	UNSUR PENUNJANG KEUANGAN								
1	Persentase Peningkatan Nilai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persen	0,36	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	BAPENDA
2	Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Rupiah	41.038.340.853	42.183.310.563	43.360.224.928	44.569.975.203	45.813.477.511	47.091.673.534	BAPENDA
3	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam APBD	Persen	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	BAPENDA
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	BAPENDA
5	IPKD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	BAPENDA
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	BAPENDA
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	BPKAD
8	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Hasil Pengukuran	Bobot	15	15	15	15	15	15	BPKAD
9	Indeks Penyerapan Anggaran	Bobot	20	20	20	20	20	20	BPKAD
10	Hasil Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Bobot	15	15	15	15	15	15	BPKAD
11	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	BPKAD
12	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	BPKAD
13	Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	BPKAD

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
14	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	BPKAD
15	Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	BPKAD
16	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	Bobot	50	50	50	50	50	50	BPKAD
17	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	85	85	85	85	85	85	BPKAD
18	Nilai AKIP OPD	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	BPKAD
35)	UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN								
1	Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	BKPP
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	46,44	50,05	51,00	51,50	51,80	52,00	BKPP
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	B	B	BKPP
4	Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	35,6	2	2,1	1,9	2,3	2	BKPP
36)	UNSUR PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen	6,2	11	11	11	11	11	BKPP
37)	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Presentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEPAN
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	BAPPEPAN
3	Persentase Hasil Penelitian Yang Dikembangkan Menjadi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	BAPPEPAN

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	BAPPEPAN
38)	UNSUR PENGAWASAN								
1	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
2	Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
3	WBK/WBM	Nilai	1	1	5	7	10	12	INSPEKTORAT
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	B	B	INSPEKTORAT
5	Persentase Audit dengan Tujuan tertentu	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
6	Persentase OPD Yang menerapkan SPIP	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
7	Persentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	80	83	85	90	95	100	INSPEKTORAT
8	Persentase Zona Integritas, Persentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Persentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
39)	UNSUR KEWILAYAHAN								
1	Nilai IKM Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Semua Kecamatan
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Kalukku, Papalang, Sampaga, Tommo, Bonehau, Kalumpang. Dan Bala-Balakang

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Mamuju, Simboro, Tapalang, Kalukku, Papalang, Sampaga, Tommo, Bonehau, dan Kalumpang
4	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Kalukku, Papalang, Sampaga, Tommo, Bonehau, Kalumpang. Dan Bala-Balakang
5	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Kalukku, Papalang, Sampaga, Tommo, Bonehau, Kalumpang. Dan Bala-Balakang
6	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Kalukku, Papalang, Sampaga, Bonehau, Kalumpang. Dan Bala-Balakang
40)	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	KESBANGPOL

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	Persen	N/A	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
4	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persen	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
5	Persentase Ormas yang terbina	Persen	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
6	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
7	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
XX)	NON URUSAN								
1	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Seluruh Perangkat Daerah
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	30,00	30,55	35,00	43,00	55,00	70,00	Seluruh Perangkat Daerah

BAB IX

PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya Kepala Daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Mamuju yang mana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2024, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut :

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya

tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya;

3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Bupati Mamuju berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target- target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Mamuju yaitu: **MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)** dapat terwujud.